



**PERUBAHAN KELEMBAGAAN DAN DINAMIKA EKONOMI RUMAH
TANGGA: STUDI PADA IBU RUMAH TANGGA PEKERJA SEKTOR
INFORMAL TERKAIT AKSES LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Oleh

**HADI NA'IM
NIM 120820201010**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PERUBAHAN KELEMBAGAAN DAN DINAMIKA EKONOMI RUMAH
TANGGA: STUDI PADA IBU RUMAH TANGGA PEKERJA SEKTOR
INFORMAL TERKAIT AKSES LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER**

*CHANGES IN INSTITUTIONAL ARRANGEMENT AND DYNAMICS OF
HOUSEHOLD ECONOMY: A STUDY OF HOUSEWIFE WORKERS IN
INFORMAL SECTOR RELATED TO MICROFINANCE INSTITUTION
ACCESS AT TANJUNG MARKET JEMBER REGENCY*

TESIS

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2)
dan mencapai gelar Magister**

Oleh

**HADI NA'IM
NIM 120820201010**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Suci yang menciptakan alam jagat raya beserta segala isinya, sholawat dan salam tercurah kepada manusia yang paling mulia di alam jagat raya ini yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi titik ukuran bagi hamba Allah SWT, yang ingin mendekat kepada-Nya. Alhamdulillah Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan selanjutnya ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Setikah dan Bapak Marli, mertuaku Hj. Misti Suhartini dan H. Mulyadi
2. Istriku, Leni Widiyastutik dan kedua buah hatiku, M. Diaz Nawfal Risfiqian dan Adlina Zalfa Zahida
3. Saudaraku Musrifah dan Ailul Huda
4. Almamaterku, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, dan
5. Guru-guruku, atas jasanya dalam mengajar dan mendidiku

MOTTO

*"...Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas."
(QS Az-Zumar:10)*

*Dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda :
"siapa saja yang mengajak kepada kebenaran, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun.
Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun"
(HR Muslim)*

*"tidaklah penting apapun agama atau sukumu, jika kamu bisa berbuat baik kepada semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu"
(Alm. KH. Abdurrahman Wahid)*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadi Na'im

NIM : 120820201010

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga: Studi Pada Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2014

Yang menyatakan

Hadi Na'im
NIM 120820201010

TESIS

**PERUBAHAN KELEMBAGAAN DAN DINAMIKA EKONOMI RUMAH
TANGGA: STUDI PADA IBU RUMAH TANGGA PEKERJA SEKTOR
INFORMAL TERKAIT AKSES LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER**

***CHANGES IN INSTITUTIONAL ARRANGEMENT AND DYNAMICS OF
HOUSEHOLD ECONOMY: A STUDY OF HOUSEWIFE WORKERS IN
INFORMAL SECTOR RELATED TO MICROFINANCE INSTITUTION
ACCESS AT TANJUNG MARKET JEMBER REGENCY***

Oleh :

HADI NA'IM
NIM 120820201010

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Adhitya Wardhono, SE, M.Sc, Ph.D

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah
Tangga: Studi Pada Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor
Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro di Pasar
Tanjung Kabupaten Jember
Nama : Hadi Na'im
NIM : 120820201010
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah
Disetujui Tanggal : 23 Desember 2014

Oleh :
Pembimbing Utama

Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Pembimbing Anggota

Adhitya Wardhono, SE, M.Sc, Ph.D
NIP. 19710905 199802 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Ilmu Ekonomi
Ketua Program Studi

Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si
NIP. 19710610 200112 2 002

PENGESAHAN

JUDUL TESIS

**PERUBAHAN KELEMBAGAAN DAN DINAMIKA EKONOMI RUMAH
TANGGA: STUDI PADA IBU RUMAH TANGGA PEKERJA SEKTOR
INFORMAL TERKAIT AKSES LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hadi Na'im
NIM : 120820201010
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:
23 Desember 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Magister Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc
NIP. 19560831 198403 1 002
2. Sekretaris : Dr. Siswoyo Hari Santoso, SE, M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001
3. Anggota I : Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si
NIP. 19710610 200112 2 002
4. Anggota II : Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001
5. Anggota III : Adhitya Wardhono, SE, M.Sc, Ph.D
NIP. 19710905 199802 1 001



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP.19630614 199002 1 001

Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga: Studi Pada Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Hadi Na'im

*Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Sektor informal sebagai bagian dari entitas ekonomi perkotaan kontribusinya sangat signifikan dalam perekonomian daerah. Konteks ini memberi gambaran pentingnya aktivitas sektor informal dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu memberikan dukungan kepada masyarakat terutama untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak mampu mereka dapatkan dari sektor formal. Posisi termarginalkan secara ekonomi mendorong kaum perempuan dari kelas ekonomi rendah untuk berperan dalam menambah pendapatannya dengan bekerja di luar sektor domestik. Peran lembaga keuangan mikro sangat besar dalam mendorong perkembangan kegiatan usaha sektor informal di pasar Tanjung. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola perubahan kelembagaan sektor informal dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga terkait akses lembaga keuangan mikro dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pola perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga pedagang di Pasar Tanjung yang kontinyus dan permanen. Hal ini dapat ditenggarai sebagaimana berikut: keberadaan pedagang di Pasar Tanjung umumnya karena warisan-turun temurun, keberadaannya memiliki kontribusi positif bagi *survival strategy* untuk peningkatan pendapatan rumahtangga, penataan belum menyelesaikan masalah, tersedia lembaga keuangan dalam kelangsungan usaha sektor informal. Dampak perubahan kelembagaan terhadap ekonomi rumah tangga terkait akses lembaga keuangan mikro oleh ibu rumah tangga pedagang yang memiliki kecenderungan bersifat laten dan dinamis. hal ini terlihat bahwa para pedagang sektor informal lebih cenderung mengakses lembaga keuangan mikro.

Kata Kunci : perubahan kelembagaan, sektor informal, lembaga keuangan mikro.

Changes in Institutional Arrangement and Dynamics of Household Economy: A Study of Housewife Workers in Informal Sector Related to Microfinance Institution Access at Tanjung Market Jember Regency

Hadi Na'im

*Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRACT

Informal sector as a part of urban economic entity provides a very significant contribution to the regional economy. This context describes the importance of informal sector activities in urban economic system since it has proved capable of providing support to the community, especially to meet the needs that they cannot obtain from formal sector. Economically marginalized position encourages women from lower economic classes to play a role in increasing the family income by working outside the domestic sector. The role of microfinance institutions is very large in driving the development of business activities of the informal sector at Tanjung market. This study aimed to determine the pattern of changes in the institutional arrangement of informal sector and its impacts on the family economy related to access to microfinance institutions using qualitative descriptive method. The research results showed that there was a continuous and permanent change in the institutional arrangement of informal sector and the economy of family of sellers at Tanjung Market. This can be seen as follows: the existence of sellers at Tanjung Market in general is due to hereditary inheritance and has a positive contribution to the survival strategy to increase household income, the arrangement before overcoming problems, availability of financial institutions in the business running of informal sector. Impacts of institutional change to the household economy related to access to microfinance institutions by housewife sellers who have latent and dynamic tendencies. It is seen that the informal sector traders are more likely to access microfinance institutions.

Key words: *institutional change, informal sector, microfinance institution.*

RINGKASAN

Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga: Studi Pada Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Hadi Na'im, S.Pd, 120820201010; 2014: 176 halaman, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Sektor informal sebagai bagian dari entitas ekonomi perkotaan kontribusinya sangat signifikan dalam perekonomian daerah. Konteks ini memberi gambaran pentingnya aktivitas sektor informal dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu memberikan dukungan kepada masyarakat terutama untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak mampu mereka dapatkan dari sektor formal. Posisi termarginalkan secara ekonomi mendorong kaum perempuan dari kelas ekonomi rendah untuk berperan dalam menambah pendapatan keluarganya dengan bekerja di luar sektor domestik. Peran lembaga keuangan mikro sangat besar dalam mendorong perkembangan kegiatan usaha sektor informal di pasar Tanjung. Penelitian ini bertujuan: 1) Mendeskripsikan pola perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga perempuan pekerja sektor informal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember terkait akses Lembaga Keuangan Mikro (*microfinance institution*), 2) Mengetahui dampak pola perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga perempuan pekerja sektor informal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember terkait akses Lembaga Keuangan Mikro (*microfinance institution*) dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan pada suatu obyek dan mengkondisikannya seperti apa adanya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi atau data-data seputar keberadaan ibu rumah tangga pedagang sektor informal di Pasar Tanjung dalam mengakses lembaga keuangan mikro di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Data skunder diperoleh dari Dinas Pasar dan media informasi yang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pola perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga pedagang di Pasar Tanjung yang kontinyus dan permanen. Hal ini dapat ditenggarai sebagaimana berikut: keberadaan pedagang di Pasar Tanjung umumnya karena warisan-turun temurun, keberadaannya memiliki kontribusi positif bagi *survival strategy* untuk peningkatan pendapatan rumahtangga, penataan (penertiban) yang dilakukan pemerintah daerah belum menyelesaikan masalah, tersedia lembaga keuangan dalam kelangsungan usaha sektor informal. Dampak perubahan kelembagaan terhadap ekonomi rumah tangga terkait akses lembaga keuangan mikro oleh ibu rumah tangga pedagang yang memiliki kecenderungan bersifat laten dan dinamis. Hal ini terlihat bahwa para pedagang sektor informal lebih cenderung mengakses lembaga keuangan mikro. Perlu ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah perlu perbaikan kelembagaan sektor informal.

SUMMARY

Changes in Institutional Arrangement and Dynamics of Household Economy: A Study of Housewife Workers in Informal Sector Related to Microfinance Institution Access at Tanjung Market Jember Regency, Hadi Na'im, S.Pd, 120820201010; 2014: 186 pages, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Jember.

Informal sector as a part of urban economic entity provides a very significant contribution to the regional economy. This context describes the importance of informal sector activities in urban economic system since it has proved capable of providing support to the community, especially to meet the needs that they cannot obtain from formal sector. Economically marginalized position encourages women from lower economic classes to play a role in increasing the family income by working outside the domestic sector. The role of microfinance institutions is very large in driving the development of business activities of the informal sector at Tanjung market. This study aimed to: 1) describe the pattern of changes in the institutional arrangement and the conomy of women workers in the informal sector at Tanjung Market Jember Regency related to Microfinance Institutions access, 2) Determine the impacts of the patterns of institutional changes and household economy of women workers in the informal sector at Tanjung Market Jember Regency related to access to microfinance institutions in increasing the family income.

This study applied qualitative research approach conducted on an object and conditioned the way it is. Primary data were collected by collecting a variety of information or data on the existence of housewife traders in the informal sector at Tanjung Market in accessing microfinance institutions in Tanjung Market Jember Regency. Secondary data were obtained from Market Department and other information media.

The research results showed that there was a continuous and permanent change in the institutional arrangement of informal sector and the economy of sellers' families at Tanjung Market. This can be seen as follows: the existence of sellers at Tanjung Market in general is due to hereditary inheritance and has a positive contribution to the survival strategy to increase household income, the arrangement made by the local government has not overcome the problems, the availability of financial institutions in the business running of informal sector. The impacts of institutional change on the household economy related to access to microfinance institutions by housewife traders who have latent and dynamic tendencies. It is seen that the informal sector traders are more likely to access microfinance institutions. It is necessary for the local government to give a serious attention in improving the institutional arrangement of informal sector.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga: Studi Pada Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember”. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Tesis ini merupakan sebuah karya kecil yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang membaca. Selama penelitian sampai dengan penulisan Tesis, penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zainuri, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh kesabaran banyak memberikan bimbingan dan arahan serta bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dan kepada penulis hingga selesainya Tesis ini.
2. Adhitya Wardhono, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), atas keikhlasan dan semangat membimbing yang membuat aku sabar dan sadar. Seorang pendidik dan pembelajar yang menjadi pembimbingku adalah orang yang mampu menajamkan kematangan berfikir akademis. Terima kasih bapak telah menjadi bagian dari “gulatan idealisme intelektual” yang selama ini tercipta dalam setiap kesempatan belajar untuk berdiskusi, sehingga tercipta hasil pemikiran yang dikemas dalam bentuk tesis ini dengan lebih baik.
3. Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Dosen Penguji yang telah memberikan bekal ilmu dan telah merumuskan kebijakan-kebijakan demi kelancaran studi di Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember.
4. Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc selaku Ketua tim Penguji atas kesabaran dan koreksi terhadap Tesis ini, memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

5. Dr. Siswoyo H S, M.Si selaku Sekretaris tim penguji dan Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis dan telah membantu kelancaran studi di Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember.
6. Secara khusus buat Bapakku (Marli) dan Ibuku (Setikah) tercinta yang selalu mendoakan keberhasilan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi, serta mertuaku (H. Mulyadi dan Hj. Misti Suhartini), terima kasih atas do'a dan perhatiannya terutama saat seminar dan ujian Tesis ini.
7. Istriku tercinta (Leni Widiyastutik) yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Kedua Buah Hatiku (M. Diaz Nawfal Risfiqian dan Adlina Zalfa Zahida) tersayang, yang lucu dan ceria, merupakan semangat tersendiri sebagai pendorong untuk menyelesaikan Tesis ini.
9. Sahabat-sahabatku Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2012, atas segala kebersamaan dan kekompakan selama ini. Semangat kekeluargaan menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan, rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Jember, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Kelembagaan dalam Tinjauan Ekonomi	12
2.1.1 Perkembangan Ekonomi Kelembagaan	17
2.1.2 Dinamika Perubahan Kelembagaan	21

2.2 Konsep Sektor Ekonomi Informal	24
2.2.1 Karakteristik Sektor Informal dan Sektor Formal.....	30
2.2.2 Bidang-bidang Sektor Informal	36
2.2.3 Sektor Informal Perkotaan	39
2.2.4 Ekonomi Kelembagaan dan Sektor Informal.....	40
2.3 Teori Ibu Rumah Tangga Pekerja (Perspektif Gender) .	43
2.3.1 Status dan Peran Ibu Rumah Tangga dalam Keluarga .	46
2.3.2 Ibu Rumah Tangga dalam Konsep Kemandirian Ekonomi	48
2.3.3 Faktor Pendorong Ibu Rumah Tangga Untuk Bekerja .	50
2.4 Konsepsi Lembaga Keuangan Mikro (Microfinance Institutions)	52
2.5 Tinjauan Empiris Penelitian Sebelumnya	59
2.6 Kerangka Konseptual.....	64
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	68
3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian	68
3.2 Fokus, Lokasi dan Waktu Penelitian	69
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	70
3.4 Teknik Pengumpulan Data	70
3.5 Pemilihan Informan.....	73
3.6 Instrumen Penelitian	74
3.7 Metode Analisis Data	75
3.8 Batasan Penelitian.....	77
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78
4.1 Profil Pasar Tanjung di Tengah Pembangunan Kota Jember	79
4.1.1 Kelembagaan Sektor Informal di Pasar Tanjung	85
4.1.2 Karakteristik dan Tipologi Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung	98
4.2 Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga Ibu Pekerja Sektor Informal.....	104
4.2.1 Kelembagaan Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung Sebelum dan Setelah Penertiban	105

4.2.2	Pedagang Sektor Informal dalam Perspektif Kebijakan Penataan.....	115
4.2.3	Ibu Rumah Tangga Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung.....	122
4.2.4	Modal Sosial Memperkuat Daya Tawar Pedagang Sektor Informal	129
4.3	Dampak Pola Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga Ibu Pekerja Sektor Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro.....	141
4.3.1	Dinamika Sosial, Ekonomi dan Motif Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal di Pasar Tanjung.....	144
4.3.2	Kontribusi Ekonomi Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung.....	148
4.3.3	Sektor Informal sebagai <i>Survival Strategy</i> Bagi Rumah Tangga Pedagang Terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro.....	154
4.3.4	Implikasi Penertiban (Penggusuran) Terhadap Pola Kelembagaan Sektor Informal.....	158
4.4	Konstruksi Model Kelembagaan Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal Terkait Akses <i>Microfinance Institutions</i>. Beberapa Temuan dan Implikasi Kebijakan	165
4.5	Keterbatasan Penelitian.....	175
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	176
5.1	Kesimpulan.....	176
5.2	Saran	179
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Pendapatan Retribusi Daerah Pasar Tanjung.....	8
2.1 Perbedaan Karakteristik Antara Komunitas, Pemerintah dan Pasar dalam Kelembagaan Secara Konseptual	16
2.2. Karakteristik Sektor Informal dan Sektor Formal.....	35
2.3. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin.....	45
2.4. Hasil Penelitian Sebelumnya	62
4.1. Tipologi PKL di Pasar Tanjung	103
4.2. Beberapa Pengertian dan Elemen Dasar dari Social Capital.....	130
4.3. Pendapatan Retribusi Daerah Pasar Tanjung	151
4.4. Karakteristik Antara Komunitas, Pemerintah, dan Pasar Secara Konseptual	166

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Perbandingan Persentase Pedagang Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin di Los Pinggiran Pasar Tanjung	9
2.1 Kerangka Konseptual	67
3.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman.....	76
4.1. Bangunan Fisik Pasar Tanjung (kanan) dan Aktivitas Dagang Pada Malam Hari Sebelum Penertiban (kiri)	80
4.2. Persentase Pedagang di Pasar Tanjung Berdasarkan Tempat Usaha	81
4.3. Persentase Pedagang di Pasar Tanjung Berdasarkan Jenis Barang dagangan	82
4.4. Jumlah Pedagang di Pasar Tanjung Berdasarkan Kepemilikan Surat Ijin Menempati SIM	84
4.5. Aktivitas Dagang Di Timur Pasar Tanjung atau di Jl. Wahidin.....	101
4.6. Seorang Pedagang menjual barang dagangan dengan menggunakan kendaraan bermotor	102
4.7. Tipologi Aktivitas Dagang Sebelum dan Setelah Penertiban di Jl. Wahidin	103
4.8. Persentase Pedagang Sektor Informal Berdasarkan Jenis Barang di Jl. Wahidin S (Timur Pasar Tanjung)	106
4.9. Pedagang Sektor Informal Menjelang Penertiban	111
4.10. Lapak-lapak Pedagang Sebelum Penertiban	112
4.11. Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya.	119
4.12. Penggusuran Lapak Pedagang dan Bentuk Resistensi Pedagang Perempuan	132
4.13. Modal Sosial Pedagang Sebagai Penguat Resistensi Pedagang Kaki Lima	133
4.14. Salah Satu Informan Sedang Melayani konsumen	138
4.15. Mekanisme Modal Sosial mendorong Tindakan Kolektif Akses Pinjaman dan Simpanan	139
4.16. Visualisasi Pedagang Pasca Kebijakan Penataan	162
4.17. Visualisasi Lokasi Pasca Kebijakan Penataan	164
4.18. Konstruksi Model Kelembagaan Sektor Informal	167

DAFTAR LAMPIRAN

1. Cuplikan hasil wawancara dengan informan
2. Pedoman wawancara dengan informan
3. Sistematika Profil Pasar Tanjung tahun 2012



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1970-an, perdebatan klasik problematika sektor ekonomi informal perkotaan telah menarik minat banyak pakar ekonomi, sosial, tata ruang kota dan pemerintah daerah. Perhatian ditumpukan pada relasi antara masalah ketenagakerjaan perkotaan dengan masalah migrasi tenaga kerja desa-kota (Manning dan Effendi, 1991; Rachbini dan Hamid, 1994). Pada titik ini, fokus studi Todaro dan Stilkind (1991) menekankan bahwa migrasi desa-kota lebih diarahkan pada tingkat keparahan kondisi kehidupan di perdesaan daripada perkembangan ekonomi perkotaan. Keterbatasan peluang untuk bertahan di sektor pertanian mendorong mereka untuk pindah ke daerah perkotaan. Aktivitas ekonomi yang memberikan insentif penghasilan tanpa memerlukan persyaratan tertentu membuka peluang masuk ke sektor ekonomi informal dengan lebih menguntungkan dibandingkan sektor formal.

Pada perspektif lain bias pembangunan secara makro akan menghasilkan sistem ekonomi lain yaitu sektor informal, yang sebagian besar terjadi di negara-negara sedang berkembang. Kecenderungan pertumbuhan tinggi jumlah sektor informal di kota-kota besar seringkali dipastikan sebagai akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota-kota besar. Selama ini sektor formal dan informal berjalan dengan pertumbuhannya masing-masing. Paradigma sektor informal menjadi penyangga ketidakseimbangan pada transformasi struktur ketenagakerjaan semakin nyata. Babbitt *et al.* (2015) menuturkan bahwa para pekerja sektor informal khususnya perempuan memiliki preferensi yang sangat beragam tentang pekerjaan di sektor informal dengan berbagai faktor. Ibu rumah tangga di perkotaan semakin banyak yang terjun di dunia usaha sebagai pedagang sektor informal. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkurangnya peluang untuk bekerja di daerah perdesaan. Di samping itu juga pertumbuhan sektor informal di perkotaan semakin besar akibat dari dinamika pembangunan perkotaan yang semakin pesat.

Sektor informal diyakini mampu memberi kontribusi yang berarti, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kapasitas pemenuhan kebutuhan barang. Secara konsepsional sektor informal tidak saja dipandang sebagai tempat penampungan, tetapi juga menjadi alternatif yang komplementer terhadap sektor formal (Mulyadi, 2003:85). Karakteristik sektor informal yang fleksibel mampu memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal. Konteks ini memberi gambaran pentingnya aktivitas sektor informal dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu memberikan dukungan kepada masyarakat terutama untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak mampu mereka dapatkan dari sektor formal. Sebagian besar pekerja informal, khususnya di perkotaan terserap ke dalam sektor perdagangan, di antaranya perdagangan jalanan atau kaki lima. Usaha sektor informal diperkotaan diantaranya pedagang kaki lima, pedagang keliling, warung makan, sebagian tukang cukur, tukang becak, tambal ban, dan lain-lain (Manning dan Efendi dalam Bappenas, 2009). Pada aras ini, perdagangan jalanan telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer, terutama di kalangan kelompok miskin kota. Hal ini terkait dengan cirinya yang fleksibel (mudah keluar-masuk), modal yang relatif kecil, dan tidak memerlukan prosedur yang rumit.

Lebih jauh terkait pekerja sektor informal menunjukkan adanya perbedaan dalam kerentanan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, serta sifat dan komposisi pekerjaan rentan juga jauh berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Pada konsepsi ini, pekerja rentan dimaknai sebagai jumlah pekerja mandiri dan menggunakan pekerja keluarga, sementara di Indonesia pekerja musiman dan pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja cuma-cuma juga termasuk pekerja rentan (ILO, 2012). Hal ini karena kebiasaan pekerjaan di Indonesia, sering kali bersifat informal dengan kondisi kerja yang kurang layak, dan biasanya memiliki pendapatan tidak layak, produktivitas rendah dan kondisi kerja di bawah hak-hak dasar pekerja. Para pekerja perempuan memiliki peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga (fungsi reproduksi) sekaligus sebagai pekerja sektor informal (fungsi produksi) dengan tujuan menambah pendapatan keluarga.

Studi yang dilakukan oleh Hani, *et al.* (2012) memberikan penekanan bahwa motivasi ibu rumah tangga terjun dalam dunia usaha dalam bentuk sektor informal tumbuh pesat di usaha kecil menengah. Perbedaan gender tidak lagi menjadi penghalang untuk menjalankan bisnis dan menjadi pengusaha khususnya pedagang sektor informal. Motif bekerja perempuan di sektor informal terbagi atas dua yaitu motif perempuan untuk bekerja dan motif perempuan untuk memilih sektor informal. Pada titik ini, maka dapat diurai bahwa motif perempuan untuk bekerja ditengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat beragam, sebagian dari mereka beralasan untuk membantu suami, atau bahkan menjadi sumber penghasilan utama. Singkatnya dapat dikategorikan menjadi tiga motif, yaitu mencari nafkah, menambah penghasilan keluarga dan mengisi waktu luang (Sajogyo, 1983). Pendapat berbeda diungkapkan Haryanto (2008) dan Budiman (1985) bahwa berkaitan dengan pengerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki rumah tangga miskin, maka perempuan dituntut untuk berperan dalam menambah penghasilan suami. Peran ini ada karena posisi ekonomis perempuan lebih lemah dari lelaki sehingga perempuan dalam pemenuhan kebutuhan materialnya sangat tergantung pada suami.

Sementara itu, motif perempuan untuk memilih sektor informal sebagai tempat pencarian nafkah salah satunya dikarenakan sumberdaya yang dimiliki perempuan seperti tingkat pendidikan, modal kapital, maupun ketrampilan yang relatif lebih rendah, juga karena sifat sektor ini yang lebih fleksibel dan mudah bagi sumberdaya yang minim tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus buta aksara yang lebih tinggi dikalangan perempuan yakni 64 persen menyebabkan setengah dari jumlah penduduk yang merupakan kaum perempuan sulit memasuki sektor formal oleh karena ketatnya persyaratan yang ditentukan (Adhelia, 2011). Selain faktor pendidikan, faktor usia pun menjadi persyaratan yang berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja perempuan disektor formal, adapun usia yang dianggap produktif biasanya berada sekitar 18-30 tahun dimana sebagian besar perempuan pada usia tersebut tidak seluruhnya memenuhi atau memiliki syarat yang memadai untuk memasuki sektor formal.

Posisi termarginalkan secara ekonomi memaksa kaum perempuan dari kelas ekonomi rendah untuk berperan dalam menambah pendapatan keluarganya dengan bekerja di luar sektor domestik. Perempuan bekerja diluar sektor domestik biasanya disertai mekanisme yang disebut peran ganda yang berarti melakukan dua fungsi keluarga sekaligus (fungsi produksi dan fungsi reproduksi). Peran ganda dialami juga baik laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi beban kerja ganda yang lebih nyata dan lebih berat terbukti lebih banyak dipikul oleh perempuan (Sajogyo:1983), terutama bagi perempuan yang telah menikah dan mempunyai tanggungan, serta perempuan yang menjadi *single parent* atau kepala keluarga.

Khusus dalam rumah tangga miskin, perempuan mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga. Bagi rumah anggota rumah tangga miskin, perempuan terjun ke pasar kerja untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak cukup. Hasil kajian Kurniawati (2008) memperkuat hal ini, bahwa faktor tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh nyata terhadap pendapatan perempuan. Pendapat ini juga didukung oleh kajian Sari (2010) yang menunjukkan bahwa umur, status perkawinan dan pendidikan memengaruhi pendapatan pekerja perempuan sektor informal. Bertambahnya jumlah anggota keluarga yang dimiliki, maka meningkat pula beban tanggungan keluarga tersebut. Hal ini didukung oleh Simanjuntak (2001) yang mengatakan bahwa jumlah tanggungan yang tinggi pada suatu rumah tangga tanpa diikuti dengan peningkatan dari segi ekonomi akan mengharuskan anggota keluarga selain kepala keluarga untuk mencari nafkah.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu *pertama*, adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan dan pria serta makin disadari perlunya kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, *kedua*, adanya kemauan perempuan untuk bermandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidup dan mungkin juga kebutuhan hidup dari orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri (Hariyanto, 2008). Kemungkinan lain

penyebab peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah makin luasnya kesempatan kerja yang dapat menyerap pekerja perempuan, misalnya munculnya kerajinan tangan dan industri ringan. Perempuan mempunyai potensi memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.

Berkaitan dengan penerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki rumah tangga miskin, maka perempuan sebagai istri telah menuntut untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi demikian merupakan dorongan yang kuat bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Beberapa tahun terakhir ini keterlibatan perempuan pada sektor publik menunjukkan angka yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi perempuan untuk bekerja di sektor publik semakin tinggi (Haryanto, 2008). Analisis gender dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari analisis tentang keluarga. Ekonomi dan keluarga merupakan dua lembaga yang saling berhubungan sekalipun tampak keduanya terpisah satu sama yang lainnya. Ketidakseimbangan berdasarkan gender (*gender inequality*) mengacu pada ketidakseimbangan pada akses kesumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber yang penting yang ada di masyarakat ini antara lain meliputi kekuasaan atas material, jasa, *prestise*, peran dalam masyarakat, kesempatan memperoleh pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan sebagainya

Keberadaan sektor informal selanjutnya tidak dapat dilepaskan dengan lembaga penyedia modal baik yang formal, semi formal maupun informal. Kedua sektor ini kemudian membentuk sebuah pola hubungan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi penopang kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Anderson et al. (2002) menyatakan bahwa kredit mikro, modal sosial, dan sumber daya miliki bersama dalam komunitas pekerja sektor informal mengemuka melalui perubahan produksi rumah tangga dan konsumsi, fokus pada wanita, dan modal sosial sebagai bentuk pola hubungan kelembagaan yang mampu memberikan kontribusi ekonomi. Masyarakat pekerja sektor informal membutuhkan keberadaan pihak penyedia modal dalam hal ini adalah lembaga penunjang permodalan (*microfinance institution*) baik dalam jumlah yang kecil sampai pada jumlah besar.

Sementara itu lembaga keuangan mikro (LKM) membutuhkan masyarakat yang memiliki usaha khususnya di sektor informal agar modal tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah khususnya perkotaan. Pemberdayaan sektor informal merupakan bagian dari pemberdayaan perekonomian rakyat guna pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Muzakir; 2010). Perekonomian suatu daerah tersebut akan semakin maju apabila kedua sektor ini mampu bekerja sama dan saling mendukung.

Lembaga keuangan mikro, jika dilihat dari institusi yang menjalankan aktivitasnya dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga Keuangan Mikro memiliki komitmen untuk melayani masyarakat yang selama ini diabaikan oleh sektor perbankan formal. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, melalui pemberian akses terhadap layanan keuangan, berpotensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro terus mengalami perkembangan, dan melalui produk-produk keuangan kredit mikro mereka diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat di daerah kota dan pedesaan. Karena itu Lembaga Keuangan Mikro harus mampu meningkatkan kinerja agar dapat memberikan akses yang lebih baik lagi, umumnya kepada usaha kredit mikro dan kecil. Jaringan keluarga dan masyarakat memengaruhi akses individu ke lembaga kredit dengan menggunakan data baru dari survei kehidupan keluarga Indonesia. Jaringan komunitas dan keluarga memiliki peran yang penting dalam mengetahui tempat untuk meminjam, serta untuk persetujuan kredit. Perempuan memiliki kemampuan partisipasi dalam jaringan komunitas lebih dari laki-laki (Okten dan Osili, 2004).

Perkembangan sektor keuangan mikro didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat miskin memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan ekonomi tetapi dibatasi oleh kurangnya akses dan penyediaan tabungan, kredit dan fasilitas asuransi (Hulme dan Arun 2009). Tujuan dari pengembangan Lembaga Keuangan Mikro sebagai organisasi adalah untuk melayani kebutuhan keuangan pasar yang belum terlayani. Ledgerwood (1999),

memaparkan bahwa tujuan utama dari LKM secara umum mencakup; untuk mengurangi kemiskinan, untuk memberdayakan perempuan atau kelompok-kelompok penduduk yang kurang beruntung, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk membantu pertumbuhan bisnis atau keragaman aktivitas mereka, untuk mendorong pengembangan bisnis baru. Sementara itu, pinjaman yang dilakukan pada aktivitas LKM, memiliki tiga tujuan Ledgerwood (1999), yaitu *pertama*; untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan dan perluasan mikro; *kedua*; untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, khususnya perempuan dan kaum miskin dan *ketiga*; untuk mengurangi ketergantungan pada keluarga pedesaan, rawan kekeringan tanaman melalui diversifikasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan mereka.

Pasar memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberadaannya mampu menjadi salah satu penyebab tumbuhnya sektor informal di perkotaan. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena diperkotaan adalah dibidang perdagangan. Kegiatan perdagangan disektor informal dapat menghasilkan keuntungan dan pendapatan keluarga sekaligus dapat menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan kerja alternatif bagi masyarakat yang tidak diterima di sektor formal. Demikian pula keberadaan pedagang di pasar Tanjung yang merupakan pasar tradisional di Kabupaten Jember yang menjadi lahan subur bagi perkembangan kegiatan sektor informal perdagangan sebagai sarana distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja informal.

Disamping menjadi sektor penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan keluarga, keberadaan pasar Tanjung juga menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang relatif besar. Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh para pedagang di pasar Tanjung dalam bentuk penerimaan retribusi selama tujuh tahun terakhir seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Pendapatan Retribusi Daerah Pasar Tanjung Kabupaten Jember

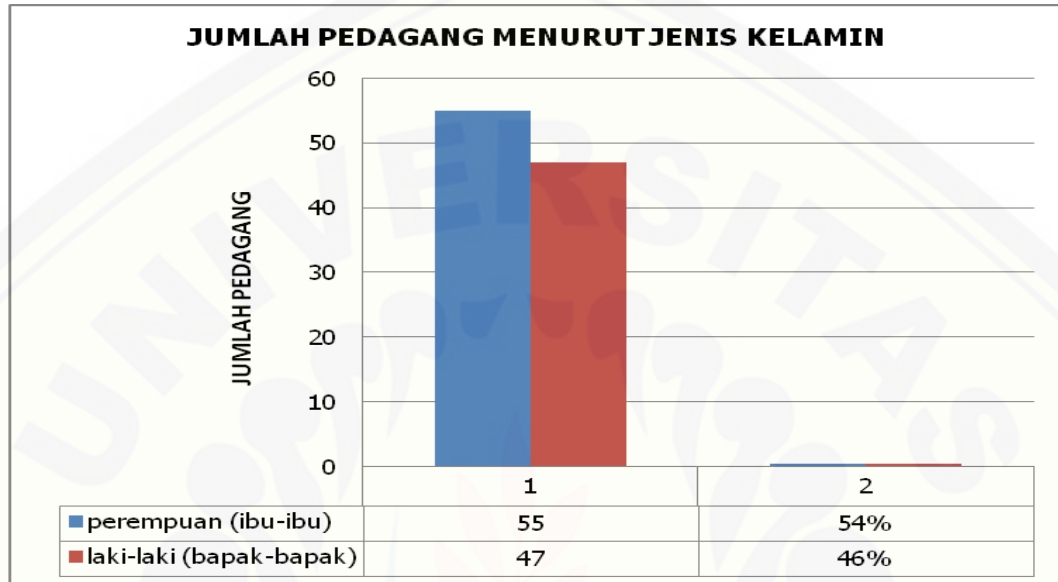
No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1.	2007	869.449.000	869.944.600	100.06
2.	2008	894.449.000	985.031.100	100.07
3.	2009	983.983.000	935.695.400	95.10
4.	2010	1.033.100.000	1.034.598.450	100.14
5.	2011	1.136.410.000	1.138.026.540	100.14
6.	2012	1.221.641.000	1.221.969.360	100.02
7.	2013	1.170.805.000	1.032.607.340	88.19

Sumber: (Dinas Pasar, 2014, diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan tingginya angka pendapatan retribusi yang diperoleh dari para pedagang di pasar Tanjung. Target dan realisasi retribusi rata-rata mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata persentase kenaikan realisasi sebesar 100%. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar Tanjung mampu menjadi salah satu sektor usaha peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku ekonomi dan khususnya bagi ibu rumah tangga pekerja sektor informal sekaligus menjadi salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan sektor informal yang ada di pasar Tanjung sangat didominasi oleh ibu rumah tangga terutama mereka yang menempati los pinggiran pasar. Beberapa jenis usaha yang didominasi oleh bapak-bapak adalah usaha jasa service sekaligus penjual jam tangan, tukang bakso, penjual buah dan palawija, selebihnya adalah usaha dagang yang dilakukan oleh ibu-ibu. Gambar 1.1 menunjukkan dominasi ibu-ibu pedagang sektor informal di pasar Tanjung. Hal ini memunculkan asumsi awal bahwa para ibu rumah tangga tersebut memiliki peran akses modal yang lebih mudah dari lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) dibanding laki-laki. Kondisi seperti itu didasari oleh faktor ekonomi dimana kebutuhan rumah tangga keluarga para pekerja tersebut tidak hanya bergantung terhadap pendapatan suami sebagai kepala rumah tangga, melainkan juga dari usaha dagang di pasar Tanjung. Beberapa pedagang di pasar Tanjung juga menuturkan bahwa usaha dagang yang dijalani merupakan usaha satu-satunya,

sehingga harus dikelola bersama suami atau istri. Berikut Gambar 1.1 yang menunjukkan perbandingan jumlah pedagang laki dan perempuan di pasar Tanjung los pinggiran.



Gambar 1.1. Perbandingan Persentase Pedagang Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin di Los Pinggiran Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Sumber: Data primer 2014, diolah.

Tingginya aktivitas perdagangan di pasar Tanjung Kabupaten Jember menjadi daya tarik tersendiri bagi para ibu rumah tangga pekerja sektor informal untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan. Peningkatan kegiatan usaha sektor informal yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pedagang sektor informal tersebut tentu saja berhubungan dengan keberadaan lembaga pembiayaan yang khusus melayani pedagang-pedagang sektor informal untuk mendapatkan modal khususnya yang berasal dari lembaga keuangan mikro. Tentu saja ini menjadi menarik karena keberadaan perempuan pekerja sektor informal di pasar Tanjung menjadi sasaran lembaga pembiayaan dalam membantu kelangsungan usaha mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) dan para ibu rumah tangga pekerja sektor informal akan kaji lebih mendalam dan bahas lebih luas dalam konteks ekonomi kelembagaan. Untuk itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola perubahan kelembagaan dan dinamika ekonomi rumah tangga ibu pekerja sektor informal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember terkait akses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*)?
2. Bagaimana dampak pola perubahan kelembagaan dan dinamika ekonomi rumah tangga ibu pekerja sektor informal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember terkait akses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) terhadap peningkatan pendapatan keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemecahan permasalahan studi baik secara teoritis yang bersifat ilmiah maupun pemecahan secara praktis (Nawawi, 2001). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban empiris sebagaimana berikut:

1. Mendeskripsikan pola perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga ibu pekerja sektor informal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember terkait akses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*).
2. Mengetahui dampak pola perubahan kelembagaan dan dinamika ekonomi rumah tangga ibu pekerja sektor informal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember terkait akses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kajian tentang pola perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga perempuan pekerja sektor informal terkait akses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) di Kabupaten Jember.

2. Kontribusi Praktis

2.1 Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar, dalam menyusun rencana yang terkait dengan aktivitas pekerja sektir informal perkotaan khususnya di Pasar Tanjung dalam mengakses modal dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

2.2. Dapat memberi sumbangan pemikiran baru untuk penelitian lanjutan, sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis, memberikan tambahan referensi bagi para pengelola lembaga keuangan mikro khususnya yang ada di Kabupaten Jember.

2.3 Sementara bagi para pekerja sektor informal, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya mengakses modal dari lembaga keuangan mikro di Pasar Tanjung.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 diuraikan tinjauan pustaka berupa teori dan hasil tinjauan empiris dengan penelitian. Berbagai teori yang diharapkan dapat mendukung penelitian ini meliputi kelembagaan ekonomi terkait dengan keberadaan ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam mengakses kebutuhan modal pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan mikro. Teori yang diuraikan diantaranya adalah teori ekonomi kelembagaan, teori sektor informal, teori perempuan bekerja dan teori lembaga keuangan mikro. Untuk mempertajam penelitian dengan dasar berpikir teoritis dan empiris, maka dikemukakan pula hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis pada sub bab berikutnya. Setelah uraian landasan teoritis dan landasan empiris penelitian sebelumnya selanjutnya dapat dibangun kerangka berpikir agar penelitian lebih terarah untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

2.1 Konsep Kelembagaan dalam Tinjauan Ekonomi

Keyakinan bahwa kelembagaan (*intitutions*) dapat menjadi sumber efisiensi dan kemajuan ekonomi telah diterima oleh sebagian besar ekonom, bahkan yang paling liberal. Saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai makna dan definisi dari kelembagaan. Saptana et al (2003) menyatakan bahwa, selain dipandang dari kajian sosiologi, kelembagaan juga dipelajari oleh ahli ekonomi berdasarkan sisi pandang mereka. Teori ekonomi seharusnya dilihat dalam kerangka yang lebih luas, karena dalam proses perkembangannya terjadi interaksi yang kompleks dengan aspek alam, fisik, dan sosial, serta tatanan sosial. Perkembangan ekonomi kelembagaan diilhami oleh aliran neo Malthusian dan ekonomi teknik yang bersifat radikal. Dalam konsep mereka, cakupan analisis dalam ekonomi kelembagaan meliputi: (1) kemajuan teknologi (*technical progress*), (2) perusahaan multinasional (*multinational enterprise*), (3) berkembangnya blok-blok kekuasaan (*power blocks*); (4) permainan berjumlah nol (*zero sum games*); (5) perencanaan indikatif (*indicative planning*); dan (6) pendekatan indikatif untuk ekonomi kebijakan dan ekonomi ekologi (*indicative*

approach to policy economics and ecology). Teori kelembagaan mengungkap lebih dalam dan mengarah pada aspek struktur sosial yang mempertimbangkan proses dari suatu budaya mencakup bagan, aturan main, norma dan rutinitas yang tidak dapat dipungkiri menjadi pedoman dalam perilaku sosial (Scott, 2004:2). Oleh karena itu, saat ini tugas terberat bagi para ahli ekonomi kelembagaan adalah mencoba merumuskan secara definitif pengertian kelembagaan sehingga dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengkajinya. Pada bagian ini, akan dikupas makna kelembagaan dari mulai aspek paling fundamental yang mendasari lahirnya teori ekonomi kelembagaan.

Secara definitif Yustika (2006:29) memaparkan bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan norma dalam masyarakat; tetapi, nilai dan norma itu bukanlah kelembagaan itu sendiri. Pendapat yang sama juga diungkapkan Vatn (2006:2) yang menggambarkan kelembagaan sebagai sebuah organisasi yang memandang keduanya sebagai “aturan”. Sementara itu North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai “aturan main” memandang bahwa dalam pengambilan suatu bentuk norma sosial atau “aturan resmi” yang disebutnya sebagai “*external constrains*” dapat memengaruhi individu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan hal terbaik yang dipilihnya secara optimal. Tinjauan kelembagaan dalam sistem ekonomi, menurut Shaffer dan Schmid (dalam Saptana, 2003), merupakan sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Berdasarkan sudut pandang individu, kelembagaan sebagai gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya.

Pakpahan (1989) mengemukakan suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama: (1) batas yurisdiksi (*jurisdiction of boundary*); (2) hak kepemilikan (*property right*); dan (3) aturan representasi (*rule of representation*). Batas yurisdiksi berarti hak hukum atas (batas wilayah kekuasaan) atau (batas otoritas) yang dimiliki oleh suatu lembaga, atau mengandung makna kedua-duanya. Batas yurisdiksi akan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu organisasi atau masyarakat. Perubahan batas yurisdiksi akan menghasilkan *performance* yang diinginkan,

ditentukan oleh empat hal, yaitu: perasaan sebagai satu masyarakat (*sense of community*), eksternalitas, homogenitas, dan skala ekonomi (*economic of scale*).

Konsep *property* atau pemilikan sendiri muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligations*) yang diatur oleh hukum, adat, dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya (Pakpahan, 1990). Dalam masyarakat tidak seorangpun yang dapat menyatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakat di mana dia berada. Hak kepemilikan juga merupakan sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Hak kepemilikan atas lahan (*land right*) pada kelembagaan adat setempat yang berkaitan dengan lahan dapat dilihat pada hak masyarakat baik secara kelompok (*comunal*) maupun secara individu (*private*) dalam pengaturan, penggunaan, dan pemeliharaan sumberdaya lahan. Aturan representasi (*rule of representation*) mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Aturan representasi menentukan alokasi dan distribusi sumberdaya. Dari segi ekonomi, aturan representasi memengaruhi ongkos membuat keputusan.

Pengertian yang kurang lebih sama dikemukakan Yeager (1999:9) yang secara ringkas menjelaskan kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi. Kelembagaan dapat mengurangi ketidakpastian yang *inheren* dalam interaksi manusia melalui penciptaan pola perilaku (Pejovich, 1995:30). Kelembagaan efektivitas penegakan hak kepemilikan (*property rights*), kontrak dan jaminan formal, *trademarks*, *limited liability*, regulasi kebangkrutan, organisasi korporasi besar dengan struktur tata kelola yang membatasi persoalan-persoalan *agency*, kontrak yang tidak lengkap dan oportunistik paska-kontrak (*expost opportunism*) (Bardhan, 1996:4). Menurut definisi dan makna yang begitu banyak tersebut, ruang lingkup dari kelembagaan memang sangat luas. Pemaknaan kelembagaan bisa dipilah dalam dua klasifikasi. *Pertama*, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain

pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. *Kedua*, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antarpelakunya.

Kajian kelembagaan dalam dunia sosial dibangun berdasarkan tiga pilar sebagai elemen sosial pokok, yang secara fundamental ketiganya sangat memiliki karakteristik yang berbeda. Masing-masing memiliki paradigma, ideologi, nilai, norma, *rules of the game*, dan bentuk keorganisasiannya sendiri. Tiga pilar yang dimaksud adalah: pemerintah, pasar, dan komunitas. Secara sederhana ketiganya direpresentasikan menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan sosial (Saptana et al, 2003). Masing-masing memiliki peran yang harus dijalankan secara ideal. Konfigurasi kekuatan antara ketiganya merupakan dasar pembentuk suatu sistem sosial di masyarakat. Perubahan dominasi peran antar ketiganya bergeser dari komunitas ke pemerintah dan terakhir ke pasar. Pada era masyarakat agraris pra-kapitalis peran komunitas sangat besar, ketika negara dan pasar belum hadir. Kemudian, negara mendominasi komunitas dan pasar, pada era pembentukan masyarakat modern. Terakhir, ketika globalisasi semakin kuat pada dunia yang nir-batas, maka pasarlah yang menguasai dunia. Korporasi-korporasi transnasional mendominasi pemerintah dan komunitas.

Selain itu, perubahan pola dominansi di antara ketiganya dimulai dari pola “komunitas-pemerintah-pasar”, ke “pemerintah-komunitas-pasar”, menjadi “pasar-pemerintah-komunitas”. Pemerintah dan pasar merupakan dua entitas yang semakin menyatu, yang secara bersama-sama semakin melemahkan peran komunitas. Munculnya wacana *civil society* merupakan respon dari semakin kuatnya peran pemerintah yang berkolaborasi dengan pasar tersebut. Secara teoritis, pemerintah semestinya menjadi pihak yang mengatur struktur otoritas antar ketiganya. Berbagai dinamika ini sangat menentukan apa yang terjadi di tingkat mikro. Aktivitas-aktivitas yang semestinya dikelola menurut bentuk “kelembagaan komunitas” menjadi tidak

efektif ketika cara bekerjanya tidak lagi murni. Antara komunitas, pemerintah, pasar memiliki perbedaan yang hakiki seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Antara Komunitas, Pemerintah Dan Pasar dalam Kelembagaan Secara Konseptual

Aspek	Komunitas	Pemerintah	Pasar
Orientasi utama kepada	Pemenuhan kebutuhan hidup komunal	Melayani penguasa dan masyarakat	Keuntungan (<i>profit oriented</i>)
Sifat kerja sistem sosialnya	Demokratis, berdasar kesetaraan	monopolis	kompetitif
Sandaran kontrol sosial	Kultural (<i>cultural compliance</i>)	<i>Cohersif compliance</i>	Penuh perhitungan (<i>renumeration compliance</i>)
Bentuk simbol yang diterapkan	Mitis	<i>Pseudorealis</i>	<i>Realis</i>
Bentuk norma utama	Komunal dan kepatuhan	Modifikasi perilaku	individualis

Sumber: Saptana dkk, 2003.

Komunitas merupakan bentuk kelembagaan paling alamiah dan universal yang menjadi kelembagaan yang pertama dibentuk pada masyarakat manapun, dan tidak akan kehilangan eksistensinya meskipun muncul kelembagaan baru yaitu negara dan pasar. Orientasi utama munculnya kelembagaan komunitas adalah lebih pada pemenuhan kebutuhan hidup secara komunal. Perwujudan demokrasi yang murni dapat ditemukan di jenis kelembagaan ini, yang didukung oleh struktur sosial ekonomi masyarakatnya yang cenderung setara. Gambaran kelembagaan negara memiliki karakteristik yang berbeda, karena orientasi utamanya kepada pelayanan terhadap penguasa dan rakyat. Bangunan struktur kekuasaan yang monopolis menjadikan demokrasi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, sifat tidak alamiah. Artinya, demokrasi bukanlah jiwa alamiah negara. Pasar merupakan kelembagaan yang tegas, dan juga sederhana yang berorientasi kerjanya sempit yaitu mencari keuntungan. Sejalan dengan itu, kompetisi adalah semangat kerjanya, dengan kontrol sosialnya berbentuk *renumerative compliance* (Etzioni, 1961).

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Kelembagaan

Pembahasan mengenai kelembagaan atau institusi dalam ilmu ekonomi mulai berkembang sejak dekade 1980-an, pada saat itu kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi, sehingga para ekonom yang sudah memahami masalah tersebut berupaya untuk mengkaji peranan institusi dalam pembangunan ekonomi. Cabang baru ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) muncul karena perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh para pakar ekonomi. Perkembangan ekonomi kelembagaan ini selanjutnya lebih menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi (*transaction cost*).

Untuk menggantikan kegagalan sistem ekonomi aliran Neoklasik, maka sudah seharusnya para pakar ekonomi untuk melihat dan mempelajari aliran ekonomi lainnya yang sesuai dengan perkembangan perekonomian. Salah satu aliran ekonomi yang diperkirakan sangat sesuai dan dapat menggantikan kegagalan aliran ekonomi Neoklasik yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi sekarang adalah aliran ekonomi kelembagaan (Santosa, 2010:18). Reaksi dari ketidakpuasan terhadap aliran Neoklasik yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi Klasik mendorong munculnya aliran ekonomi kelembagaan (*institutional economics*). Lebih lanjut Hasibuan (2003) menekankan bahwa inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah memahami ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah dan hukum. Para ekonom merangkum kesatuan ilmu ekonomi dengan disiplin ilmu yang lain dalam analisis ekonomi, akan tetapi di antara para ekonom masih mempunyai pandangan yang berbeda. Pada garis besarnya mereka tidak sepakat dengan berlakunya pasar bebas atau persaingan bebas dengan azas *laissez-faire* dan motif untuk memperoleh laba maksimal.

Tokoh aliran kelembagaan menurut Landreth dan Colander (1994) terbagi dalam tiga golongan, yaitu tradisional, quasi dan neo. Sementara itu, Yustika (2006) membagi aliran kelembagaan ke dalam ilmu ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) dan ilmu ekonomi kelembagaan baru (*new institutional*

economics). Diperlukan upaya untuk mengkombinasikan kedua pandangan tersebut agar diperoleh pemahaman yang sama dalam kelembagaan, *pertama* akan dikemukakan aliran ekonomi kelembagaan lama, *kedua* quasi, dan yang *ketiga* aliran ekonomi kelembagaan baru. Pembagian aliran kelembagaan ini sifatnya relatif seperti pandangan para pemikir aliran tersebut, artinya ilmu ekonomi kelembagaan yang dikemukakan bukan yang terbaik dan yang lama (tradisional) harus ditinggalkan, akan tetapi hanya dalam hal kesamaan fokus dan isu-isu pemikiran.

Terkait dengan bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Hal ini kemudian dihubungkan dengan ilmu ekonomi yang berkembang dalam cabang barunya sehingga muncul ilmu ekonomi institusi baru (*neo institutional economics*) dengan melihat kelembagaan dari sudut biaya transaksi (*transaction costs*) dan tindakan kolektif (*collective action*). Di dalam analisis biaya transaksi termasuk analisis tentang kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi (*property rights*), ketidak-seimbangan akses dan penguasaan informasi (*information asymmetry*) serta tingkah laku opportunistik (*opportunistic behaviour*). Ilmu ekonomi institusi baru ini sering pula disebut sebagai ilmu ekonomi biaya transaksi (*transaction costs economics*) sedangkan yang lain menyebutkannya sebagai paradigma informasi yang tidak sempurna (*imperfect information paradigm*).

Ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Ekonomi kelembagaan kemudian berkembang menjadi dua macam yakni ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) dan ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*). Ekonomi kelembagaan lama muncul pada awal abad ke-20.

Ekonomi kelembagaan lama ini muncul untuk merubah pandangan para tokoh ekonomi neoklasik. Para tokoh ekonomi kelembagaan lama mengkritik keras aliran neoklasik dengan alasan antara lain Rutherford (1994):

1. Aliran Neoklasik mengabaikan peran institusi dalam perekonomian, artinya makna penting dari kendala-kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*) mereka mereka anggap tidak berpengaruh terhadap perekonomian.
2. Para tokoh Neoklasik memberikan penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational-maximizing self-seeking behaviour of individuals*).
3. Perhatian dan konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan (equilibrium) serta bersifat statis.
4. Tokoh Neoklasik menolak bahwa preferensi seseorang yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan.

Hal-hal tersebut mendorong para pakar ekonomi kelembagaan baru untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya. Ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya peran institusi dalam perekonomian, akan tetapi keberadaan institusi tersebut masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan dalam memahami perkembangan perekonomian, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan baru menjelaskan bahwa, institusi memiliki peran sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar. Ekonomi kelembagaan baru memiliki beberapa arti penting dalam perekonomian antara lain adalah (Arsyad, 2010):

1. Teori yang terdapat dalam ekonomi kelembagaan baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik dengan dasar landasan ekonomi neoklasik. Salah satu permasalahan yang berhasil dijelaskan ekonomi kelembagaan baru tersebut adalah eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan

keuangan. Ekonomi kelembagaan baru merupakan sebuah paradigma baru dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi.

2. Sejak dekade 1990-an makna ekonomi kelembagaan baru sangat penting dalam konteks kebijakan ekonomi, karena ekonomi kelembagaan baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. Ekonomi kelembagaan baru telah berhasil menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutions*). Ekonomi kelembagaan baru telah mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak dan lain sebagainya untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Menurut ekonomi kelembagaan baru, adanya informasi yang tidak sempurna, eksternalitas dan fenomena *free-riders* di dalam barang-barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar. Hal ini yang menyebabkan kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan.

Sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada kepentingan pribadi, mekanisme harga dan pasar bebas, seharusnya dipahami dengan hal-hal terkait dengan hak kepemilikan dan penggunaan kekayaan. Ekonomi liberal (klasik maupun neoklasik) tidak membahas tentang hal tersebut. Jika terdapat hak kepemilikan, maka penggunaan kekayaan tersebut diperlakukan sebagai suatu konstanta yang tidak aktif berfungsi menjelaskan kegiatan lokatif. Tentang hak kepemilikan, Yustika (2010) memaparkan bahwa hingga saat ini para pakar ekonomi dan pengambil kebijakan memberikan perhatian yang terbatas. Terdapat perdebatan akan pengakuan status hak kepemilikan antara kaum kapitalis dengan kaum sosialis. Ekonomi kapitalis menganggap bahwa satu-satunya hak kepemilikan yang diakui adalah hak kepemilikan individu, sementara itu kaum sosialis menganggap bahwa hak kepemilikan yang sah adalah hak kepemilikan negara. Penganut sosialis meyakini bahwa hak kepemilikan tidak hanya menyangkut masalah sosial dan kapitalis. Di negara berkembang hak kepemilikan berhubungan dengan hal yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, demokrasi, politik dan kebebasan ekonomi individu dan persoalan lingkungan (Prasad; 2003). Oleh karena itu nilai-nilai sosial

kemasyarakatan, perkembangan politik terkadang menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Kajian tentang ekonomi kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar (Rachbini,2001). Hal ini dikarenakan dalam konteks ekonomi, kelembagaan merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi. Kelemahan dan kekuatan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari keberadaan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Ketika perekonomian hanya didasarkan pada kelembagaan formal, maka dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Oleh karena itu, saat ini masyarakat perlu mengembangkan ekonomi kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik di masyarakat sangat tergantung pada kelembagaan yang mbingkainya.

2.1.2 Dinamika Perubahan Kelembagaan

Jika dikaji menurut perspektif ekonomi konsep kelembagaan dapat dikatakan bersifat dinamis, keberadaannya dalam sebuah komunitas akan mengalami perubahan, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini di akibatkan adanya interaksi ekonomi yang mempertemukan antar berbagai macam kepentingan di dalamnya. Nilai-nilai dan kebudayaan dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kehidupan telah menyebabkan sifat kelembagaan menjadi dinamis. Perubahan kelembagaan yang demikian setidaknya memiliki dua dimensi. *Pertama*, perubahan konfigurasi antarpelaku ekonomi akan memicu terjadinya perubahan kelembagaan (*institutional change*). Dalam pendekatan ini, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan (kepentingan/konfigurasi) pelaku ekonomi. *Kedua*, perubahan kelembagaan sengaja didesain untuk memengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi (Yustika, 2010;205). Pada kondisi dimana setiap pihak yang punya kepentingan dalam kegiatan ekonomi memainkan peran masing-masing, maka kelembagaan secara aktif akan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi (termasuk aktor-aktor yang terlibat di

dalamnya). Berdasarkan dua spektrum tersebut, bisa diyakini bahwa perubahan kelembagaan sama pentingnya dengan desain kelembagaan itu sendiri.

Jika ditinjau berdasarkan waktu perubahannya level perubahan kelembagaan terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada: 1) masyarakat (*level social*), 2) level kelembagaan formal (*formal institutional environment*), 3) level tata kelola (*governance*) dan 4) perubahan bersifat kontinyu (Williamson, 2000). *Pertama*, perubahan kelembagaan pada level masyarakat artinya perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat (*social embeddedness*) seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat, dan lain-lain. Tingkat perubahan yang demikian dapat kita jumpai dalam tradisi masyarakat zaman dulu contohnya dalam bentuk arisan. Model kelembagaan seperti ini juga berlaku dalam dunia perdagangan dimana keberadaan bank, maupun lembaga keuangan mikro belum muncul ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat pedagang khususnya pedagang sektor informal belum dihadapkan pada situasi dimana pada saat mereka membutuhkan modal mereka hanya bergantung pada tradisi pinjam meminjam tanpa berpikir untuk menyediakan jaminan dan syarat yang lain. Berlakunya kelembagaan dalam dunia perdagangan yang melibatkan pelaku sektor informal hanya berdasarkan norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat, dan lain-lain.

Kedua, perubahan kelembagaan yang terjadi pada lingkungan kelembagaan formal. Hidayat (2007;22), mengutip pendapat Wiliamson yang dimaksud kelembagaan formal adalah kelembagaan yang umumnya sengaja dirancang oleh masyarakat atas nama negara seperti perundang-undangan (konstitusi) yang dibuat oleh lembaga legislatif/pemerintah. Pada tingkatan ini kondisi yang sesuai dengan keberadaan sektor informal adalah mulai terbentuknya institusi-institusi atau lembaga formal yang berperan dalam kelangsungan usaha sektor informal. Munculnya lembaga formal ini bisa dilihat dari mulai munculnya lembaga penyedia modal bagi para pekerja sektor informal yaitu lembaga keuangan mikro. Disamping itu pihak pekerja sektor informal juga mulai berpikir untuk melembagakan keberadaan mereka dalam sebuah komunitas formal semacam paguyuban maupun asosiasi dan

perkumpulan dalam bentuk yang lain. Pola hubungan antara para pekerja sektor informal dengan lembaga keuangan mikro sudah semakin kelihatan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan para pekerja sektor informal telah bergantung pada keberadaan lembaga keuangan mikro.

Level perubahan kelembagaan yang *ketiga* terjadi pada tingkatan tata kelola (*governance*) yaitu serangkaian peraturan (*rule of the game*) dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola (*governance structure*), dilengkapi dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari *rule of the game* tersebut. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja sektor informal serta semakin banyaknya model lembaga keuangan mikro dimasyarakat, pemerintah selanjutnya punya peran untuk menyediakan atau merumuskan aturan-aturan yang jelas. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya akan membentuk sebuah tata kelola dalam kegiatan kredit yang melindungi pihak-pihak tersebut. Williamson (2000) menganggap perubahan pada tingkatan ini merupakan isu sentral ekonomi kelembagaan yang ia asumsikan bahwa penegakan *governance* tidak bebas biaya (*costless*). Lahirnya sebuah struktur tata kelola yang baik akan menjamin kepastian interaksi dan transaksi antar pihak-pihak terkait yaitu adanya resolusi konflik, kepastian sistem kontrak, dan lain-lain yang membutuhkan biaya. *Governance* akan selalu berubah menuju *governance* yang lebih efisien yaitu *governance* yang dapat meminimalkan biaya transaksi.

Berbeda dengan tiga tingkatan perubahan kelembagaan sebelumnya pada tingkatan *keempat* berlangsung kontinu (sepanjang waktu) mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumberdaya dan tenaga kerja jika perubahan kelembagaan pada tingkatan ketiga masih berlangsung tidak kontinyu. Hal ini menunjukkan, kelembagaan berubah mengikuti perubahan harga input produksi, perubahan input produksi ini selanjutnya menyebabkan perubahan kelembagaan. Secara teoritis, hal ini dapat dipahami tapi bagaimana mengukur dampak perubahan tersebut terhadap realitas kehidupan ekonomi masih sulit dilakukan, Williamson

(2000). Pada level terakhir tahap perubahan kelembagaan ini masyarakat, pemerintah dan juga lembaga keuangan mikro punya tanggungjawab untuk menjaga agar peran mereka berfungsi sesuai dengan aturan-aturan telah disepakati sebelumnya. Para pekerja sektor informal akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang terkadang tidak terkait dengan keberadaan lembaga keuangan mikro. Sementara itu di pihak lembaga keuangan mikro dituntut untuk meningkatkan pelayanan dibidang penyediaan modal bagi pekerja sektor informal. Aturan main dan segala hal yang memengaruhi perubahan kelembagaan ini akan berlangsung setiap saat.

2.2 Konsep Sektor Ekonomi Informal

Pada subbab ini akan dikemukakan kajian teoritis yang terkait dengan keberadaan sektor informal. Gagasan utama yang muncul ketika membahas tentang struktur perekonomian suatu negara atau suatau wilayah salah satunya adalah sektor ekonomi informal. Melalui perannya yang begitu penting dalam aspek penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan pekerjaan sampai pemberdayaan perempuan, maka sangat penting untuk membahas konsep sektor ekonomi informal ini dari berbagai sudut kajian. Kajian tentang sektor ini kemudian akan disesuaikan dengan pendapat beberapa pakar ekonomi utamanya mereka yang punya perhatian dengan keberadaan sektor informal tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi akan tetapi juga masalah sosial dan dimensi gender. Termasuk dalam kajian ini juga akan dikemukakan bagaimana sektor informal itu muncul dengan disertai karakteristik/ciri-ciri yang melekat pada sektor ini.

Pemaparan tentang sektor informal dikemukakan oleh De Soto (1989), aktivitas ekonomi informal itu muncul sebagai jawaban atas mandeknya kesempatan mendapatkan legalitas hukum dan adanya hambatan birokrasi. hal ini terjadi ketika legalitas hukum merupakan hak istimewa yang bisa diperoleh dengan akses politik dan ekonomi segelintir orang atau kelompok. Hambatan untuk memperoleh legalitas hukum dan pelayanan birokrasi ini menurut de soto adalah biaya transaksi yang sangat mahal harganya. Selama ini sektor informal yang sebagian besar adalah bercirikan

usaha kecil menengah dan perorangan. Usaha ini dikategorikan illegal karena tidak mengantongi berbagai izin, tidak formal, menempati lahan terlarang dan dengan pendapatan yang rendah. Hal itu terjadi karena usaha-usaha mereka banyak dihambat oleh aturan birokrasi hukum dan sulitnya melakukan hubungan dengan pemerintah. Sektor informal dalam sistem dan struktur perekonomian dalam perkembangannya tidak lagi menjadi substansi utama. Sektor informal merupakan gejala sampingan sistem perekonomian yang tidak berdaya dan tidak bekerja sempurna. Ketidakberdayaan itu kemudian mewujudkan ke dalam ekonomi, yang kurang produktif. Semakin maraknya eksistensi sektor informal, semakin jelas ada yang salah besar di dalam sistem ekonomi. Jadi, sektor informal merupakan gejala dari adanya distorsi sistem ekonomi. Distorsi tersebut terjadi karena kebijakan ekonomi yang tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan dengan penuh penyimpangan yang bersangkutan dengan kekuasaan.

Sebagai sebuah sistem dan struktur, terkadang perekonomian berjalan tidak sesuai dengan teori dan nilai-nilai sosial ekonomi. Penyimpangan ini yang kemudian memunculkan sektor informal. Persepsi berbeda disampaikan oleh Mulyadi (2003:95) mengungkapkan bahwa sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak atau sama sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Keberadaan usaha sektor informal yang ada di kota maupun yang ada di desa kurang mendapatkan perlindungan yang cukup dari pemerintah sehingga para pekerja sektor informal tidak dapat berbuat banyak apabila dilakukan penggusuran. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap sektor informal ini dapat berupa tarif proteksi, kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan, penyuluhan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, dan sebagainya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menjelaskan bahwa sektor informal adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Berbagai sektor usaha jalannya usaha kecil yang termasuk kelompok usaha sektor usaha informal dijelaskan dalam undang-undang ini juga tentang

ekonomi kerakyatan yang ada di masyarakat serta berbagai hal yang berkaitan dengan usaha kecil pedagang kaki lima (PKL), penjual makanan keliling, pedagang sayuran, warung-warung keluarga, dan lain-lainnya yang masing-masing usahanya bersifat kekeluargaan. Sementara itu definisi ILO (Organisasi Buruh Internasional) tentang sektor informal adalah cara melakukan setiap pekerjaan dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada daya lokal, usaha milik sendiri, beroperasi dalam skala kecil, padat karya dan dengan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian di luar sistem pendidikan formal, tidak terkena langsung regulasi, dan pasar yang kompetitif.

Perkembangan sektor informal yang cukup banyak dan persaingan dari usaha-usaha perusahaan besar menuntut perlunya pemahaman yang sama untuk membedakannya kriteria atau ciri-ciri bagi usaha kecil atau sektor informal ini. Mulyadi (2003:94-95) merinci ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik. Usaha pada sektor informal tidak menggunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia seperti sektor formal; 2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha; 3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja; 4) Kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah kadang tidak sampai sektor ini; 5) Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor; 6) Teknologi yang digunakan bersifat primitif; 7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil; 8) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan one man enter prises dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga; 9) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi, dan 10) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah

Pemahaman yang hampir sama dikemukakan Todaro (2003: 367-368) ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut : 1) bidang kegiatannya bervariasi dan berskala kecil; 2) banyak menggunakan tenaga kerja dan usaha dimiliki perorangan; 3) teknologi sangat sederhana; 4) beroperasi seperti halnya perusahaan monopoli persaingannya dalam menghadapi penurunan pemasukan; 5) tenaga kerja tidak pernah

mengalami pendidikan formal; 6) tidak mempunyai ketrampilan khusus; 7) tidak ada jaminan keselamatan kerja; 8) motivasi kerja hanya untuk kelangsungan hidup; 9) pendatang baru di desa/kota karena gagal di sektor formal; 10) tinggal di permukiman sederhana dan kumuh, dan 11) produktivitas dan pendapatan lebih rendah dari usaha-usaha besar

Sektor informal di Indonesia mempunyai ciri khas sendiri seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil kriteria usaha kecil dalam pasal 5 sebagai berikut: a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau; b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); c) milik warga negara Indonesia; d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar, dan e) berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dari ciri-ciri tersebut maka sebagian besar usaha di sektor masyarakat dapat digolongkan dalam sektor informal.

Sektor informal adalah bagian angkatan kerja dikota yang berada diluar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Selanjutnya definisi Breman yang dikutip Mandayati (2012) menyatakan bahwa sektor informal meliputi massa pekerja kaum miskin yang tingkat produktifitasnya jauh lebih rendah daripada pekerja disektor modern dikota yang tertutup bagi kaum miskin ini (Manning, 1996). Ada beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk menerangkan sektor informal antara lain umur, pendidikan, dan jam kerja sebagai indikator untuk menggambarkan karakteristik pekerja sektor informal. Sektor informal tidak mengenal batasan umur, pekerja sektor informal itu umumnya berpendidikan rendah dan jam kerja yang tidak teratur. Kebanyakan dari mereka bekerja secara efektif dengan jumlah jam kerja yang sangat panjang karena pendapatan yang belum memadai pada hari itu. Sektor formal adalah lawan dari sektor informal, sektor formal diartikan sebagai suatu sektor yang terdiri dari unit

usaha yang telah memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah, sedangkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah.

Sebagai sektor alternatif yang dapat dimasuki masyarakat dalam memperoleh penghasilan, sektor informal sangat cepat pertumbuhannya. Karakteristik sektor informal yang sangat tidak memerlukan ijin mendorong masyarakat untuk membuka usaha ini dengan meskipun dengan modal yang relatif kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Subarsono (1996) yang mengemukakan bahwa karakteristik sektor informal adalah: a) sektor informal ini mudah dimasuki, b) tidak memerlukan ijin untuk beroperasi, c) menggunakan teknologi sederhana dan padat tenaga kerja d) beroperasi dalam skala kecil dan biasanya milik keluarga, e) tidak ada akses ke lembaga keuangan formal, f) unit usahanya tidak terorganisir, g) kesempatan kerja disektor ini tidak terproteksi sebab tidak diatur oleh peraturan pemerintah.

Karakteristik yang ada di sektor informal menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk masuk ke sektor ini. Beberapa alasan menjadi dasar seseorang memasuki sektor informal, ada faktor yang menyebabkan sektor informal muncul, misalnya karena proses memperoleh kesempatan untuk memasuki sektor formal ternyata memerlukan biaya transaksi yang terlalu tinggi bagi sebagian besar masyarakat urban dan rural. Motif usaha seseorang masuk sektor informal adalah alasan ekonomi (Winarno, 1996). Sektor informal telah mampu menjadi katup pengaman bagi perkembangan angkatan kerja yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pendapat ini didukung oleh pendapat Haryanto (2000) bahwa sektor informal saat ini semakin berkembang, sebagian akibat dari keterpurukan sektor formal, banyak angkatan kerja yang tidak mampu bertahan di sektor formal.

Sektor informal pada kenyataannya mampu menjadi penopang ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pada saat ini, sektor informal mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, dan mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran di Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahun. Pakar ekonomi

Rachbini (2010) menegaskan, bahwa sektor informal mengisi seluruh sudut perekonomian nasional, dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari perekonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian strategis di dalam sistem, tetapi sekaligus merupakan masalah yang rumit.

Melalui konsep-konsep tentang sektor informal yang telah dikemukakan di atas, memahami konsep tersebut di atas tentunya dapat dimengerti, bahwa peranan sektor informal dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja tentu sangat besar, dengan memperlihatkan cirinya yang unik itu. Untuk memahami konsep sektor kerja informal, maka ciri-ciri ekonomi yang dapat dipergunakan sebagai titik tolak analisa lebih lanjut Mandayati (2012). Sektor kerja informal mempunyai aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya antara lain; 1) sebagai katup pengaman dari adanya urbanisasi, 2), dapat dipergunakan sebagai benteng pertahanan dan 3) dapat merupakan batu loncatan 4) mobillisasi akan mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa apabila dikelola dengan baik. Sementara itu aspek negatifnya ialah; 1). dapat menimbulkan kesemrawutan karena tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk menertibkannya, 2) kurang terorganisir meskipun di beberapa daerah telah terbentuk organisasinya terorganisir, 3) pemerintah menuduh sebagai biang keladi dari sejumlah kondisi yang tidak mengenakkan. Hal ini karena koordinasi dan pendekatan yang kurang antara pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para pekerja sektor informal dengan aparat pemerintah daerah.

Sektor informal merupakan rangkaian aktivitas yang sangat mudah dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah atau terbelenggu dengan kemiskinan (Sethuraman, 1985). Mereka yang tidak mampu mengakses pekerjaan di sektor formal karena terbatas pada orang-orang yang mempunyai kontak pribadi dalam sektor ini, mempunyai pendidikan yang relatif tinggi dan bahkan mereka harus mempunyai dana yang cukup untuk membiayai hidupnya selama masa menganggur. Sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dari segi produksi yang secara ekonomis tidak

begitu menguntungkan meskipun mereka menunjang kehidupan bagi penduduk yang terbelenggu kemiskinan. Ini merupakan penafsiran yang didasarkan atas sektor formal ; dan kegiatan-kegiatan yang hampir otomatis terdaftar, misalnya pedagang keliling, pengemudi becak, penjual makanan, penyemir sepatu, buruh pengangkut dan sebagainya.

Implikasi hal tersebut di atas adalah relatif mudahnya memasuki sektor informal dibandingkan sektor formal adalah sangat penting. Kesempatan kerja sektor informal diciptakan oleh permintaan pekerjaan dan setiap orang bisa memasuki sektor ini. Bagaimanapun sifatnya pekerjaan dan tingkat penghasilan yang diterima berbeda-beda sesuai dengan keterampilan individu, kontak pribadi, dan inventasi waktu dan modal yang dimiliki. Teori Ketergantungan yang menggambarkan kaum miskin kota sebagai warga kota yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki oleh kaum miskin kota berada pada sektor informal (Bappenas, 2009). Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kemiskinan di perkotaan dengan sektor informal. Sektor informal sering kali dikaitkan dengan kaum miskin kota yang tidak tingkat pendidikannya rendah sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

2.2.1 Karakteristik Sektor Informal dan Sektor Formal

Fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal menjadi ciri perekonomian tersendiri umumnya di negara-negara berkembang bahkan di beberapa negara maju. Hal ini didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja yang tidak mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor formal. Ciri penting untuk membedakan sektor informal dari semua kegiatan ekonomi sektor-sektor lainnya adalah skala operasi. Alat ukur yang tepat untuk mengukur skala operasi adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau

lembaga yang tidak berbadan hukum, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*). Sementara itu ciri-ciri kegiatan-kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), tukang becak, penata parkir, pedagang keliling, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya.

Melalui tulisannya, Bromley (1979) mengkaji relevansi model dualistik kegiatan ekonomi dan usaha yang diterapkan di negara-negara dunia ketiga. Tulisan ini difokuskan pada pembahasan asal, perubahan, dan kekurangan dari dualisme model formal/informal. Sembilan kekurangan utama telah berhasil diidentifikasi. Kemudian, perubahan yang serba cepat terhadap konsep informal terkait dengan ketepatan waktu dan tempat presentasinya, pentingnya institusi-institusi kunci dalam perubahan gagasan ini, dan relevansi konsepnya terhadap rekomendasi kebijakan yang mungkin (*feasible*) atau aman secara politis bagi konsultan dan organisasi-organisasi internasional.

Pendekatan dualistik ekonomi ini berawal dari pembagian kegiatan ekonomi dan kerja ke dalam sektor tradisional dan modern. Pendekatan ini telah menjadi dasar teoritis sebagian besar literatur dan hampir dilembagakan dalam analisa-analisa liberal dan neo-klasik ekonomi dunia ketiga. Di awal tahun 1970-an, Hart mempresentasikan sebuah makalah tentang kerja perkotaan di Ghana. Hart memperkenalkan istilah baru, membagi sektor ekonomi menjadi sektor formal (kurang lebih sama dengan modern) dan informal (perpanjangan dari konsep tradisional) serta menekankan pada pentingnya kerja sendiri, usaha-usaha kecil, dan tidak adanya catatan statistik sektor informal.

Selanjutnya Bromley (1979) menyampikan sembilan kekurangan klasifikasi formal/informal :

1. Pembagian seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua kategori terlalu sederhana. Pendekatan yang lebih menarik adalah untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha sebagai sebuah kelanjutan antara dua sisi yang berseberangan. Hal ini bisa melihat usaha-usaha yang berada di antara formal/informal dan proses-proses transisi yang terjadi.
2. Model klasifikasi ini tidak mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki sebagian ciri formal dan informal. Setiap kegiatan ekonomi yang tergolong formal dan informal belum tentu memenuhi semua kriteria yang dimiliki oleh kedua sektor tersebut.
3. Banyak yang berasumsi berdasar klasifikasi yang ada bahwa dua sektor ini terpisah dan mandiri padahal kasus memperlihatkan bahwa kedua sektor ini terus menerus berinteraksi berbagai bagian dalam sebuah sektor mungkin didominasi atau diciptakan oleh bagian dari sektor lain.
4. Pemberian kebijakan tunggal bagi seluruh sektor informal. Padahal kegiatan usaha di sektor informal sangat beraneka ragam sehingga memerlukan kebijakan yang berbeda-beda. Perlakuan atau kebijakan yang diberlakukan harus disesuaikan dengan karakteristik setiap pelaku/pekerja sektor informal.
5. Terdapat kecenderungan melihat sektor informal sebagai kegiatan usaha eksklusif di area perkotaan dan mempergunakan istilah sektor tradisional pedesaan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan di area non-perkotaan. Padahal bukannya tidak mungkin untuk menemukan kegiatan-kegiatan serupa di area pedesaan. Sektor informal pedesaan seharusnya mendapat perhatian yang sama besarnya dengan sektor informal perkotaan.
6. Sebagian besar tulisan yang mendefinisikan dan menggunakan klasifikasi ini tidak mampu menjelaskan komponen-komponen lain dari keseluruhan sistem nasional yang ada.
7. Sektor informal terkadang dianggap tidak memiliki masa depan, ketika sektor ini didefinisikan dalam pengertian sektor yang kurang mendapat dukungan pemerintah, tidak tercatat secara resmi, dan beroperasi diluar

aturan pemerintah, secara otomatis dukungan pemerintah akan diarahkan untuk mengformalisasi sektor ini. Pendekatan ini juga berasumsi bahwa satu-satunya hambatan sektor informal untuk tumbuh adalah sikap negatif dari pemerintah terhadap sektor ini, artinya dukungan pemerintah dianggap dapat menjadi jaminan sukses. Hal ini mengabaikan kompetisi yang kompleks dan hubungan tidak seimbang antara usaha kecil dan usaha besar dan berbagai strategi monopoli untuk menekan kompetisi usaha kecil.

8. Pembagian formal/informal tidak dapat diterapkan pada orang yang bekerja di dua sektor pada tahapan yang berbeda dalam siklus hidupnya, sepanjang tahun bahkan sepanjang hari, mereka memiliki permasalahan yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini juga berlaku dalam rumah tangga, ketika sebagian anggota rumah tangga kerja di sektor informal sementara lainnya di sektor formal. Patut dipertanyakan juga apakah klasifikasi ini seharusnya diterapkan pada kegiatan padahal kegiatan yang sama bisa dilakukan baik di sektor formal maupun informal. Tampaknya hanya perusahaan yang bisa secara meyakinkan diklasifikasikan ke dalam salah satu sektor, dan klasifikasi perusahaan ke deskripsi kegiatan, orang, RT, dan lingkungan pertetanggaan terus menerus membawa pada kebingungan dan kesalahan.
9. Terdapat kecenderungan untuk memberikan klasifikasi yang sama untuk sektor informal perkotaan dengan *urban poor*, padahal tidak semua yang bekerja di sektor informal adalah orang miskin demikian juga sebaliknya.

Sementara itu Mazumdar (1991) lebih memusatkan perhatiannya pada implikasi distribusi pendapatan dalam ekonomi kota yang terbagi atas dua macam pasar tenaga kerja, yaitu sektor formal dan sektor informal diantaranya ; *pertama*, ada semacam seleksi pekerja dalam sektor informal. Sebagian pekerja dalam sektor ini tidak termasuk dalam kelompok usia kerja 25-50 tahun, kebanyakan adalah “pekerja tambahan”, yakni mereka yang bukan pencari nafkah utama di dalam rumah tangga, perempuan dan berpendidikan rendah; *kedua*, tidak ada bukti

yang menunjukkan bahwa sektor informal memainkan suatu peranan penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di kota bagi kaum migran baru; *ketiga*, rendahnya penghasilan dalam sektor informal sebagian disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang memengaruhi tipe angkatan kerja dalam sektor ini. Hal ini tidak dapat digunakan sebagai suatu argumen untuk menolak pendapat bahwa pembagian pasar kota atas sektor formal dan informal cenderung memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan di kota.

Sepanjang kelompok pekerja mendapat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dengan upah lebih tinggi, mereka cenderung menekan harga penawaran (upah) dan pendapatan dalam sektor informal. Pekerja sektor informal memperoleh penghasilan yang cukup bervariasi dan belum ada bukti bahwa penghasilan secara menyeluruh lebih rendah daripada para pekerja yang tergolong dalam sektor "formal"; *keempat*, terdapat perbedaan yang besar dalam sektor informal, dan pada kelompok-kelompok penting dalam sektor ini. Perbedaan dalam sektor ini perlu dijadikan suatu topik penelitian lebih lanjut. Pada saat ini, kita tidak tahu berapa banyak orang dalam sektor ini mengalami mobilitas dan meningkatkan penghasilannya; *kelima*, efek kumulatif dari berbagai bukti yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya mitos populer bahwa sebagian besar massa berpenghasilan rendah terdapat dalam kantong-kantong ekonomi kota tertentu sektor informal, pekerja usaha sendiri, atau kegiatan tersier yang perlu ditolak. Khususnya, suatu proporsi yang sangat kecil dari angkatan kerja di kota mempunyai tingkat penghasilan yang sama dengan atau lebih rendah dari tingkat penghasilan kaum miskin di desa.

Analisis pembagian pekerja menjadi pekerja sektor formal dan pekerja sektor informal sering terkendala dengan data yang tersedia. Tidak adanya keseragaman secara internasional tentang definisi sektor informal dan ketersediaan data yang ada di Indonesia, pengertian pekerja sektor informal dalam analisis ini didekati dengan status pekerjaan yang tersedia. Pekerja informal adalah mereka yang berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan

pekerja keluarga/tak dibayar. Tidak adanya keseragaman secara internasional tentang definisi sektor informal dan ketersediaan data yang ada di Indonesia, pengertian pekerja sektor informal dalam analisis ini didekati dengan status pekerjaan. Kecenderungan bahwa pekerjaan sektor informal di pasar kemungkinan berlangsung secara turun temurun dari anggota keluarga yang sebelumnya. Mereka dapat melibatkan anggota keluarga yang lain untuk ikut menjalankan usaha ini. Perbedaan antara sektor formal dan sektor informal ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Karakteristik Sektor Informal dan Sektor Formal

Karakteristik	Sektor Informal	Sektor Formal
1. Modal	1. Sukar diperoleh	1. Relatif mudah diperoleh
2. Teknologi	2. Padat karya	2. Padat modal
3. Organisasi	3. Organisasi keluarga	3. Birokrasi
4. Permodalan	4. Lembaga keuangan tidak resmi	4. Lembaga keuangan resmi
5. Serikat buruh	5. Tidak berperan	5. Sangat berperan
6. Bantuan negara	6. Tidak ada	6. Penting untuk kelangsungan usaha
7. Hubungan dengan desa	7. Saling menguntungkan	7. "one-way-traffic" untuk kepentingan sektor formal
8. Sifat wiraswasta	8. Berdikari	8. Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau impor
9. Persediaan barang	9. Jumlah kecil kualitas rendah	9. Banyak dan kualitas baik
10. Hubungan kerja dengan majikan	10. Berdasarkan asas saling percaya	10. Berdasarkan kontrak kerja

Sumber: Alisjahbana, 2005.

Perbedaan antara sektor informal dan sektor formal sangat jauh dari segi dana, kredit dan usaha yang dilakukan. Perbedaan antara kedua sektor memberikan pengaruh pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda baik untuk negara maupun masyarakat dan kedua sektor ini. Karakter perbedaan di atas merupakan gambaran bagaimana keadaan sektor informal dan sektor formal yang berkembang secara bersama-sama dalam perekonomian bangsa. Bagaimana yang satu selalu mendapatkan kemudahan dan yang satu tidak mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan sektornya. Perbedaan yang mencolok ini menyebabkan tidak adanya

kebijakan pemerintah yang sampai ke sektor informal dan menyebabkan sektor informal hanya dipandang sebelah mata.

2.2.2 Bidang-bidang Sektor Informal

Bidang usaha yang terdapat dalam sektor informal cukup luas. Perkembangan usaha sektor ini di Indonesia sangat luas baik di desa-desa maupun daerah perkotaan. Sektor informal yang lahir di perkotaan merupakan hasil dari urbanisasi yang mana perpindahan ini untuk mencari penghasilan. Perkotaan yang persaingannya sangat ketat dan kadang tidak mendapatkan pekerjaan maka para urban ini membuka lapangan pekerjaan baru dalam perkotaan yaitu yang disebut sektor informal. Migrasi yang terjadi di Indonesia sebagian besar merupakan migrasi dari desa ke kota (Bappenas, 2009). Berkembangnya sektor informal di kota mendorong mobilitas yang sangat relevan adalah migrasi sirkuler dan komuting. Migran sirkuler dan penglajulah yang kebanyakan berkecimpung di sektor informal kota. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja sektor informal di kota kebanyakan merupakan migran dari desa yang pada waktu-waktu tertentu pulang kembali ke desa, karena pada umumnya keluarganya tetap tinggal di desa.

Pendapat yang dikemukakan Hart (1985:79-80) bahwa bidang-bidang dalam sektor informal yang ditinjau dari pendapatan yang sah dan tidak sah sebagai berikut:

- a. Sektor informal dengan penghasilan sah
 1. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder: pertanian, perkebunan yang berorientasi ke pasar, kontraktor bangunan dan kegiatan yang berhubungan dengannya, pengrajin usaha sendiri, pembuat sepatu, penjahit, pengusaha bir dan alkohol.
 2. Usaha tersier dengan modal yang relatif besar: perumahan, transportasi, usaha-usaha kepentingan umum, spekulasi barang-barang dagangan, kegiatan sewa-menyewa.

3. Distribusi kecil-kecilan: pedangan pasar, pedangan kelontong, pedangan kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, pengangkut barang, agen atau komisi, dan penyalur.
 4. Jasa yang lain: pemusik, pengusaha binantu, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, juru potret, pekerja reparasi kendaraan maupun reparasi lainnya, makelar dan perantara.
 5. Transaksi pribadi: arus uang dan barang pemberian maupun semacamnya, pinjam-meminjam, pengemis
- b. Sektor informal dengan penghasil tidak sah :
1. Jasa : kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya penadah barang curian, lintah darat, pedangan obat bius, pelacur, mucikari, penyelundupan, suap-menyuap, pelbagai macam korupsi politik, perlindungan kejahatan.

2. Transaksi : pencurian kecil, pencurian besar, pemalsuan uang dan penipuan.

Beberapa kekuatan yang dimiliki sektor informal adalah sebagai berikut: (Tambunan, 1999) *pertama*, padat karya, dibanding sektor formal, khususnya usaha skala besar, sektor informal yang pada umumnya adalah usaha kecil bersifat padat karya. Sektor ini hanya mengandalkan keberadaan anggota keluarga dalam kegiatan usahanya. Salah satu pertimbangan mereka adalah terkait dengan upah atau penghasilan yang mereka dapatkan. Sementara itu tenaga kerja di Indonesia sangat banyak, sehingga upahnya relatif lebih murah jika dibandingkan di negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang kurang dari Indonesia. Hal ini didasari asumsi faktor-faktor lain yang mendukung (seperti kualitas produk yang dibuat baik dan tingkat efisiensi usaha serta produktivitas pekerja tinggi), maka upah murah merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki usaha kecil di Indonesia. *kedua*, daya tahan terhadap gejolak perekonomian, kondisi ini dibuktikan selama krisis pada tahun 1998 terbukti sektor informal tidak hanya dapat bertahan, bahkan jumlahnya berkembang pesat. Hal ini disebabkan faktor permintaan (pasar output) dan faktor penawaran.

Jika ditinjau dari sisi permintaan, akibat krisis ekonomi pendapatan riil rata-rata masyarakat menurun drastis dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat, dari barang-barang sektor formal atau impor (harganya relatif murah) ke barang-barang sederhana buatan sektor informal (harganya relative murah). Meningkatnya usaha sektor informal dikarenakan tuntutan ekonomi rumah tangga yang semakin besar, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan tambahan penghasilan tanpa harus bergantung pada sektor formal. *Ketiga*, keahlian khusus (tradisional), bila dilihat dari jenis-jenis produk yang dibuat di industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia, dapat dikatakan bahwa produk-produk yang mereka buat umumnya sederhana dan tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keahlian khusus (*traditional skill*). Ini merupakan keunggulan lain sektor informal, yang selama ini terbukti dapat membuat mereka bertahan walaupun persaingan dari sektor formal, termasuk impor sangat tinggi. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki pekerja atau pengusaha secara turun temurun, dari generasi ke generasi. *Keempat* permodalan, kebanyakan pengusaha di sektor informal menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal (di luar sektor perbankan/keuangan) untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mereka. Banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Selain itu, investasi di sektor informal rata-rata jauh lebih rendah daripada investasi yang dibutuhkan sektor formal. Tentu, besarnya investasi bervariasi menurut jenis kegiatan dan skala usaha.

Selain faktor-faktor kekuatan tersebut di atas, prospek perkembangan sektor informal di Indonesia juga sangat ditentukan kemampuan sektor tersebut, dibantu maupun dengan kekuatan sendiri, menanggulangi berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Mampu tidaknya sektor informal bersaing dengan sektor formal atau barang-barang impor, juga tergantung pada seberapa serius dan sifat serta bentuk dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki sektor informal. Kelemahan sektor informal tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi sektor tersebut, yang sering sekali menjadi hambatan-hambatan serius bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Pelaku-pelaku usaha di sektor informal umumnya menghadapi kendala yang banyak dialami terutama adalah keterbatasan modal, khususnya modal kerja selain itu juga hambatan tentang penentuan lokasi usaha. Kendala lain adalah kesulitan pemasaran dan penyediaan bahan-bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan minim mengenai bisnis, dan kurang penguasaan teknologi. Sebagian besar industri kecil, terlebih industri rumah tangga di Indonesia adalah sektor informal. Masalah paling besar yang dialami mereka adalah keterbatasan modal dan pemasaran. Masalah lainnya adalah pengadaan bahan baku (misalnya tempat beli terlalu jauh, harga mahal, dan tidak selalu tersedia), kurang keahlian dalam jenis-jenis teknik produksi tertentu (misalnya tenaga ahli/perancang sulit dicari atau mahal), dan kurang keahlian dalam pengelolaan. Persoalan lain yang mereka hadapi adalah persaingan yang tajam dan kemampuan mereka berkomunikasi sangat rendah, termasuk akses mereka ke fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi sangat terbatas.

2.2.3 Sektor Informal Perkotaan

Sektor informal atau ekonomi informal adalah kebalikan dari usaha formal yang berusaha untuk memperoleh penghasilan (*income*) di luar aturan dan regulasi institusi kemasyarakatan dalam tatanan sosial yang ada yaitu pemerintah sehingga dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Seorang pakar yang telah banyak melakukan penelitian di Indonesia (Wauran, 2012;7) mendefinisikan sektor informal sebagai kegiatan ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (*underground economy*) adalah kegiatan apa saja mulai dari kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, perempuan bekerja yang tidak dibayar, sampai dengan penggelapan pajak serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktek ekonomi yang legal.

Sektor informal perkotaan adalah mereka para pekerja di sektor informal yang berada di wilayah perkotaan. Mereka sebagian besar adalah para pendatang yang tertarik untuk membuka usaha sektor informal di perkotaan, terpengaruh oleh orang-orang yang lebih dahulu sukses, disamping karena semakin langkanya lapangan kerja

dan kehidupan di pedesaan sudah sangat sulit dan terbatas. Semakin sempitnya lahan pertanian di pedesaan, suksesnya program pendidikan dasar, pesatnya pembangunan di kota-kota dengan munculnya banyak industri telah mendorong terjadinya urbanisasi secara besar-besaran. Tidak sebandingnya antara kesempatan kerja yang disediakan oleh industri substitusi di perkotaan dengan membludaknya pekerja dari pedesaan. Bagi yang beruntung dapat diterima dan bekerja di pabrik/industri dan memperoleh status yang lebih tinggi yaitu sebagai pekerja formal. Sebaliknya mereka yang tidak tertampung akan bekerja serabutan sekedar untuk bertahan hidup di perkotaan, yang akhirnya disebut sebagai pekerja informal.

2.2.4 Ekonomi Kelembagaan dan Sektor Informal

Keberadaan sektor informal sepertinya akan terus menghadapi kondisi yang paradoks. Disatu sisi sektor informal menunjukkan peran yang sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor informal merupakan lapangan usaha yang paling banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat bawah di Indonesia, memberikan peluang paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah perekonomian serta memberikan kontribusi penting dalam kegiatan perdagangan. Betapa luar biasanya peran sektor informal di Indonesia kita ini. Di samping telah memberikan peran yang penting dalam perekonomian, sektor informal juga menghadapi permasalahan yang sangat rumit. Hal ini disebabkan karena secara kelembagaan sektor informal di Indonesia lemah. Secara ekonomi politik, keberadaannya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dominasi keberpihakan pemerintah kepada pelaku ekonomi besar telah menyebabkan sektor informal di Indonesia lemah secara kelembagaan. Hal ini mengakibatkan sektor informal kita menjadi lambat mandiri, lambat mengembangkan diri dan menjadi lemah dalam hal akses.

Kelembagaan secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara aktor dan organisasi dalam suatu konteks, misal konteks pemerintah daerah, konteks lembaga keuangan termasuk konteks sektor informal ini North (1996). Pandangan kelembagaan saat ini diusung oleh para pemikir ekonomi kelembagaan baru atau *New Institutional Economics*, yang menganggap bahwa kegagalan kelembagaan (*institutional failures*) yang menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan. Kelembagaan ini dalam perspektif *New Institutional Economic* menurut pandangan North and Davis (1971) dibedakan antara *institutional environment* dan *institutional arrangement*. *Institutional environment* membahas tentang aturan main yang memandu perilaku individu-individu. Hal-hal tersebut berbentuk aturan formal yakni (aturan tertulis, perundang-undangan, *property right etc*) dan batasan informal seperti adat istiadat, norma, aturan sosial dan sejenisnya. Sementara itu *institutional arrangement* membicarakan tentang *governance structure* atau dalam istilah Williamson (1993) disebut sebagai *the institutions of governance* yang mencakup kontrak dan pengorganisasian.

Sektor informal dalam pandangan ekonomi kelembagaan setidaknya memenuhi prinsip-prinsip; *Pertama*, aturan main (*rule of the game*) yang mengawal proses perkembangan sektor informal bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan sektor informal. Aturan main ini harus ada dan disepakati oleh pihak-pihak pelaku sektor informal maupun pihak yang terkait langsung dengan keberadaan sektor ini. *Kedua*, hak kepemilikan atau *property right* yang terartikulasi dalam bentuk perizinan usaha dan produk yang dihasilkan oleh sektor informal dapat dengan mudah diperoleh sektor informal. Prinsip harus jelas karena pada umumnya para pekerja sektor informal tidak memiliki hak terhadap tempat usaha yang mereka tempati. *Ketiga*, informasi yang diakses oleh sektor informal mendekati sempurna atau tidak terjadi *asymetric information* sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi yang berbentuk regulasi dari pemerintah maupun informasi internal dalam pengelolaan sektor informal. Kenyataannya tidak semua pekerja sektor ini mendapatkan informasi yang sama baik dalam hal regulasi maupun akses terhadap

lembaga penyedia modal. *Keempat*, *transaction cost* atau biaya transaksi yang harus dikeluarkan sektor informal dalam mengurus perizinan dan pengelolaan kegiatan usaha termasuk didalamnya adalah akses terhadap lembaga keuangan mikro sehingga sektor informal bisa berkembang tanpa harus dibebani oleh biaya-biaya transaksi.

Sekian permasalahan yang dihadapi oleh sektor informal di atas mendorong lahirnya sistem kelembagaan yang kuat pada sektor informal di Indonesia sesuai dengan level dan tahap perubahannya. Terdapat 5 (lima) asumsi yang memengaruhi perubahan suatu kelembagaan seperti yang disampaikan North (1995), yaitu; *Pertama*, interaksi yang berkelanjutan antara kelembagaan dan organisasi dalam situasi ekonomi yang terbatas, oleh sebab itu persaingan merupakan kunci untuk perubahan kelembagaan; *Kedua*, persaingan mendorong organisasi untuk terus menerus berinvestasi dalam keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan. Berbagai macam keahlian dan pengetahuan individual dan organisasi akan mengembangkan persepsi tentang peluang, dan karenanya pilihan yang akan menambah perubahan pada organisasi; *Ketiga*, kerangka kerja kelembagaan akan memberikan insentif secara maksimum kepada mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan; *Keempat*, persepsi dibentuk dari perilaku mental individu; *Kelima*, lingkup ekonomi, yang saling melengkapi dalam menjalin kerjasama dengan kelembagaan lain diharapkan dapat membuat perubahan kelembagaan yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan.

Jadi sebenarnya kemungkinannya sangat besar untuk terciptanya kelembagaan sektor informal yang kuat jika kita memperhatikan kelima asumsi di atas. Pelaku sektor informal, stakeholders dan semua pihak yang berniat mendukung penguatan kelembagaan sektor informal harus memberikan peran antara lain; *Pertama*, mendorong sektor informal agar berinteraksi secara aktif dengan aturan-aturan yang melingkupi pengelolaan sektor informal di Indonesia, melakukan kritik, masukan dan perubahan serta pembaharuan kebijakan peraturan tentang sektor informal. *Kedua*, membantu meningkatkan pengetahuan para pelaku sektor informal dan persaingan yang dihadapi sektor informal harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong

lahirnya kelembagaan sektor informal yang kuat. *Ketiga*, sektor informal akan kuat jika memberlakukan asas profesionalitas khususnya dalam hal pengelolaan dengan memperkuat akses terhadap lembaga keuangan sehingga pelaku sektor informal lebih serius dalam mengembangkan sektor informal. *Keempat*, membantu sektor informal membangun mental kewirausahaan dan mental keberanian untuk memperjuangkan nasib sektor informal menjadi salah satu sektor usaha perdagangan yang kuat dan mandiri di Indonesia. *Kelima*, membantu sektor informal membangun kerjasama yang lebih serius dalam bentuk asosiasi dan jaringan kerja yang dapat mewadahi kepentingan sektor informal dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada sektor informal dimasa yang akan datang.

2.3 Teori Ibu Rumah Tangga Pekerja dalam Perspektif Gender

Pada satu dekade terakhir jumlah laporan dan hasil studi mengenai isu perempuan dan jender di sektor perekonomian bertambah terus menerus jumlah laporan dan studi mengenai isu perempuan dan jender di sektor informal. Kajian dan studi tersebut umumnya fokus pada keragaman teori-teori akademis dan langkah-langkah serta pengalaman-pengalaman praktis di seluruh dunia. Laporan-laporan ini mengindikasikan dengan jelas bahwa para pekerja sektor informal ini terus menunjukkan bahwa seakan-akan telah menjadi bagian program pemberdayaan perempuan padahal sebenarnya kembali menghasilkan ketidaksetaraan jender (ILO, 2002). Di negara-negara industrialis maupun di negara-negara yang menuju industrialisasi, peran dan tugas rumah tangga, faktor-faktor siklus kehidupan seperti melahirkan dan mengurus anak sering kali dibebankan pada perempuan pekerja dan membuat mereka sulit untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi keluarga.

Para pekerja sektor informal memiliki sedikit sekali waktu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan serikat disebabkan tekanan-tekanan ekonomi yang memaksa mayoritas pekerja perempuan di sektor industri menghabiskan sebagian besar waktu mereka di malam hari dan hari-hari libur untuk lembur, mempelajari keterampilan-keterampilan baru, atau menjual barang-barang untuk menambah penghasilan

mereka, tetapi juga tugas-tugas rumah tangga. Stereotip jender juga menggambarkan perempuan sebagai pihak yang menempatkan keluarga dan isu-isu rumah tangga sebagai tugas utama mereka. Hal ini semakin memperkuat bahwa serikat pekerja merupakan tempat laki-laki dimana perempuan tidak memiliki peran apapun untuk dimainkan. Umumnya yang terlibat dalam kelompok sosial atau gerakan buruh adalah laki-laki.

Mandayati (2012;39) mengutip pernyataan Sujarwo bahwa dalam pengertian umum perempuan adalah manusia yang mengasuh, merawat dan memelihara kodrat perempuan sebagai manusia yang berbuat pasif, kodrat perempuan adalah menjadi muara penerus generasi (melahirkan keturunan) secara bermartabat ia bersikap menerima, mengandung, melahirkan dan mengasuh. Karakteristik yang melekat dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa perempuan bersifat pasif dan merupakan pihak-pihak yang menderita tetapi dalam pengertian lain menerima merupakan kegiatan aktif, ia cenderung emosional. Perempuan yang sadar mengenai keperempuannya akan bergerak aktif dan positif untuk mendapatkan status yang sama dengan laki-laki dan juga berusaha mengadakan perbaikan kedudukan dalam masyarakat.

Makna sumberdaya manusia (*human resources*) mengandung dua pengertian : *pertama*, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, *kedua* sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Adhelia; 2011). Badan Pusat Statistik (BPS, 2009) menjelaskan bahwa yang disebut tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa dari dua pengertian di atas dapat disederhanakan bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya manusia yang mampu bekerja dan mempunyai nilai ekonomis

yaitu memproduksi barang dan jasa, termasuk di dalamnya perempuan yang juga merupakan tenaga produktif.

Penyediaan kesempatan kerja bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga menjadi begitu penting keberadaannya. Hal tersebut menjadi beralasan karena perempuan khususnya dari keluarga miskin merupakan tenaga yang potensial bagi kesejahteraan keluarganya bahkan seringkali memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kartasmita dan Adhelia (2011) mengemukakan bahwa saat ini perempuan bekerja di pabrik, bekerja keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dan bekerja apa saja yang dapat mendatangkan penghasilan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga akibat meningkatnya kebutuhan sejalan dengan meningkatnya harga barang.

Pembahasan atau studi yang menyangkut perempuan tentunya berdasarkan pada pembagian berdasarkan perspektif gender. Adhelia (2011) mengemukakan pengertian gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hasil konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat tidak hanya berdasarkan ciri fisik secara biologis. Adapun basis perbedaan laki-laki dan perempuan diluar konstruksi sosial budaya atau biasa disebut dengan perbedaan berbasis seks atau ciri biologis yang bersifat alamiah atau kodrati. Untuk mempermudah identifikasi dan memahami perbedaan gender (dalam konstruksi sosial budaya) dan jenis kelamin (yang berbasis seks) dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

No	Gender	Jenis Kelamin
1	Dibentuk Sosial	Biologis dan Natural
2	Mempunyai fungsi publik	Mempunyai fungsi personal
3	Tidak berlaku universal	Bersifat Universal
4	Bentuknya berbeda dalam setiap perkembangan masyarakat	Sama dalam setiap perkembangan masyarakat

Sumber: Outline Sekolah Feminis Perempuan Mahardika, 2010.

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas jelaslah bahwa konsep gender dan jenis kelamin memiliki pemaknaan yang berbeda. Konsep gender dipergunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati yang merupakan bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Masyarakat kadang lupa bahwa hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

2.3.1 Status dan Peran Ibu Rumah Tangga dalam Keluarga

Status adalah jenjang atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau dari satu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran diartikan sebagai suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi atau tugas seseorang. Artinya tindakan status dan peran merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga ketika orang telah berperan sesuai dengan statusnya maka hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Status menunjuk pada siapa orangnya, sedangkan peran menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang itu.

Pernyataan Corner yang di kutip Mandayati (2012) hampir di sebagian besar negara menunjukkan bahwa kaum perempuan mempunyai status yang lebih rendah dan kesempatan yang lebih sedikit dari pada laki-laki di hampir semua aspek ekonomi maupun dalam kegiatan sosial. Bahkan sebagian besar penulis feminis

menegaskan bahwa secara umum diseluruh dunia kedudukan pria lebih tinggi dari perempuan. Ihromi (2004) memaparkan alasan proposisi bahwa subordinasi perempuan terhadap laki-laki adalah gejala universal, penyebabnya bukanlah karena sifat biologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki, akan tetapi karena faktor sosial kebudayaan. Artinya adalah kedudukan lebih rendah itu merupakan nilai-nilai yang di tentukan dalam sistem budaya. Status dan peran baik perempuan maupun laki-laki tidak dapat direkayasa melainkan terbentuk karena proses dinamika sosial kemasyarakatan.

Kedudukan maupun status perempuan relatif lebih rendah dari pada kaum laki-laki, pengalaman dibanyak tempat menunjukkan bahwa kaum perempuan memegang peranan penting dalam menjaga maupun mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Sebelum melangkah lebih lanjut, bagaimana sebenarnya konsep mengenai status perempuan itu sendiri. Pada dasarnya status perempuan berdasarkan konsep dapat di jabarkan ke dalam dua tingkat yaitu pada tingkat mikro adalah status perempuan dalam rumah tangga dan tingkat makro adalah status perempuan di masyarakat. Lebih jauh, indikator status perempuan relatif terhadap laki-laki dalam hal memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun produksi, termasuk juga wewenang untuk membuat keputusan mengenai ekonomi rumah tangga.

Suatu indikator yang dapat tindakan konvensional dalam menunjukkan status perempuan adalah pendidikan dan pekerjaan. Akses perempuan terhadap sumber daya sosial dapat diukur dari keterlibatan perempuan atau partisipasinya dalam bidang pendidikan sementara akses perempuan terhadap sumber daya materi diindikasikan dengan kegiatannya dalam bidang pekerjaan maupun ekonomi. Bagi masyarakat Indonesia fenomena perempuan bekerja di luar rumah oleh banyak pihak dianggap sebagai sesuatu yang relatif baru. Kendati dewasa ini fenomena semacam itu berubah menjadi sesuatu yang biasa, namun peran perempuan tidak dinilai cukup sukses bila keberhasilan membangun karir tidak dibarengi kesuksesan mengelola rumah tangga. Nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia dewasa ini berbaur antara

nilai-nilai tradisional dan modern. Peran pekerja di keluarga bagi laki-laki dan perempuan sedikit berbeda, laki-laki biasanya berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perempuan lebih ke peran keluarga.

Saat ini telah terjadi pergeseran peran dalam keluarga, banyak perempuan dalam keluarga berperan ganda, peran ganda perempuan yang ideal menuntut tugas seorang ibu rumah tangga (orang tua) sekaligus perempuan (wanita) karir. Keseimbangan dalam bentuk peran ganda ini harus diakui merupakan kendala utama bagi perempuan yang bekerja. Banyak alasan perempuan bekerja, selain karena tuntutan akan kebutuhan kehidupan juga karena peningkatan taraf pendidikan kaum perempuan. Peranan ibu rumah tangga dalam keluarga memegang peranan sangat penting. Tuntutan kemandirian ekonomi dalam keluarga mendorong ibu rumah tangga untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

2.3.2 Ibu Rumah Tangga dalam Konsep Kemandirian Ekonomi

Perempuan perlu kemandirian ekonomi guna hindari kekerasan, kemandirian secara ekonomi dibutuhkan agar perempuan tidak terus tergantung pada laki-laki baik dalam status orang tua tunggal maupun menjadi istri siri (Elvina; 2013). Pembagian peran di rumah tangga pada umumnya menempatkan laki-laki berada di wilayah publik (mencari nafkah), sementara perempuan berada di wilayah domestik (mengelola rumah tangga dan mengurus anak). Situasi ini merupakan konstruksi sosial yang telah berjalan konstan dan jarang dipertanyakan atau digugat oleh banyak orang. Budaya keluarga yang berlaku umum di negara Indonesia menempatkan seorang laki-laki sebagai penanggungjawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu seorang perempuan dalam keluarga selain bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga dan mengurus anak sebagian perempuan juga mempunyai tugas ganda.

Sulaksono (2012) mengemukakan bahwa disadari atau tidak, pembagian peran tersebut dapat melahirkan ketidakseimbangan status ekonomi, sehingga membentuk kecenderungan laki-laki sebagai pemberi dan perempuan sebagai penerima. Lebih jauh, ketidakseimbangan pembagian peran ini kadang dapat menjadi pemicu lahirnya perselisihan yang tak jarang berakhir pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tidak menutup kemungkinan diakibatkan tuntutan-tuntutan ekonomi istri terhadap suami seringkali mengarah pada situasi pertengkaran dan kekerasan. Konstruksi pembagian peran dalam rumah tangga ini secara legal diikat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 (ayat 3), yaitu “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Penempatan posisi tersebut sebenarnya dapat menjadi justifikasi pembatasan peran perempuan, baik secara struktural maupun kultural di masyarakat.

Peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat semakin lama semakin meningkat diberbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan juga politik. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam setiap bidang sehingga semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Terkait dengan peran perempuan dalam perekonomian informal lapangan pekerjaan juga banyak tersedia bagi perempuan. Perempuan yang dimasa lajangnya sudah bekerja nampaknya akan terus bekerja meskipun sudah menikah Sihotang (2011). Mereka sebagai ibu rumah tangga terus bekerja dengan berbagai motivasi dan alasan seperti kebutuhan aktualisasi diri dan perlunya membantu ekonomi rumah tangga.

Sebagian perempuan menyatakan persamaan hak sebagai alasan mengapa mereka bekerja. Kerangka emansipasi perempuan telah dijadikan sebagian istri bekerja menganggap bahwa peranan mereka dalam pembangunan bangsa dan negara tidaklah optimal kalau hanya sebagai ibu rumah. Secara umum alasan perempuan bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Pentingnya arti pekerjaan sebagai

sumber penghasilan bagi keluarga membuat istri bekerja memberikan persepsi yang positif terhadap pekerjaannya. Oleh karenanya, istri bekerja cenderung memahami liku-liku pekerjaannya.

2.3.3 Faktor Pendorong Ibu Rumah Tangga untuk Bekerja

Bekerja merupakan aktivitas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Motivasi merupakan proses pemberian dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Adanya motivasi kerja disertai dengan tersedianya kesempatan kerja di sektor informal selanjutnya mendorong seseorang untuk menentukan keputusan kerja yang merupakan suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bekerja. Pada umumnya motivasi kerja kebanyakan tenaga kerja perempuan adalah membantu menghidupi keluarga. Akan tetapi, motivasi itu juga mempunyai makna khusus karena memungkinkan memiliki otonomi keuangan, agar tidak selalu bergantung pada pendapatan suami.

Peranan ibu rumah tangga dalam keluarga membawa perubahan pada alokasi pendapatan keluarga, di mana adanya peran ganda perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di sektor formal maupun di sektor informal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Syahrudin (dalam Mandayati, 2012;43) mengatakan bahwa keputusan seorang ibu untuk masuk tenaga kerja atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memberikan untuk mengambil keputusan secara bebas, faktor-faktor tersebut antara lain tersedianya kesempatan kerja, jumlah anak yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, usia serta keadaan sosial budaya. Keterlibatan perempuan dalam meningkatkan pendapatan, baik di sektor formal maupun di sektor informal hendaknya, tidak mengurangi tugas-tugas kaum perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dalam melakukan peran gandanya di keluarga

menghadapi tugas yang tidak ringan. Oleh karena itu peran ganda tersebut tetap dipertahankan agar dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan itu sendiri serta keluarganya.

Kedudukan ibu rumah tangga dalam rumah tangga memiliki peran ganda. Selain berperan sebagai istri, perempuan juga berperan sebagai ibu rumah tangga, artinya perempuan yang mengatur berbagai macam urusan rumah tangga. Motivasi ibu rumah tangga untuk bekerja disebabkan beberapa faktor diantaranya; suami tidak bekerja, pendapatan rumah tangga rendah sedangkan jumlah tanggungan keluarga cukup tinggi, mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri dan ingin mencari pengalaman (Dewi, 2012). Keluarga dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya bergantung pada penghasilan suami, mereka harus berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Disamping alasan untuk menambah penghasilan suami, ibu rumah tangga juga tertarik bekerja di sektor informal sebagai pedagang karena ingin mempunyai penghasilan sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suami. Dengan masuk ke sektor informal sebagai pedagang, maka seorang ibu rumah tangga dapat mengatur waktunya untuk berdagang dan juga untuk keluarganya.

Pendapat yang sama dikemukakan Artini dan Handayani (2009:10) bahwa umumnya perempuan termotivasi bekerja untuk membantu menghidupi keluarga dan umumnya bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan upah dan atau imbalan (Undang-Undang Ketenagakerjaan, 2003). Selain itu, Pudjianto dan Mukhlis (2006) mengemukakan alasan lain bahwa faktor yang dapat mendorong perempuan bekerja di sektor informal adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, salah satu kegiatan usaha sektor informal yang banyak dilakukan adalah usaha dagang. Kesulitan para perempuan untuk masuk ke sektor formal diakibatkan kebanyakan mereka adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sangat sulit untuk dapat diterima di sektor formal.

Pandangan yang sama dikemukakan Mandayati (2012:43) bahwa beberapa motivasi ibu rumah tangga bekerja pada sektor informal adalah karena suami tidak bekerja, pendapatan rumah tangga kurang, mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri dan ingin mencari pengalaman. Beberapa faktor yang memungkinkan perempuan-perempuan Indonesia bergerak leluasa di bidang usaha perdagangan antara lain faktor sosial terdiri atas sub faktor-faktor lingkungan dan faktor adat-istiadat, faktor psikologis serta faktor ekonomis. Faktor lingkungan karena masyarakat di lingkungannya sebagian besar bekerja sebagai pedagang sehingga mendorong seseorang untuk mengikuti usaha mereka. Di samping itu lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, lembaga pendidikan dan fasilitas umum seperti rumah sakit dan terminal juga mendorong masyarakat untuk menekuni usaha ini. faktor adat istiadat sangat dipengaruhi oleh tradisi dikeluarga seseorang untuk bekerja sebagai pedagang, jika dalam keluarga seseorang tersebut memang mempunyai jiwa berdagang kemungkinan besar anggota keluarga yang lain juga ingin berdagang. Faktor ekonomi tentunya menjadi faktor utama karena hasil dari usaha berdagang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

2.4 Konsepsi Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance Institutions*)

Keberadaan *microfinance* merupakan fenomena yang kompleks berdimensi ekonomi dan sosio kultural. Karena itu, *microofinance* banyak dikaitkan dari sudut kelembagaan yang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola kebijakan (Syaifullah, 2013). Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Khususnya aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank (UU No. 1 Tahun 2013). Lembaga keuangan bukan bank yang melakukan

kegiatan usaha bidang keuangan telah banyak berkembang Indonesia. Keberadaannya telah banyak membantu kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Perkembangan lembaga ini dalam masyarakat mampu menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Definisi konsepsi Lembaga Keuangan Mikro memiliki ketidakseragaman pemikiran pakar, meski pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial (Arsyad, 2008). Dalam artikel pada *microfinance handbook* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Ledgerwood (dalam Arsyad, 2008) menyatakan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan biasanya berupa simpanan dan kredit kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, penjual jasa, (penata rambut, penarik becak).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam tiga jenis yakni; lembaga keuangan formal, lembaga keuangan semi formal dan lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan dikatakan formal jika lembaga tersebut secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral. Lembaga keuangan semi-formal adalah lembaga keuangan yang tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen pemerintah maupun bank sentral. LKM beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah. LKM bukan sekedar menyediakan uang (*cash*) untuk keperluan transaksi, tetapi kadang-kadang menyediakan pinjaman dalam bentuk barang (*in-kind*) (Yustika, 2008). Karakter yang fleksibel, membuat LKM memiliki daya tahan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan, karena LKM ini bersifat sangat fleksibel dalam artian memiliki hubungan personal antara kreditor dan debitor yang hampir tidak membutuhkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Tidak ada kontrak maupun persyaratan sejumlah agunan seperti pada lembaga keuangan formal.

Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam yang ada dalam masyarakat pada skala mikro mempunyai bentuk yang bermacam-macam yang dikelompokkan menjadi dua (Mashudi, 2003) yaitu; 1) LKM bank terdiri dari BRI Unit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Danamon simpan pinjam yang saat ini mulai masuk ke masyarakat pedesaan, 2) LKM bukan bank yang terdiri dari; lembaga keuangan formal diantaranya adalah koperasi simpan pinjam dan lembaga non formal antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) , kelompok swadaya masyarakat (unit ekonomi desa). Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut kemudian berkembang seiring dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang baru seperti; lembaga keuangan mikro masyarakat koperasi wanita dan lain sebagainya. Dibentuknya lembaga-lembaga keuangan mikro masyarakat tersebut seiring dengan tujuan dan upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin khususnya perempuan.

Berdasarkan defenisi di atas maka yang termasuk ke dalam lembaga keuangan mikro adalah bank (dari semua jenis), BKD, BPR, KUD, koperasi, asuransi, pengadaian dan lain-lainnya. Lembaga keuangan Mikro adalah lembaga ekonomi

yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah, kegiatannya adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan atau mengeluarkan kredit kepada masyarakat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan jasa. Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya Bank Umum

Ciri penting yang membedakan antara lembaga keuangan formal dan semi formal adalah pada tipe kesepakatan yang dibuat dalam bentuk sistem kontrak (*contract system*) antara masyarakat peminjam (debitur) dan lembaga keuangan (kreditur). Kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, misalnya persyaratan agunan (*collateral*), model pembayaran (*repayment*), dan sanksi (*punishment*) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat. Sebaliknya, lembaga keuangan informal bersifat sangat fleksibel, hubungan antara kreditor dan debitor seringkali personal, dan hampir tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Mekanisme pemberian kredit sama sekali tidak menggunakan sistem kontrak, karena tidak ada persyaratan agunan maupun sanksi. Karakteristik lembaga keuangan informal pada umumnya lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Pendapat Kasryno (1984:33) menjelaskan bahwa, kelembagaan kredit informal sangat berkembang dalam masyarakat perdesaan akibat belum terjangkaunya pelayanan kredit dari lembaga keuangan formal (bank) bagi sebagian sebagian besar masyarakat perdesaan dan golongan masyarakat menengah ke bawah, terutama petani kecil, buruh tani dan pedagang kecil di perkotaan yang selalu memerlukan kredit dengan pelayanan yang terjangkau oleh mereka.

Lembaga Keuangan Mikro sebagai sebuah institusi sudah membuktikan dirinya sebagai institusi yang menopang kehidupan usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah umumnya. Bahkan pada situasi-situasi sulitpun LKM telah menjadi bagian dari strategi survive usaha-usaha mikro, kecil,

dan masyarakat berpenghasilan rendah. Studi-studi dampak krisis yang dilakukan jurnal Akatiga dan beberapa lembaga lain memperlihatkan bahwa pada masa puncak krisis, ketika keuangan formal tidak berperan, usaha-usaha mikro dan kecil masih dapat bertahan karena dukungan institusi keuangan mikro. Salah satunya ditunjukkan oleh data Primahendra (2001) yang memperlihatkan bahwa ada 78,60 persen industri rumah tangga dan 39,79 persen industri kecil memilih atau terpaksa mengakses kredit dari sumber lain selain bank dan koperasi.

Sebagai sebuah institusi, lembaga keuangan mikro memiliki ciri dan dinamika yang spesifik. Lembaga muncul, tumbuh, dan berkembang fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang membutuhkannya. Pengetahuan dan pemahaman LKM yang sangat baik terhadap kelompok/komunitas sasarannya menjadi salah satu faktor yang membuat mereka bisa bertahan sampai dengan saat ini. Faktor-faktor lain apa yang membuat institusi keuangan mikro bertahan dan faktor-faktor apa yang membuat institusi keuangan mikro tidak berkembang, menarik dan penting untuk dicermati. Pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat peran institusi keuangan mikro dalam aktivitas ekonomi mikro diharapkan bisa menjadi bahan untuk menjaga institusi keuangan mikro dari berbagai perhatian berupa kebijakan dan non-kebijakan yang akan menghambat atau bahkan mematikan institusi keuangan mikro itu sendiri.

Berbagai literatur dan hasil penelitian memperlihatkan bahwa institusi keuangan mikro di Indonesia sudah ada sejak sebelum negara ini berdiri. Karya tulis ini mencoba mengidentifikasi dari berbagai hasil penelitian, makalah maupun tulisan di media massa untuk menggali beberapa hal, yaitu faktor kemunculan institusi keuangan mikro, faktor-faktor yang memengaruhi format/bentuk dan dinamika institusi keuangan mikro, faktor-faktor pendukung dan penghambat berkembangnya institusi keuangan mikro, dan strategi-strategi apa yang dilakukan oleh institusi keuangan mikro untuk bisa tetap bertahan sampai saat ini. Upaya tersebut diawali dengan mencoba mendefinisikan institusi atau LKM itu sendiri, kemudian mencoba membuat pembabakan perkembangan institusi keuangan mikro pada masa sebelum

kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan. Pembabakan ini dibuat terutama untuk mencoba menangkap corak perubahan yang terjadi pada institusi keuangan mikro serta untuk memudahkan proses pencarian dan analisis informasi. Terakhir, adalah kesimpulan seluruh uraian untuk melihat benang merah dan mencari pelajaran-pelajaran penting dari masing-masing pembabakan sebagai bahan pelajaran untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan institusi keuangan mikro saat ini dan masa depan. Informasi dan data yang berhasil ditangkap untuk tulisan ini sebagian besar mencatat fenomena di wilayah Jawa sehingga sangat mungkin tulisan singkat sangat bias Jawa.

Pemahaman terkait konteks aktivitas keuangan mikro, institusi dipahami sebagai norma, sistem, dan tingkah laku yang ada pada pelaku-pelaku yang memiliki kepentingan dengan aktivitas keuangan mikro. Pelaku-pelaku tersebut mempertahankan norma dan aturan di dalamnya untuk kepentingan keberlanjutan institusi, termasuk kepentingannya. Pengertian institusi ini yang lebih dominan mengawali kemunculan institusi keuangan mikro di Indonesia, khususnya pada masa sebelum kemerdekaan. Saat itu, hampir tidak ada lembaga keuangan formal yang dikenal masyarakat. Keberadaan institusi keuangan pada saat itu dikenal masyarakat dan keberlanjutannya juga dipelihara masyarakat. Dengan kata lain institusi keuangan mikro dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat tanpa intervensi pihak luar. Kebanyakan institusi keuangan mikro dibangun dalam konteks pemenuhan kebutuhan-kebutuhan cepat, mendesak, dan *income generating* untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasarannya.

Institusi keuangan mikro diyakini memiliki dimensi pemerataan yang tumbuh dari bawah dan mengandalkan kekuatan sendiri. Pada sisi tertentu institusi keuangan mikro dipandang juga sebagai bagian dari basis penguatan masyarakat di tingkat lokal yang sering kali tidak dapat terlihat potensinya oleh kekuatan sistem ekonomi formal yang lebih besar (makro). Penguatan yang dilakukan institusi keuangan mikro di tingkat lokal juga seringkali dicirikan dengan proses tatap muka cukup intensif-saling mengenal, saling percaya, kepentingan atau kebutuhan yang relatif sama yang

memunculkan hubungan timbal balik di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hubungan tersebut dipercaya dapat menjadi kemampuan potensial untuk melakukan tindakan bersama (kolektif) demi kepentingan bersama (kolektif).

Pada perkembangan selanjutnya sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat, institusi keuangan mengalami pergeseran peranan dan format atau bentuk. Meskipun di tingkat fakta sulit membedakan secara tegas pergeseran atau perubahan format yang terjadi. Pada akhirnya penggunaan istilah institusi dan lembaga seringkali bergantian. Institusi keuangan mikro berkembang dengan berbagai variasi dari institusi keuangan berkembang ke arah format yang lebih formal dalam bentuk lembaga /organisasi keuangan, di dalamnya berkembang proses pengorganisasian dari nilai-nilai bersama yang kemudian dibakukan sebagai aturan bersama. Konteks ini menjelaskan bahwa kelompok sasaran atau anggota baru mengikuti aturan main cenderung lebih formal yang ada tanpa memiliki peluang untuk memengaruhi aturan main.

Berdasarkan hasil penelitian yang dirangkum dalam buku Ekonomi Rakyat, variasi lembaga keuangan mikro yang muncul dari format informal sampai format yang sangat formal di antaranya adalah *revolving fund*, Karya Usaha Mandiri (KUM), koperasi, *Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT), Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan lain-lain. Tercatat bahwa dorongan perubahan format LKM dari informal menjadi formal dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya kebijakan organisasi/lembaga untuk menyesuaikan diri dengan luasan cakupan/jangkauan kelompok sasaran yang semakin luas. Sementara faktor eksternal berupa dorongan dari peraturan pemerintah tertentu yang mengharuskan perubahan format. Perubahan format ini kemudian menciptakan dinamika tersendiri pada keberadaan LKM selanjutnya.

Lembaga Keuangan Mikro atau *microbanking* adalah jenis usaha atau kegiatan penyediaan produk-produk perbankan konvensional dalam skala kecil yang ditujukan bagi masyarakat strata bawah yang berpenghasilan rendah dan usahawan mikro. Tujuan microfinance itu pada dasarnya memiliki dua pandangan, yaitu

kepentingan ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat penghasilan rendah dan tujuan yang lebih luas untuk pembangunan ekonomi (Syaifullah; 2013). *Microbanking* bukanlah sesuatu yang baru, tetapi yang membedakan adalah adanya mekanisme, pendekatan dan paradigma yang sangat relevan dengan kebijakan pembangunan. Negara anggota APEC dalam pertemuan di Mexico tahun 2002 menyepakati akan besarnya peranan *microbanking* dalam pembangunan. Peranan dan relevansi *microbanking* dalam kebijakan pembangunan adalah :

- a. mengurangi/mengentaskan kemiskinan dan penyediaan jaring pengaman sosial (*poverty reduction and social safety net*).
- b. kontribusi dalam pengembangan pengusaha kecil dan sektor informal (*contributing to the development of micro and small enterprise*).
- c. kontribusi dalam pembangunan pedesaan (*contributing to rural development*).
- d. mengutamakan bantuan terhadap kaum perempuan (*gender considerations*).
- e. pemberdayaan Komunitas (*community empowerment*).

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (*microfinance institutions*) di banyak negara, utamanya di negara-negara berkembang memiliki peran dan dampak begitu besar dalam mendorong perubahan ekonomi masyarakat. Hal ini didasari oleh kemampuan *microfinance* yang mereproduksi kemanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan terjadinya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi.

2.5 Tinjauan Empiris Penelitian Sebelumnya

Berbagai hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai keberadaan pekerja perempuan di sektor informal terkait dengan kemampuan mengakses kebutuhan permodalan dari lembaga keuangan mikro (LKM) antara lain;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adhelia (tanpa tahun) yang berjudul analisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan tenaga kerja perempuan di sektor informal di kota makassar, Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa

variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah modal kerja dan tingkat pendidikan, sedangkan variabel yang berpengaruh positif dan tidak signifikan adalah jam kerja dan jumlah tanggungan usia balita, dan yang memiliki pengaruh yang negative dan tidak signifikan adalah variabel usia tenaga kerja.

2. Beberapa riset tentang pengembangan dan pemberdayaan LKM dilakukan oleh Wijono (2005) dan Wardoyo & Prabowo (2006). Penelitian Wijono (2005) bertujuan menguraikan peranan LKM dalam menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan lembaga keuangan formal. Namun hal menarik untuk dikaji sebab perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan UKM sehingga dapat dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua hal yang layak direkomendasikan. Pertama, memperkuat aspek kelembagaan LKM sebagaimana yang selama ini telah berjalan pada lembaga keuangan formal, yaitu mempercepat pengesahan RUU tentang LKM.
3. Studi lain dilakukan oleh Wardoyo dan Prabowo (2006), yang menganalisis kinerja Lembaga Keuangan Mikro dalam upaya untuk penguatan UMKM di wilayah Jabodetabek yang meliputi beberapa variabel, seperti: pencapaian hasil target grup, permodalan, *capacity building*, dan permasalahannya. Dengan analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan hasil yang kurang maksimal bagi perkembangan UMKM. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang relevan dengan laporan keuangan yang ada pada LKM. Rasio keuangan ini berdasarkan usulan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) pada tahun 2000, yang terdiri dari rasio-rasio kelestarian keuangan pilihan dan indikator-indikator jangkauan. Selain itu, peneliti juga mencoba menggunakan data primer.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Sukarno dan Damayanti (2012) dengan judul Bank Gakin: Telaah Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Di Jember. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Gakin sebagai suatu lembaga pembiayaan sudah sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan, nilai yang diperoleh selalu meningkat atau mengalami perubahan positif dari periode ke periode. Nilai rasio Bank Gakin juga telah mampu memenuhi standar kinerja lembaga keuangan mikro yang dikeluarkan oleh IFAD. Bank Gakin sebagai lembaga pembiayaan mikro telah mampu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

Berdasarkan perkembangan jumlah kantor cabang, jumlah peminjam, dan jumlah total pinjaman mulai Januari-Desember 2007 selalu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini sebagai akibat dari bunga yang ditawarkan Bank Gakin sangat ringan dan tidak memberatkan masyarakat miskin. Selain itu, syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman juga sangat mudah serta pelayanannya yang memuaskan. Bank Gakin telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta keberadaan Bank Gakin sangat diperlukan bagi masyarakat. Bank Gakin juga mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Sebagian besar anggota Bank Gakin merasa sangat terbantu dengan adanya Bank Gakin, karena sejak adanya Bank Gakin memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pinjaman modal untuk usaha. Kebutuhan pembiayaan masyarakat miskin terhadap modal usaha dapat terpenuhi.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang sektor informal dan lembaga keuangan mikro disajikan dalam penelitian ini dengan tujuan dapat mendukung penelitian ini. Untuk itu agar lebih mudah dalam melihat setiap hal yang menjadi objek kajian dan penelitian dalam penelitian tersebut, maka akan dibuat tabel yang memuat nama peneliti, objek kajian (judul penelitian) dan hasil penelitian (*resume*) seperti pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4. Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Hasil
1	Sukarno dan Damayanti (2012)	Bank Gakin: Telaah Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Di Jember	Keberadaan Bank Gakin (LKMM) sangat membantu masyarakat miskin. Dengan syarat dan prosedur pinjaman yang mudah masyarakat dapat memperoleh modal untuk usaha sehingga kehidupannya lebih baik.
2	Wardoyo & Prabowo (2006)	Kinerja LKM dalam upaya untuk penguatan UMKM di wilayah Jabodetabek	Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mendorong peran LKM belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang maksimal bagi perkembangan UMKM
3	Kompip Solo. and Lab. UCYD. FI SIP UNS Solo. (2004)	Kajian Implikasi Otonomi Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal di Kota Surakarta	Melalui otonomi daerah telah terbentuk kelembagaan baru terkait dengan pelaku sektor informal, meskipun pola kelembagaan yang terbentuk belum sepenuhnya melibatkan pelaku sektor informal yang ada.
4	Firdausy, C. M. (1995)	Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima	Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima baik secara internal maupun secara eksternal untuk mengakses modal/kredit yang disediakan pemerintah. Di pihak pemerintah belum ada kebijakan yang dapat memberdayakan pedagang kaki lima.
5	Rachbini, D. J. and A. Hamid (1994)	Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua	Berkembangnya sektor informal perkotaan tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya arus migrasi desa-kota sebagai akibat dari model pembangunan yang bias perkotaan. Bagi para migran sirkuler lebih mudah mencari pekerjaan di kota dan penghasilannya pun relatif lebih banyak
6	Wauran, Patrick C. (2012)	Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado	Permasalahan utama para pedagang sektor informal yang teridentifikasi adalah keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal untuk mendapatkan kredit usaha. Pemenuhan pembiayaan dilakukan dengan meman-

			faatkan sumber pembiayaan informal, seperti "koperasi" atau "bank keliling".
7	Oktavianti, Ika (2012)	Peranan Perempuan Penjual Jamu Gendong dalam Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga	kondisi sosial dan kondisi ekonomi keluarga yang rendah mendorong perempuan bekerja di sektor publik. Motivasi perempuan bekerja memilih pekerjaan menjual jamu gendong adalah modal sedikit, tidak membutuhkan pendidikan/ketrampilan tinggi, dan ajakan teman atau saudara yang telah bekerja.
8	Martini Dewi Putu (2012)	Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga	Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh penghasilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh umur, waktu bekerja, pendidikan dan jumlah anak.
9	Baskara I Gde Kajeng (2013)	Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia	beragamnya jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berdasarkan heterogenitas masyarakat. Peraturan dan legalitas amat dibutuhkan untuk memperkuat peran lembaga ini.
10	Firdaus dan Titik Hartini (2001)	Aspek Pemberdayaan Perempuan Dibalik Lembaga Kredit Mikro	Pemberdayaan perempuan di Indonesia dapat melalui Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK). Hasil identifikasi sementara ASPPUK terhadap dampingan LSM anggota yang tersebar di 22 propinsi, terungkap bahwa kendala paling utama dihadapi oleh usaha kecil-mikro adalah permodalan.
11	Okten, C dan Osili, O. U (2004)	Jaringan Sosial dan Akses Kredit di Indonesia	Jaringan keluarga dan masyarakat memengaruhi akses individu ke lembaga kredit dengan menggunakan data baru survei kehidupan keluarga Indonesia. Perempuan memiliki kemampuan partisipasi dalam jaringan komunitas lebih dari laki-laki
12	Anderson, C. L, Laura, Nugent (2002)	Kredit Mikro, Modal Sosial, dan Sumber Daya Miliki Bersama	Kredit mikro, modal sosial, dan sumber daya miliki bersama dalam komunitas pekerja sektor informal mengemuka melalui perubahan produksi rumah tangga dan konsumsi, fokus pada wanita, dan modal social

2.6 Kerangka Konseptual

Kondisi perempuan yang ter subordinatif dalam mengakses kehidupan ekonomi menjadikan perempuan sebagai kelompok yang rentan. Hal itu terlihat jelas pada perempuan yang bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, penanganan perempuan yang bekerja di sektor informal akan menjadikan suatu potensi ekonomi yang tinggi bagi kesejahteraan keluarga. Usaha-usaha sektor informal itu tidak bisa lepas dari peran perempuan dalam sektor domestik. Daya tahan terhadap usaha disebabkan oleh tingkat kemandirian perempuan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dengan kebijakan yang berkelanjutan dan memberikan akses lebih besar terhadap sumber permodalan formal (Adi, 2003).

Jika merujuk pada kenyataan sehari-hari di masyarakat, perempuan masih dibebankan dua peran; produksi dan reproduksi. Keadaan seperti ini kemudian diperparah juga dengan pemahaman keagamaan yang semakin membakukan wilayah perempuan sebagai orang yang bertanggung-jawab untuk urusan domestik. Ketika perempuan masuk dalam wilayah kerja, secara umum biasanya terdorong untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomi keluarga Asyiek (dalam Nilakusmawati; tanpa tahun). Saat penghasilan suami belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang terus meningkat, dan tidak seimbang dengan pendapatan riil yang tidak ikut meningkat. Hal ini lebih banyak terjadi pada lapisan masyarakat bawah. Bisa dilihat bahwa kontribusi perempuan terhadap penghasilan keluarga dalam masyarakat lapisan bawah sangat tinggi.

Hal ini diperkuat oleh pandangan Ken Suratiyah *et.al*, (1996) dalam Ware (1981) dalam yang mengatakan bahwa ada dua alasan pokok yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. *Pertama*, adalah keharusan, sebagai refleksi dari kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga adalah sesuatu yang penting. *Kedua*, “memilih” untuk bekerja, sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat menengah ke atas. Bekerja bukan semata-mata diorientasikan untuk mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tapi merupakan salah satu bentuk aktualisasi

diri, mencari afiliasi diri dan wadah untuk sosialisasi. Gambaran di atas paling tidak telah menunjukkan bahwa sesungguhnya masuknya perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan kenyataan bahwa perempuan adalah sumber daya yang produktif pula.

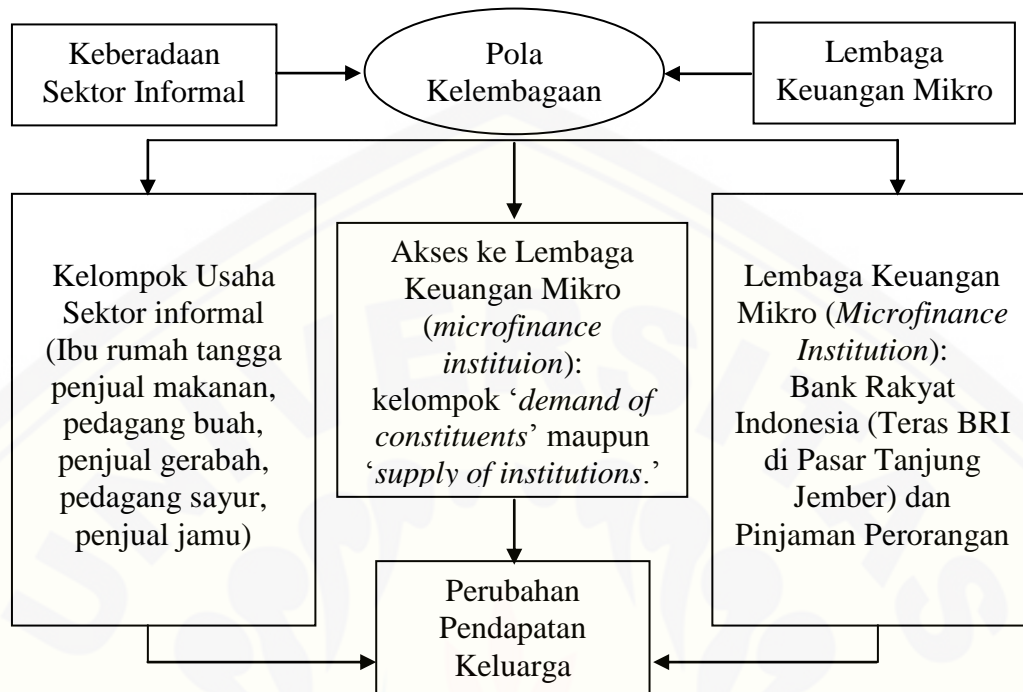
Berkaitan dengan masalah ibu rumah tangga yang berstatus sebagai pekerja yaitu dengan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, sesungguhnya sudah lazim ditemui di berbagai kelompok masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa ibu rumah tangga dan kerja publik sebenarnya bukan hal baru bagi ibu rumah tangga Indonesia, terutama mereka yang berada pada strata menengah ke bawah. Di pedesaan, perempuan pada strata ini mendominasi sektor pertanian. Mereka pada umumnya bekerja sebagai buruh tani. Sementara di perkotaan sektor usaha perdagangan dan industri tertentu didominasi oleh perempuan. Di luar konteks desa-kota, sektor perdagangan informal juga banyak melibatkan ibu rumah tangga.

Keterlibatan ibu rumah tangga di sektor mana pun selalu tampak dicirikan oleh skala bawah dari pekerjaan perempuan. Perempuan di sektor pertanian pedesaan, mayoritas berada di tingkat buruh tani. Perempuan di sektor industri perkotaan terutama terlibat sebagai buruh di industri tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik. Di sektor perdagangan, pada umumnya ibu rumah tangga terlibat dalam perdagangan usaha kecil seperti berdagang sayur mayur di pasar tradisional, usaha warung, adalah jenis-jenis pekerjaan sektor informal lainnya yang lazim ditekuni perempuan. Bagi ibu rumah tangga dari golongan ekonomi menengah ke bawah, dalam situasi krisis ekonomi, banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama keluarga atau bersama-sama suami memberikan kontribusi finansial hingga 50 persen dari total penghasilan keluarga, atau bahkan lebih.

Berdasarkan batasan teoriti serta rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat tiga domain yaitu keberadaan sektor informal, pola kelembagaan dan peran lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*). *Pertama* penelitian ini menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan tentang kaum miskin kota yang

mendorong mereka terjun ke sektor informal, yaitu teori marjinalitas dan teori ketergantungan Lutfi (dalam Bappenas, 2009). Teori marjinalitas yang menjelaskan tentang penduduk yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota di salah satu sektor perekonomian. Teori ketergantungan melihat masyarakat yang tidak dapat ambil bagian dalam sektor formal. Satu-satunya kemungkinan adalah bekerja di sektor informal, seperti penjaja makanan, pedagang kecil, pemulung sampah yang tidak membutuhkan keterampilan khusus.

Domain *kedua* menjelaskan tentang pola kelembagaan dalam melihat keberadaan para ibu rumah tangga pekerja sektor informal. Hal ini didasarkan bahwa ibu rumah tangga pekerja sektor informal sangat mendominasi dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Fenomena ini mungkin bisa dijelaskan dengan dasar alasan ekonomi dimana salah satu alasan mereka terjun di sektor informal adalah untuk menambah penghasilan keluarga yang tidak bisa dipenuhi oleh suami mereka. Untuk itu sangat menarik untuk mengetahui kemampuan mereka dalam mengakses keberadaan lembaga penunjang permodalan usaha mereka. *Ketiga* adalah peran Lembaga Keuangan Mikro (*microfinance institution*) dalam menyediakan jasa penyedia permodalan untuk mereka yang bekerja di sektor informal. Peluang sektor informal untuk tetap bertahan atau berkembang, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama adalah sisi permintaan modal yang didasarkan pada kebutuhan permodalan bagi pekerja sektor informal, sedangkan sisi penawaran jasa keuangan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan batasan teoriti serta rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Ketiga domain tersebut kemudian akan dianalisis melalui kerangka kelembagaan. Pemahaman terhadap kerangka konseptual ini dapat diketahui bahwa perubahan kelembagaan merupakan hal yang niscaya, namun memiliki derajat kerumitan yang sangat kompleks Yustika (dalam Wardhono, tanpa tahun). Untuk itu secara spesifik tulisan ini diarahkan untuk mengungkapkan pola perubahan kelembagaan ekonomi rumah tangga yang terjadi dengan bertambahnya dinamika perekonomian perkotaan yang melibatkan pekerja perempuan di sektor informal. Disamping itu arah tulisan ini juga hendak mengungkap pola perubahan kelembagaan dengan melihat aktor-aktor ekonomi perdesaan sebagai subyek, entah mereka sebagai kelompok 'demand of constituents' maupun 'supply of institutions.'

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari: (1) pendekatan penelitian ; (2) fokus penelitian; (3) jenis dan sumber data; (4) teknik pengumpulan data; (5) pemilihan informan; (6) instrumen penelitian; (7) teknik analisis data. Setiap sub bab akan dijelaskan sebagai berikut :

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Terkait dengan bab pendahuluan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini berusaha menemukan jawaban empiris mengenai pola kelembagaan keberadaan perempuan pekerja sektor informal dalam mengakses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) di kabupaten Jember, maka agar peneliti dapat secara jelas dan rinci serta dapat mendapatkan data yang mendalam dari fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nawawi dan Martina (1994) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat keilmiahannya. Suatu penelitian kualitatif dapat dipahami bahwa peneliti merupakan instrumen utama bagi pengumpulan dan analisis data yang dijadikan bahan untuk menyusun deskripsi yang mengutamakan proses dari pada produk. Proses dalam penelitian kualitatif merupakan proses induktif yang membangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari hal-hal yang detail di lapangan. Untuk lebih menekankan pada penemuan makna maka seorang peneliti harus benar-benar terjun ke lokasi penelitian.

Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai pola kelembagaan ekonomi rumah tangga khususnya ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam mengakses modal dari lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*). Danim (2002:54), penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar

belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Rancangan studi kasus ini digunakan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian, yaitu data yang dikumpulkan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi dalam pola kelembagaan ekonomi rumah tangga khususnya ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam mengakses modal dari lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*). Untuk itu, peneliti akan lebih cermat memberikan pertanyaan yang terkonsentrasi pada fokus masalah yang diteliti, bersikap netral dan obyektif serta mampu mendeskripsikan rancang bangun studi kasus dengan baik.

3.2 Fokus, Lokasi dan Waktu Penelitian

Fokus penelitian ini mengungkap pola kelembagaan ekonomi rumah tangga khususnya ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam mengakses modal dari lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) dengan mengadakan kajian secara mendalam terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam menentukan lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) dan besarnya kebutuhan pinjaman. Disamping itu juga yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) dalam memberikan dan menentukan besaran pinjaman kepada para ibu rumah tangga pekerja sektor informal. Dimamika berupa norma atau aturan, kedekatan personal dan nilai-nilai lain sesuai dengan pemaknaan kelembagaan yang dibangun oleh kedua pihak ini kemudian menjadi substansi dari penelitian ini.

Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah PasarTanjung yang berada di Kabupaten Jember sebagai pusat kegiatan ekonomi perdagangan khususnya ibu rumah tangga pedagang sektor informal. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini dimulai dari bulan Maret-Nopember 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2000:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi informan tentang pola kelembagaan keberadaan ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam mengakses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) di Pasar Tanjung. Setelah data terkumpul dipisahkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal, kata-kata atau ucapan lisan atau perilaku dari subjek (informan) secara langsung yang berkaitan dengan pola usaha sektor informal yang dijalani serta dinamika usaha mereka dalam mengakses kebutuhan modal dan keuangan dari lembaga keuangan mikro. Data sekunder bersumber dari dokumen tertulis, foto-foto atau catatan-catatan yang digunakan sebagai penunjang data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data adalah wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber data dan lokasi di mana informan menjalankan usahanya serta lembaga keuangan yang dituju. Adapun uraian secara singkat teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000:186), menyebutkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan secara tatap muka (bertemu langsung dengan yang diwawancarai). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh :

- a. rekonstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya,
- b. rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu,
- c. proyeksi keadaan tersebut diharapkan terjadi pada masa yang akan datang dan

verifikasi, pengecekan, dan pengembangan informasi yang didapat sebelumnya.

Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau pertanyaan-pertanyaan yang berurutan. Materi yang dikemukakan dalam wawancara terstruktur tersebut merupakan materi yang lengkap, terencana dan dirancang dengan baik melalui tahapan :

- a. menentukan siapa yang diwawancarai,
- b. mempersiapkan wawancara,
- c. pendahuluan,
- d. melakukan wawancara dan menjaga agar produktif, dan
- e. menghentikan wawancara.

Agar wawancara dapat berhasil dengan baik peneliti (pewawancara) mengikuti aturan-aturan dan kesopanan sebagaimana yang dianut oleh pihak yang diwawancarai, disamping itu pewawancara meninggalkan kesan baik dalam pelaksanaan wawancaranya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data tentang pola kelembagaan keberadaan perempuan pekerja sektor informal dalam mengakses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) di kabupaten Jember. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya disusun secara bertahap oleh peneliti supaya hasil wawancara lebih terarah dan terfokus, maka hasilnya dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara peneliti dengan informan.

2. Diskusi Kelompok Terarah /*Focus Group Discussion*

Kreuger dalam Moleong (2000) mendefinisikan kelompok fokus sebagai diskusi yang dirancang dengan baik untuk memperoleh persepsi dalam bidang perhatiannya pada lingkungan yang permisif dan yang tidak menekan-nekan. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Dalam

penelitian ini, FGD dilakukan untuk mendukung data hasil wawancara sebelumnya.

Bungin (2003:138) menjelaskan ada dua tahapan utama FGD, yaitu :

- a. Tahap Diskusi, dengan melibatkan berbagai anggota FGD yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan kompetensi formal serta kompetensi penguasaan masalah FGD.
- b. Tahap Analisis hasil FGD, pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap analisis mikro dan tahap analisis makro. Pada tahap analisis mikro, FGD memiliki langkah-langkah analisis sebagai berikut : *pertama*; melakukan *coding* terhadap sikap, pendapat peserta yang memiliki kesamaan, *kedua*; menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda. *ketiga*; menentukan persamaan istilah yang digunakan, *keempat*; melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta FGD berdasarkan alur diskusi, *kelima*; mencari hubungan di antara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap dan pendapat kelompok terhadap masalah yang didiskusikan (fokus diskusi).

Pada tahap analisis makro, peneliti tidak saja dapat menemukan hubungan antar masing-masing kategorisasi namun juga dapat mengabstraksikan hubungan-hubungan pada tingkat yang lebih substansial. Pihak yang terlibat dalam FGD adalah ibu rumah tangga pekerja sektor informal khususnya pedagang yang mewakili wilayah kota selanjutnya juga mereka yang berada di wilayah kota di pasar Tanjung.

3. Observasi

Disamping wawancara dan FGD, peneliti ini juga melakukan metode observasi. Nawawi dan Martini (1994) berpendapat bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Untuk melakukan observasi, peneliti dapat menempatkan diri sebagai non partisipan. Selain itu peneliti juga melakukan dengan terus terang (*overt*). Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi

terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

4. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berupa arsip surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik ini memberikan keuntungan dari penggunaan data dari bahan-bahan yang telah tersedia dan siap dipakai. Dokumentasi digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau selain rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, naskah pidato, editorial, catatan kasus, skrip, televisi, foto-foto, sejarah kesehatan dan catatan lain yang dianggap perlu.

Dokumentasi hendaknya mengandung unsur-unsur : objek yang dicatat, cara langkah pencatatan, aspek dan jenis yang dicatat, dan cara penulisan catatan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga perempuan pekerja sektor informal terkait akses *microfinance institution*. Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah, seperti yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000 : 161), yaitu (1) dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; (2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (3) sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks; (4) relatif murah dan mudah diperoleh; (5) tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi; (6) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3.5 Pemilihan Informan

Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti (Faisal, 1990). Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik

triangulasi yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Variasi informan digunakan dalam penelitian ini agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi bias. Informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para pedagang yang ada disekitar pasar Tanjung Kabupaten Jember. Melalui informan-informan ini diharapkan data akan terkumpul. Penetapan mereka sebagai informan didasarkan pada alasan bahwa mereka yang terlibat langsung dalam dinamika pola kelembagaan ekonomi ibu rumah tangga pekerja sektor informal khususnya pedagang.

3.6 Instrumen Penelitian

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsiran data serta menjadi pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang akurat dan mendalam. Untuk mengumpulkan data-data peneliti membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian), penelitian ini menggunakan tiga alat bantu, yaitu :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian.

2. Pedoman *Focus Group Discussion*

Pedoman FGD ini berupa daftar pertanyaan terbuka agar para peserta diskusi dapat menanggapi atau menjawab pertanyaan dari berbagai dimensi. Moleong (2000 : 230) menyarankan pertanyaan yang diajukan kurang dari 12 buah agar diskusi lebih terfokus. Pertanyaan FGD dalam penelitian ini adalah merupakan penjabaran pola kegiatan dagang dan penyaluran kredit.

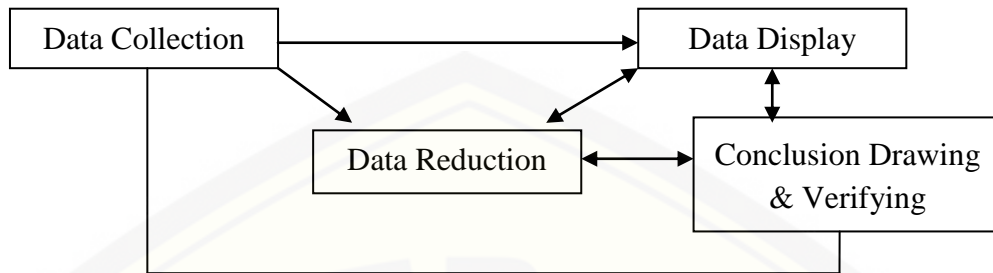
3. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan. Pengumpulan data dengan alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat izin dari subjek penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Kegiatan analisis membutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi dari peneliti supaya mampu menafsirkan dan menginterpretasikan data secara baik sehingga mampu memberikan makna pada setiap fenomena atau data yang ada. Kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data, menata dan menemukan apa yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang pola kelembagaan keberadaan ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam mengakses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Selanjutnya hasil analisis data dilaporkan secara sistematis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interactive Model Analysis* dari Miles dan Huberman seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013)

Gambar 3.1 memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linier. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Model ini kegiatan analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan membuat ringkasan, memberi kode, menelusur tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai akses permodalan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja sektor informal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

2. Tahap Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis

sehingga tema sentral yaitu pola kelembagaan keberadaan ibu rumah tangga pekerja sektor informal dalam mengakses lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi Data/Penarikan Simpulan

Verifikasi data penelitian, yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung/menolak kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

3.8 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas, namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Untuk memperjelas dan memfokuskan obyek yang akan diteliti, batasan penelitian dirumuskan pada hal-hal sebagai berikut; *pertama*, penelitian ini hanya meneliti perubahan kelembagaan ibu rumah tangga pedagang sektor informal berdasarkan akses pinjaman ke lembaga keuangan mikro; *kedua*, penelitian ini hanya melibatkan subyek penelitian atau informan ibu rumah tangga pedagang sektor informal dalam jumlah terbatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah yang besar; *ketiga*, penelitian ini hanya dilaksanakan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Tipologi dan karakteristik pedagang yang berbeda antara pedagang di Pasar Tanjung dengan di tempat lain mungkin menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini akan diuraikan bagaimana kelembagaan sektor informal di pasar Tanjung, karakteristik pedagang sektor informal dan bagaimana posisi para pedagang sektor informal pasar Tanjung di tengah dinamika pembangunan kota Jember. Untuk itu pada sub bab 4.1 akan dipaparkan mengenai profil kebijakan pemerintah di tengah dinamika pembangunan daerah Jember. Implikasi yang muncul berdasarkan kondisi ini adalah terjadinya perubahan kelembagaan baik yang alamiah berdasarkan dinamika sosial maupun yang disengaja melalui pola kebijakan. Fakta di lapangan memberi paradigma yang cukup signifikan dalam kontestasi pembangunan itu sendiri yaitu Kabupaten Jember dalam menertibkan (menggusur) para pedagang sektor informal menjadi salah satu telaah empiris dalam penelitian ini dan akan dipaparkan pada sub bab 4.2.

Konsekuensi yang muncul adalah keberadaan para pekerja sektor informal tidak hanya berimplikasi terhadap masalah ekonomi akan tetapi juga masalah sosial. Problematika yang juga cukup pelik terekam pada masalah akses finansial terhadap lembaga keuangan mikro, kenyataan bahwa mereka telah menempati lokasi baru sehingga sedikit menyulitkan bagi lembaga keuangan yang ada untuk menagih angsuran setiap hari atau setiap bulannya. Pola perubahan kelembagaan dan dinamika ekonomi yang terjadi seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya berdampak pada ekonomi ibu rumah tangga pedagang. Paparan terkait hal di atas akan dipreskripsikan pada sub bab 4.3. Tentang dinamika sosial dan ekonomi, motif dan kontribusi ekonomi serta makna *survival strategy* bagi pedagang sektor informal akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya. Tidak luput dari pembahasan mengenai implikasi kebijakan terhadap kelembagaan sektor informal. Pemaparan terakhir pada sub bab 4.4 ditemukan konstruksi model kelembagaan perempuan pekerja sektor informal beserta beberapa temuan dan implikasinya. Bagian terakhir pada bab ini 4.5 akan dikemukakan keterbatasan penelitian.

4.1 Profil Pasar Tanjung di Tengah Pembangunan Kota Jember

Bagi masyarakat Kabupaten Jember, keberadaan Pasar Tanjung sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perdagangan, baik skala rumah tangga maupun industri dalam kerangka tradisional, untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sebagai pasar induk di kabupaten ini, Pasar Tanjung menjadi salah satu pusat perekonomian atau perdagangan disamping keberadaan pusat perdagangan modern. Fungsi pasar secara umum termasuk pasar Tanjung di Jember pada dasarnya didirikan dalam rangka untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan memperhatikan pergerakan sektor-sektor ekonomi yang lain. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pasar didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal sebagaimana dimandatkan dalam produk regulasi berupa peraturan daerah semisal Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2005. Secara struktural, pengelolaan Pasar Tanjung berada dibawah pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan daerah sekaligus mampu menciptakan kesempatan kerja di Kabupaten Jember.

Lebih jauh menelisik pada dasar pendirian Pasar Tanjung adalah realisasi S.K DPR GR Kabupaten Jember tanggal 20 September 1971 No. 08/IX/DPRDGR, guna melaksanakan kebijakan bupati Jember dalam nota APBD tahun 1971-1972 tanggal 12 Juli 1971 yang memutuskan bahwa biaya pembangunan Pasar Tanjung secara gotong-royong antara penghuni Pasar Tanjung dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Jember sebesar 25% ditanggung PEMDA dan 75% menjadi tanggungjawab penghuni Pasar Tanjung. Sebelumnya masyarakat dilokasi pasar Tanjung atau pasar Jember melakukan kegiatan perdagangan pada pagi hingga sore hari.

Secara historis catatan yang dapat dicermati adalah bahwa pada kurun waktu tahun 1976, di masa pemerintahan Bupati Abdul Hadi, kondisi pasar mengalami revitalisasi fisik yang secara masif dilakukan yaitu renovasi fisik pasar dari semula berlantai satu, menjadi dua lantai. Segmentasi pedagang menjadi perhatian sebagai upaya optimalisasi fungsi pasar, yaitu dimana pasar Tanjung mulai ditempati oleh

para pedagang pasar Tanjung dan pasar Johar. Peruntukan lantai bawah untuk pakaian dan tekstil, serta barang elektronik, dan kebutuhan peralatan olahraga, sedangkan lantai atas diperuntukkan bagi pedagang sembilan kebutuhan pokok.

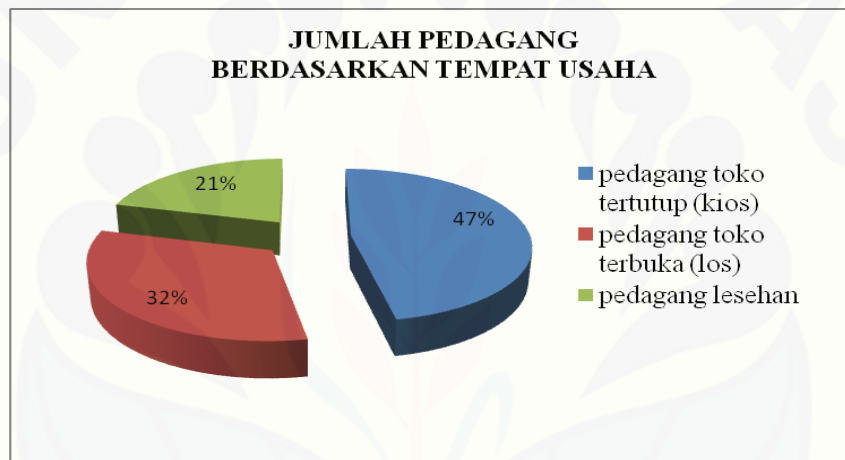
Pasar Tanjung Jember telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Amir Machmud Pada tanggal 19 April 1976 bersamaan dengan peresmian proyek-proyek pembangunan pemerintah Jember seperti Masjid Jami' Al Baitul Amien, lapangan olahraga bulutangkis (*sport hall*) serta pembentukan kota administratif Kabupaten Jember. Pasar Tanjung memiliki luas tanah 25.105 m², dan luas bangunan 24.970 m², yang terbagi menjadi dua lantai, lantai atas/lantai bawah dengan luas 22.970 m² dan lantai 3 seluas 2000 m². Bangunan pasar Tanjung terbagi menjadi kios/toko sebanyak 1.251 yang terdiri dari; lantai bawah dengan jumlah toko/kios 531 dan lantai atas sebanyak 720 kios/toko. Kios-kios yang terdapat di pasar Tanjung saat ini tidak semuanya difungsikan oleh pedagang, terdapat beberapa kios utamanya di lantai atas yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena berkurangnya pembeli yang datang ke pasar Tanjung. Bangunan fisik dan sekilas aktivitas dagang di pasar Tanjung yang terjadi di malam hari seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1. Bangunan Fisik Pasar Tanjung (kanan) dan Aktivitas Dagang Pada Malam Hari Sebelum Penertiban (kiri) (data skunder, 2012).

Sebagai satu-satunya pasar tradisional berkelas utama di Kabupaten Jember, pasar Tanjung berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat perkotaan khususnya maupun pedesaan pada umumnya. Tingginya permintaan barang kebutuhan pokok yang ada di pasar Tanjung mendorong semakin banyaknya pedagang sektor informal

untuk membuka usaha di lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah (legal) berupa kios/los/toko termasuk juga para pedagang sektor informal yang membuka usaha tanpa ijin pengelolaan (ilegal). Mereka menempati jalan/trotoar disekitar pasar Tanjung. Pada tahun 2012 jumlah pedagang Pasar Tanjung kurang lebih sebanyak 2.665 pedagang yang terdiri dari pedagang yang menempati kios maupun pedagang lesehan. Jumlah ini dapat berubah setiap saat karena banyak pedagang yang terkadang berpindah-pindah karena tidak terdaftar di Dinas Pasar. Jumlah pedagang yang tercatat di Dinas Pasar sampai tahun 2012 seperti terlihat pada Gambar 4.2 berikut:

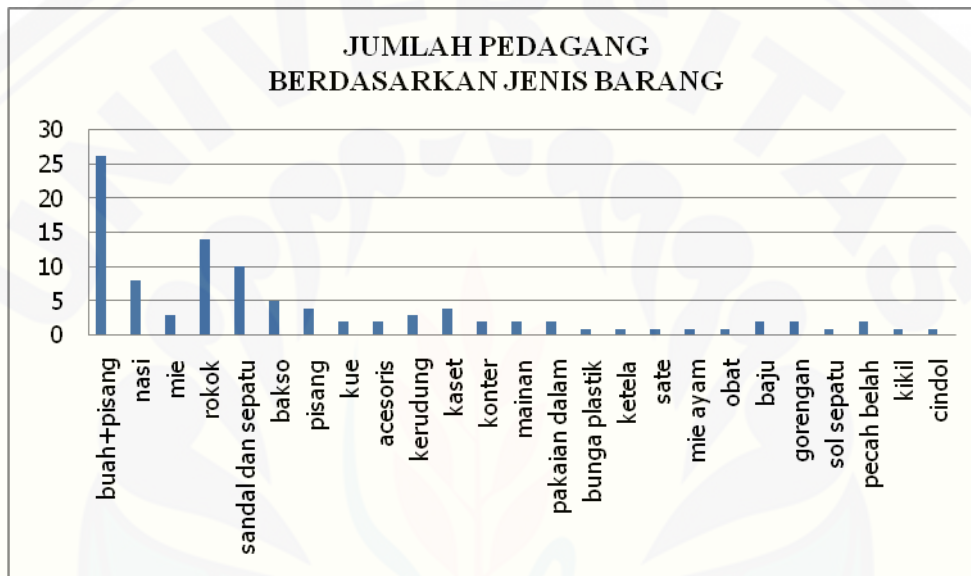


Gambar 4.2 Persentase Pedagang di Pasar Tanjung Berdasarkan Tempat Usaha (Data primer 2014, diolah)

Pedagang yang menempati toko tertutup (kios) jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 1.251 pedagang atau sebesar 47%. Pedagang yang menempati kios tertutup atau toko kebanyakan adalah para pedagang baju (konveksi), perlengkapan sholat, peralatan (perabot) rumah tangga, sepatu, kain, dan lain-lain. Mereka ini merupakan pedagang dengan skala menengah ke atas. Sementara itu pedagang yang menempati area terbuka dalam pasar (los) sebanyak 858 pedagang atau sebesar 32%. Para pedagang kelompok ini kebanyakan adalah para pedagang skala kecil atau yang termasuk kategori skala informal. Mereka menempati los-los yang ada di area pasar Tanjung baik los pinggiran maupun dalam pasar Tanjung di lantai bawah dan lantai

atas. Pedagang dengan jumlah paling sedikit adalah pedagang yang menggelar barang dagangannya dengan cara lesehan sebanyak 556 pedagang atau sebesar 21%.

Para pedagang yang menempati los pinggiran terdiri dari pedagang yang menjual makanan, kue, warung nasi, rokok, buah-buahan, kaset, peralatan dapur, mainan, dan lain-lain. Persentase pedagang yang menempati los pinggiran ditunjukkan Gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3 Persentase Pedagang di Pasar Tanjung Berdasarkan Jenis Barang dagangan (Data primer 2014, diolah)

Pedagang buah termasuk pisang merupakan jumlah terbanyak yang menempati area los pasar Tanjung sebesar 26%. Para pedagang ini tersebar di los pinggiran barat pasar, selatan pasar dan timur pasar, bahkan diantara pedagang tersebut ada yang menempati tangga menuju lantai atas pasar Tanjung. Selain itu terdapat 14% pedagang yang menjual rokok, sebesar 10% penjual sandal dan sepatu, penjual makanan (warung nasi) sebanyak 8%, sementara itu sebanyak 5% pedagang merupakan penjual bakso dan sisanya adalah penjual kue, kaset aksesoris, gorengan, dan lain-lain dengan persentase antara 1% hingga 2%.

Pemanfaatan tempat usaha baik berupa kios maupun los oleh para pedagang di Pasar Tanjung harus disertai dengan Surat Ijin Menempati (SIM). Surat Ijin

Menempati (SIM) ini harus diperpanjang oleh para pedagang setiap lima tahun, bahkan surat ijin ini dapat dipindahtangankan atau dijual ke pedagang lain. Seperti penuturan seorang penjual gerabah dan peralatan rumah tangga yang sudah menempati kios di lantai atas sejak tahun 1994, ibu Rd (40 tahun) berikut:

“...saya menempati sini mulai 1994, ini surat ijin pemakaiannya kan hak pakai, setiap lima tahun sekali kan harus perpanjang, tapi sekarang sudah banyak yang dijual,..sekarang sepi mas, makanya banyak yang dijual, maksudnya dipindahtangankan hak pakainya .” (wawancara 24 Nopember 2014)

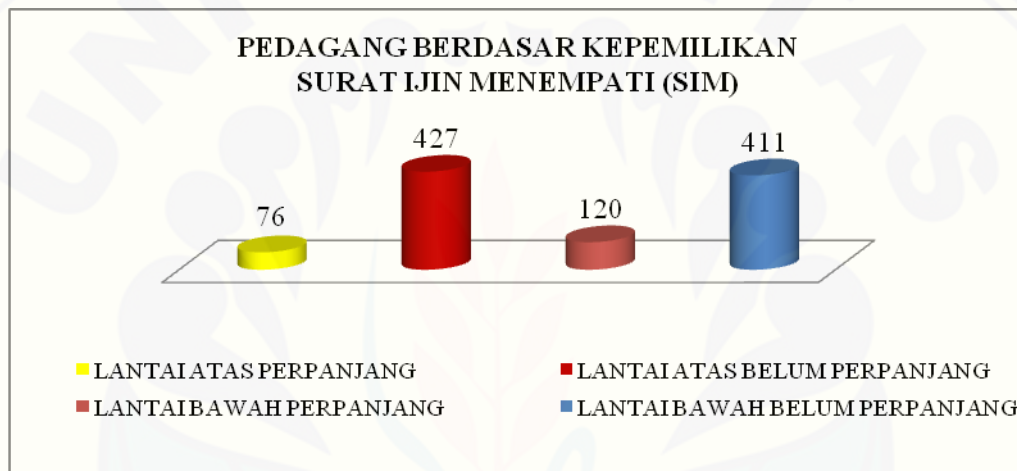
Penuturan ibu Rd diperkuat dengan pengakuan ibu Skd, penjual makanan dan rokok yang menempati los bawah sebelah Timur Pasar Tanjung mulai pasar Tanjung dibangun, berikut penuturannya:

“...untuk menempati los ini ada surat ijinnya, jadi istilahnya Surat Ijin Menempati (SIM), biasanya perpanjang setiap lima tahun, itu tidak termasuk iuran harian atau bulanan, kalau yang menempati toko-toko (kios) itu bayarnya setiap bulan.” (wawancara 30 Nopember 2014)

Surat Ijin Menempati (SIM) merupakan bukti hak pakai seorang pedagang untuk menempati atau memanfaatkan lokasi di pasar Tanjung baik itu dalam bentuk toko (kios) maupun sela-sela toko (los). Para pedagang yang memiliki surat ijin menempati secara otomatis akan terdaftar di kantor pasar Tanjung. Para pedagang yang menempati los juga memiliki kewajiban untuk membayar retribusi harian antara Rp 1.000,- hingga Rp 8.500,-. Toko atau kios dikenakan iuran bulanan sebesar Rp 42.000,- setiap kios. Sementara bagi mereka yang menempati los pasar dan tidak mempunyai SIM tidak diperkenankan untuk berjualan di pasar Tanjung. Jika terdapat pedagang ilegal atau tidak memiliki SIM akan ditindak oleh petugas pasar. Hal ini disampaikan oleh Fd, petugas juru tagih para pedagang yang menempati los-los lantai bawah, berikut:

“...tidak mungkin ada pedagang yang menempati lokasi di sini mas, kalau ada pasti ketemu,..karena tiap hari saya kan menagih ke mereka...kalau misalkan ada yang tetap berjualan ya pasti dimarahi dua-duanya, ya juru tagihnya ya pedagangnya.” (wawancara 30 Nopember 2014)

Data dari Dinas Pasar unit pasar Tanjung sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa pedagang yang ada di pasar Tanjung ada yang sudah memperpanjang Surat Ijin Menempati (SIM) dan masih ada juga pedagang yang belum memperpanjang, bahkan berdasarkan observasi di lantai atas, banyak terdapat kios-kios yang sudah kosong ditinggal pemiliknya. Kios atau toko yang kosong kebanyakan adalah toko yang menjual sayur dan palawija yang berada di sisi selatan bangunan pasar lantai atas. Perbandingan pedagang yang berada di lantai atas dengan lantai bawah baik yang telah memperpanjang atau belum dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 Jumlah Pedagang di Pasar Tanjung Berdasarkan Kepemilikan Surat Ijin Menempati SIM (Data primer 2014, diolah)

Berdasarkan Gambar 4.4, jumlah pedagang yang menempati lantai atas dan lantai bawah sebanyak 1.034 pedagang, sejumlah 503 (49%) menempati lantai atas dan sejumlah 531 (51%) menempati lantai bawah. Dengan jumlah sebanyak itu pedagang yang sudah memperpanjang Surat Ijin Menempati (SIM) baru sebanyak 196 pedagang atau 19% dan yang belum memperpanjang Surat Ijin Menempati (SIM) sebanyak 838 pedagang atau 81%. Jika dilihat perbandingannya antara pedagang di lantai atas dengan pedagang di lantai bawah, maka terlihat bahwa kebanyakan pedagang yang belum memperpanjang Surat Ijin Menempati (SIM) adalah para pedagang yang menempati kios atau los di lantai atas.

4.1.1 Kelembagaan Sektor Informal di Pasar Tanjung

Peningkatan kehidupan masyarakat diberbagai sektor termasuk perekonomian merupakan tuntutan yang sekiranya wajar untuk diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Jember. Salah satu upaya yang kiranya dilaksanakan adalah memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan dengan dasar aturan yang disepakati. Pedagang sektor informal sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal, keberadaanya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian masyarakat kabupaten Jember.

Dinamika pembangunan kabupaten Jember telah mendorong pertumbuhan usaha di sektor informal, keberadaan pelaku usaha sektor informal di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah banyak menggunakan fasilitas publik seperti; bahu jalan, trotoar dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketrengaman, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib masyarakat. Untuk itu, dalam rangka mengatur keberadaan pedagang sektor informal khususnya yang berlokasi di pasar Tanjung, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui kegiatan penataan lokasi usaha, pengaturan mekanisme pemberian izin, dan pengaturan mengenai pemberian sanksi, serta dengan melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengawasan serta pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam suatu kegiatan usaha baik formal maupun informal dibutuhkan hubungan kelembagaan yang baik antar sesama pelaku usaha maupun hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat berupa aturan-aturan yang melekat dalam kelembagaan atau institusi. Institusi sebagai aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal seperti undang-undang, konstitusi dan aturan informal seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat (North, 1990). Demikian halnya dengan keberadaan pedagang kaki lima PKL di Jember sebagai derivatif dari kegiatan usaha sektor

informal. Dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang Pelaku Kegiatan Usaha Informal (PKL) diatur beberapa hal yang terkait dengan keberadaan pelaku usaha sektor informal yaitu PKL. Hal-hal yang diatur diantaranya mengenai lokasi kegiatan, perizinan, hak dan kewajiban serta larangan dan sanksi jika mereka melanggar.

Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban. Sementara itu pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL. Peraturan ini kemudian diperkuat dan dipertegas lagi dengan peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009.

Peraturan itulah yang dijadikan dasar kebijakan penertiban dan pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember pada tanggal 8 September 2014. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Jember berikut:

“...itu kan sebetulnya keputusan bupati yang masalah penertiban di lingkungan pasar Tanjung, ya kita kembali pada keputusan Bupati yang tahun 2008, minimal seperti yang dulu lah,... untuk masalah relokasi kita masih belum memastikan, kami sudah diskusi dengan dinas terkait dengan dinas pasar dan pak bupati, nanti akan dilakukan mapping oleh Dinas Pasar, kami akan rapat lagi..terkait adanya perlawanan kami sudah berdiskusi bermusyawarah.”

Ada nilai-nilai atau norma dalam kelembagaan yang sebetulnya sudah tidak lagi disepakati oleh para pedagang utamanya pedagang yang menempati lokasi di Jl. Wahidin (Timur Pasar). Keberadaan mereka disatu sisi menguntungkan bagi masyarakat yang akan berbelanja, akan tetapi di sisi lain merugikan bagi pengguna jalan yang akan melewati Jl. Wahidin. Keberadaan mereka juga merugikan pedagang yang menempati pasar Tanjung utamanya yang berada di lantai atas. Dengan jenis barang dagang yang sama secara otomatis konsumen akan lebih memilih membeli kebutuhan mereka pada para pedagang yang ada di Jl. Wahidin daripada harus naik ke lantai atas. Seperti disampaikan ibu Tt, penjual palawija di lantai atas yang sudah

lebih dari 40 tahun menekuni usaha dagang di lantai atas sejak masih ikut neneknya, seperti berikut:

“...dulu perjanjiannya kan buka jam 19.00 malam mas, tapi jam 14.00 sore kadang jam 15.00 mereka sudah buka jualan, perjanjiannya jam 19.00 malam habis maghrib jadi yang dilantai atas sudah tutup...”
(wawancara, 27 Nopember 2014)

Demikian pula yang diungkapkan salah satu informan bernama ibu Km (50 tahun) yang menempati los dalam pasar mulai tahun 1984 sebagai berikut:

“...ngeten niki wonten surate (gini ini ada suratnya), surat kendaline, wonten (ada) perjanjian sewaktu-waktu dibutuhkan pasar nggeh (ya) siap dipindah, menawi (yang) PKL niko (itu) memang cengel tiyange (susah ditertibkan orangnya), dikengken pindah jam boten purun asale (disuruh pindah jam tidak mau asale), namine pasar sore kan bukae sore (namanya pasar sore kan buka sore), niku mboten purun (itu tidak mau), saking manut dikengken buka jam 14.00 sampek isuk enak (misalnya mau disuruh buka jam 14.00 sampai pagi kan enak), mboten purun (tidak mau), melanggar perjanjian...romiyen dikengken buka sore (dulu disuruh buka sore), nyuwun rombongan diparingi rombongan (minta rombongan dikasih rombongan)...diparingi (dikasih) modal Rp 1.000.000,- tapi melanggar...” (wawancara 26 Nopember 2014)

Fenomena keberadaan pedagang sektor informal yang menempati lokasi-lokasi di pasar Tanjung menunjukkan bahwa dalam ilmu ekonomi kelembagaan juga menekankan adanya hak kepemilikan (hak pakai) yang bersifat sementara seperti halnya yang diatur dalam peraturan daerah. Kegiatan dagang yang dilakukan oleh mereka sebagai cerminan individu atau kelompok yang memiliki sarana atau faktor produksi yang salah satunya merupakan barang publik. Hak dan kewajiban yang melekat pada pelaku usaha ini membuat mereka memiliki keleluasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Para pedagang sektor informal di Pasar Tanjung menjadi pelaku pengembangan perekonomian. Ternyata dalam praktek kegiatan usahannya banyak faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor ekonomi, sosial, politik dan lainnya.

Pada titik ini ekonomi kelembagaan masuk untuk mewartakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antarpelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas (teori modal sosial), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. Dengan adanya desain aturan main atau kelembagaan (*institutions*) diharapkan muncul keseimbangan peran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang merasa disatu sisi diuntungkan dan disisi lain merasa dirugikan dengan keberadaan pelaku usaha sektor informal. Hal ini untuk melindungi agar kegiatan perekonomian atau perdagangan di pasar Tanjung tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung.

Keberadaan pedagang sektor informal dimanapun pada awalnya hanya memunculkan dimensi ekonomi semata, akan tetapi dalam perkembangannya kajian tentang sektor informal ini menjadi begitu luas tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi akan tetapi dapat dilihat dari sudut pandang sosial, politik dan hukum. Tidak jauh berbeda dengan pedagang di kota atau di lokasi lain, keberadaan pedagang sektor informal di pasar Tanjung memberikan makna yang luas seperti yang dipelajari dalam ilmu kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan kemudian menjadi bagian dari ilmu ekonomi yang cukup penting perannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial ekonomi, humaniora, budaya dan termasuk juga ilmu politik.

Begitu sentralnya peranan kelembagaan dalam masyarakat, maka setiap perubahan sosial yang terjadi menjadikan kelembagaan sebagai wadahnya. Hal itu pula yang terjadi dalam pembangunan yang diartikan sebagai perubahan yang direncanakan. Hal ini sudah terlihat selama ini, dimana setiap terdapat komunitas masyarakat hampir pasti membentuk suatu kelembagaan baru, misalnya: koperasi untuk aktivitas usaha ekonomi, Kelompok Pencapir untuk kepentingan pemenuhan informasi, kelompok tani untuk aktivitas budidaya pertanian, kelompok P3A untuk urusan air irigasi, kelompok ternak bagi peternak, kelompok pedagang bagi pedagang, dan lain-lain.

Pasar Tanjung pada awalnya dibangun untuk para pedagang yang memiliki ijin usaha. Mereka menempati lokasi pasar dengan menyewa kios-kios dalam pasar. Lantai bawah diperuntukkan bagi mereka yang berjualan baju, perlengkapan sholat dan seragam sekolah, sepatu, tas dan lain-lain. Sementara itu lantai atas diperuntukkan bagi para pedagang ikan, dan buah-buahan serta sayur dan palawija. Akan tetapi dalam perkembangannya pasar Tanjung telah berubah menjadi pasar dengan jumlah pedagang yang sangat banyak. Aktivitas dagang mereka tidak hanya berlokasi di dalam pasar atau di kios-kios, melainkan para pedagang tersebut telah menggunakan sela-sela kios untuk berdagang.

Permasalahan muncul ketika ada pedagang baru yang menempati lokasi Jl. Wahidin (Timur Pasar Tanjung). Permasalahan semakin kompleks karena para pedagang yang menempati lokasi tersebut menjual barang dagangan yang sama dengan barang dagang yang dijual dilantai atas. Sejak saat itu kontruksi kelembagaan sektor informal di pasar Tanjung menjadi perhatian masyarakat. Bahkan ketika upaya pengusuran (penertiban) berhasil dilakukan oleh pemkab permasalahannya juga belum selesai. Para pedagang sektor informal yang ada di lantai atas merasakan ada perubahan baik sosial maupun ekonomi terkait pendapatan yang mereka peroleh. Perubahan sosial misalnya dalam bentuk penolakan terhadap pedagang di bawah yang akan dipindah ke atas dan perubahan ekonomi terkait dengan pendapatan mereka yang semakin menurun. Mereka menuntut upaya pemerintah daerah untuk menertibkan para pedagang yang ada di Jl. Wahidin. Seperti diungkapkan ibu Tt (56 tahun) pedagang palawija yang berada di lantai atas. Ibu Tt sudah lebih dari 40 tahun menekuni usaha dagang di lantai atas sejak masih ikut neneknya. Berikut penuturannya terkait kondisi pedagang di lantai atas:

“...kalau karcis kios-kios yang di atas sekarang sudah naik, tapi ndak tahu berapa, tapi banyak yang ndak bayar soalnya yang bawah itu masih jualan, yang dituntut sama orang atas itu kan yang dibawah, kalau bawah itu sudah bersih ya banyak yang akan bayar. Kalau dulu sebelum ada pasar bawah, orang naik semua ke atas semua, ...pasar bawah itu kan mulai jamannya pak Syamsul, sebelum pak Syamsul, kalau jamannya pak Hadi itu rame..” (wawancara, 27 Nopember 2014)

Pernyataan ibu Tt diperkuat oleh penuturan ibu Rd, bahwa pembeli sekarang sepi dibandingkan dengan waktu dulu sebelum ada pasar bawah. Pernyataan ibu Rd yang senada dengan ibu Tt sebagai berikut:

“...mungkin terakhir ini mas saya pinjam bank, karena keadaannya sudah sepi, kayaknya kalau tidak ada pertolongan yang kuasa mungkin tidak mampu, sepi. kondisi yang parah itu sudah sekitar tiga tahun ini.”
(wawancara, 27 Nopember 2014)

Kebijakan pengaturan jam operasional pedagang atau bahkan pengusuran permanen telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi para pedagang sektor informal di pasar Tanjung. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena banyak pedagang di lantai atas yang merasa dirugikan dengan keberadaan pedagang lain. Pernyataan ibu Tt dan ibu Rd telah memberikan gambaran bahwa peran institusi dalam ekonomi kelembagaan sektor informal memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran ini dapat dimainkan oleh pengambil kebijakan misalnya Dinas Pasar selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas perdagangan khususnya di Pasar Tanjung. Institusi memiliki peran sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar menurut ekonomi kelembagaan baru. Salah satunya adalah keberadaan para pedagang sektor informal yang terdapat di Pasar Tanjung Jember.

Ekonomi kelembagaan baru memiliki beberapa arti penting dalam perekonomian antara lain adalah (Arsyad, 2010): *pertama*, teori yang terdapat dalam ekonomi kelembagaan baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik dengan dasar landasan ekonomi neoklasik. Salah satu permasalahan yang berhasil dijelaskan ekonomi kelembagaan baru terkait para pedagang sektor informal di pasar Tanjung adalah eksistensi para pedagang yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Ekonomi kelembagaan baru merupakan sebuah paradigma baru dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi. *Kedua*, sejak dekade 1990-an makna ekonomi kelembagaan baru sangat penting dalam konteks kebijakan ekonomi, karena ekonomi kelembagaan baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. Ekonomi

kelembagaan baru telah berhasil menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutions*).

Dari sudut pandang institusi seharusnya para pihak-pihak terkait harus segera merumuskan sebuah kebijakan yang dapat memperat bangunan kelembagaan sektor informal di pasar Tanjung. Tidak lantas malah terkesan membiarkan kondisi ini semakin mempertentangkan kepentingan para pedagang sehingga dapat melemahkan ikatan sosial bahkan saling beradu kekuatan. Fenomena pengusuran (penertiban) pedagang sektor informal yang terjadi beberapa saat lalu menunjukkan bahwa nilai-nilai dan norma norma dalam bangunan kelembagaan telah banyak dilanggar oleh para pedagang dan pihak-pihak yang punya kepentingan. Masing-masing kelompok memiliki modal sosial sendiri-sendiri untuk memperjuangkan nasib mereka. Aksi penolakan oleh pedagang yang ada di dalam pasar terhadap pedagang yang akan direlokasi ke dalam pasar untuk menempati los-los pasar Tanjung menunjukkan bahwa *bergaining position* mereka masih nampak dan mampu mengalahkan fungsi institusi. Penuturan staf Dinas Pasar saat mengawasi keberadaan pedagang di Jl. Wahidin menguatkan hal tersebut.

“...ada laporan katanya pedagang sudah mulai menggunakan jalan,..ada yang menyuruh membeli payung...ya itu dari paguyubannya, kalau tidak beli tidak boleh jualan, kalau yang di bawah ini *dibacking* LSM Gempar, kalau yang di dalam pasar ya ada, toko-toko itu ada, kalau ndak ada gitunya mas akhirnya kan seperti dulu informasinya kan ini (pedagang yang di timur pasar) mau ditaruh di los-los, ternyata mereka semuan membuat pernyataan, karena satu masalah kebersihan, yang kedua takut merusak kunci-kunci.”
(wawancara, 27 Nopember 2014)

Keberadaan organisasi yang mewadai komunitas pedagang sektor informal di pasar Tanjung juga disampaikan oleh ibu Tt ketika menuturkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pedagang khususnya yang ada dilantai atas. Berikut penegasan dari bu Tt:

“...saya dulu bagian itu di paguyuban pedagang pasar Tanjung, sekarang itu diganti di bawah, orang-orang bawah. Apa itu paguyuban GERPAS, kapan hari sudah ke pendopo Bupati, ke Pemda,...GERPAS

itu Gerakan Pedagang Pasar Tanjung. Kan dulu adik saya terus ndak jualan, berangkat haji ndak mau kisruh-kisruh lagi.” (wawancara, 27 Nopember 2014)

Ekonomi kelembagaan baru telah mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak dan lain sebagainya untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Ekonomi kelembagaan baru berpandangan, adanya informasi yang tidak sempurna, eksternalitas dan fenomena *free-riders* di dalam barang-barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar. Hal ini yang menyebabkan kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan. Norma-norma yang ada dalam tatanan kelembagaan para pedagang sektor informal telah bergeser maknanya dari aturan main yang harus disepakati para pelaku ekonomi dalam hal ini adalah para pedagang menjadi sebuah bentuk ajang pertentangan kepentingan. Para pedagang kini dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mengambil pilihan keputusan.

Kajian tentang ekonomi kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar (Rachbini, 2001). Hal ini dikarenakan dalam konteks ekonomi, kelembagaan merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi. Kelemahan dan kekuatan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari keberadaan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Ketika perekonomian hanya didasarkan pada kelembagaan formal, maka dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Oleh karena itu, saat ini masyarakat perlu mengembangkan ekonomi kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik di masyarakat sangat tergantung pada kelembagaan yang menjadi tatanannya.

Keberadaan para pedagang sektor informal di Pasar Tanjung sepertinya akan terus menghadapi kondisi yang paradoks. Disatu sisi sektor informal menunjukkan peran yang sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil retribusi setidaknya dapat dijadikan ukuran. Turunnya pendapatan daerah dari retribusi pasar berapa tahun terakhir

membuktikan bahwa apa yang disampaikan informan di atas benar. Sektor informal merupakan lapangan usaha yang paling banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat, memberikan peluang paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan kondisi perekonomian serta memberikan kontribusi penting dalam kegiatan perdagangan. Sektor ini seakan menjadi sektor warisan bagi setiap keluarga yang memiliki usaha di Pasar Tanjung. Mereka secara turun temurun menjalankan usaha ini, dinamikannya begitu kental dengan nuansa persaingan disamping juga ada nilai-nilai kekerabatan. Pernyataan bu Skd menegaskan hal itu:

“...yang punya usaha ini ya ibu, aku yang sebelah itu yang kemarin kena gusur jadi sekarang nunggu ini gantian, sekarang anak-anaknya ibu ngumpul disini semua.” (wawancara, 25 Nopember 2014)

Yang disampaikan bu Km, begitu biasa dipanggil, senada dengan yang disampaikan bu WI berikut:

“...Saya sudah jualan di sini sudah 18 tahun...mulai menempati sudah lama dulu ini yang nempati mertua, saya mulai kawin ya menempati sini..yang disini nggak di pindah ini kan di pinggir yang di depan ya dibongkar semua.” (wawancara 25 Oktober 2014)

Tidak hanya yang disampaikan bu Skd dan bu WI, bu Skd penjual makanan dan minuman yang ada di bagian Timur bangunan Pasar Tanjung juga menyatakan bahwa usaha yang dijalani dimulai sejak jaman pak Soeharto. Sama halnya dengan yang utarakan oleh bu Rd yang memulai usaha berdagang karena meneruskan orangtuanya sejak tahun 1997.

Di samping telah memberikan peran yang penting dalam perekonomian, sektor informal juga menghadapi permasalahan yang sangat rumit. Hal ini disebabkan karena secara kelembagaan sektor informal lemah. Secara ekonomi politik, keberadaannya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dominasi keberpihakan pemerintah kepada pelaku ekonomi besar telah menyebabkan sektor informal secara umum lemah secara kelembagaan. Hal ini mengakibatkan sektor informal kita

menjadi lambat mandiri, lambat mengembangkan diri dan menjadi lemah dalam hal akses.

Kehidupan sosial masyarakat dikonstruksi dengan pondasi tiga pilar sebagai elemen sosial pokok, yang secara fundamental ketiganya sangat berbeda. Masing-masing pondasi tersebut memiliki paradigma, ideologi, nilai, norma, *rules of the game*, dan bentuk keorganisasiannya sendiri. Tiga yang dimaksud adalah: pemerintah, pasar, dan komunitas (Saptana, 2003). Secara sederhana ketiganya direpresentasikan dalam bentuk kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Masing-masing memiliki peran yang harus dijalankan secara ideal. Konfigurasi kekuatan antara ketiganya merupakan dasar pembentuk suatu sistem sosial. Konfigurasi ketiga kekuatan itu dapat dilihat dalam dinamika penataan pedagang sektor informal di pasar Tanjung. Satu pihak berjuang atas nama pemerintah dan satu pihak lagi berjuang atas nama komunitas pedagang. Pernyataan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember berikut dapat dijadikan dasar argumen tersebut:

“...jadi begini, pendataan memang kami lakukan bersama Pol PP kemudian dilakukan sinkronisasi data, kemudian validasi, selanjutnya ditemukan PKL yang harus direlokasi..sesuai dengan keberadaan pasar, seperti pesan pak Bupati yang penting dilakukan yang manusiawi..jadi tidak bisa ditunda lagi, saya selaku Kepala Dinas Pasar berusaha menyesuaikan dengan petunjuk pimpinan sesuai dengan peraturan melaksanakan dengan cara manusiawi.”

Pernyataan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember diperkuat oleh penuturan Sdq, sekretaris paguyuban Pedagang di Jl. Untung Suropati berikut:

“...mereka ndak mau dipecah-pecah, jadi tertata, letak pasar itu temen-temen tidak setuju karena tidak layak...jadi kalau belum dibangun tempat yang layak jangan dipindah dulu,...walau Pol PP belum turun banyak yang sakit, di gertak aja banyak yang sakit, seperti kemarin kabarnya ada 500 Pol PP, Polisi, ABRI.kalau kita rakyat kecil gak ada namanya perlawanan, lima orang Pol PP turun kita sudah takut sekarang aja surat turun banyak yang sakit.”

Pernyataan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pemerintah mampu mendominasi kekuatan komunitas yaitu para pedagang yang ada di Pasar Tanjung dan sekitarnya. Kedua pilar kelembagaan pedagang sektor informal tersebut

kemudian memunculkan pilar ketiga berupa kekuatan politik. Pernyataan anggota DPRD Jember Fraksi PKB berikut dapat dijadikan dasar argumen tersebut:

“...butuh konsep yang jelas, rapat kemarin saya melihat konsep pemkab belum matang, harusnya tidak keburu-buru, siapkan anggaran jangan hanya anggaran untuk penertiban, bagaimana nasib PK5 selanjutnya...kita butuh jalan tengah...PK5 jangan dianggap musuh, PK5 harus dianggap mitra, ingat..ingat, hidupnya Pol PP, gajinya Pol PP itu diambil dari keringatnya Pedagang...”

Kelembagaan menurut pandangan North (1996) secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara aktor dan organisasi dalam suatu konteks, misal konteks pemerintah daerah, konteks lembaga keuangan termasuk konteks sektor informal ini. Menurut pandangan ekonomi kelembagaan, sektor informal dipandang setidaknya memenuhi prinsip-prinsip; *Pertama*, aturan main (*rule of the game*) yang mengawal proses perkembangan sektor informal bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan sektor informal. Aturan main ini harus ada dan disepakati oleh pihak-pihak pelaku sektor informal maupun pihak yang terkait langsung dengan keberadaan sektor ini. Aturan main yang harus disepakati oleh para pedagang sektor informal di pasar Tanjung diantaranya adalah; lokasi berdagang, waktu berdagang, kesepakatan besarnya retribusi yang harus mereka bayar baik setiap bulan maupun setiap hari.

Kedua, hak kepemilikan atau *property right* yang terartikulasi dalam bentuk perizinan usaha dan produk yang dijual oleh pedagang sektor informal dapat dengan mudah diperoleh sektor informal. Prinsip harus jelas karena pada umumnya para pekerja sektor informal tidak memiliki hak terhadap tempat usaha yang mereka tempati. Hak kepemilikan atau pemanfaatan lokasi dalam menjalankan usahanya. Para pedagang sektor informal di pasar Tanjung memiliki surat ijin menempati (SIM) sebagai bentuk hak kepemilikan. *Ketiga*, informasi yang diakses oleh sektor informal mendekati sempurna atau tidak terjadi *asymmetric information* sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi yang berbentuk regulasi dari pemerintah maupun informasi internal dalam pengelolaan sektor informal. Kenyataannya tidak semua

pekerja sektor ini mendapatkan informasi yang sama baik dalam hal regulasi maupun akses terhadap lembaga penyedia modal. Keberadaan lembaga penyedia modal baik LKM maupun bank pemerintah terkadang bekerja sama dengan para pegawai dinas pasar untuk menginformasikan program-program pinjaman melalui pegawai pasar tersebut. Hal ini memicu terjadinya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pedagang. Seperti diungkapkan oleh bu Ftm, penjual buah di los lantai bawah berikut:

“...kalau mau pinjam bisa lewat kantor pasar, biasanya ada petugas yang siaran di pasar, jadi yang mau ngajukan datang ke kantor pasar, nanti kalau persyaratannya sudah lengkap dipanggil ke kantor BRI.”

Ketika ditanya besarnya retribusi yang dibayar setiap pedagang bu Ftm juga tidak tahu berapa retribusi yang harus dibayar oleh pedagang lain dipasar Tanjung. Ketidakpastian atau ketidakseragaman masalah retribusi pedagang di pasar Tanjung juga terbukti ketika bu Wt pedagang berusia 75 tahun di lantai atas yang menempati los dan kios. Berikut penuturannya:

“...kalau ini karcisnya Rp 2.000,- kalau yang agak luas itu Rp 4.000,- ada yang ditarik sampai tiga kali mas, karena mereka berjualan sampai malam, jadi ada karcis sampah, ada retribusi dan terakhir nanti uang keamanan.”

Berdasarkan penuturan kedua informan tersebut sangat sulit untuk menentukan besarnya retribusi para pedagang sektor informal di Pasar Tanjung. Para pedagang sangat sulit membandingkan besarnya iuran sampah, retribusi dan uang keamanan yang harus ia bayar dan yang harus dibayar orang lain.

Keempat, transaction cost atau biaya transaksi yang harus dikeluarkan sektor informal dalam mengurus perizinan dan pengelolaan kegiatan usaha termasuk didalamnya adalah akses terhadap lembaga keuangan mikro sehingga sektor informal bisa berkembang tanpa harus dibebatkan oleh biaya-biaya transaksi.

Sekian permasalahan yang dihadapi oleh sektor informal di atas mendorong lahirnya sistem kelembagaan yang kuat pada sektor informal di pasar Tanjung sesuai dengan level dan tahap perubahannya. Terdapat 5 (lima) asumsi yang memengaruhi perubahan suatu kelembagaan menurut North (1995) yaitu; *Pertama*, interaksi yang

berkelanjutan antara kelembagaan dan organisasi dalam situasi ekonomi yang terbatas, oleh sebab itu persaingan merupakan kunci untuk perubahan kelembagaan; *Kedua*, persaingan mendorong organisasi untuk terus menerus berinvestasi dalam keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan. Berbagai macam keahlian dan pengetahuan individual dan organisasi akan mengembangkan persepsi tentang peluang, dan karenanya pilihan yang akan menambah perubahan pada organisasi; *Ketiga*, kerangka kerja kelembagaan akan memberikan insentif secara maksimum kepada mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan; *Keempat*, persepsi dibentuk dari perilaku mental individu; *Kelima*, lingkup ekonomi, yang saling melengkapi dalam menjalin kerjasama dengan kelembagaan lain diharapkan dapat membuat perubahan kelembagaan yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan.

Jadi sebenarnya kemungkinannya sangat besar untuk terciptanya kelembagaan sektor informal yang kuat jika kita memperhatikan kelima asumsi di atas. Pelaku sektor informal, *stakeholders* dan semua pihak yang berniat mendukung penguatan kelembagaan sektor informal harus memberikan peran antara lain; *Pertama*, mendorong sektor informal agar berinteraksi secara aktif dengan aturan-aturan yang melingkupi pengelolaan sektor informal di pasar Tanjung, melakukan kritik, masukan dan perubahan serta pembaharuan kebijakan peraturan tentang sektor informal. *Kedua*, membantu meningkatkan pengetahuan para pelaku sektor informal dan persaingan yang dihadapi sektor informal harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong lahirnya kelembagaan sektor informal yang kuat. *Ketiga*, sektor informal akan kuat jika memberlakukan asas profesionalitas khususnya dalam hal pengelolaan dengan memperkuat akses terhadap lembaga keuangan sehingga pelaku sektor informal lebih serius dalam mengembangkan sektor informal. *Keempat*, membantu sektor informal membangun mental kewirausahaan dan mental keberanian untuk memperjuangkan nasib sektor informal menjadi salah satu sektor usaha perdagangan yang kuat dan mandiri di Pasar Tanjung. *Kelima*, membantu sektor informal membangun kerjasama yang lebih serius dalam bentuk asosiasi dan jaringan kerja

yang dapat mawadahi kepentingan sektor informal dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada sektor informal dimasa yang akan datang.

Pasar tradisional memiliki suatu kelembagaan tersendiri sebagaimana yang terlihat di pasar Tanjung. Apabila dikaitkan dengan komposisi pedagang pasar, maka pasar Tanjung sebenarnya terdiri atas pedagang yang berasal dari luar Jember bahkan dari Madura, sehingga mau atau tidak mau, terdapat unsur budaya yang terbawa oleh masyarakat dari luar Jember yang kemudian berinteraksi dalam sebuah komunitas pedagang dalam pasar. Selain itu, interaksi dari sejumlah orang juga akan membentuk kelembagaan tersendiri sebagai garis haluan yang harus dipatuhi, baik itu formal maupun informal. Unsur kelembagaan yang berasal dari para pedagang, lembaga keuangan informal juga memengaruhi pola-pola interaksi antar pedagang dengan pihak lembaga keuangan informal maupun lembaga keuangan formal yang bermain dalam pasar. Dimana kelembagaan itu sendiri akan memberikan “aturan-aturan permainan” kepada pedagang untuk mengakses jasa dari lembaga keuangan. Pada akhirnya pola interaksi antara pedagang dengan sesama pedagang dan pedagang dengan lembaga keuangan tersebut akan tergantung dari kelembagaan yang diterapkan.

4.1.2 Karakteristik dan Tipologi Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung

Perdebatan mengenai kecenderungan pedagang sektor informal yang memiliki mobilitas dan yang memilih untuk menetap, serta asumsi tingkat modal usaha yang berbanding lurus dengan kompleksitas desain, setidaknya dapat membantu kita untuk mendefinisikan tipologi desain pedagang sektor informal. Dari survei dan fakta yang kita kumpulkan dari beberapa kota, seperti Yogyakarta, Jakarta, Denpasar, Anyer, Penang, Berlin, Milan di dalam dan luar negeri khususnya Malaysia, dapat kita susun tipe-tipe pedagang kaki lima yang menjadi bukti keterkaitan antara mobilitas, kementerian, modal dan kompleksitas desain (Ikaputra dan Rochmad, 2004).

Kecenderungan mobilitas maupun kementerian dari pedagang sektor informal tentu sangat terkait dengan legalitas penggunaan ruang usaha di pasar Tanjung,

banyaknya pelanggan yang dilayani pada satu tempat, maupun lemah-tidaknya kontrol pemerintah setempat terhadap pedagang sektor informal. Analisa perkembangan pedagang sektor informal di pasar Tanjung cenderung mengarah kepada kegiatan dagang yang lebih menetap. Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggan yang membeli barang pada suatu tempat tertentu semakin banyak.

Ciri-ciri sektor informal khususnya di Indonesia sebagai berikut (Hidayat, 1986): (1) kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik; (2) umumnya tidak mempunyai izin usaha; (3) pola waktu dan tempat usahanya tidak teratur/menetap; (4) tidak terkena kebijakan pemerintah secara langsung untuk membantu golongan ekonomi lemah; (5) unit usahanya mudah beralih antar sub sektor; (6) berteknologi sederhana; (7) skala operasinya kecil karena modal dan perputaran usahanya juga relatif kecil; (8) tidak memerlukan pendidikan formal, lebih berdasar pada pengalaman sambil bekerja; (9) pada umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu pekerja keluarga yang tidak dibayar; (10) bermodal tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi dan (11) sebagian besar hasil produksi atau jasanya dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian golongan menengah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pola kerja para pedagang sektor informal di pasar Tanjung sebagaimana ciri-ciri di atas. Mereka membagi waktu kerja secara bergantian dengan anggota keluarga yang lain, bisa suami atau istri, atau anak mereka. Seperti pengakuan bu Tt berikut:

“...ya usaha saya mulai buka jam 7.00, habis ini bapak yang ganti jam 5.00 sampai nanti jam 9 .00 nanti jam 2.00 bapak kesini lagi melayani mlijo-mlijo, mereka sudah menjadi langganan sini.” (wawancara 27 Nopember 2014)

Terkait ciri-ciri pedagang sektor informal dari aspek permodalan, penuturan bu Wl juga mempertegas pernyataan bu Tt sebagaimana berikut:

“...modalnya modal sendiri..saya kan jualannya sedikit jadi cukup modal sendiri, tapi banyak yang nawari, dulu juga ada yang nawari dari Al Ikhwan untuk orang-orang yang jualan khusus bagi jamaahnya jadi nggak ada bunganya ...kalau nggak salah itu punya lambaga

masjid..banyak orang yang nawarkan tapi saya ndak mau...takut waktu bayar ndak ada uangnya.” (wawancara 30 Nopember 2014)

Sedikit berbeda dengan teori di atas utamanya terkait dengan permodalan, belakangan ini beberapa ciri tersebut telah bergeser, beberapa kebijakan pemerintah pun telah ada yang secara langsung diarahkan untuk membantu sektor ini agar dapat berkembang, antara lain melalui intervensi kredit bagi industri kecil dan rumah tangga, atau melalui pinjaman Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Proyek Penanganan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terkait dengan ciri-ciri yang lain, sejalan dengan ciri-ciri tersebut sektor informal dapat diartikan sebagai sektor kegiatan usaha yang tidak memiliki surat izin pendukung, sehingga tidak menerima perlindungan ekonomi atau perlindungan hukum dari pemerintah, yang diusahakan dengan atau tanpa mendirikan bangunan, atau diusahakan pada fasilitas umum, fasilitas sosial, di atas tanah/bangunan pribadi, pada usaha perdagangan, jasa, maupun yang bersifat industri (Dialog Publik Forum Gelar Kota, ITB, 2003).

Tidak jauh berbeda dengan beberapa hasil penelitian tentang karakteristik sektor informal, khususnya sebagai pedagang kaki lima, kelompok pedagang sektor informal yang bekerja di Pasar Tanjung secara umum bervariasi. Setidaknya ditemukan sembilan kelompok pedagang yang ada di Pasar Tanjung, yaitu (1) penjual makanan dan minuman (warung makan), (2) penjual buah-buahan, (3) pedagang sayur-sayuran dan sembako, (4) penjual alat-alat dapur, (5) penjual VCD/DVD, (6) penjual daging, ikan laut dan ikan asin, (7) penjual makanan/kue, (8) pedagang konveksi (seragam sekolah, kostum olahraga, celana pendek, dll), dan (9) serta penjual dan sekaligus jasa service jam tangan.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa, pedagang sektor informal dapat ditemukan setiap lokasi di pasar Tanjung. Mereka menempati los atau kios di area bangunan pasar. Pedagang yang menempati los-los pasar menggunakan peralatan rak dan gantungan karena mereka menempati sela-sela kios pedagang baju atau konveksi dan pedagang lainnya yang skala usahanya bukan tergolong sektor informal. Berbeda dengan pedagang yang menempati los daerah pinggir pasar, mereka

menggunakan meja dan rak untuk tempat barang dagangannya yang kebanyakan berupa makanan, buah, sandal dan baju, serta sebagian adalah pedagang warung kopi. Sementara itu pedagang di lantai atas yang kebanyakan adalah pedagang ikan dan palawija menempati lapak dan kios yang tersedia sebagai tempat berjualan secara permanen. Kelompok pedagang yang lain adalah para pedagang yang berada di sepanjang Jl. Wahidin, mereka adalah korban penertiban atau penataan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Hasi Madani selaku kepala Dinas Pasar kabupaten Jember menuturkan bahwa jumlah pedagang sektor informal di lokasi ini yang menjadi korban penggusuran adalah sebanyak 31 orang, pedagang yang menjadi korban penggusuran ini adalah mereka yang membangun lapak permanen. Selebihnya adalah mereka yang hanya menjadi korban penataan. Mereka yang berdagang disepanjang jalan ini berdagang secara linier dengan lapak-lapak, dengan cara lesehan bahkan disepanjang jalan ini juga banyak yang menggelar barangnya di atas kendaraan. Berikut ini adalah Gambar 4.5 yang menunjukkan tipologi lokasi pedagang di Pasar Tanjung.



Gambar 4.5. Aktivitas Dagang di Jl. Wahidin Soedirohoesodo
(Sumber: Data Primer, 2014)

Di lokasi ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, sebelum adanya kebijakan penertiban para pedagang dengan bebas menjual barang dagangannya dengan menggunakan lapak-lapak permanen sepanjang hari mulai pagi hingga dini hari, sehingga ini sangat mengganggu lalu-lintas. Pasca penertiban pedagang kondisi

berubah, para pedagang yang berjualan di lokasi ini hanya diperbolehkan berjualan mulai pukul 17.00 hingga pagi dini hari. Para pedagang yang berada di lokasi ini adalah pedagang lama yang sebelumnya menggunakan lapak-lapak permanen. Aturan yang diberlakukan oleh Dinas Pasar adalah mewajibkan para pedagang untuk mengemas barang dagangannya setelah mereka selesai berjualan. Seperti diungkapkan Staf Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung berikut:

“...ada kesepakatan dengan pedagang, mereka kan leshan namanya, jadi setelah selesai ya diringkesi, jam operasionalnya mulai nanti sore sampai pagi.” (wawancara, 24 Oktober 2014)

Pernyataan pak Tfq dibenarkan oleh pak Ag, penjual kaset CD yang menempati lokasi sebelah Timur pasar Tanjung berikut:

“...yang disini jualan nanti sore sayur sayur saja, jam 04.00 di sini di situ ndak boleh. jualannya nanti sore jam empat sampai pagi...rame kan jualan sayur, yang pinggir.” (wawancara, 24 Oktober 2014)

Akibat diberlakukannya jam operasional berdagang oleh pemerintah kabupaten Jember melalui Dinas Pasar, banyak pedagang yang memanfaatkan kendaraan bermotor untuk berjualan. Seperti yang nampak pada Gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6. Seorang Pedagang menjual barang dagangan dengan menggunakan kendaraan bermotor (Sumber: Data Primer, 2014)

Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa tipologi pedagang sektor informal atau PKL di pasar Tanjung dibedakan menjadi pedagang menetap, semi menetap dan keliling. Pedagang makanan, palawija dan buah merupakan jenis

pedagang yang menetap, sedangkan pedagang yang terdapat di Jl. Wahidin merupakan pedagang semi menetap. Berdasarkan hasil penelitian pedagang sektor informal akan dijelaskan klasifikasinya berdasarkan dua jenis tipologi ini, seperti Tabel. 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Tipologi PKL di Pasar Tanjung

No	Dasar Klasifikasi	Tipologi	
		Menetap	Semi menetap
1.	Jenis barang dagangan	Pedagang barang	Pedagang barang
2.	Konsentrasi	berkelompok	Linier
3.	Waktu berdagang	Pagi – malam (07.00 - 22.00)	Sore – pagi (15.00 – 06.00)
4.	Lokasi berdagang	Kios/los atas dan bawah	Pinggir pasar (Timur Pasar)
5.	Akses modal	Modal sendiri/pinjaman	Modal sendiri /pinjaman

Sumber : (Data primer 2014, diolah)

Berdasarkan sifat layanannya pedagang sektor informal dipasar Tanjung dibagi atas pedagang menetap, pedagang semi menetap dan pedagang keliling. Ciri dari pedagang sektor informal menetap ini pada umumnya terdapat pada pasar, karena mereka menata barang dagangan mereka dengan menggunakan meja, atau rak-rak serta gantungan. Selain itu waktu berjualan mereka rata-rata dimulai dari pagi hingga sore hari. Sedangkan untuk pedagang yang berada di Jl. Wahidin tipologinya adalah semi menetap, mereka berdagang pada waktu tertentu, dan dapat berpindah-pindah. Seperti tampak pada Gambar 4.7 berikut:



Gambar 4.7. Tipologi Aktivitas Dagang Sebelum dan Setelah Penertiban di Jl. Wahidin (Sumber; Data Primer, 2014)

Dokumentasi di atas menunjukkan bahwa, telah terjadi perubahan kelembagaan sektor informal yang melingkupi budaya pasar di pasar Tanjung yang melibatkan aktor dan agen-agen sosial. Banyak indikator yang mendukung alasan perubahan kelembagaan dalam hal mobilitas, penetapan lokasi berdagang, akses modal. Indikasi pendukung yang mendorong seorang pedagang untuk ”menetap” di suatu lokasi adalah adanya ijin berdagang dari pemerintah.

4.2 Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga Ibu Pekerja Sektor Informal

Kelembagaan tidak bersifat statis, namun dinamis sesuai dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antar kepentingan. Diluar itu, sifat dinamis dari kelembagaan juga disebabkan oleh berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perubahan masa Yustika (2006). Manig (1991) menyatakan bahwa perubahan kelembagaan di dalam masyarakat berarti terjadinya perubahan di dalam prinsip regulasi dan organisasi, perilaku, dan pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut biasanya menuju ke peningkatan perbedaan prinsip-prinsip dan pola-pola umum di dalam kelembagaan yang saling berhubungan. Lebih lanjut Manig (1992) menyatakan bahwa tujuan utama dari setiap perubahan kelembagaan adalah untuk meninternalisasikan potensi produktivitas yang lebih besar daripada perbaikan pemanfaatan sumberdaya yang kemudian secara simultan menciptakan keseimbangan baru. Pemahaman tersebut mengartikan bahwa, perubahan kelembagaan dapat dianggap sebagai proses terus menerus yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas interaksi (ekonomi) antar pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi permanen merupakan bagian penting dari perubahan kelembagaan.

Kelembagaan akan berubah sesuai dengan tantangan atau kondisi zaman baik yang disengaja atau yang sesuai dengan dinamika sosial. Perubahan kelembagaan pada aras ini memiliki dua dimensi, yaitu *pertama*, perubahan konfigurasi antar pelaku ekonomi yang merupakan komunitas pedagang sektor informal akan memicu terjadinya perubahan kelembagaan (*institutional change*) yang bersifat alamiah. Pada

kondisi seperti ini, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan (kepentingan/konfigurasi) pelaku ekonomi yaitu para pedagang sektor informal. Perubahannya hanya terbatas pada keberadaan komunitas pedagang sektor informal. Kedua, perubahan kelembagaan sengaja didesain untuk memengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi. Peran pemerintah pada tahap perubahan ini sangat besar, ada kekuatan-kekuatan pemerintah yang berperan terhadap perubahan ini. Pada posisi ini, kelembagaan ditempatkan secara aktif sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi (termasuk aktor-aktor yang terlibat di dalam kelembagaan komunitas dan pasar). Pola perubahan kelembagaan pedagang sektor informal yang berlangsung di Pasar Tanjung berjalan secara dinamis melalui peran pedagang, dan pemerintah sekaligus mengubah dinamika ekonomi rumah tangga para pedagang sektor informal

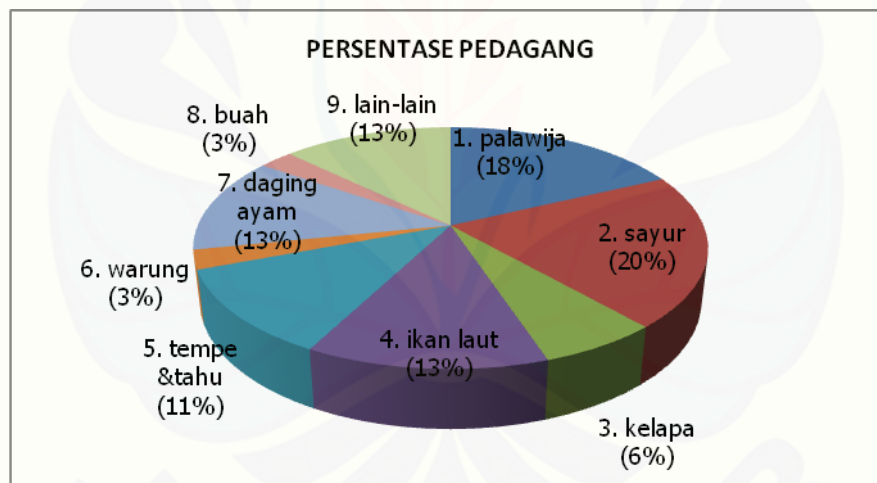
4.2.1 Kelembagaan Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung Sebelum dan Setelah Penertiban

Komunitas pedagang sektor informal terbentuk berdasarkan atas kesamaan masalah dan kepentingan yang dihadapi bersama oleh sekelompok manusia, dalam hal ini adalah keberadaan komunitas pedagang sektor informal berdasarkan pada kesamaan lokasi (teritorial) yang dapat menciptakan ikatan sosial bersama serta di antara anggota komunitas terjadi interaksi sosial yang dapat menguatkan posisi mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Tonny (2003) yang mengutip pendapat Wilkinson (1970), yang menyatakan bahwa komunitas merupakan orang-orang yang hidup di suatu tempat (lokalitas) dengan membentuk kumpulan dimana mereka mampu membangun sebuah konfigurasi sosial budaya dan secara bersama-sama menyusun aktivitas-aktivitas kolektif.

Pedagang Sektor Informal atau biasa disebut Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Tanjung bukan merupakan suatu fenomena yang baru. Keberadaannya sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan bagian yang sebenarnya memiliki ketahanan yang cukup handal dibandingkan sektor-sektor usaha lainnya. Terbukti disaat unit-unit usaha lainnya tersingkir akibat badai krisis ekonomi, justru sektor ini tumbuh dan

berkembang hampir di setiap kota termasuk Jember. Dilihat dari perkembangannya, jumlah PKL di pasar Tanjung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Di Pasar Tanjung khususnya yang berada di Jl. Wahidin (Timur Pasar) merupakan lokasi yang memiliki jumlah pedagang sektor informal paling banyak. Lokasi ini sebelum penertiban merupakan tempat berdagang bagi para pedagang sektor informal (pedagang kaki lima). Kawasan Jl. Wahidin (Timur Pasar) ini merupakan pusat kegiatan perdagangan bagi pedagang sektor informal di pasar Tanjung selama bertahun-tahun. Pemanfaatan lokasi tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan pangan khususnya palawija. Sebagian besar mereka menjual sayur, daging ayam, tahu, tempe, ikan laut, buah-buahan, telur, hasil kebun berupa singkong dan ketela, kacang tanah dan lain-lain. Secara rinci, persentase untuk masing-masing barang yang diperdagangkan ditunjukkan pada Gambar 4.8 berikut:



Gambar 4.8 Persentase Pedagang Sektor Informal Berdasarkan Jenis Barang di Jl. Wahidin Soedirohoesodo. (Data primer 2014, diolah)

Para pedagang sektor informal yang ada di lokasi ini menempati area trotoar bahkan mereka memanfaatkan badan jalan sebelah timur pasar Tanjung untuk kegiatan berdagang. Aktivitas-aktivitas kolektif yang dimaksud sesuai dengan teori di atas mereka lakukan dengan jalan memanfaatkan lokasi berdagang mulai pagi hari sampai

malam hingga dini hari. Ikatan sosial yang mereka bangun juga sangat kuat. Hal ini mereka buktikan dengan berani membangun lapak-lapak permanen untuk aktivitas dagang mereka.

Jumlah pedagang sektor informal yang menempati wilayah timur pasar Tanjung tidak kurang dari 100 pedagang. Jumlahnya setiap hari dapat berubah karena banyak para pedagang yang selain berjualan dengan lapak permanen juga terdapat pedagang yang menjual dagangannya dengan cara lesehan. Tidak hanya terbatas pada mereka yang menempati lokasi dagang secara permanen, di lokasi ini juga dimanfaatkan bagi mereka para pedagang yang menjual barang dagangannya dengan cara berpindah-pindah. Mereka para pedagang dalam kelompok ini adalah para pedagang yang menjual kelompok barang-barang seperti; buah, pedagang jamu keliling dan pedagang kue-kue. Pedagang sektor informal di lokasi ini berani menggunakan membangun lapak semi permanen bahkan lapak permanen karena komunitas yang ada memiliki ikatan emosional yang kuat. Upaya penertiban sebetulnya telah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah daerah namun karena kuatnya perlawanan atas nama paguyuban pedagang kaki lima membuat upaya itu terus mengalami kegagalan.

Sektor informal dapat dibedakan dengan sektor formal berdasarkan karakteristik pekerjaan dan unit usahanya (Hidayat, 1986). Sektor formal memiliki ciri pekerjaan yang didasarkan atas kontrak dan aturan kerja yang jelas, sistem pengupahan yang relatif menetap, menuntut beberapa persyaratan yang membawa konsekuensi persyaratan pekerja dengan skill dan tingkat pendidikan tertentu bahkan pengalaman dibidangnya; unit usaha ini relatif bermodal besar, berskala besar dan berteknologi tinggi. Sementara itu sektor informal memiliki ciri pekerjaan tidak didasarkan pada kontrak kerja dan aturan yang jelas, bahkan seringkali bekerja untuk dirinya sendiri, penghasilan tidak tetap, tidak membutuhkan syarat pendidikan dan keahlian khusus, unit usahanya relatif bermodal kecil, pemilikan oleh individu atau keluarga, bersifat lokal atau beroperasi di pasar lokal, padat karya dengan teknologi madya.

Pembangunan suatu pusat kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi kegiatan perdagangan sangat bergantung pada lokasi. Begitu juga halnya dengan munculnya kegiatan perdagangan sektor informal. Aktivitas sektor ini kebanyakan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis dengan tingkat kunjungan yang sangat tinggi. Fenomena ini sangat berkaitan dengan salah satu fungsi pemasaran dalam kegiatan perdagangan tidak terkecuali dengan pedagang sektor informal, yaitu mendekatkan produk atau komoditi pada konsumen (*place utility*). Oleh karena itu aktivitas kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir di lokasi-lokasi pusat keramaian seperti pada kawasan perdagangan (pusat perbelanjaan), perkantoran, lembaga pendidikan, perumahan, rumah sakit, serta sepanjang jalan protokol, dan lokasi strategis lainnya.

Banyaknya pedagang sektor informal di lokasi ini sebelum terjadi penggusuran (penertiban) tidak terlepas dari lokasi yang sangat strategis bagi kegiatan usaha. Masyarakat dapat langsung membeli barang kebutuhannya dengan tetap mengendarai sepeda motor atau kendaraan lain untuk memilih barang yang dibutuhkan. Kondisi inilah yang kemudian memicu kesemrawutan serta kekumuhan lokasi ini. Para pedagang semakin banyak dan menjual barang dagangannya sampai ke bahu jalan. Pada awal pendirian pasar Tanjung lokasi ini sebenarnya lebih dikenal dengan sebutan pasar sore, artinya para pedagang hanya boleh berjualan di lokasi ini pada sore hari. Akan tetapi dalam perkembangannya dengan semakin banyaknya pedagang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akhirnya para pedagang sektor informal menjual barang dagangannya sejak pagi atau siang sampai malam hingga dini hari. Seperti penuturan seorang informan ibu Km (55 tahun) pemilik warung kopi di Pasar Tanjung yang telah berdagang sejak tahun 1984 bahwa;

“...kalau PKL orangnya agak sulit, disuruh pindah jam tidak mau asalnya, namanya pasar sore kan bukanya sore nah orang-orang itu tidak mau, coba manut ya ndak mungkin dipindah, disuruh buka jam 14.00 ya buka jam 14.00 sampai pagi terus tidak permanen, tapi tidak mau, mereka melanggar perjanjian...dulu sudah minta rombong mau buka sore, tapi tetep.”(wawancara 26 Nopember 2014)

Semakin banyaknya jumlah pedagang di pasar Tanjung tidak terlepas dari makin banyaknya jumlah pendatang yang datang ke Jember. Mereka memilih untuk menempati area yang ada di Pasar Tanjung dengan cara membeli lokasi jualan yang sebelumnya ditempati orang asli Jember. Rata-rata para pendatang yang memilih pekerjaan sebagai penjual atau pekerja sektor informal berasal dari Madura. Seperti dituturkan oleh pak Syr (65 tahun), penjual dan pemilik usaha service jam tangan yang sudah menekuni usaha ini selama hampir 30 tahun:

“...mereka jualan sebelumnya mulai jam 4.00 sore sampai malam ada yang sampai pagi..akhirnya-akhirnya dikasih gerobak ya tambah netep, ndak mau pindah...dulu waktu jamannya Bupati siapa itu, pak Syamsul...waktu masih jamannya politik, partai apa itu..Golkar, PPP terus...PDI, mungkin dikasih gerobak biar dipilih. Dulu yang jualan hanya orang sini, akhirnya banyak pendatang-pendatang yang rata-rata dari Madura. Akhirnya banyak orang maduranya. Akhirnya tempat-tempat jualan itu dijual pada orang Madura.” (wawancara 13 Oktober 2014)

Pernyataan pak Syr diperkuat dengan pengakuan bu Min (55 tahun) penjual makanan (nasi) yang sudah berjualan di pasar Tanjung selama hampir 30 tahun. Ketika ditanya asal dan asal mula menjadi pedagang:

“...saya ini dari madura mas, saya sebelum ini jualan nasi jualan kopi, itu kumpul dengan jualan kaset, selama tiga tahun.. pernah juga jualan nasi selama tiga puluh tahun.” (wawancara 13 Oktober 2014)

Bu Min juga mengungkapkan bahwa ketika awal datang ke Jember sempat tidak kebagian tempat jualan di pasar Tanjung. “sekitar 40 pedagang saat itu tidak kebagian tempat jualan,” ungkapnya.

Berdasarkan penuturan informan di atas menunjukkan bahwa, keberadaan para pedagang sektor informal ternyata membawa permasalahan sendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi keberadaan mereka mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun disisi lain mereka ternyata tidak mentaati aturan yang telah menjadi kebijakan terkait keberadaan para pedagang sektor informal khususnya yang ada di lokasi Timur pasar. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan berupa penertiban (penggusuran).

Sebagai pusat kegiatan perdagangan (pasar tradisional) di tengah bertambahnya pusat perbelanjaan modern Pasar Tanjung memiliki keunggulan karena berada di tengah-tengah kota Jember. Lokasi ini sangat mudah dijangkau baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun sarana transportasi umum. Rekayasa jalur lalu-lintas kendaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Polres Jember dan juga Laboratorium Transportasi Universitas Jember juga semakin memudahkan masyarakat untuk dapat menuju pasar Tanjung. Kondisi ini juga memudahkan arus keluar masuk pedagang sekaligus sirkulasi barang dan jasa baik yang masuk maupun keluar pasar Tanjung sehingga aktivitas perdagangan yang ada di pasar Tanjung semakin lama semakin padat. Karakteristik sektor informal yang sangat fleksibel baik dari segi waktu usaha, jenis usaha dagang dan lokasi mendorong semakin banyaknya para pedagang untuk membuka usaha di Pasar Tanjung.

Pedagang yang ada di Pasar Tanjung sebagian besar merupakan penduduk asli Jember, tetapi sebagian juga berasal dari luar Jember atau pendatang. Kebanyakan para pendatang tersebut telah lama tinggal di kota Jember, sebagian besar mereka bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi tempat berjualan yaitu di daerah sekitar Pasar Tanjung yang biasa disebut dengan perkampungan timur pasar Tanjung. Pasar Tanjung sebagai pasar tradisional terbesar berada ditengah-tengah kota sekaligus merupakan pasar induk bagi pasar-pasar lain yang ada di kota Jember menyediakan beraneka ragam barang kebutuhan. Selain menawarkan bahan-bahan kebutuhan pokok berupa produk-produk hasil pertanian seperti sayur dan buah-buahan, hasil laut, para pedagang Pasar Tanjung juga banyak menjual pakaian, hasil kerajinan, makanan dan minuman, barang-barang elektronik serta jasa service dan penjualan jam tangan, radio, televisi dsb. Keberadaan para pedagang di pasar Tanjung juga memiliki kelompok paguyuban, seperti yang dilakukan kelompok penjual arloji (jam tangan) dengan membentuk paguyuban yang bernama Ikatan Pedagang Arloji dan Radio (IKPAR).

Sebelum dilakukan penertiban (penggusuran) besar-besaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Jajaran Polres Kabupaten Jember

pada hari Senin, 8 September 2014, pedagang sektor informal di wilayah sekitar Pasar Tanjung terpusat disepanjang Jl. Untung Suropati (Utara Pasar Tanjung), Jl. Wahidin Soedirohoesodo (Timur Pasar Tanjung), dan sepanjang Jl. Samanhudi (Barat Pasar Tanjung). Banyak para pedagang yang menjalankan aktivitas ekonomi mulai pagi hingga malam atau bahkan dini hari, terutama adalah pedagang sayur dan ikan di Timur Pasar Tanjung (Jl. Wahidin). Para pedagang sektor informal tersebut menempati lokasi berdagang berdasarkan waktu dan jenis barang yang diperdagangkan. Seperti pada Gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9 Pedagang Sektor Informal Menjelang Penertiban (Data Sekunder, 2014)

Sepanjang Jl. Untung Suropati banyak ditempati para pedagang pakaian, perlengkapan sholat, perlengkapan sekolah (tas, sepatu, kaos kaki), ada juga pedagang peralatan rumahtangga serta pedagang VCD/DVD. Mereka yang menempati lokasi ini beraktivitas sepanjang pagi hingga sore hari bahkan ada juga yang sampai malam hari. Di Jl. Samanhudi sebelah barat terkonsentrasi para pedagang yang berjualan makanan dan minuman dengan memanfaatkan rombongan, dan sebagian juga memanfaatkan trotoar pinggir jalan dengan menggunakan tenda-tenda. Mereka yang menempati lokasi ini menjalankan usahanya mulai pagi sampai sore hari. Pada malam hari terkadang masih terdapat pedagang yang berjualan makanan dan minuman. Sementara itu di sisi Timur Jl. Samanhudi terdapat lapak-lapak pedagang yang kebanyakan mereka adalah penjual barang-barang berupa baju-baju bekas dengan memanfaatkan tenda-tenda yang sudah lapuk sehingga lokasi ini terkesan sangat kumuh. Kegiatan

operasional para pedagang di sisi Timur Jl. Samanhudi ini hanya terbatas mulai pagi hingga sore hari. Berbeda kondisinya dengan yang ada di Jl. Untung Suropati. Seperti Gambar 4.10 berikut:



Gambar 4.10 Lapak-lapak Pedagang Sebelum Penertiban (Data Skunder, 2014)

Aktivitas paling padat para pedagang sektor informal terjadi di Jl. Wahidin (Timur Pasar Tanjung). Mereka kebanyakan adalah pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, sembako, daging dan ikan laut, pedagang hasil kebun dan pertanian serta penjual makanan atau kue. Mereka tidak hanya menempati lapak-lapak permanen yang dibangun di sisi Timur sepanjang Jl. Wahidin, akan tetapi juga banyak pedagang yang menjual barang dagangannya dengan cara lesehan disepanjang jalan. Kegiatan dagang di lokasi ini pagi hingga sore hari untuk sebagian pedagang dan akan mencapai puncaknya pada malam hingga dini hari. Para pembeli kebanyakan datang pada malam hari karena pada saat itu hampir semua kebutuhan konsumsi makanan dan bisa didapatkan di pasar ini. Kepadatan aktivitas dagang di lokasi ini juga ditambah dengan banyaknya kendaraan pengangkut sayur-sayuran, buah dan hasil kebun lainnya yang melakukan bongkar-muat di ujung jalan Wahidin sebelah selatan. Pemandangan ini telah menjadi kegiatan rutin setiap hari selama bertahun-tahun.

Jumlah pedagang pada saat pengusuran tidak kurang dari 200 orang pedagang. Atas nama proyek pembangunan kota dan rekayasa perubahan jalur lalu-lintas dalam kota, pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu jajaran Polres Jember menertibkan (menggusur) pedagang

sektor informal di wilayah sekitar Pasar Tanjung yang padat dipenuhi para pedagang sektor informal. Akhirnya, pada tanggal 8 September 2014, para pedagang sektor informal di tiga lokasi tersebut digusur. Seluruh bangunan lapak semi permanen dan lapak yang dibangun permanen diratakan dengan tanah. Saat ini mereka hanya diperbolehkan berdagang pada sore hari sampai pagi dengan ketentuan bahwa setelah kegiatan dagang selesai, para pedagang harus mengemasi barang dagangannya.

Sementara itu para pedagang yang menempati kios/los, atau lokasi tertentu di dalam pasar Tanjung tidak terkena penertiban. Sebagian besar mereka adalah para pedagang sayur, ikan dan daging yang ada dilantai atas. Sementara itu, di lantai bawah para pedagang buah, penjual makanan, penjual alat masak di dalam pasar masih dapat menjalankan usahanya. Mereka terdaftar di Dinas Pasar dengan membayar retribusi berjualan setiap hari/bulan. Seperti diungkapkan oleh ibu Rs, Penjual buah-buahan di dalam pasar Tanjung;

“...kami ini didaftar mas di Dinas Pasar, kalau saya membayar retribusi tiap bulan, yang yang didepan itu (sambil menunjuk pedagang buah yang menempati sela-sela bangunan pasar yang ada didepan tokonya) membayar tiap hari.” (wawancara 25 Oktober 2014).

Pengakuan ini diperkuat dengan pernyataan ibu Wl (60 tahun), pedagang makanan ringan, minuman dan rokok yang menempati area bangunan pasar sebelah Timur selama lebih dari 18 tahun, ibu Wl merupakan pedagang asli dari Sukowono yang meneruskan usaha dagang ibu mertuanya yang berasal dari Madura, Ia mengatakan bahwa setiap hari membayar retribusi sebanyak tiga kali untuk retribusi kebersihan dan retribusi tempat usaha dagangnya.

“... ini kan di pinggir yang di depan ya dibongkar semua...ini bayarnya setahun, tapi tiap hari kan ditagih sehari tiga kali, pagi karcis sampah, karcis biasa, terus nanti sore, kalau setiap tahun kan memperbarui ijin tempat usaha ini, kalau sudah mati di perbaharui, setahun tiga ratus ribu, tapi pas waktu kantor pasar tidak ada ketuanya (maksudnya Kepala Pasar) dua tahun apa tiga tahun Rp 300.000,-, tiap kios itu lain-lain iurannya ada yang ditarik Rp 1.000.000,-, Rp 2.000.000,-, tapi orang-orang tidak mau, ya kalau besar kan punya saya kecil, jadi ya Rp 300.000,-.” (Wawancara 25 Oktober 2014)

Pasca penggusuran, pedagang yang menjalankan usaha pada malam hari di Jl. Wahidin hanya terbatas para pedagang sayur-sayuran, itupun mereka hanya menggelar barang dagangannya dengan cara lesehan. Di daerah ini kondisinya sudah bersih dari PKL mereka paling banyak dipindah ke pasar Tegal Besar. Seperti diungkapkan petugas Dinas Pasar Unit pasar Tanjung, pak Tfq (50 Tahun):

“...memang yang paling banyak pedagangnya dipindah ke Pasar Tegal Besar, yang didata kan hanya PKL (Pedagang Kaki Lima), kalau lesehan kan gelar tikar selesai terus diringkes, itu lesehan namanya.” (Wawancara 13 Oktober 2014)

Ketika ditanya jumlah pedagang yang dipindah pak Tfq menyampaikan bahwa jumlah pedagang yang dipindah awalnya sekitar 225 begitu didata ternyata lebih. Pedagang yang paling banyak dipindah adalah pedagang yang menempati Jl. Untung Suropati yang utara pasar bukan yang di Timur Pasar.

Penjelasan pak Taufiq tersebut membuktikan bahwa memang karakteristik para pedagang sektor informal sangat bervariasi, mereka menempati lokasi di pasar Tanjung ada yang memiliki ijin dan ada juga para pedagang yang tidak memiliki ijin berdagang. Lebih lanjut pak Tfq menuturkan:

“... awalnya mereka tidak mau dipindah, begitu digusur gitu bingung mereka, apalagi tidak mendaftarkan awalnya, malah yang di Pasar Tegal Besar itu kekurangan tempat, orangnya ada tapi tempatnya tidak ada, karena yang paling ramai kayaknya ya ...pasar Tegal Besar itu, selain ke pasar Tegal Besar, juga dipindah ke pasar Kreongan, pasar Gebang, pasar Sukorejo, yang menentukan lokasinya ya petugas pasar bukan pedagangnya, mana yang masih kosong ya itu yang ditawarkan ke pedagang.” (Wawancara 13 Oktober 2014)

Setelah dilakukan penertiban, kegiatan dagang yang menempati ruas jalan Wahidin sudah tidak diperbolehkan. Fungsi jalan ini saat ini hanya digunakan untuk area parkir kendaraan. Aktivitas dagang yang dilakukan oleh para pedagang sektor informal di Jl. Wahidin S (sisi Timur pasar Tanjung) masih ada. Mereka menjalankan kegiatan dagangnya hanya terbatas pada sore hari pukul 17.00 WIB hingga pukul 05.00 pagi. Pedagang yang menjalankan kegiatan usaha di lokasi ini kebanyakan adalah pedagang sayur, ikan laut, dan buah-buahan, termasuk juga pedagang bumbu

masakan. Mereka menggunakan area ini dengan cara menggelar dagangan di jalan (lesehan) atau menggunakan meja. Pada malam hari, area yang ada digunakan PKL untuk berdagang sayur dan ikan, serta hasil kebun dan pertanian. Jumlah pedagang yang menempati area ini sekitar 50-an. Para pedagang sektor informal yang berdagang pada malam hari biasanya selesai jam 23.00 bahkan sampai pagi atau ketika dagangannya sudah habis. Seperti disampaikan Ag berikut:

“...kita memang sudah sepakat dengan petugas pak, lokasi ini boleh ditempati bersama oleh pedagang, bahkan siapa pun yang ingin berdagang di sini...tapi ya tidak semuanya bisa tertampung...yang diutamakan adalah mereka yang dulu digusur dan boleh berdagang di sini. Aturannya, kami boleh berjualan mulai pukul 17.00 dan setelah selesai harus segera diringkes.” (wawancara 25 Oktober 2014)

Pada malam harinya, kegiatan dagang di lokasi ini tidak pernah sepi dari pembeli, apalagi lokasi sentra pedagang di pasar Tanjung ini ramai dan padat lalu lintas. Keberadaan para pedagang di pasar Tanjung khususnya yang menempati ruas jalan Wahidin setidaknya masih memberikan ciri khas sebuah pusat kegiatan dagang yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan khususnya sayur dan ikan serta hasil perkebunan atau pertanian.

4.2.2 Pedagang Sektor Informal dalam Perspektif Kebijakan Penataan

Pada bagian berikut menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan publik yang disusun dan diimplementasikan pemerintah kabupaten Jember memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi pedagang sektor informal atau pedagang kaki lima. Kebijakan publik yang dimaksud merupakan implementasi Peraturan Daerah kabupaten Jember yang mengatur persoalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Jember, Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Jember, Rencana Tata Rencana Wilayah kabupaten Jember, Peraturan Daerah tentang Pembinaan PKL di kabupaten Jember.

Arti kebijakan mengandung makna spesifik dan umum. Makna kebijakan arti spesifik adalah ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan

(*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sementara dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Greer and Paul Hoggett (1999), memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik.

Kebijakan publik memiliki arti yang lebih luas karena merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Paparan yang sama tentang kebijakan disampaikan oleh Nugroho (2009:11), negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tirani, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Tata kelola negara (*governance*) termasuk dalam arti kebijakan publik, yaitu upaya mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Setiap kepala Daerah pasti berkepentingan untuk mengendalikan sekaligus juga mengelola wilayahnya.

Kepala daerah dalam mengelola daerahnya, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan daerah tersebut, tetapi juga mengelola wilayah pemerintahannya agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau daerah sesungguhnya. Sebagaimana dikatakan Santoso (2010:4), negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai. Dalam hubungannya dengan tata kelola pemerintahan kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimengerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (*setting*) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa untuk mengatur rakyat dan pihak yang dikuasai atau pihak yang harus mengikuti aturan pemerintah.

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari sektor informal dalam perspektif kebijakan publik, berada pada posisi pihak yang seharusnya dilayani, sedangkan pemerintah kabupaten Jember beserta aparaturnya merupakan pihak yang sudah semestinya memberi pelayanan melalui kebijakan yang diambil. Sebagaimana pernyataan Ndraha (2003), pemerintah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas produk-produk pemerintah, dengan melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pemerintah bertugas melakukan pelayanan publik, karena pemerintah merupakan badan publik yang diadakan tidak lain adalah untuk melayani kepentingan publik, sedangkan dalam hal layanan sipil, pemerintah setiap saat harus siap sedia memberikan layanan kepada setiap orang yang membutuhkan. Realitasnya, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang melayani dan pemerintah sebagai pihak yang dilayani. Itulah sebabnya, dalam praktik pemerintahan seringkali menimbulkan *abuse of power* sehingga terciptanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2008 merupakan wujud kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Jember untuk mengatur, menata, dan membina pedagang kaki lima. Konsiderans Perda nomor 6 tahun 2008 juga menguatkan pertimbangan kebijakan.

“bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial”

Karakter kepala daerah kultur masyarakat daerah yang membedakan bagaimana pemerintah kabupaten mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi pedagang kaki lima meskipun peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima antara daerah yang satu dengan lainnya tidak jauh berbeda. Pada bagian ini juga dikaji tentang kebijakan relokasi dan penertiban yang diawali dengan aktivitas penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah

kabupaten Jember. Hasilnya akan diketahui apa saja bentuk-bentuk respon dan pengaruhnya terhadap para pedagang yang ada di pasar Tanjung terutama yang berlokasi di Jl. Wahidin S (pasar sore).

Kebijakan penataan dan penertiban bahkan sampai pada tindakan penggusuran sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember sejak Bupati Syamsul. Artinya upaya ini sudah melalui proses sosioalisasi kepada para pedagang. Seperti diungkapkan oleh informan bernama Sdq, sekretaris paguyuban pedagang di Jl. Untung Suropati berikut :

“...hasilnya mempertanyakan pertemuan yang hari Jum’at kemarin, karena PKL sekarang ini sedang resah karena, PKL bukan ndak mau di relokasi, siap ditata cuma tempat yang layak misalnya lapangan Talangsari dibangun, jadi konsumen tahu pedagang pindah di sana, jadi satu pasar.”

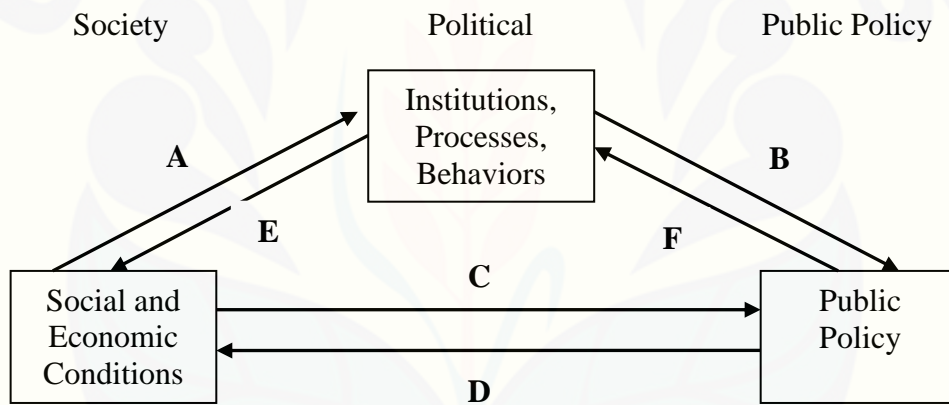
Penuturan informan ini mengindikasikan bahwa sebelumnya telah dilakukan komunikasi dalam bentuk pertemuan antara pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pasar dengan para pedagang yang diwakili oleh komunitas sosial berupa paguyuban pedagang. Penegasan akan hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Jember Fraksi PKB berikut:

“...ya jadi begini menindaklanjuti pertemuan kemarin pada hari Jum’at kemarin dengan PK5 ternyata Pemkab masih besikukuh untuk menertibkan atau merenovasi, saya melihat konsepnya belum matang, Pemkab terburu-buru, karena menertibkan atau relokasi tidak gampang...butuh dialog.”

Substansi dari Perda nomor 6 tahun 2008 sebenarnya menunjukkan adanya keberpihakan kepada pedagang kaki lima. Hal ini diperlihatkan oleh pasal tentang hak pedagang kaki lima dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Pasal 7 Perda tersebut menyatakan bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang izin penempatan pedagang berhak: (1) melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya; dan (3) memperoleh perlindungan keamanan.

Perda nomor 6 tahun 2008 mewajibkan bupati sebagai kepala daerah untuk memberikan pemberdayaan kepada pedagang informal. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3), pemberdayaan terhadap PKL dalam bentuk kegiatan: a. pembinaan manajemen usaha; b. penguatan modal usaha; c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL; d. peningkatan kualitas alat peraga PKL; e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.

Kebijakan melibatkan tiga komponen utama yang saling memengaruhi, yaitu *society*, *political system*, dan *public policy* itu sendiri. Studi tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, Dye, Thomas R. (2002:5) menggambarkan kaitan tiga komponen di atas seperti dalam Gambar 4.11. berikut:



Gambar 4.11. Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya (Dye, 2002)

Nuansa politik dalam dinamika kelembagaan sektor informal ini juga nampak selain juga pemerintah daerah, birokrasi dan organisasi. Mereka menentukan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah. Segitiga kebijakan Dye dapat juga dipakai untuk memotret bagaimana kebijakan publik di Jember dirancang dan diimplementasikan. Di Jember, kebijakan publik yang ditetapkan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, baik berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat maupun tingkat kemiskinan. Kelembagaan dan sistem politik Jember memengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi

masyarakat Jember. Kelembagaan tersebut sangat rumit, mencakupi sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem kultural.

Fenomena sosial ekonomi di Pasar Tanjung selain menjadi perhatian unsur-unsur pemerintah daerah juga mendorong anggota DPRD untuk bermain peran dalam memperjuangkan nasib para pedagang sektor informal yang ada di pasar Tanjung. Kebijakan penataan para pedagang setidaknya mencerminkan tiga komponen dengan tiga kepentingan; *pertama*, komponen sistem politik seperti komentar Anggota DPRD Kabupaten Jember Fraksi PKB berikut:

“...ya jadi begini menindaklanjuti pertemuan kemarin pada hari Jum’at kemarin dengan PK5 ternyata Pemkab masih besikukuh untuk menertibkan atau merenovasi, saya melihat konsepnya belum matang, Pemkab terburu-buru, karena menertibkan atau relokasi tidak gampang...butuh dialog, butuh konsep yang jelas, rapat kemarin saya melihat konsep Pemkab belum matang, harusnya tidak keburu-buru, siapkan anggaran jangan hanya anggaran untuk penertiban, bagaimana nasib PK5 selanjutnya...kita butuh jalan tengah...PK5 jangan dianggap musuh, PK5 harus dianggap mitra, ingat..ingat, hidupnya Pol PP, gajinya Pol PP itu diambil dari keringatnya pedagang...”

Pernyataan tersebut setidaknya menunjukkan adanya peran politik dalam kebijakan penataan pedagang. *Kedua*, kelembagaan pemerintah, hal ini dipertegas dengan komentar yang disampaikan oleh Wakil Bupati Jember berikut:

“...itu kan sebetulnya keputusan bupati yang masalah penertiban di lingkungan pasar Tanjung, ya kita kembali pada keputusan Bupati yang tahun 2008, minimal seperti yang dulu lah,... untuk masalah relokasi kita masih belum memastikan, kami sudah diskusi dengan dinas terkait dengan dinas pasar dan pak bupati, nanti akan dilakukan mapping oleh dinas pasar, kami akan rapat lagi..terkait adanya perlawanan kami sudah berdiskusi bermusyawarah.”

Upaya kelembagaan pemerintah daerah dalam kebijakan penataan kemudian diterjemahkan oleh Dinas Pasar untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pasar berikut:

“...jadi begini, pendataan memang kami lakukan bersama Pol PP kemudian dilakukan sinkronisasi data, kemudian validai, selanjutnya ditemukan PKL yang harus direlokasi..sesuai dengan keberadaan

pasar, seperti pesan pak Bupati yang penting dilakukan yang manusiawi..jadi tidak bisa ditunda lagi, saya selaku Kepala Dinas Pasar berusaha menyesuaikan dengan petunjuk pimpinan sesuai dengan peraturan melaksanakan dengan cara manusiawi.”

Kedua komponen kebijakan di atas setidaknya mengarah pada keberadaan masyarakat pedagang sebagai komponen yang ketiga, bahwa masyarakat seringkali menjadi objek sasaran kebijakan yang sebenarnya bukan mensejahterakan akan tetapi malah memiskinkan jika kebijakan penataan tersebut tidak dimbangi dengan kebijakan lain. Pernyataan informan bernama ibu Rf, selaku ketua paguyuban Pedagang di Jl. Untung Suropati berikut setidaknya memberikan gambaran bagaimana posisi para pedagang terkait kebijakan penertiban (penggusuran):

”...ya ini kan solusinya bagaimana karena rombongan-rombong kami sudah kayak peyek, saat ini kan sudah mau ke Sukorejo, ke Sabtuhan, karena tidak muat ya bagaimana...ya, kami sudah lima hari, karena memang sudah suruh bongkar, sebenarnya pemerintah sebelum, menertibkan pedagang kaki lima disiapkan dulu jadi gak ribut seperti ini, jadi pedagang langsung masuk.., kalau di kota-kota lain tempatnya dulu disiapkan, ini kan ndak... jadi ya seperti ini jadi korbannya pedagang kaki lima..sebenarnya ini sudah nurut semua, kalau sebelumnya disiapkan semua kan ya..Alhamdulillah saya bisa meredam..soalnya dilapangan itu pedagang kan cuma itu itu aja ndak mau melawan...”

Selain para pedagang di Jl. Wahidin yang terkena dampak langsung penertiban, pedagang yang berjualan di lantai atas juga terkena dampak. Keberadaan pedagang sektor informal baik itu pedagang kaki lima (PKL) maupun bentuk usaha yang lain yang makin marak, merupakan persoalan pelik yang tidak mudah diatasi hampir semua kepala daerah, bupati dan walikota di Indonesia. Para pedagang sektor informal umumnya melakukan aktivitas di tempat-tempat publik, seperti trotoar, taman, alun-alun, depan kantor pemerintah, depan sekolah, dan tempat-tempat strategis lainnya. Banyak ruang publik dan pusat-pusat kegiatan ekonomi berubah fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, karena ditempati para pedagang sektor informal untuk berdagang dan menjalankan usahanya. Akibatnya, lingkungan yang ditempati tersebut menjadi kumuh dan terkadang mengganggu arus lalu lintas terutama bagi pejalan

kaki, pengemudi sepeda motor dan mobil. Kondisi yang demikian menyebabkan bupati dan walikota yang menghadapi masalah PKL, membuat kebijakan penataan dan penertiban PKL, tidak terkecuali bupati Jember. Jember memiliki tingkat kepadatan (*density*) yang cukup tinggi, seperti halnya kota-kota lain. Jember menjadi tempat persinggahan serta arus manusia dan kendaraan yang menuju dari dan ke kota-kota sekitarnya, seperti Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.

Berdasar informasi yang diperoleh dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan keberadaan para pedagang sektor informal merupakan persoalan yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan adanya hubungan kelembagaan dan peran dari masing komponen kebijakan publik agar para pedagang tidak merasa dirugikan, pemerintah juga berhasil dalam mengatur dan memberdayakan mereka. Sektor informal memang memberikan konsekuensi dan implikasi tidak hanya secara sosial akan tetapi juga secara ekonomi. Masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008). Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan memberdayakan para pedagang agar kontribusi ekonominya dapat menyumbang pendapatan daerah, dilain hal hak-hak masyarakat secara bersama-sama dapat menggunakan fasilitas umum tanpa harus terganggu dengan keberadaan para pedagang sektor informal. Sebaliknya para pedagang disamping memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha, mendapatkan pembinaan dan perlindungan keamanan, setiap pedagang juga mempunyai kewajiban mematuhi peraturan. Inti dari apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak di atas terkait keberadaan pedagang informal dalam perspektif kebijakan adalah perlunya komunikasi antara para pengambil kebijakan (eksekutif), para pedagang dan secara politik akan diperankan oleh para anggota DPRD (legislatif) sebagai wakil rakyat.

4.2.3 Ibu Rumah Tangga Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung

Adanya berbagai gerakan emansipasi menunjukkan bahwa penghargaan masyarakat terhadap posisi perempuan sudah mengalami peningkatan. Gerakan ini bukan sekedar gerakan yang bertujuan untuk persamaan hak bagi kaum perempuan

saja, tetapi juga bertujuan untuk pengembangan manusia secara utuh (*full humanity*), baik bagi perempuan maupun laki-laki (Fitlayeni, 2010). Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat tidak hanya menuntut kesetaraan peran perempuan dibidang politik, akan tetapi juga dibidang yang lain termasuk bidang ekonomi dan pemerintahan. Perempuan dalam konteks permasalahan ekonomi menjadi sangat penting karena keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi keluarga menunjukkan peningkatan.

Dewasa ini peran serta perempuan dalam menopang perekonomian keluarga semakin dirasakan dan eksistensinya tidak terbantahkan. Hal tersebut didukung oleh terdapatnya kecenderungan semakin tingginya peran serta perempuan dalam berbagai lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini tidak terlepas dari dampak krisis yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998. Peningkatan jumlah usaha sektor informal di Jember yang melibatkan perempuan tidak hanya berada di pasar Tanjung sebagai pasar induk, akan tetapi sektor informal dalam bentuk kegiatan dagang juga banyak muncul di daerah kampus, rumah sakit dan lokasi umum lainnya.

Transformasi perempuan di sektor publik semakin terbuka luas karena banyaknya pilihan jenis pekerjaan yang pada dasarnya memerlukan sumbangsih dari tenaga kerja wanita sesuai dengan sifatnya yang mengarah pada penilaian positif yakni kesabaran dan ketelatenan. Keterlibatan perempuan pada sektor informal di pasar Tanjung mencerminkan bahwa mereka bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Setidaknya ditemukan beberapa tipologi keterlibatan perempuan dalam kegiatan dagang terkait gender di pasar Tanjung antara lain: *Pertama*, peran perempuan dalam menjalankan usaha dagang berkaitan dengan jenis barang dagang; *kedua*, berdasarkan pengaturan atau pembagian waktu kerja dengan suami; *ketiga*, berdasarkan sifat usahanya.

Tuntutan peran perempuan dalam kegiatan dagang dikarenakan jenis barang dagang yang dijual. Peran ini mewakili para pedagang atau penjual nasi dan warung kopi, konveksi, jilbab, sandal dan pedagang kebutuhan sehari-hari. Perempuan dalam kelompok pertama seperti yang dijalani oleh ibu Km, yang menekuni usaha warung

nasi dan kopi sejak tahun 1984. Ibu asal Banyuwangi ini menjalankan usaha sendirian. Warung kopinya mulai buka jam 08.00 sampai 16.00. Usaha semacam ini tidak banyak membutuhkan peran suami karena jenis barang yang diperjual belikan. Sifat barang yang diperdagangkan membutuhkan sentuhan tangan seorang perempuan.

Berdasarkan hasil observasi di pasar Tanjung diketahui bahwa jumlah pedagang perempuan sangat mendominasi utamanya pada jenis-jenis barang yang sifatnya membutuhkan keahlian perempuan. Perempuan dalam kelompok ini memiliki peran yang dominan karena suami telah memiliki pekerjaan lain. Selain bu Km, pedagang lain dalam kelompok ini adalah para pedagang bahan kebutuhan pokok atau toko pracangan. Kelompok kedua adalah perempuan yang menjalankan usaha dagang di pasar Tanjung karena memungkinkan pembagian jam kerja dengan suami. Pada kelompok ini peran ibu rumah tangga tidak begitu dominan dalam sektor informal. Keterlibatan ibu rumah tangga dalam klasifikasi ini masih dapat membagi tugas rumah tangga dengan tugas pekerjaan sebagai pedagang di pasar. Seperti usaha yang dijalankan ibu Tt, pedagang palawija di lantai atas pasar Tanjung. Ibu Tt mengaku bahwa usahanya telah dirintis oleh neneknya sejak beliau masih kecil. Seperti yang diungkapkan berikut:

“kerjanya disini ya oplosan, gantian sama bapak, sebentar lagi bapak datang nanti sampai malam, terus jam dua bapak kesini lagi, sampai pagi bapaknya melayani mlijo-mlijo.”

Senada dengan apa yang disampaikan bu Tt, usaha warung kopi yang dijalankan oleh ibu Skd termasuk jenis usaha yang melibatkan anak-anaknya dengan membagi jam kerja warung terutama sejak ada kebijakan penertiban. Seperti yang disampaikan anak bu Skd berikut : “Saya anak yang ragil, jadi yang jaga warung ini gantian.” kata nya. Hal ini dipertegas oleh bu Skd berikut:

“..anak saya tiga, cucu sembilang, anak saya semua jualan baju di pasar Johar, sekarang kena gusur, jadi sekarang anak dan cucu-cunya kesini semua, suami saya sudah meninggal, warung ini buka terus, siang lain yang jaga, malam lain, habis ini anak saya.”

Untuk jenis pedagang yang ketiga adalah perempuan yang menekuni usaha dagang di pasar Tanjung karena sifat usaha yang dijalankan. Sebagai usaha penunjang ekonomi keluarga, usaha yang ada merupakan usaha yang menjadi tanggung jawab penuh istri karena suami mempunyai pekerjaan lain. Akan tetapi terkadang suami masih ambil peran dalam aktivitas usahanya. Seperti yang jalani oleh ibu Rd, penjual peralatan rumah tangga di lantai atas pasar Tanjung yang telah berlangsung selama lebih dari lima belas tahun, penuturan bu Rd memperkuat peran perempuan sebagai pedagang sektor informal yang punya tanggungjawab penuh terhadap usahanya.

Berikut penuturannya:

“...saya mengelola usaha ini sejak 1994, suami saya yang asli sini, saya Banyuwangi, suami saya buka toko di pasar Gebang, jarang kesini mas paling lama ya setengah jam, habis itu sudah balik lagi, gak pernah lama, paling ya sebentar.”

Ketika ditanya kenapa tidak buka usaha yang lain, atau kenapa tidak pindah lokasi, ibu Rd menuturkan bahwa untuk membuka usaha lain masih harus banyak persiapan, harus babat lagi, butuh modal dan biaya lagi. Ungkapnya.

Penuturan beberapa informan tersebut membuktikan bahwa ibu rumah tangga terjun ke sektor informal tidak hanya karena kesulitan ekonomi akan tetapi juga karena juga untuk mengisi waktu luang. Kesulitan ekonomi terkadang memaksa ibu rumah tangga dari kelas ekonomi menengah ke bawah untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan bekerja di luar sektor domestik. Keterlibatan perempuan untuk bekerja didorong oleh pengaruh faktor keterdesakan/kesulitan ekonomi keluarga, selain adanya faktor kesempatan kerja. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, banyak ibu rumah tangga harus berperan dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga adalah dengan berjualan di pasar selain di tempat-tempat lain. Melihat adanya dimensi gender yang dipaparkan di atas banyak dari ibu rumah tangga mengatasi kesulitan ekonomi mereka dan berusaha memberikan kontribusi pada pendapatan rumah tangga dengan berjualan di pasar. Masalah penting yang dihadapi ibu rumah tangga pekerja, termasuk yang terlibat dalam sektor informal

adalah peran ganda mereka yang harus berjalan serasi dan seimbang satu sama lain antara tugas di keluarga dengan tugas di tempat usaha. Mereka diharapkan tetap membagi waktu antara tugas mencari nafkah dengan tugas sebagai pengelola rumah tangga. Pergeseran dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dalam perkembangannya dapat menggambarkan pola perubahan peran perempuan yaitu: *pertama* peran perempuan yang seluruhnya hanya dalam pekerjaan rumah tangga; *kedua*, perempuan yang mempunyai dua peran yaitu peran dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah (Pudjiwati, 1985).

Realita ini juga tergambar di pasar Tanjung, di mana banyaknya ibu rumah tangga yang berjualan di pasar ini khususnya berjualan barang harian, jualan sayuran dan palawija, serta ikan. Ibu rumah tangga yang berjualan di pasar Tanjung dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian keluarganya karena hasil dari jualannya merupakan sumber penghasilan untuk keluarga, baik untuk kebutuhan pokok, maupun untuk pendidikan anak-anak mereka. Mengutip pernyataan Hart, menurut Ihromi (1995) bahwa perempuan memiliki peran sebagai pencari nafkah di dalam dan di luar sektor pertanian. Peran perempuan tidak hanya terlibat di dalam kegiatan reproduktif, tetapi juga dalam kegiatan produktif yang langsung menghasilkan pendapatan. Peran perempuan pada rumah tangga menengah ke bawah dalam mencari nafkah lebih nyata dibandingkan pada rumah tangga lapisan atas.

Sebagai pencari nafkah peran ibu rumah tangga ikut memengaruhi relasi gender dalam kehidupan keluarga. Relasi gender merupakan paradigma yang melihat keseluruhan hubungan (struktur) dominasi kekuasaan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan sosialnya. Hubungan kekuasaan itu, salah satunya dapat diidentifikasi pada proses pengambilan keputusan sebuah keputusan dalam keluarga. Untuk melihat relasi gender, maka kita tidak akan dapat lepas mengenai peran dan status laki-laki atau perempuan dalam struktur sosialnya. Latar belakang kehidupan ibu rumah tangga pedagang sektor informal di pasar Tanjung dapat dikatakan bersifat homogen, yaitu berasal dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Pada dasarnya, ibu rumah tangga pekerja sektor informal (pedagang) ini menjalankan usahanya tidak dapat lepas

dari tugas-tugas rumah tangganya. Oleh karena itu, mereka mempertahankan kelangsungan usahanya, bagaimanapun kondisinya termasuk dalam kondisi sepi pembeli di tengah “kekurangmampuan” suami mereka untuk memberikan nafkah yang cukup memadai bagi keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya latar belakang ibu rumah tangga pedagang sektor informal ini adalah karena alasan ekonomi serta tidak adanya pekerjaan formal dan informal lain yang dapat dimasuki. Akibat kebutuhan hidup yang semakin meningkat, pendapatan suami tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka, akhirnya usaha usaha sektor informal inilah yang menjadi pilihan untuk menambah penghasilan keluarga. Aktivitas keseharian di Pasar Tanjung memperlihatkan bahwa banyak ibu rumah tangga ikut berperan aktif dalam menunjang penghasilan keluarga, bahkan sebagai sumber penghasilan utama. Betapapun sibuknya ibu rumah tangga pada kerja produksi, mereka harus tetap menjalankan tugas domestik seperti memasak, mencuci, mengurus anak yang masih kecil, dan membersihkan rumah. Setelah adanya kebijakan penertiban dan pengusuran pada tanggal 8 September 2014 lalu mengakibatkan pendapatan perempuan pedagang sektor informal khususnya penjual barang peralatan rumah tangga yang berada di lantai atas banyak yang menurun bahkan drastis. Misal, sebelum penertiban penjualan perabot lumayan tinggi, setelah penertiban jarang pengunjung pasar naik ke lantai atas. Hal ini disampaikan oleh ibu Wt (75 tahun), penjual peralatan rumah tangga di lantai atas berikut:

“...buka jam enem ngantos jam sekawan sonten, wong sepi mas, sepi sak niki, sabene tasek wonten pasar ngisor niko rame, pasar sore niko, kadang wonten tiyang tumbas keranjang nopo ngoten, pundi ono wong liwat, minggu maleh malah mboten wonten tiyang blas, kecuali wonten kifayah, nopo nggadah damel buru rame.” (buka jam enam pagi sampai jam empat sore, sepi sekarang mas sekarang sepi, dulu masih ada pasar bawah (pasar sore) masih rame, kadang ada orang beli keranjang atau apa, mana ada orang lewat, malah minggu tidak ada orang, kecuali ada orang meninggal, punya hajat baru rame)

Berbeda dengan kondisi pedagang lain di pasar Tanjung, ibu Wt adalah contoh pedagang sektor informal yang menjalani usaha karena alasan lain, dengan kondisi sudah berusia 75 tahun ibu wito menjadi ibu rumah tangga pekerja sektor informal karena dorongan untuk mengisi waktu. Bersama suaminya yang pensiunan PJKA Jember sebenarnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari berdua sudah lebih dari cukup. Apalagi ibu Wt tidak dikaruniai anak. Secara bergantian ibu Wt menjalankan usahanya dengan suaminya. Jam 8.00 sampai dengan jam 15.00 giliran ibu Wt, sedangkan suaminya mulai jam 15.00 sampai maghrib. Kondisi yang dirasakan tersebut menjadi tantangan baru dalam perjuangan bertahan hidup ibu rumah tangga pedagang sektor informal Pasar Tanjung. Realita yang ditemui di lapangan bahwa kontribusi perempuan pedagang sektor informal pasar Tanjung sangat besar dalam menopang perekonomian keluarganya. Peran suami sebagai kepala rumah tangga untuk masalah ekonomi menjadi sedikit kabur.

Pergeseran dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ibu rumah tangga pedagang sektor informal Pasar Tanjung telah mengubah peran perempuan dan menggeser peran laki-laki. Pendapatan yang diperoleh dari usaha dagang sektor informal ini menjadi sulit untuk diakui sebagai penghasilan suami atau istri karena usahanya di kelola bersama dengan istri . Berdasarkan hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa orang informan, bahwa relasi gender dalam hal pola komunikasi dan pengambilan keputusan pada keluarga perempuan pedagang sektor informal Pasar Tanjung sangat bervariasi. Ada beberapa keluarga informan saat penetapan kebutuhan sehari-hari, pembagian dalam pekerjaan rumah tangga, pembelian perabot rumah tangga, serta penentuan pinjaman modal menunjukkan bahwa keputusan lebih didominasi oleh isteri dan ada juga beberapa keluarga informan yang masih meminta pendapat dan keputusan dari sang suami. Satu hal yang tidak terbantahkan adalah berdasarkan realita yang ada, pada dasarnya peran produksi dan reproduksi yang dijalankan secara bersamaan oleh ibu rumah tangga pedagang sektor informal di pasar Tanjung ini menunjukkan pergeseran peran suami dan isteri. Walaupun ada beberapa

keluarga dalam pengambilan keputusan selalu berkomunikasi terlebih dahulu dengan suami, akan tetapi pada hakikatnya suami hanya memberikan nafkah sesuai dari apa yang didupatkannya. Sebagian suami juga ikut menjalankan usahanya. Mereka tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain karena pertimbangan usia, maupun kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lain. Kondisi demikian memperlihatkan relasi gender yang kurang seimbang dalam hidup berkeluarga.

4.2.4 Modal Sosial Memperkuat Daya Tawar Pedagang Sektor Informal

Modal sosial merupakan modal yang sangat penting bagi para pedagang sektor informal untuk bertahan hidup di daerah tujuan migrasi yang dia lakukan. Terkadang modal sosial lebih dibutuhkan daripada modal-modal yang lainnya. Mengutip pendapat Putnam (2000) menurut Handoyo (2012) bahwa modal sosial terdiri dari tiga bagian besar yaitu, jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), dan norma (*norms*). Paradigma tentang modal sosial ini mengemuka, dikarenakan banyak ahli ekonomi menyadari bahwa untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, tidak semata-mata bertumpu pada modal sumber daya manusia, modal fisik, maupun modal finansial, tetapi ada jenis modal lain yang ternyata efektif dalam melumasi kegiatan ekonomi, bahkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik daripada hanya mengandalkan modal manusia, fisik, dan finansial, yaitu modal sosial.

Di dalam sebuah komunitas, konsep pokok atau unsur-unsur modal sosial sosial, yaitu kepercayaan, jaringan dan norma paling tidak berkontribusi terhadap eksistensi para pedagang sektor informal di pasar Tanjung. Konsep modal sosial tumbuh dan berkembang lebih dahulu muncul dalam literatur ekonomi sebelum muncul konsep modal atau kapital. Modal (kapital) pada awalnya hanya dipahami sebagai kekuatan uang (finansial) atau faktor-faktor produksi yang dapat diakumulasi dan diinvestasikan, yang pada suatu ketika atau di masa depan diharapkan bisa memberi manfaat atau layanan produktif (Field 2008). Subejo (2004:3) merangkum definisi modal sosial dari para ahli, yaitu pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Beberapa Pengertian dan Elemen Dasar dari *Social Capital*

Sumber	Pengertian dan Elemen Dasar dari <i>Social Capital</i>
Coleman (1988)	Social capital consists of some aspects of social structures, and they facilitate certain actions of actors--whether persons or corporate actors--within the structure
Putnam et.al (1993)	Features of social organization, such as trust, norms (or reciprocity), and networks (of civil engagement), that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions
Narayan (1997)	The rules, the norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relations, social structure and society's institutional arrangements which enable members to achieve their individual and community objectives
World Bank (1998)	Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions
Uphoff (1999)	Social capital can be considered as an accumulation of various types of intangible social, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior
Dhesi (2000)	Shared knowledge, understandings, values, norms, and social networks to ensure the intended results

Sumber: Subejo (2004)

Terkait masalah kepercayaan (*trust*) yang menjadi bagian modal sosial dibuktikan oleh informan yang berinisial Hmd berikut:

“...ya berat gimana lagi, gimana lagi kalau sudah nggak ada buat beli beli ini, belanja bumbu kalau nggak punya memang terpaksa, apalagi buat anak sekolah, kalau ndak ada ya cari utangan, ngak ada bantuan dari Dinas Pasar...ya cuma 1 temen itu wis harian, jadi cukup ngajukan langsung dikasih, yang ngih ya yang berangkutan yang punya uang.”

Modal sosial menjadi penting bagi para pedagang sektor informal, karena adanya unsur kepercayaan antar anggotanya. Lebih lanjut mengenai hal ini diperkuat dengan pernyataan ibu Hmd ketika ditanya mengenai frekuensi pinjaman terhadap temanya sebagai berikut:

“...ya berkali, kali, tapi kan membantu untuk beli bumbu, misal ndak ada pinjaman ya bingung apalagi bayar anak sekolah, biaya sekolah kan mahal.”

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, makna modal sosial (*social capital*) mempunyai esensi yaitu keterkaitan dan timbal-balik (*reciprocity*) antar manusia di dalam

hubungan tidak hanya bersifat sosial tetapi juga menyangkut psikologi, budaya, dan kelembagaan yang didasari dengan kepercayaan (*trust*) untuk mencapai tujuan tertentu. Jika ditarik berdasarkan kompleksitas kajian, maka kajian modal sosial (*social capital*) bersifat multidimensional. Dimana untuk memahami fenomena dari modal sosial yang tumbuh pada masyarakat diperlukan kajian ilmu sosial yang lain. Salah satu efek lain dari modal sosial adalah apabila dihadapkan dengan individu, grup, atau kelompok yang mempunyai bentuk modal sosial yang tertutup dengan entitas (*entity*) yang lain. Jika kondisi tersebut terjadi, maka alokasi sumberdaya akan terjadi hanya di dalam kelompok masing-masing. Untuk itu diperlukannya sesuatu hal yang menjembatani (*bridging*) berbagai kelompok tersebut. Modal sosial para pedagang sektor informal di Pasar Tanjung tidak hanya muncul ketika dihadapkan pada hal-hal atau kondisi yang mengancam kelangsungan usaha mereka misalkan kebijakan penataan, akan tetapi modal sosial juga sangat berperan dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha terkait kebutuhan modal. Ibu Hmd menyampaikan bahwa modal para pedagang di Pasar Tanjung yang penting kejujuran, jika ada kebutuhan modal yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan mikro, para ibu rumah tangga dapat meminjam pada pedagang yang lain. berikut pernyataan ibu Hmd:

“modal di sini yang penting jujur meski ngambil apa gitu, yang penting kalau laku uangnya dikasihkan gitu, pernah pinjam harian, itu harian misal ambil setoran Rp 5.000,00 dapat uang Rp 400.000,00 bukan koperasi, tapi punya orang kayak saya ini, dari temen-temen, itu inisiatif saya sendiri, kalau angsuran Rp 10.000,00 dapat Rp 800.000,00 ambil tiga bulan dan tidak usah pake jaminan, kalau ambil bank takut gak bisa bayar”.

Dalam kaitan dengan penelitian tentang kelembagaan pedagang sektor informal di Pasar Tanjung, ditemukan bahwa para pedagang yang pada umumnya bersedia bekerjasama dengan pedagang lainnya, dikarenakan adanya kepentingan yang sama agar mereka dapat bekerja dan mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya di lokasi yang selama ini mereka tempati. Mereka tetap bertahan di lokasi yang dilarang oleh pemerintah kabupaten, dikarenakan dua hal. *Pertama*, mereka bertahan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. *Kedua*, mereka bertahan

karena adanya perasaan bersatu dengan para pedagang lainnya di bawah perlindungan paguyuban dan organisasi lain yang mendukungnya. Bentuk-bentuk perlawanan sebagai wujud modal sosial salah satunya nampak dalam Gambar 4.12 berikut:



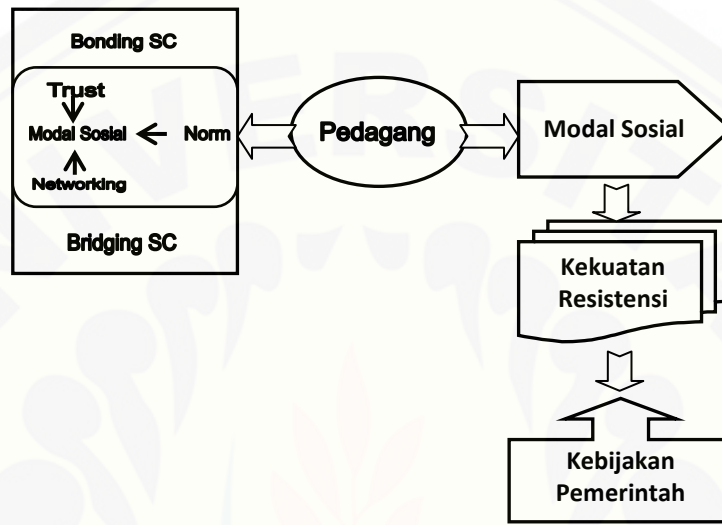
Gambar. 4.12. Penggusuran Lapak Pedagang dan Bentuk Resistensi Pedagang Perempuan (Data Sekunder, 2014))

Melihat Gambar tersebut kita dapat memahami bahwa kebijakan penataan (penggusuran) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pasar dan Satpol PP dapat memunculkan dan memperkuat modal sosial para pedagang. Modal sosial yang mereka bangun diwujudkan dengan membentuk kepengurusan agar perjuangan mereka terstruktur. Modal sosial mereka muncul pada saat terjadi penertiban. Berikut komentar Sdq sebagai sekretaris paguyuban pedagang:

“...Pedagang sebetulnya siap di relokasi siap ditata cuma tempatnya yang layak dibikinkan tempat yang layak misal di lapangan Talangsari...sekarang ini tempatnya tidak layak, mereka sendiri yang tau layak atau tidak, mereka sendiri yang survei satu per satu kesana, kadang orang lima kadang orang sepuluh, jadi pembeli bisa tahu dimana lokasinya...jadi satu pasar, mereka ndak mau dipecah-pecah.”

Collective resistance pedagang di Jl. Wahidin dan Jl. Untung Suropati telah berakhir, karena semua bangunan yang permanen maupun semi permanen dan lapak-lapak yang ada sudah hancur tak bersisa. Berakhirnya perlawanan tersebut tidak berarti modal sosial mereka hilang. Modal sosial yang lahir dari interaksi di antara pedagang dalam *bonding social capital* dan antara peguyuban pedagang dengan paguyuban pedagang lainnya dalam *bridging social capital*, masih tampak meskipun sebagian pedagang sudah ke luar dari tempat berdagang mereka. Mereka

memperjuangkan agar konsep penataan yang dilakukan pemerintah kabupaten tetap memperhatikan kelangsungan usaha para pedagang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan kerangka modal sosial yang menjadi penguat bagi resistensi pedagang di di pasar Tanjung seperti Gambar 4.13 berikut:



Gambar 4.13. Modal Sosial Pedagang Sebagai Penguat Resistensi Pedagang Kaki Lima (diadaptasi dari Handoyo, 2012)

Gambar 4.13 di atas menunjukkan bahwa yang menjadi kekuatan perlawanan para pedagang, utamanya PKL di Jl. Untung Suropati adalah keberadaan paguyuban dengan ketuanya bu Rofi'ah. Kepemimpinan dalam struktur organisasi menghasilkan apa yang disebut dengan modal sosial. Modal sosial ini dibangun oleh kelompok pedagang dengan cara menjalin komunikasi dengan lembaga, lembaga yang lain baik itu dipemerintahan maupun, di lembaga pendidikan dan lembaga legilatif.

Salah satu konsep yang memiliki kaitan erat dengan interaksi sosial adalah tindakan sosial. Tindakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh individu dalam mewujudkan sebuah kepercayaan atau harapan, yang sifatnya unilateral; sedangkan interaksi sosial merujuk pada apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang secara bersama-sama sadar dalam mewujudkan harapan dari masing-masing pihak terhadap satu sama lainnya (Lawang 2005:47). Kondisi di atas setidaknya

menunjukkan bahwa masing-masing pihak dalam satu kelompok paguyuban memiliki harapan yang sama dapat menempati satu lokasi.

Jika unsur-unsur yang terdapat dalam modal sosial dapat berfungsi akan memberikan manfaat besar dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Unsur-unsur modal sosial meliputi norma (*norm*), kepercayaan (*trust*), dan jaringan (*network*). Hubungan sosial pedagang diikat oleh kepercayaan dan kepercayaan dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak yaitu pedagang dan pemerintah. Kerja antar simpul (orang atau kelompok), melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama. Unsur-unsur modal sosial ini ditengarai juga dimiliki oleh kelompok pedagang yang ada di pasar Tanjung terutama yang berada di Jl. Wahidin (Timur Pasar).

Hal paling nyata untuk melihat wujud modal sosial para pedagang di pasar Tanjung adalah sikap oposan atau negatif terhadap peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan penertiban (penggusuran). Sikap resisten para pedagang selalu muncul manakala kebijakan yang diambil pemerintah menegasikan keberadaan mereka atau dianggap mengganggu ruang hidup para pedagang, sehingga atas perlakuan pemerintah tersebut, mereka berani melakukan perlawanan. Perlawanan atau resistensi yang ditunjukkan para pedagang di pasar Tanjung, khususnya di Jl. Untung Suropati dan Jl. Wahidin sebagai respon terhadap implementasi kebijakan publik Pemkab Jember, dilakukan tanpa rasa takut. Bentuk resistensi sebagai wujud modal sosial yang dilakukan para pedagang dilakukan dengan cara menggelar dagangan dengan memasang terpal atau payung-payung. Mereka tidak menghiraukan keberadaan petugas dari Dinas Pasar yang setiap hari berjaga pada saat sore hari. Pak Cip, petugas Dinas pasar yang saat itu mengawasi sempat mengatakan bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa pedagang sudah mulai turun ke jalan lagi. Berikut pernyataan pak Cip:

“...Tiap hari mengawasi di sini, ada petugasnya, ada laporan katanya pedagang-pedagang sudah mulai meluber lagi ke jalan, ini biasanya petugas sudah pulang, banyak yang pake payung kalo ndak hujan ndak boleh, yang jualan payung ya paguyubannya itu.”

Pak Cip juga menyampaikan bahwa informasi mengenai adanya orang yang menjual payung kepada para pedagang berasal dari pedagang yang menjual sayur dengan cara lesehan. Pada saat peneliti berusaha untuk mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pedagang sayur yang dimaksud pak Cip, peneliti mendapatkan keterangan bahwa informasi yang disampaikan oleh pak Cip memang benar. Ada oknum yang mengatasnamakan LSM Gempar sebagai *backing* para pedagang yang ada di Jl. Wahidin. Berikut penuturan ibu As pedagang sayur yang telah menempati ruas jalan Wahidin sejak pasar Tanjung belum di bangun, berikut penuturannya:

“...Iku teko paguyuban, sing ngutangno payung, lek gak utang payung gak oleh dodolan ndek kene jare, wong pinter iku le pinter ngomong, koyo pengacara, wingi aku di omongi wong kantor kon masang terpal, lek gak oleh mbek (...) kon laporno, wong pedagang iku wedian, nek nang aku gak masuk akal, golek mangan koyok ngene kate dibujuki wong.” (itu dari paguyuban, yang menjual payung secara kredit, yang tidak kredit payung tidak boleh jualan di sini katanya, orang pintar itu, pintar ngomong, seperti pengacara, kemarin saya dibilangi orang kantor pasar, suruh pasang terpal kalau tidak boleh suruh melaporkan ke kantor pasar, kalau pedagang yang di situ takut sama Ansori kalau ke saya tidak masuk akal, cari makan seperti ini susahny mau di tipu sama orang)

Pada saat itu juga peneliti mendapati para pedagang yang berada di sisi sebelah Timur Jl. Wahidin memasang payung besar. Menurut informasi yang didapat dari petugas pasar dan pedagang sayur yang berjualan di pinggir Jl. Wahidin Soedirohoesodo bahwa payung tersebut dibeli oleh pedagang dari pengurus paguyuban. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa modal sosial belum terjalin kuat antar sesama pedagang. Adanya protes dari bu As menunjukkan bahwa tidak semua kelompok pedagang yang berada di Jl. Wahidin bisa menerima tawaran menggunakan payung. Modal sosial baru akan nampak nyata ketika para pedagang dihadapkan dengan kebijakan yang mangancam kelangsungan usaha mereka.

Modal sosial mencakup kelembagaan, kekeluargaan, sikap dan nilai-nilai yang mengarahkan sekaligus menggerakkan interaksi-interaksi antar orang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. *Social capital* tidaklah

sesederhana hanya melihat kuantitas institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, akan tetapi *social capital* juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara bersama-sama World Bank (1998). *Social capital* meliputi *shared values* dan *rules* bagi perilaku sosial yang terekspresikan dalam hubungan-hubungan antar personal, *trust and common sense* tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, semua hal tersebut menjadikan masyarakat lebih ari sekedar kumpulan individu-individu.

Mendasarkan pada beberapa pengertian dan elemen penyusun modal sosial seperti tersebut dalam Tabel 4.2, nampaknya dapat dilakukan suatu generalisasi dan simplifikasi tentang elemen-elemen utama dari modal sosial. Terdapat simpulan yang sederhana dan umum yang dapat diajukan tentang elemen utama modal sosial mencakup norma, pertukaran, kepercayaan, dan jaringan. Keempat elemen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan yang mampu mengakomodasi kepentingan individu yang melakukan kerjasama maupun kelompok secara kolektif.

Secara nyata dalam keseharian, apabila dicermati secara mendalam, semua perilaku aktivitas sosial-ekonomi pedagang di pasar Tanjung melekat dalam jaringan hubungan-hubungan sosialnya. Modal sosial dan kepercayaan (*trust*) dapat membuat dan memungkinkan para pedagang melakukan transaksi-transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak yang terkait untuk bisa (1) mengakses lebih banyak informasi yang dibutuhkan oleh para pedagang, (2) memungkinkan mereka untuk saling mengkoordinasikan kegiatan untuk kepentingan bersama, dan (3) para pedagang sektor yang ada dapat melakukan transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang. Seperti pengakuan informan Hmd berikut:

“...kalau modal disini, yang penting jujur, meskipun ngambil apa gitu di warung-warung kayak gitu nanti kalau habis dikasihkan uangnya. nggak, nggak pernah pinjam ke perbankan, ya pernah pinjam disini, itu harian, itu harian umpama ambil Rp 5.000, bukan Rp 5.000.000,-, setoran Rp 5.000 dapat dapat uang RP 400.000,- namanya apa ya,

bukan koperasi bukan apa itu, itu punya orang kayak saya gini bukan punya koperasi, punya temen, itu inisiatif saya sendiri, ya itu Rp 5.000 dapat Rp 400.000,-, saya ambil yang Rp 10.000 dapat Rp 800.000 selama 3 bulan 10 hari.”

Modal sosial tidak hanya dibangun oleh para pedagang di pasar Tanjung dengan melakukan tindakan-tindakan resisten seperti yang dilakukan oleh para pedagang di Jl. Untung Suropati dan pedagang yang berada di Jl. Wahidin. Para pedagang yang berada di dalam pasar Tanjung juga membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan sesama pedagang yang ada di pasar Tanjung. Hubungan dagang yang mereka jalankan dikonstruksi dengan dasar fondasi rasa saling percaya. Saat ini modal sosial yang dulunya sangat kuat sedikit luntur. Pedagang tidak lagi berani untuk melakukan transaksi dagang, jika tidak ada uang. Artinya penjual (pengepul) baru akan menyerahkan barang jika pembeli (pedagang dengan skala kecil) tidak membayar tunai. Hal ini disampaikan oleh bu Rus pedagang buah-buahan yang menempati los pasar Tanjung sebelah selatan.

Penuturan salah satu informan menyatakan bahwa kepercayaan antar pedagang yang dulunya sangat kuat semakin berkurang. Bu Rus menuturkan bahwa, dulunya banyak pembeli yang mengambil barang dagangan dulu, dan baru dilunasi pada saat barang laku. Berikut penuturan ibu Rs:

“...kalau siang biasanya ramai, banyak orang kulakan, kalau barang habis ya orangnya telpon kalau mau ngirim, saya bayar langsung kan uangnya mau diputar lagi sama orangya, kalau orang yang beli ke saya ya langsung bayar, dulu orang-orang sering utang ke saya, akhirnya banyak yang nunggak, saya di tipu terus, sekarang ndak mau.”

Jika menyimak penuturan dan melihat kondisi barang dagangan ibu Rs, memang terlihat bahwa memang ibu Rs layak disebut pedagang besar (pengepul) karena stok barang dagang berupa buah-buahan yang dimiliki oleh ibu Rus sangat banyak. Peneliti juga aktivitas penimbangan kirriman buah yang baru datang dan langsung diterima oleh bu Rs. Seperti terlihat pada Gambar 4.14 berikut.

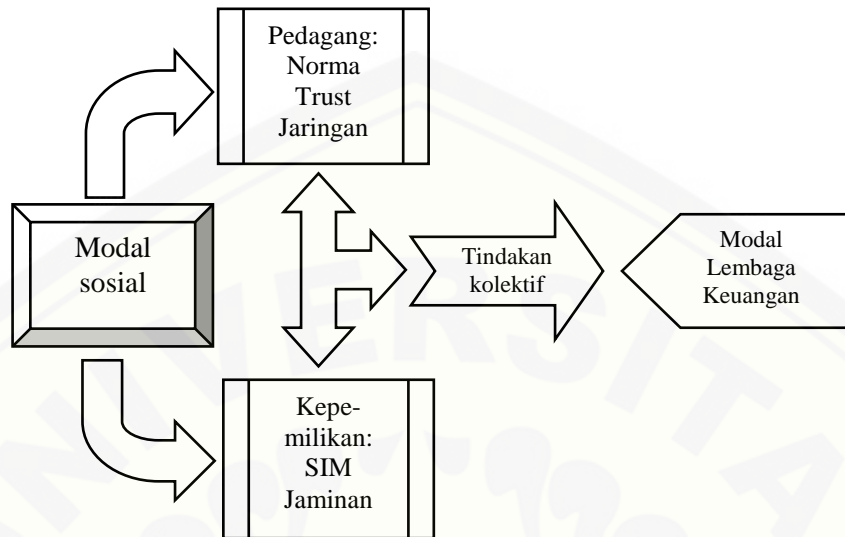


Gambar. 4.14. Bu Rus sedang melayani konsumen (Data Primer, 2014)

Kegiatan dagang yang dilakukan bu Rus tidak hanya melayani pembeli eceran. Akan tetapi juga menerima setiap kiriman atau tawaran buah yang datang untuk menambah stok barang dagangnya. Ketika ada kiriman buah yang datang dan diterima oleh bu Rus, terkadang ada yang langsung dikemas menjadi per satuan kilogram untuk selanjutnya dijual kepada pedagang lain baik yang ada di Pasar Tanjung maupun yang berada di luar pasar.

Berbeda dengan modal sosial yang dibangun antar sesama pedagang yang berada di Jl. Wahidin dan Jl. Untung Suropati, dan pedagang buah seperti yang ditampilkan dan dialami oleh bu Rus. Unsur-unsur modal sosial yang muncul dari hubungan antara pedagang dengan lembaga penyedia modal juga terlihat di pasar Tanjung. Kebutuhan modal bagi para pedagang tidak dapat lepas dari keberadaan lembaga keuangan yang ada di pasar Tanjung. Rasa saling percaya antara para pedagang di pasar dengan lembaga keuangan ditunjukkan dengan model hubungan antara nasabah dengan lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman modal. Selain itu guna memperlancar pembayaran angsuran setiap bulan, para pedagang menabung agar pada saat membayar angsuran mereka tidak lagi repot untuk datang ke kantor bank.

Dalam aras teori, dari penelitian tersebut dapat dikembangkan model penguatan kerjasama melalui modal sosial yang dikembangkan. Ilustrasi dari mekanisme penguatan tindakan kolektif dalam mengakses kebutuhan modal terhadap lembaga keuangan berdasarkan basis modal sosial dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut:



Gambar 4.15. Mekanisme Modal Sosial mendorong Tindakan Kolektif Akses Pinjaman dan Simpanan (diadaptasi dari Handoyo, 2012)

Hal yang menarik dalam pola kerjasama ini adalah bentuk pelayanan bank melalui petugasnya yang setiap hari harus keliling untuk mengambil buku tabungan milik para pedagang yang pada hari itu ingin menabung dan dan sore harinya kembali para petugas bank datang kepada para pedagang untuk mengantar buku tabungan. Begitulah aktivitas rutin yang dilakukan oleh para pedagang dan pegawai bank yang melayani nasabahnya. Seperti yang dituturkan oleh Dian dan Dora, dua orang yang menjadi karyawan bank pada saat mengantarkan buku tabungan nasabah bernama Ibu Tt berikut:

“...ini lagi nganterin mbak Dora biar cepet hafal nasabah,ini ngantarkan tabungan, tadi pagi sudah nabung sudah dicetak terus diprint out, dikembalikan, sebenarnya ndak dikembalikan ndak apa-apa, tapi kan nggak enak, jadi biar tahu pemasukannya.” (wawancara, 27 Nopember 2014)

Modal sosial memiliki tipologi yang memberikan karakter pada suatu kelompok atau komunitas. Terdapat dua karakteristik modal sosial, yang dalam realitasnya dapat diamati di suatu organisasi, kelompok atau komunitas. Dua tipe modal sosial ini diduga melekat pada kelompok pedagang yang akan diteliti. *Pertama*, adalah modal sosial terikat atau *bonding social capital*. *Kedua*, modal

sosial yang menjembatani atau *bridging social capital* (Hasbullah, 2006). Berdasarkan penuturan informan-informan di atas, menandakan bahwa adanya kebersamaan dan kerja sama antar sesama pedagang, pedagang dengan pemerintah (petugas Dinas Pasar, Satpol PP), dan pedagang dengan lembaga keuangan menjadikan hubungan sosial diantaranya semakin erat. Jika disimpulkan beberapa temuan mengenai modal sosial yang ada di pasar Tanjung maka ada dua jenis modal sosial yaitu modal sosial internal kelompok dan modal sosial antar kelompok.

Tipologi kelompok yang ada di dalam pasar dengan modal sosial terikat ini tampak pada karakter pedagang yang ada di Pasar Tanjung. Berdasarkan hasil observasi, tampak bahwa kelompok pedagang cenderung loyal dan solider dengan kelompoknya sendiri dan kurang perhatian atau pun terlibat dengan kelompok pedagang lainnya. Para pedagang terorganisasi atau resmi cenderung kurang apresiatif terhadap kelompok pedagang yang tidak terorganisasi atau yang sering disebut pedagang liar. Sebaliknya, pedagang liar, juga memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda dengan kelompok pedagang terorganisasi. Sebenarnya tidak ada rivalitas diantara kelompok-kelompok pedagang tersebut, akan tetapi jika ada pedagang yang sedang digusur, pedagang lain bukannya sedih dengan menunjukkan perasaan empati dan simpati, tetapi justru senang karena kompetitornya berkurang. Disamping ada pedagang yang merasa dirugikan, tetapi sebagian juga merasa diuntungkan dengan konsep pengaturan jam berdagang .

Modal sosial tidak dapat diwariskan atau dipindahtangankan sepenuhnya secara otomatis dari generasi ke generasi seperti dalam pengertian biologi. Pewarisan *social capital* dan nilai-nilai yang menjadi atributnya memerlukan suatu proses adaptasi, pembelajaran serta pengalaman dalam praktek nyata seperti yang dialami oleh para pedagang yang ada di pasar Tanjung. Perasaan sesama anggota komunitas pedagang akan tetap terbangun meskipun usahanya telah diwariskan pada generasi selanjutnya. Proses ini akan terus tumbuh dan berkembang dalam waktu yang relatif panjang melalui interaksi yang berulang-ulang antara anggota kelompok yang memungkinkan suasana untuk saling membangun kesepahaman, kepercayaan serta

nilai dan aturan main yang disepakati bersama antar pelaku kerjasama dalam hal ini adalah para pedagang.

4.3 Dampak Pola Perubahan Kelembagaan dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga Ibu Pekerja Sektor Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro

Keberadaan pedagang sektor informal atau lebih dikenal dengan pedagang kaki lima (PKL) di perkotaan tumbuh dan berkembang berkaitan dengan penerapan model pembangunan yang tidak ramah terhadap masyarakat golongan bawah yang miskin, berpendidikan rendah dan tidak terampil (*un-skill*). Karakteristik sektor informal yang fleksibel tidak menuntut batasan tingkat pendidikan dan usia menjadi alasan mendasar bagi masyarakat (perempuan) untuk memilih pekerjaan sebagai pekerja sektor informal. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke sektor informal.

Kartasasmita dan Adhelia (2011) mengemukakan bahwa saat ini perempuan bekerja di pabrik, bekerja keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dan bekerja apa saja yang dapat mendatangkan penghasilan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga akibat meningkatnya kebutuhan sejalan dengan meningkatnya harga barang. Banyak alasan ibu rumah tangga bekerja, selain karena tuntutan akan kebutuhan kehidupan juga karena peningkatan taraf pendidikan kaum perempuan. Peranan ibu rumah tangga dalam keluarga memegang peranan sangat penting. Tuntutan kemandirian ekonomi dalam keluarga mendorong ibu rumah tangga untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Kondisi inilah yang mendorong pertumbuhan jumlah pedagang yang ada di pasar Tanjung sebelum ada upaya penertiban (penggusuran). Setiap orang dengan mudah membuka usaha tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Faktor keluarga dan lingkungan banyak berperan dalam membentuk karakteristik seseorang untuk menekuni profesi. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang karena pendidikan kewirausahaan atau semangat dan jiwa

berdagang sudah diterima sejak kecil dari orang tua. Kepemilikan ijin usaha yang telah dimiliki oleh anggota keluarga sebelumnya tidak dijual atau dialihkan ke orang lain melainkan diwariskan ke anggota keluarga sendiri. Dinamika sosial ini selanjutnya melekat dengan perubahan kondisi perekonomian yang selanjutnya mendorong para ibu rumah tangga pekerja untuk menekuni profesi sebagai pedagang. Demikian diungkapkan oleh salah satu informan bernama bu St, seorang penjual jamu yang telah berdagang sejak tahun 1984, berikut penuturan bu Siti:

“...saya mulai berdagang sejak tahun 1984, suami buka usaha jual bahan bangunan..saya memulai berdagang sejak kecil..jadi diajarin sama ibu juala apa dulu ya jualan kacang mungkin ya kalau nggak salah...hasilnya ya untuk kebutuhan makan, bayar utang dan menghidupi keluarga...” (wawancara, 2 Nopember 2014)

Beberapa faktor yang menyebabkan atau melatarbelakangi seseorang memilih sektor informal sebagai aktivitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup Alisjahbana (2006:3-9). Faktor tersebut menggambarkan motif sekaligus kondisi sosial ekonomi para perempuan pekerja sektor informal.

Pertama, tidak ada pekerjaan lain. Segala keterbatasan yang dimiliki oleh para pedagang memaksa mereka untuk memilih satu-satunya pilihan yang ada adalah bekerja di sektor informal. Sebagian informan yang diwawancarai, menyatakan bahwa mereka terjun di sektor informal bukan karena tertarik, melainkan karena keadaan terpaksa demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan sebagai pedagang ini merupakan satu-satunya pekerjaan yang bisa untuk memperoleh penghasilan, sehingga dilakukan oleh para pedagang sektor informal.

Kedua, dampak krisis ekonomi dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak pedagang sektor informal ini yang beralih menjadi pedagang karena dampak krisis ekonomi yang terjadi. Krisis moneter 1997 yang berlanjut dengan krisis ekonomi dan krisis lainnya menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar dan memberhentikan sebagian besar karyawannya. Di antara karyawan yang diberhentikan, ada yang mendapat pesangon dan ada juga yang tidak. Bagi mereka yang memperoleh pesangon, dengan berbekal sedikit modal mereka terjun ke jalan menjadi PKL. Bagi

mereka menjadi pekerja sektor informal mungkin hanya pekerjaan sementara, akan tetapi ketika banyak diantara mereka yang telah menikmati pekerjaan dan hasilnya serta sulit masuk ke sektor formal, maka menjadi pekerja sektor informal merupakan satu-satunya pilihan guna menyambung hidup.

Ketiga, mendapat rezeki halal. Bagi mereka daripada mereka melakukan pekerjaan haram atau tidak patut, misalnya meminta-minta, menipu, atau mencuri, lebih baik mereka bekerja sebagai pedagang kaki lima. Menurut golongan masyarakat miskin perkotaan, gengsi tampaknya tidak lagi dihiraukan. Ketika tidak ada lagi sumber pendapatan yang dapat diandalkan, maka masuk ke sektor ini adalah pilihan yang rasional. Profesi ini bagi mereka adalah sumber mencari rezeki secara halal sesuai dengan ketentuan agama, norma hukum, dan tata tertib masyarakat.

Keempat, sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Menjadi pekerja sektor informal sangat fleksibel dalam pengelolaan usahannya. Mereka tidak terikat waktu dan aturan yang ketat seperti halnya di perusahaan. Sektor informal sebagai tempat mengais rezeki, di mana mereka bisa mengatur pekerjaannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh bersifat langsung dan dapat dinikmati segera, mereka dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk mengembangkan usahanya. Hasil atau keuntungan tidak dapat dinikmati segera, jika mereka bekerja di pabrik atau perusahaan.

Kelima, mencukupi kebutuhan. Setiap pedagang pasti membutuhkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang mereka peroleh tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, akan tetapi juga untuk membiayai keluarga, membiayai sekolah anak-anaknya, membantu biaya sekolah adik-adiknya, atau bahkan mengirim uang kepada orangtua yang ada di desa.

Keenam, pendidikan rendah dan modal kecil. Banyak orang yang memilih menjadi pekerja sektor informal karena tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga siapapun dapat masuk kesana. Sebagaimana diungkapkan Firdausy (1995:1), bahwa sektor informal mempunyai karakteristik usaha yang relatif tidak memerlukan modal besar, keterampilan tinggi, relatif mudah dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat beresiko kecil. Dengan demikian, para urban memilih menjadi

PKL, selain karena tidak membutuhkan syarat pendidikan, keahlian, dan keterampilan khusus, juga tidak membutuhkan modal yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa semangat usaha dan daya tahan yang tinggi yang diperlukan bagi siapapun yang ingin masuk ke sektor informal merupakan motif utama mengapa para urban tetap bertahan.

Ketujuh, kesulitan kerja di desa. Tidak tersedianya kesempatan kerja di desa dan tidak adanya kesempatan kerja di kota bagi yang tidak berpendidikan dan tidak terampil, menjadi alasan mengapa para urban memilih bekerja sebagai PKL. Bagi kaum urban atau migran, kota merupakan tujuan akhir ketika mereka tidak dapat tertampung di desa. Perkembangan kota yang begitu pesat mendorong mereka untuk datang ke kota dan mencari kesempatan untuk dapat membuka usaha sebagai pedagang kaki lima (PKL).

4.3.1 Dinamika Sosial, Ekonomi dan Motif Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal di Pasar Tanjung

Tidak jauh berbeda dengan beberapa hasil penelitian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa ibu rumah tangga bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kaki lima, motif para pedagang kaki lima (PKL) yang bekerja di Pasar Tanjung juga bervariasi. Dari hasil penelitian ditemukan empat motif mengapa perempuan memilih bekerja sebagai pekerja sektor informal, yaitu (1) mengisi waktu luang, (2) ingin usaha mandiri, (4) meneruskan usaha keluarga, (4) tidak ada usaha lain.

Meneruskan usaha orang tua menjadi motif atau alasan yang dominan mengapa para perempuan bekerja pada sektor informal. Seperti diakui Kh (52 tahun), penjual jamu yang memulai berjualan sejak tahun 1995 yang berlokasi di pasar Tanjung:

“...saya memulai usaha ini sekitar tahun 1995,..walnya abah sama umi yang jualan disini , terus abah umi meninggal saya penerusnya...ya karena usaha ini warisan jadi tidak ada usaha lain, ya ini lah yang ditekuni, mulai dulu mulai pembangunan pasar.” (wawancara 2 Nopember 2014)

Kenyataan ini juga didukung pernyataan informan lain, bahwa meneruskan usaha warisan orang tua sebagai pedagang di pasar Tanjung juga di benarkan oleh bu Fr (35 tahun) penjual konveksi:

“...Saya mulai berdagang sudah lama...ya mulai sekolah..mulai kuliah sudah bantu orang tua mulai tahun 1997, tahun 1997 itu cuma bantu-bantu orang tua, kalau mulai usaha ini secara mandiri ya tahun 2004, suami juga ikut mengelola usaha ini.” (wawancara, 2 Nopember 2014).

Pernyataan di atas didukung pula pedagang yang lain, salah satunya adalah ibu WI (60 tahun) pedagang makanan, minuman, rokok dan snack di pasar Tanjung yang menempati los sebelah Timur, menyatakan bahwa :

Saya sudah jualan di sini sudah 18 tahun...mulai menempati sudah lama dulu ini yang nempati mertua saya, setelah saya kawin ya menempati sini...yang disini kan nggak di pindah, ini kan di pinggir, yang di depan (Jl. Wahidin dan di Jl. Untung Suropati) ya dibongkar semua...” (wawancara, 25 Oktober 2014).

Pernyataan ketiga informan tersebut menunjukkan bahwa para perempuan yang bekerja sebagai pedagang sektor informal menekuni usaha mereka karena meneruskan usaha keluarga. Mereka memiliki pertimbangan bahwa pasar Tanjung merupakan pasar utama di Jember, banyak pengunjung yang datang ke pasar tersebut sehingga memberikan keuntungan tersendiri secara ekonomi bagi mereka. Mereka juga merasa rugi (eman) jika sampai los yang mereka tempati nantinya dimiliki atau dijual kepada orang lain. Keuntungan yang semacam itu yang menyebabkan para pemilik kios atau los kemudian mewariskan usaha mereka kepada anak-anaknya. Mereka enggan menjual kios/los yang mereka tempati kepada orang lain, meskipun praktek jual beli kios atau los itu ada. Praktek jual beli kios maupun los di pasar Tanjung memang ada, (Faizah;2012). Praktek jual beli kios (milik umum) di pasar Tanjung kabupaten Jember adalah memanfaatkan tanah milik pemerintah yang disewakan kepada PKL untuk melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi beberapa PKL memperjualbelikan kios beserta isinya tersebut pada orang lain dengan memberikan syarat untuk menjual barang dagangan tertentu dan memberikan batasan waktu kepemilikan.

Ketika ditanya mengapa ibu Fara (35 tahun) bekerja sebagai pedagang di pasar Tanjung, jawabannya adalah karena ingin usaha sendiri. Sebagai seorang pedagang, bu Fara sangat senang dapat menjalankan usaha secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain, berikut pernyataannya:

“...awalnya senang ya gitu-gitu awalnya, maksudnya usaha sendiri itu senang dari pada ikut orang lain...ada usaha disitu dari orang tua.”
demikian ibunya.

Ibu Fara lebih bisa menikmati waktu dan keuntungan dari usahanya. Keuntungan yang diperoleh juga meningkat pada waktu tertentu seperti pada saat bulan Ramadhan. Bu Hos (60 tahun) yang sudah puluhan tahun berdagang buah-buahan di pasar Tanjung memilih menekuni usahanya bersama suami. Berbekal los yang dimiliki hasil warisan orang tuanya, bu Hos, demikian biasa dipanggil menekuni usaha ini dengan mengatur waktu bergantian bersama suami, bu Hos datang ke pasar pukul 07.00 sampai pukul 16.00, setelah itu diganti suaminya sampai pukul 21.00. aktivitas dagang yang dilakukan bu Hos hampir sama dengan yang dilakukan ibu W1, bahkan waktu berjualan yang dilakukan bu W1 mulai pukul 03.00 pagi dini hari bergantian dengan suaminya sampai maghrib kadang sampai isya'. Ketika ditanya kenapa tidak mencoba usaha lain ibu W1 mengatakan:

“...dulu pernah pulang ke desa untuk nyoba tani, di sana tujuh bulan tapi bapak tidak kerasan, jadi bapak di sini ya, kerjanya di sini saja jualan. Mulai buka jam tiga pagi nanti sampai maghrib kadang sampai isya.”.

Melihat cara mereka menjalankan usaha sangat nampak bahwa para ibu rumah tangga pedagang tersebut memiliki etos kewirausahaan yang demikian tinggi, mereka para ibu rumah tangga pedagang sebenarnya merupakan sesungguhnya yang dapat disebut sebagai pengusaha, meskipun dengan modal yang terbatas, tanpa harus mempekerjakan karyawan, mereka dapat menjalankan usahanya dalam kurun waktu yang sangat lama. Para pedagang memang memiliki modal yang jumlahnya tidak terlalu banyak, peralatannya pun sangat terbatas hanya berupa meja atau rak dan peralatan lain yang mendukung usahanya untuk menata dagangannya. Dengan

kondisi semacam itu mereka harus pandai-pandai dalam mengelola usaha yang dimiliki agar dapat bertahan.

Semangat berdagang juga ditunjukkan oleh para pedagang yang ada di Jalan Wahidin (Timur Pasar Tanjung), meskipun menjadi korban pengrusakan (penertiban) yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada sore hari mereka masih dapat menjalankan usahannya dengan ketentuan bahwa setelah berjualan, maka lokasi tempat mereka berdagang harus bersih. Aktivitas yang ada di lokasi ini sudah mulai nampak sekitar pukul 15.00, padahal sesuai kesepakatan dengan petugas Dinas Pasar bahwa mereka baru boleh memulai berjualan pada pukul 17.00. Mereka berjualan di lokasi ini sampai pukul 05.00 pagi karena pada pukul 06.00 lokasi itu harus bersih agar dapat digunakan untuk area parkir bagi pemilik toko di sepanjang Jl. Wahidin maupun para pengunjung pasar Tanjung. Sebagaimana disampaikan pak Tfq (Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung) berikut:

“...ya sebetulnya ada kesepakatan dengan para pedagang, mereka bisa berjualan mulai pukul 17.00 sampai pagi jam 06.00, nanti setelah selesai jualannya ya..mereka harus ringkasi barang-barang dagangannya, seperti itu terus tiap harinya, ada petugas satpol PP yang memantau kegiatan mereka..” (wawancara 13 Oktober 2014)

Pernyataan pak Tfq dipertegas dengan pernyataan yang disampaikan bu W1 yang menempati los sisi Timur Pasar Tanjung, bahwa para pedagang sudah mulai datang dan menata barang dagangannya pukul 15.00.

Seperti dituturkan bu Siti (42 tahun), pemilik warung kopi yang telah menekuni usahanya sejak tahun 1984 di bawah ini.

“...ya penghasilannya ya untuk kebutuhan makan, bayar utang dan menghidupi keluarga...memang ditempatkan disini memang dari dulu tempatnya di sini..kalau penghasilan rata-rata ndak ketemu dalam seharusnya ya mas ndak mesti, ya yang penting bisa balik modal, bisa bayar utang, bayar bank lebih dari cukup lah” (wawancara 2 Nopember 2014).

Penuturan bu St dipertajam oleh informan lain yang bernama bu W1 yang menyatakan bahwa:

“...kalau pendapatan sehari ya nggak ngitung mas wong kadang-kadang dapat ya langsung saya pake kulakan, kadang saya pake belanja, jadi nggak ketemu dapat berapa, ya kalau untuk kebutuhan makan ya Alhamdulillah cukup.” (Wawancara 25 Oktober 2014)

Motif para ibu rumah tangga pedagang di pasar Tanjung dalam menjalankan usaha perdagangan dan jasa informal umumnya juga berkaitan dengan aspek ekonomi. Motif ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana para ibu rumah tangga pedagang ini dengan sumber daya yang terbatas, seperti pendidikan yang umumnya rendah, keterampilan terbatas, dan modal usaha (kapital) relatif kecil, dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus tergantung kepada orang lain. Para ibu rumah tangga pedagang yang menjalankan usaha di pasar Tanjung pada umumnya didorong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, membeli pakaian, dan lain-lain. Kebutuhan keluarga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan dan minum, tetapi juga untuk biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.

4.3.2 Kontribusi Ekonomi Pedagang Sektor Informal di Pasar Tanjung

Sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, dalam sistem ekonomi kontemporer (modern) bukanlah merupakan suatu gejala ekonomi negatif sebagaimana argumen yang menolak keberadaan pedagang kaki lima, tetapi lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional (Effendi 1997:1). Pedagang sektor informal (pedagang kaki lima) sebagai korban dari kelangkaan kesempatan kerja produktif di kota, sehingga PKL dipandang sebagai jembatan terakhir bersama berkembangnya proses urbanisasi (Mustafa; 2008:57). Kontribusi positif dari sektor informal dan PKL khususnya, dapat dilihat dari kontribusi nyata yang diberikan sektor informal terhadap penyerapan tenaga kerja, GDP, dan lain-lain. Meskipun banyak pihak yang menganggap keberadaan pekerja informal sebagai pencipta

kemacetan dan pengganggu ketertiban kota, akan tetapi sumbangan positif sektor informal dan PKL tidak dapat diragukan.

Argumen yang positif mengenai peran positif dari pedagang informal juga disuarakan pula oleh Morrell, *et al* (2008:7) dalam kajiannya tentang sektor informal di kota Surakarta dan Manado. Hasil penelitian di Surakarta menunjukkan bahwa aktivitas sektor informal tidak hanya menterjemahkan fungsi ekonomi, tetapi juga memberikan pendidikan, mobilitas sosial, dan meningkatkan jaminan bagi anak-anak mereka. Harris sebagaimana dikutip Amin (2005) menunjukkan bukti bahwa efisiensi yang dimiliki oleh sektor informal dapat mengurangi tingkat kemiskinan urban.

Hasil penemuan ILO menunjukkan bahwa sektor informal mampu menyerap migran pedesaan (Amin 2005). Demikian pula, Kutcha-Helbling sebagaimana dikutip Kayuni dan Tambulasi (2009:81) dalam sebuah penelitian tentang pedagang kaki lima di Malawi, Afrika, mengungkapkan bahwa sejumlah besar sektor informal memiliki konsekuensi serius terhadap aktivitas sektor privat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta konsolidasi demokrasi. Sektor informal dapat memainkan peran yang strategis dalam pembangunan sebuah bangsa.

Beberapa kajian dan penelitian di atas membuktikan bahwa sektor informal dan pedagang kaki lima (PKL) telah memberikan bukti bahwa peran mereka sangat besar sebagai pelaku ekonomi yang tidak bisa dipandang remeh dan kontribusinya cukup besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kontribusi ekonomi dalam perspektif makro, sektor informal dan PKL memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan dan lapangan kerja bagi para migran pedesaan maupun warga perkotaan, serta mengurangi atau menekan kemiskinan. Sementara dalam perspektif mikro, sektor informal dan PKL meningkatkan pendapatan bagi pelakunya, memberikan jaminan kehidupan bagi keluarga dan anak-anaknya, serta memupuk dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Seperti diungkapkan informan bernama bu Tt berikut:

“...ibu sudah mulai bayi sudah dibawa mbah jualan di pasar Tanjung, sampai sekarang ke anak-anaknya, sebelah itu anak saya, itu dulu ibu yang belikan kios, ibu ndak ambil pinjaman sudah capek, anak-anaknya ibu yang ambil pinjaman biar punya tanggung jawab sendiri, saya yang bayar, kayaknya usahannya jalan itu dulu ibu yang modali, sekarang sudah punya rumah, kemarin sudah beli yang besaran.”(wawancara, 27 Oktober 2014)

Penuturan bu Tt senada dengan yang diungkapkan ibu Rus, Ibu penjual buah ini mengungkapkan bahwa putrinya yang nomor empat sejak awal juga dididik untuk menjadi pedagang

Saya sudah jualan di sini sejak pasar Tanjung dibangun, bapak nanti datang jam setengah empat, kadang jam empat, kalau pagi anak saya sama ponakan bantu di sini, kalau ndak ada yang bantu payah, kalau pagi banyak orang kulakan buah, ...anaknya mau kerja keluar bapaknya ndak boleh.” (wawancara, 27 Oktober 2014)

Ibu Alf seorang pedagang ikan asing juga merupakan tipologi pedagang yang telah memiliki jiwa wirausaha karena faktor keluarga, namun agak berbeda ibu Tt dan ibu Rus. Dengan bekal usaha hasil warisan orang tuanya Ibu satu anak ini lebih memilih menekuni usaha dagang di Pasar tanjung daripada harus ke bekerja di Jakarta. Berikut penuturannya:

“...kalau dulu yang menjalankan usaha ini orangtua saya, karena mama saya meninggal, jadi saya mau nggak mau ya meneruskan usaha ini, karena saya wanita, mau disuruh ke Jakarta nggak mau.” (wawancara, 22 Nopember 2014)

Penuturan dua informan di atas menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan atau penanaman jiwa enterpreneur sejak kecil sangat penting bagi para pedagang. Hampir semua pedagang informal yang berada di pasar Tanjung adalah penerus keluarga sebelumnya. Mereka menekuni usaha dagang di pasar Tanjung karena memang usaha tersebut telah ada sebelumnya. Mereka tidak perlu lagi merintis usaha dagang di pasar Tanjung.

Kontribusi yang paling nyata dengan adanya pedagang sektor informal di Pasar tajung adalah dalam bentuk penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Selain itu juga keberadaan mereka dapat menjadi sumber penghasilan

keluarga. Semakin banyaknya pedagang di pasar Tanjung juga mendorong semakin beranekaragamnya barang yang dijual seperti barang elektronik, mainan anak-anak, perlengkapan sekolah dan olahraga, konveksi, sembako, buah, daging, ikan laut, dan sayur-sayuran. Pedagang yang memiliki surat izin menempati (SIM) di lantai atas sebanyak 513 pedagang. Sejumlah 76 SIM sudah diperpanjang sedangkan sebanyak 427 SIM belum diperpanjang. Sementara itu di lantai bawah sebanyak 531 pedagang telah memiliki surat iji menempati, sebanyak 120 SIM telah diperpanjang sementara yang belum diperpanjang sebanyak 411. Jumlah pedagang sebanyak itu memberikan keuntungan daerah. Jumlah penerimaan retribusi yang diperoleh tiap tahun mengalami peningkatan seperti yang tampak pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Pendapatan Retribusi Daerah Pasar Tanjung

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1.	2007	869.449.000	869.944.600	100.06
2.	2008	894.449.000	985.031.100	100.07
3.	2009	983.983.000	935.695.400	95.10
4.	2010	1.033.100.000	1.034.598.450	100.14
5.	2011	1.136.410.000	1.138.026.540	100.14
6.	2012	1.221.641.000	1.221.969.360	100.02
7.	2013	1.170.805.000	1.032.607.340	88.19

Sumber : (Data Primer 2014, diolah)

Berdasarkan tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa rata-rata terjadi peningkatan rribusi tiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun tersebut peningkatan retribusi bahkan mencapai 100,14 pesen. Penurunan retribusi terjadi pada tahun 2009 dan 2013, pada tahun tersebut pemerintah daerah berusaha menertiban para pedagang sektor informal yang ada di pasar Tanjung dan sekitarnya, meskipun belum berhasil namun jumlah pedagang sudah berkurang. Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pedagang di pasar Tanjung setia tahun rata-rata melebihi dari target, bahkan pada tahun 2010 dan 2011 persentase realisasi pendapatan retribusi mencapai 100,14%.

Namun dengan mengabaikan pengecualian pada tahun 2009, sumbangan ekonomi PKL terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jember dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan. Ini artinya, keberadaan pedagang sektor informal atau PKL adalah riil memberi manfaat, sehingga fasilitasi dan pembinaan terhadap pedagang sektor informal sangat diperlukan agar mereka dapat mengembangkan usahanya, demi memenuhi kebutuhan keluarga dan pada gilirannya memberi sumbangan positif bagi perekonomian Jember. Penarikan retribusi kepada pedagang informal, baik yang sudah terorganisasi maupun yang belum, menunjukkan bahwa para pedagang tersebut memiliki kontribusi terhadap capaian pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Jember meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Meskipun tidak sebesar kontribusi ekonomi pedagang di kota lain seperti Surabaya, tetapi sumbangan pedagang informal di Jember cukup signifikan, karena pendapatan yang berasal dari retribusi pedagang tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah kota untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini menunjukkan, bahwa meskipun sikap pemerintah kota terkadang ambivalen, tetapi keberadaan sektor informal, khususnya pedagang informal tetap diperhitungkan karena sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cukup signifikan.

Jika ada yang menganggap bahwa pedagang sektor informal tidak memberikan sumbangan yang besar dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) seperti beberapa kota besar lainnya, namun penghasilan PKL dapat digunakan oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung kehidupan kelompok marginal lainnya, seperti tukang parkir dan pengemis. PKL memberi kontribusi dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan stabilitas ekonomi kota. Keberadaan PKL juga tidak membebani anggaran pemerintah kota, bahkan dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja tidak terdidik.

Sebelum terjadinya penertiban (penggusuran) besar-besaran pada bulan September 2014, wilayah pasar Tanjung dan pasar Johar, khususnya di Jl. Untung Suropati dan Jl. Wahidin, cukup banyak para pedagang yang menjalankan aktivitas ekonomi, terutama adalah berdagang baju, warung nasi dan sayuran. Jumlah pedagang pada saat penggusuran tidak kurang dari 200 pedagang. Atas nama kebijakan penataan dan penertiban (rekayasa) jalur lalu lintas, pemerintah kabupaten Jember memberi

perintah kepada Polisi Pamong Praja untuk membersihkan wilayah sekitar pasar Tanjung yang padat dipenuhi para pedagang informal. Akhirnya, pada tanggal 8 September 2014, pedagang yang di Jl. Untung Suropati digusur. Seluruh bangunan semi permanen dan lapak mereka diratakan dengan tanah, dan sejak itu mereka direlokasi ke pasar Sabtu pasar Tegal Besar, pasar Kreongan, pasar Gebang dan pasar Sukorejo.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, selain telah berkembang bisnis properti, di kota Jember juga telah tumbuh bangunan-bangunan hotel dan mall. Saat ini pertumbuhan pusat perbelanjaan dalam bentuk minimarket semacam Indomaret dan Alfamaret di seluruh pelosok kota Jember. Hal ini menyebabkan Jember makin siap memasuki gerbang kota perdagangan dan jasa. Perkembangan ini yang menjadi daya tarik banyak investor yang tertarik menanamkan sahamnya di Jember untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, industri maupun jasa. Pertumbuhan pusat-pusat perdagangan tersebut akan memunculkan atau mendorong pertumbuhan sektor informal.

Sebagai dampak dari berkembangnya sektor formal di kota Jember, utamanya bisnis properti, pendidikan, perdagangan dan perhotelan, maka berkembang pesat juga usaha sektor informal. Sentra-sentra perdagangan, industri, dan jasa (tekstil, makanan/kuliner, pendidikan, dan yang lain) mendorong tumbuh berkembangnya sektor informal, terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menjual makanan dan kebutuhan pangan lainnya. Hampir semua tempat di kota Jember, siang maupun malam hari, bisa dijumpai para pedagang sektor informal yang menjual makanan dan minuman. Keberadaan para pedagang sektor informal juga memberi kontribusi ekonomi kepada pihak lain, seperti tukang parkir, pengamen, dan pengemis. Secara akumulatif, pedagang sektor informal juga memiliki kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan bagi penduduk kurang beruntung, bahkan juga memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah.

4.3.3 Sektor Informal sebagai *Survival Strategy* Bagi Rumah Tangga Pedagang Terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro

Strategi atau upaya untuk mempertahankan hidup merupakan ciri khas kelompok, masyarakat, atau komunitas yang terpinggirkan. Para pekerja sektor informal yang hidupnya semata-mata tergantung dari pekerjaan tersebut akan berusaha untuk menjalankan usaha tersebut dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang mereka geluti termasuk jika mereka harus berhadapan atau menentang kebijakan pemerintah daerah yang mengancam kelangsungan usahanya. Dalam kasus pedagang kaki lima di pasar Tanjung, ditemukan suatu kenyataan bahwa setiap pedagang sesungguhnya bertahan dengan kondisi apapun agar dapat menemukan cara untuk menghadapi tantangan agar dapat mempertahankan usahanya. Kondisi ini berkaitan dengan strategi survival para pedagang.

Ibrahim dan Baheram (2009) mengutip pernyataan White menyebutkan tiga jenis strategi survival, yaitu: *pertama*, strategi survival sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat minimum agar dapat bertahan hidup; *kedua*, strategi konsolidasi yaitu strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang dicerminkan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan sosial; *ketiga*, sebagai strategi akumulasi, yaitu strategi pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kebutuhan pokok, sosial, dan pemupukan modal. Seperti diungkapkan informan bersinial Hmd berikut:

“...kalau punya saya nggak tahu per harinya berapa yang penting dapat 1 hari kadang itu ya Rp 100.000, bukan penghasilan itu semua, kotornya, Alhamdulillah mencukupi. putranya saya enam, sekolah semua, ada yang kuliah, ada yang sudah menikah, yang kuliah tiga, sudah selesai yang satu, kalau nggak cukup ya cari utang buat bayar kuliah, di sini ada kelompok arisan.”

Strategi bertahan hidup tersebut ditempuh oleh para pedagang atau kelompok masyarakat, tergantung pada kondisi ekonominya dan status sosial para pedagang. Kehidupan ekonomi dan sosial setiap orang pasti berbeda, strategi mana yang akan ditempuh juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan. Bagi

kelompok masyarakat marginal, termasuk di dalamnya pedagang sektor informal, jenis strategi survival yang pertama dan kedua yang dipilih. Kalau pun ada yang menempuh strategi ketiga, yaitu akumulasi, tidaklah banyak. Bu Tt merupakan contoh pedagang yang mewakili strategi ketiga. Ia yang hanya bekerja sebagai pedagang palawija yang menempati los di lantai pasar Tanjung, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat menabung dan memberikan modal bagi anaknya yang laki-laki untuk dapat mengikuti jejaknya sebagai pedagang. Contoh lain yaitu yang dialami Ibu Wl, ibu dua anak ini menjalankan usaha dagangannya bersama dengan suami dan anaknya, pembagian tugas berjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor usaha ibu Wl merupakan usaha pokok. Penghasilan dari usaha dagangannya ini harus diatur selain untuk belanja barang dagang juga harus digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, berikut yang disampaikan ibu Wl:

“...kalau pendapatan sehari ya nggak ngitung mas wong kadang-kadang dapat ya langsung saya pake kulakan, kadang saya pake belanja, jadi nggak ketemu dapat berapa, ya kalau untuk kebutuhan makan ya Alhamdulillah cukup,”

Hal yang hampir senada disampaikan oleh Ibu Skd. Beliau sehari-hari berjualan pisang rebus, kopi dan rokok. Anak-anaknya semua yang berjumlah sembilan orang, tiga orang menjadi pedagang di pasar Tanjung, anaknya yang berjualan di Jl. Untung Suropati dan di Jl. Wahidin (Timur Pasar Tanjung) menjadi korban pengusuran dan penertiban. Akibat adanya kebijakan penertiban itu, anak-anaknya sekarang semua bertahan hidup dengan mengandalkan pendapatan dari warung bu Skd. Berikut yang disampaikan ibu Skd:

“...anaknya saya tiga, cucu sembilan, anak saya yang jualan banyak yang digusur yang di pasar sore, jadi anak dan cucu-cucunya makan di mbahnya semua, kalau di pasar tegal besar tidak laku, ndak tahu sekarang kesini semua dek, disana digusur, anak saya sekarang di pasar Sabtuan, sepi di sana, kadang dapat 5.000. penghasilan saya disini tidak mesti, dapat segini dibelanjakan, ndak ketemu pokoknya bisa kulakan lagi alhamdulillah.” (wawancara 24 Nopember 2014)

Apa yang disampaikan oleh ibu Skd menegaskan bahwa begitu pentingnya usaha bergadang yang di jalani oleh Ibu Skd bersama anak-anaknya. Dengan berdagang ibu Skd dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggal sendiri sekaligus menjadi harapan anak-anaknya. Apa yang disampaikan oleh ibu Skd dipertegas oleh anaknya yang juga ikut berjualan di tempat usaha bu Skd.

Banyak kejadian yang dialami orang-orang termasuk pedagang informal, ketika mereka merasa terpinggirkan atau disingkirkan, mereka akan berusaha mempertahankan rumahnya, tempat tinggalnya, atau alat-alat produksi untuk memperoleh pendapatan. Kondisi menunjukkan ada sesuatu yang membuat mereka bertahan dan berani mengambil resiko betapa pun beratnya. Tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi dan hidup yang penuh risiko inilah yang membuat mereka bertahan. Segala keterbatasan yang mereka miliki, seperti pendidikan yang kurang, modal pas-pasan, keterampilan tidak ada, tidak berani mengakses kredit, maka satu-satunya jalan bagi kelompok masyarakat seperti itu adalah berusaha untuk tetap mempertahankan hidupnya demi keluarga yang mereka cintai. Situasi dan kondisi yang tertekan dan menekan mereka, membuat kelompok masyarakat kurang mampu ini bergerak keluar dari belenggu kemiskinan, sekadar untuk hidup.

Pernyataan dari ibu Skd menunjukkan bahwa determinasi ekonomi dan kerja sama dalam konteks ekonomi dengan sesama pedagang sektor informal merupakan cara yang rasional untuk menutupi kebutuhan hidup yang semakin beragam. Pola ekologis para pedagang dalam bentuk survival dari kelompok sosial yang berbasis subsistence tersebut, maka pedagang kaki lima biasanya akan memanfaatkan setiap jengkal ruang kota yang dianggap punya nilai ekonomis untuk ditempati berdagang guna mempertahankan hidupnya. Bagi pedagang sektor informal di pasar Tanjung, setiap jengkal sudut pasar yang mereka gunakan untuk berdagang pada dasarnya adalah ruang ekonomi utama yang mereka miliki hak pemakaiannya baik sebagai warisan dan harus mereka manfaatkan sebaik mungkin. Pedagang kaki lima sebagai kelompok masyarakat yang subsistence melihat bahwa semua aset yang mereka miliki baik lapak dan tempat mereka berdagang adalah sarana untuk mewujudkan

rasionalitas instrumentalnya sehingga apapun akan dilakukan untuk mempertahankan diri. Lokasi berdagang merupakan aset yang sangat penting bagi pedagang sektor informal di pasar Tanjung karena sejengkal tanah tempat mereka berusaha adalah satu-satunya cara mereka mempertahankan hidupnya di kota. Kebanyakan mereka menempati lokasi yang diklaim oleh pemerintah kota melanggar peraturan.

Sebagai kelompok marjinal dalam piramida masyarakat kota pedagang sektor informal mempunyai posisi tawar yang sangat tidak menguntungkan. Keberadaan mereka terkadang tidak dianggap sebagai entitas masyarakat kota sehingga seringkali ada argumen-argumen yang membenarkan lewat produksi kebijakan yang muaranya adalah semakin menempatkan para pedagang sektor informal dalam posisi yang semakin termarginalkan. Semangat semacam itulah yang akhirnya memunculkan wajah pedagang sektor informal sebagai komunitas sosial yang benar-benar berbeda dalam dinamika wajah perekonomian masyarakat kota di samping pertumbuhan sektor formal.

Potret kehidupan ibu As menggambarkan batapa kehidupan sebagai pedagang sektor informal ia jalani setiap hari dengan menempuh jarak yang relatif jauh. Bersama suaminya ibu Astutik setiap hari harus mengangkut sayur berupa terong, pakis, jagung dari Desa untuk dibawa ke pasar Tanjung. Berikut ini pernyataannya:

“...aku asli mumbulsari, engok barange diangkut muleh pakai tossa, nek ono sisae, isuk balik ngono awan lungo maneh balek bendino ngangkut bendino, angel golek pangan le.” (saya asli mumbulsari, nanti barangnya diangkut pulang pakai gerobak tosa, kalau ada sisa barang, pagi pulang siang kesini lagi, balik setiap hari, ngangkut setiap hari, sulit cari makan) (wawancara 22 Nopember 2014)

Setiap pedagang mempunyai strategi dalam merintis, menjalankan dan mempertahankan usahanya. Sebagai pedagang sektor informal sangat rentan dengan segala tantangan dan kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal dapat berupa penggusuran maupun ketersediaan stok barang dagangan. Faktor internal dapat berupa modal sosial maupun modal usaha yang lain. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, strategi yang harus dimiliki oleh pelaku sektor informal

adalah: *Pertama*, strategi pemenuhan kebutuhan dasar, bentuk strategi yang digunakan dalam memperoleh pekerjaan di kota. *Kedua*, strategi peningkatan kesejahteraan: tahap pengembangan usaha untuk meningkatkan perolehan penghasilan (Yusuf, 2006).

Strategi survival atau bertahan hidup setiap pedagang memang bermacam-macam. Ibu Skd misalnya, dengan anggota keluarga yang begitu banyak dan menjadi korban penggusuran berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Anaknya sebelum digusur, bekerja sebagai penjual bajur dan plastik, dan setelah penggusuran, sekarang harus ikut membantu di kios ibu Skd. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa (1) lepas dari kebijakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jember, pedagang sektor informal memiliki daya tahan yang luar biasa ketika menghadapi tantangan dan persoalan hidup serta mereka mampu keluar dari kesulitan, (2) usaha sektor informal yang ada di pasar Tanjung merupakan sumber penghasilan utama keluarga. Sektor informal tidak hanya diartikan sebagai unit yang berkaitan dengan persoalan mencari penghasilan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan sumbangan kepada pendapatan daerah, tetapi lebih dari itu, bagi masyarakat golongan miskin merupakan sebah tindakan rasional yang harus dijalani guna mempertahankan kelangsungan hidup (*survival strategy*).

4.3.4 Implikasi Penertiban (Penggusuran) Terhadap Pola Kelembagaan Sektor Informal di Pasar Tanjung

Diakui bahwa sektor informal memiliki kontribusi bagi pembangunan ekonomi, namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah beserta aparaturnya berkecenderungan menempatkan para pedagang kaki lima sebagai derivatif pedagang sektor informal sebagai pengganggu yang harus ditertibkan. Padahal sektor ini memberi kontribusi penyerapan angkatan kerja yang signifikan meskipun hingga sekarang tetap masih menjadi sektor marginal, kurang mendapat perhatian, dan tidak jarang dianggap mengganggu ketertiban Samhadi (dalam Handoyo, 2012). Pasca krisis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman di

tengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (2006), sektor informal menyerap kurang lebih 70% angkatan kerja, sementara sektor formal hanya 30%.

Konsep pembangunan dalam pemerintahan bupati MZA. Djalal dengan slogan “Membangun Desa Menata Kota” lebih banyak bernuansakan pembangunan fisik daerah kota. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 yang mengatur PKL pernah diterapkan pada tahun 2010, namun kebijakan ini hanya berhasil menertibkan para pedagang yang berada di Jl. Samanhudi. Sementara upaya penertiban pedagang pasar Johar dan Timur pasar Tanjung baru berhasil diterapkan pada tahun 2014 bersamaan dengan kebijakan rekayasa perubahan jalur lalu lintas di sekitar pasar Tanjung. Sasaran kebijakan penertiban dan pengusuran adalah para pedagang kaki lima yang menempati lokasi sekitar pasar Tanjung, tepatnya yang berada di Jl. Untung Suropati, Jl. Wahidin. Dalih dari penertiban ini karena dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial (Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008).

Implikasi kebijakan penertiban ini dalam konteks kelembagaan setidaknya dapat dikemukakan menurut kajian ekonomi dan sosial dan lingkungan. Pasar tradisional menunjukkan dinamika kelembagaan tersendiri sebagaimana yang terlihat di pasar Tanjung. Dampak yang paling nyata adalah terkait masalah ekonomi, baik itu menyangkut masalah pendapatan pedagang. Kebijakan penataan (pengusuran) pedagang memengaruhi pendapatan mereka. Implikasi secara ekonomi tentu saja dirasakan oleh para pedagang utamanya yang berada di Jl. Untung Suropati, mereka terkena dampak langsung kebijakan ini karena harus pindah ke lokasi baru. Selain itu juga para pedagang yang berada di Jl. Wahidin masih punya kesempatan untuk berdagang meskipun dibatasi waktu. Seperti yang disampaikan bu WI berikut:

“...sudah ada kesepakatan dengan petugas, biasanya kesepakatan mereka bukanya jam 17.00 sore, tapi jam 15.00 sore mereka sudah mulai menata barang dagannya, mereka ndak nunggu pedagang yang yang di atas tutup, kalau nunggu yang atas tutup, kadang yang atas sampai jam 09.00 malam, kalau nunggu yang atas tutup nggak makan yang bawah, mereka sekarang jualan ndak boleh di jalan, tapi di atas.” (wawancara 2 Desember 2014)

Pernyataan bu Wl dipertegas oleh penuturan bu Tt pedagang palawija (toko pracangan) di lantai atas. Keberadaan penataan ternyata tidak banyak merubah onzet penjualannya. Harapannya ketika dilakukan penertiban yang mengatur jam buka pedagang di bawah menjadi malam sampai pagi, bu Tt berharap pembeli akan naik. Akan tetapi kebijakan yang dilakukan hanya membongkar lapak atau warung yang ada di jalan. Kebijakan ini dirasakan pedagang seperti bu Tt yang di lantai atas tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Berikut ini pernyataan bu Tt:

“...kalau kios sekarang karcisnya naik, tapi orang di atas banyak yang ndak bayar, soale di bawah itu masih jualan, yang dituntut sama orang atas itu kan pedagang yang dibawah bersih, kalau bawah itu bersih banyak yang bayar, yang bawah cuma beber tikar, bayar Rp 1.000, jualannya laris. Pedagang yang bawah itu maunya dipindah ke atas, itu di atas banyak yang ditinggal penghuninya, kalau dulu di sini banyak sayur, waluh, orang atas itu rame punya ibu rame, jaman dulu ibu dapat Rp500.000, Rp600.000 sudah banyak, sekarang kadang Rp100.000, kecil.” (wawancara 10 Nopember 2014)

Pedagang seperti bu Tt yang berada di lantai atas perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Pada kelompok ini kebijakan yang harus dilakukan adalah merelokasi pedagang berdasarkan barang yang diperdagangkan. Jika pasar bawah (Jl. Wahidin) tetap ada, maka pedagang yang di atas akan tetap dirugikan. Menurut penuturan bu Tt, para pedagang yang di bawah harusnya diijinkan buka setelah pedagang palawija yang di atas tutup. Tentunya kebijakan ini harus di ikuti dengan kebijakan lain berupa kesepakatan dengan pedagang yang di lantai atas agar ada batasan jam aktivitas dagang. Bu Tt menambahkan bahwa perjanjiannya jam 07.00 malam habis maghrib mereka baru boleh buka, tetapi jam 14.00 kadang 15.00 mereka sudah buka.

Berbeda dengan yang dialami oleh ibu Tt, bu Wt seorang penjual barang-barang peralatan rumah tangga, seperti sapu, keranjang, gantungan baju, dan gerabah, menyatakan bahwa sejak pasar bawah ditutup terjadi penurunan hasil penjualan. Biasanya pengunjung yang berada di pasar bawah naik ke lantai atas jika membutuhkan barang-barang seperti yang dijual bu Wt. Berikut pernyataan bu Wt:

“...dulu masih ada pasar bawah (pasar sore) masih rame, kadang ada orang beli keranjang atau apa, sekarang banyak kosong, dulu masih lumayan hasilnya, sehari tidak mesti mas, kemarin dapat Rp50.000,- kecil mas benar mas, duduk sehari tidak ada orang lewat, kadang dapat Rp50.000,- dapat Rp100.000,- kalau dulu lumayan.” (wawancara 11 Nopember 2014)

Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, penataan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember di satu sisi memberikan implikasi terhadap para pedagang utamanya yang berada di Jl. Wahibin sebagai objek penataan. Sementara implikasi penataan pedagang di bawah dirasakan berbeda oleh pedagang yang berada di lantai atas. Bagi pedagang palawija, harusnya konsep penataan yang dijalankan harus betul-betul memperhatikan komoditas yang diperdagangkan. Jika barang yang diperdagangkan sama maka konsumen cenderung membeli di pasar bawah. Sementara bagi pedagang dengan komoditas lain berharap pasar bawah tetap ada agar pengunjung dapat naik ke lantai atas jika membutuhkan peralatan rumah tangga. Ada aturan main yang dilanggar oleh para pedagang utamanya para pedagang yang berada di Jl. Wahidin. Mereka memiliki kekuatan sosial masing-masing untuk memperjuangkan nasib para pedagang. Bagi pedagang yang berada di pasar Tanjung baik yang berada di lantai bawah maupun yang berada di lantai atas didukung modal sosial yang terakumulasi dalam sebuah wadah paguyuban. Seperti jawaban bu Tt ketika ditanya tentang keberadaan paguyuban pedagang pasar Tanjung berikut:

“..saya dulu bagian itu (paguyuban), sekarang itu diganti orang dibawah, apa itu paguyuban GERPAS, itu Gerakan Pemuda Pasar Tanjung, kapan hari sudah ke pendopo, sudah ke lobi Pemda. (wawancara 10 Nopember 2014)

Para pedagang yang berada di dalam pasar Tanjung terutama yang di lantai atas berusaha memperjuangkan nasib mereka terkait kebijakan yang terkesan sepihak yang hanya menguntungkan keberadaan pedagang yang berada di bawah. Sementara itu para pedagang yang berada di Jl. Wahidin *dibackup* oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempar dengan seseorang menjadi aktornya. Pasca kebijakan penataan sekarang muncul fenomena penggunaan payung bagi para pedagang yang berada di Jl. Wahidin. Mereka memanfaatkan payung untuk berdagang dengan membeli pada koordinator pedagang. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tekanan kepada para pedagang yang tidak membeli payung tidak boleh berjualan di Jl. Wahidin. Tentu saja aturan ini mendapat respon berbeda dari para pedagang, sebagian besar pedagang harus mengikuti kemauan aktor pasar ini agar tetap dapat berjualan. Akan tetapi ada juga pedagang yang menolak untuk membeli payung tersebut. Seperti yang dialami oleh ibu Astutik, penjual sayur di Jl. Wahidin yang telah puluhan tahun berjualan di Pasar Tanjung, bahkan sebelum pasar Tanjung dibangun. Ibu As menganggap bahwa intimidasi itu tidak ada artinya karena merasa sebagai pedagang lama di lokasi tersebut. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh ibu As mendapat dukungan dari pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Berikut Gambar 4.16.



Gambar. 4.16. Visualisasi Pedagang Pasca Kebijakan Penataan (Data Primer 2014)

Apabila dikaitkan dengan aspek kelembagaan yang berasal dari para pedagang hubungannya dengan lembaga keuangan informal maupun formal juga memengaruhi pola-pola interaksi antar pedagang dengan pihak lembaga keuangan informal maupun

lembaga keuangan formal yang bermain dalam pasar. Dimana kelembagaan itu sendiri akan memberikan “aturan-aturan permainan” kepada pedagang untuk mengakses jasa dari lembaga keuangan. Pada akhirnya pola interaksi antara pedagang dengan sesama pedagang dan pedagang dengan lembaga keuangan tersebut akan tergantung dari kelembagaan yang diterapkan.

Terkait dengan pedagang yang menjadi korban penggusuran, lembaga keuangan harus menelusuri ulang keberadaan pedagang yang menjadi nasabah untuk menagih angsuran setiap bulan. Seperti yang disampaikan oleh Fn, pegawai bank BRI yang setiap hari berada di Teras BRI yang berada di pasar Tanjung.

“...kalau yang kena relokasi tapi mereka punya pinjaman, ya nabungnya atau angsurannya kita hubungi atau bayar di Tegal Besar, kita punya nomor Hp-nya kita punya alamat rumahnya, kalau mereka pernah telat ya jadi catatan sendiri, misal kita datang ke rumah orangnya orangnya tidak bayar ya menjadi catatan sendiri bagi bank.”
(wawancara 11 Nopember 2014)

Keterangan Fanny dari BRI diperkuat oleh keterangan Sn dari bank Mandiri, yang menyatakan bahwa khusus nasabah-nasabah yang menjadi korban relokasi, maka pihak lembaga keuangan harus menghubungi atau mencari nasabah tersebut. Berikut pernyataan Sn terkait hal itu:

“...kalau ada debitur yang dipindah ya nyari sendiri ke lapangan mas, tapi saya kan sudah punya nomornya semua, karena debitur ada yang minta di tagih tiap hari, ada yang minta satu bulan, kalau yang nominalnya besar dia kan berfikir uangnya lebih baik dibuat modal.”
(wawancara 7 Nopember 2014)

Kondisi yang alami oleh pegawai bank tersebut mencerminkan munculnya *transaction cost*. Biaya transaksi pasti muncul ketika muncul kebijakan yang dilakukan oleh salah satu unsur kelembagaan yaitu pemerintah. Hal ini diakibatkan karena waktu untuk dapat bertemu dengan nasabah (debitur) menjadi bertambah. Apa yang dihadapi oleh Sn dan juga Fn dapat dikatakan sebagai penyebab munculnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk menagih ke nasabah (debitur) karena para

pedagang telah berpindah lokasi. Selain itu jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan dan harus dilaksanakan oleh Sn khususnya tidak terbatas pada pagi sampai sore hari, pada malam hari petugas dari bank Mandiri ini juga harus kembali ke pasar Tanjung untuk menagih angsuran kepada para nasabah.

Selain perubahan kelembagaan dari sisi hubungan pedagang dengan para pedagang, pedagang dengan lembaga keuangan dan pedagang dengan pengambil kebijakan. Perubahan secara fisik juga terjadi di Pasar Tanjung akibat dari penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti nampak pada Gambar 4.17 berikut:



Gambar. 4.17. Visualisasi Lokasi Pasca Kebijakan Penertiban dan Penataan (Sumber : Data Prmer, 2014)

Perubahan yang paling nyata pasca pengurusan dan penataan adalah kondisi jalan yang semakin tertib. Apalagi kebijakan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah hampir bersamaan dengan pengalihan atau uji coba sekaligus rekayasa jalur lalu lintas di sekitar pasar Tanjung. Sepanjang Jl. Untung Suropati menjadi steril dari para pedagang karena lokasi inilah yang sebenarnya menjadi sasaran utama pengurusan. Jika pedagang di Jl. Untung Suropati (pasar Johar) harus terkena relokasi ke pasar Tegal Besar, Pasar Sabtuan, Pasar Gebang dan Pasar Sukorejo. Sementara itu pedagang yang berada di Jl. Wahidin hanya terkena dampak kebijakan penataan. Pembongkaran yang dilakukan oleh petugas Satpol PP hanya dilakukan terhadap para pedagang yang mendirikan bangunan atau lapak permanen, misal sampai dikeramik atau tembok.

4.4 Konstruksi Model Kelembagaan Ibu Rumah Tangga Pekerja Sektor Informal Terkait Akses Lembaga Keuangan Mikro: Beberapa Temuan dan Implikasi Kebijakan

Dinamika sosial masyarakat dibangun di atas tiga pilar penting sebagai elemen sosial pokok, yang secara fundamental ketiganya sangat berbeda. Masing-masing elemen memiliki paradigma, ideologi, nilai, norma, *rules of the game*, dan bentuk keorganisasiannya sendiri Saptana *et al.* (2003). Tiga pilar elemen sosial yang dimaksud adalah: pemerintah, pasar, dan komunitas. Secara sederhana ketiganya direpresentasikan menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Masing-masing memiliki peran berbeda yang harus dijalankan secara seimbang dan ideal. Konfigurasi kekuatan antara ketiganya merupakan dasar pembentuk suatu sistem sosial. Dewasa ini dalam perkembangannya telah terjadi evolusi dominansi peran antar ketiganya dalam historik dunia ini, yaitu dari komunitas ke pemerintah dan terakhir ke pasar. Pada era masyarakat agraris pra-kapitalis peran komunitas sangat besar, ketika peran negara dan pasar belum hadir. Kemudian pada era pembentukan masyarakat modern, negara mendominasi komunitas dan pasar. Pada perkembangan terakhir, ketika globalisasi semakin kuat pengaruhnya pada dunia yang tanpa batas, maka pasarlah yang menguasai dunia. Terlebih ketika sistem kapitalis semakin menguasai perekonomian dunia, korporasi-korporasi transnasional mendominasi pemerintah dan komunitas. Demikian pula pada tingkat lokal.

Selain pola pergeseran atau perubahan dominansi di antara ketiga bentuk kelembagaan mulai dari pola “komunitas-pemerintah-pasar”, menuju “pemerintah-komunitas-pasar”, menjadi “pasar-pemerintah-komunitas”. Negara yang seringkali diidentikkan dengan pemerintah (secara politik) dan pasar dalam makna ekonomi adalah dua entitas yang semakin menyatu, yang secara bersama-sama semakin membatasi dan melemahkan peran komunitas dalam makna sosial. Munculnya wacana *civil society* merupakan respon dari semakin kuatnya peran negara yang berkolaborasi dengan pasar tersebut terutama dalam bingkai demografi perekonomian suatu negara.

Secara teoritis, pemerintah semestinya menjadi pihak yang mengatur struktur otoritas antar ketiganya.

Berbagai dinamika perubahan kelembagaan ini sangat menentukan apa yang terjadi di tataran mikro khususnya di pasar Tanjung. Aktivitas-aktivitas perekonomian yang semestinya dikelola menurut bentuk “kelembagaan komunitas” menjadi tidak efektif ketika cara bekerjanya tidak lagi murni dijalankan oleh pedagang. Secara konseptual antara komunitas, pemerintah, pasar memiliki perbedaan yang hakiki seperti nampak pada Tabel 4.4.berikut:

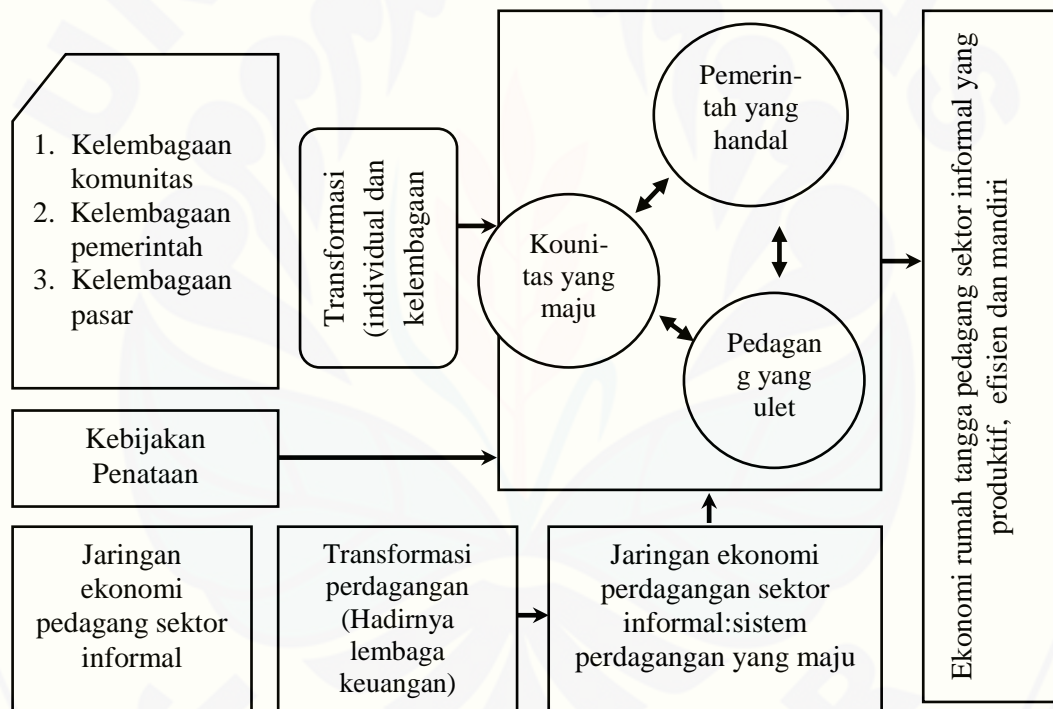
Tabel 4.4. Perbedaan Karakteristik Antara Komunitas, Pemerintah, dan Pasar Secara Konseptual

No	Aspek	Komunitas	Pemerintah	Pasar
1.	Orientasi	Pemenuhan kebutuhan hidup komunal	Melayani penguasa dan masyarakat	Keuntungan profit (<i>profit oriented</i>)
2.	Sifat kerja sistem sosialnya	Demokratis berdasarkan kesetaraan	Monopolis	Kompetitif
3.	Sandaran kontrol sosial	Kultural (<i>cultural compliance</i>)	<i>Cohersif compliance</i>	Penuh perhitungan (<i>renumeration compliance</i>)
4.	Bentuk norma utama	Komunal dan kepatuhan	Modifikasi perilaku	Individualis

Sumber: Saptana et. al (2003)

Kelompok pedagang sektor informal merupakan bentuk kelembagaan yang paling alamiah dan universal. Keberadaannya menjadi kelembagaan yang pertama dibentuk pada masyarakat manapun bahkan sebelum kelembagaan pasar terbentuk, dan tidak akan kehilangan eksistensinya meskipun muncul kelembagaan negara dan pasar. Orientasi utama terbentuknya kelembagaan komunitas pedagang adalah kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang sifatnya secara komunal. Sementara itu gambaran pada kelembagaan pemerintah daerah sangat berbeda, karena orientasi utamanya kepada pelayanan terhadap penguasa, pejabat, kepala daerah dan sekaligus rakyat. Struktur kekuasaannya yang monopolis menjadikan demokrasi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Bagi kelembagaan pemerintah, berbagai sistem norma,

hukum, struktur politik dan lain-lain merupakan impor dari bentuk-bentuk yang sudah lebih dahulu berkembang di masyarakat dengan lingkungan sosial yang sangat berbeda. Pasar yang diwakili oleh pedagang dan lembaga keuangan mikro merupakan kelembagaan yang tegas, dan juga sederhana. Tegas karena setiap perilaku yang diperankan oleh kelembagaan pedagang dan kelembagaan pemerintah harus tunduk pada hukum pasar. Kesederhanaannya tampak dari orientasi kerjanya sangat sempit: mencari keuntungan. Kelembagaan pasar dibentuk dengan semangat kerjanya yaitu kompetisi. Konstruksi model kelembagaan sektor informal nampak pada Gambar 4.18 berikut:



Gambar 4.18. Konstruksi Model Kelembagaan Sektor Informal (diadaptasi dari Saptana et. al, 2003)

Uraian dan konstruksi model kelembagaan di atas merupakan cerminan kelembagaan sektor informal yang ada di pasar Tanjung. Dinamika perkembangan para pedagang di pasar Tanjung membentuk sebuah sistem kelembagaan baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Pada tahapan yang pertama secara sosial muncul kelompok masyarakat yang dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang

semakin lama semakin besar, semakin kompleks dan semakin cepat. Teori Thomas Robert Malthus mengenai pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan barang dan jasa menjadi dasar hal ini, bahwa kebutuhan manusia diikuti pertumbuhan penduduk ibarat deret ukur, sementara pertumbuhan barang dan jasa mengikuti deret hitung. Komunitas pedagang inilah yang kemudian menjadi kelompok masyarakat yang disebut dengan kelembagaan komunitas. Para pedagang sektor informal ini tumbuh secara alamiah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengindikasikan bahwa keberadaan mereka karena memang ada budaya mewariskan usaha dagangnya kepada anak-anaknya atau keluarganya. Seperti penuturan Ibu Kh Penjual jamu di pasar Tanjung berikut:

“...saya memulai usaha ini sekitar tahun 1995, suami sama kerja di sini juga, ...awalnya abah sama umi yang jualan disini , terus abah umi meninggal saya penerusnya...ya karena usaha ini warisan jadi tidak ada usaha lain, ya ini lah yang ditekuni, mulai dulu mulai pembangunan pasar. (wawancara, 9 Nopember 2014)

Senada dengan yang disampaikan oleh Kh, Ibu Wl juga merupakan pedagang yang memulai usaha sejak mertuanya meninggal dan sudah berjualan di pasar Tanjung selama delapan belas tahun dan tidak berpindah-pindah. Pernyataan ini dipertegas oleh ibu St, penjual Rokok dan warung kopi, berikut penuturannya:

“...mulai berdagang sejak tahun 1984, suami buka toko bangunan di Jl. Kacapiring 4 Gebang sekaligus tempat tinggal. Mulai berdagang sejak kecil.jadi diajarin sama ibu juala apa dulu ya jualan kacang mungkin...ya untuk kebutuhan makan bayar utang dan menghidupi keluarga...memang ditempatkan disini memang dari dulu tempatnya di sini.” (wawancara, 11 Nopember 2014)

Ibu Tt pedagang palawija yang menempati los di latai atas mengungkapkan hal yang sama, bahwa usaha dagang yang ditekuni sekarang merupakan warisan dan sekaligus hasil pembelajaran kewirausahaan yang berasal dari neneknya. Berikut ini petikan wawancara dengan bu Tt:

Ibu mulai bayi sudah dibawa mbah ke pasar, mulai dari mbah jualan di pasar Tanjung sampai ke anak-anaknya, dulu kios itu punya ibu, terus tukar tambah sama yang punya ini.” (wawancara, 12 Nopember 2014)

Berdasarkan penuturan informan-informan tersebut dapat disimpulkan bahwa para ibu rumah tangga pedagang sektor informal yang berada di pasar Tanjung adalah pedagang yang menekuni usaha dagang sejak bertahun-tahun dan usaha tersebut berasal dari keluarga mereka sebelumnya. Rata-rata mereka telah menekuni usaha dagang tersebut lebih dari 10 tahun. Gambaran ini menunjukkan bahwa sebelum pasar dibangun komunitas pedagang sektor informal sudah terbentuk lebih dulu. Mereka belum tersentuh kebijakan penataan dan akses modal ke lembaga keuangan.

Kelembagaan komunitas pedagang ini selanjutnya mengalami perkembangan ketika muncul komunitas yang lain untuk dapat bergabung dengan komunitas yang ada sebelumnya di pasar Tanjung. Para pendatang kemudian terlibat dalam kegiatan dagang di pasar Tanjung. Mereka kebanyakan adalah para pendatang yang berasal dari Madura. Dengan cara membeli los, kios maupun lokasi berdagang yang sebelumnya dimiliki oleh warga Jember. Hal ini diungkapkan oleh informan bernama Pak Syr, pemilik usaha service dan penjual jam tangan yang telah menekuni usahanya lebih dari 30 tahun sejak pasar Tanjung belum ada. Rumah pak Syr juga tidak jauh dari pasar Tanjung tepatnya di Jl. Dr. Sutomo, sehingga setiap perkembangan yang ada di pasar beliau mengikuti. Berikut ini penuturan pak Syr:

“...dulu mereka jualan hanya mulai sore sampai pagi, akhirnya-akhirnya dikasih gerobak ya tambah netep, ndak mau pindah... dulu yang jualan hanya orang sini, akhirnya banyak pendatang-pendatang yang rata-rata dari Madura. Akhirnya banyak orang maduranya. Akhirnya tempat-tempat jualan itu dijual pada orang Madura.”
(wawancara, 13 Oktober 2014)

Gambaran kelembagaan komunitas muncul dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat secara sosial. Mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara ekonomi maupun sosial. Kebutuhan ekonomi terkait dengan kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka membentuk sebuah komunitas dalam sebuah wadah paguyuban pedagang.

Ketika jumlah para pedagang di pasar Tanjung sudah semakin banyak dan keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum, membahayakan lingkungan, maka

muncullah komunitas yang kedua yang disebut sebagai kelembagaan pemerintah sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol dalam kegiatan pembangunan disegala bidang, maka pemerintah di satu sisi harus bersikap memberikan tindakan kepada siapa saja termasuk kepada para pedagang sektor informal di Pasar Tanjung jika keberadaan mereka sudah mengganggu kepentingan masyarakat secara luas. Disisi lain kelembagaan ini juga harus berperan untuk melindungi hak-hak para pedagang agar kelangsungan hidup mereka sebagai bagian kelembagaan komunitas tetap terpenuhi. Pola kelembagaan pemerintah ini tertuang dalam sikap pemerintah dengan mengeluarkan aturan atau kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember no. 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima kabupaten Jember. Dalam diktum pertimbangan point (a). Perda terkait pedagang kaki lima dinyatakan bahwa:

“bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat erlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal” (Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008)

Hal inilah yang dilakukan oleh kelembagaan pemerintah dengan bentuk norma utama adalah memodifikasi perilaku. Sikap kelembagaan ini dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya yang berkembang di Jember. Bentuk sikap kontrol yang diperankan oleh kelembagaan pemerintah ini dengan memberikan tindakan pengawasan, penertiban sampai penggusuran seperti yang tercantum dalam pertimbangan perda tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

“bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial” (Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008)

Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja ketika pada tanggal 8 September 2014 melakukan penertiban (penggusuran) para pedagang yang berada di Jl. Untung Suropati dan di Jl. Wahidin. Kelembagaan komunitas yang telah terbentuk sebelumnya merespon hal-hal

berupa tindakan penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk kelompok sosial dengan kekuatan modal sosial dalam sebuah paguyuban pedagang. Menurut informasi yang didapat peneliti bahwa kelompok pedagang yang di dalam pasar Tanjung memiliki paguyuban yang bernama Gerakan Pemuda Pedagang Pasar Tanjung (Gerpas) sementara itu kelompok pedagang yang berada di Jl. Wahidin (Timur Pasar) dibackup oleh LSM Gempar. Dikotomi kebijakan penertiban dan penataan muncul ketika implikasi kebijakan yang telah dilakukan ternyata tidak menyelesaikan masalah. Inilah bentuk perubahan dominasi kelembagaan yang melibatkan komunitas pedagang dan pemerintah. Kebijakan dapat menguntungkan satu pihak tetapi ada pihak yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari peran pemerintah daerah. Banyak aturan main dan norma yang dilanggar oleh sebagian pihak yang itu luput dari perhatian pemerintah.

Hadirnya kelembagaan yang ketiga, berupa sistem pasar yang kemudian mendominasi aktivitas dagang serta hadirnya lembaga penyedia modal menambah pola kelembagaan terkait sektor informal menjadi semakin kompleks. Dengan bentuk norma individualias dan sifat sistem kerja sosialnya yang kompetitif, para pedagang sektor informal dipasar Tanjung menjadi harus dituntut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ketergantungan kepada pemasok barang dagang muncu, ketergantungan kepada pinjaman juga mewarnai aktivitas dagangnya. Kelembagaan pasar sebagai bagian dari kelembagaan ekonomi secara umum mendominasi kegiatan perekonomian di pasar Tanjung inilah tahapan pola perubahan kelembagaan yang terjadi. Ketika kapitalisme masuk ke dalam sistem perdagangan yang melibatkan para pedagang, maka semuanya akan dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebanyak-banyaknya meskipun dengan cara melanggar aturan main. Akses modal dari perbankan menjadi kebutuhan sebagian pedagang di pasar Tanjung. Hal ini diungkapkan oleh ibu St, pemilik warung kopi, berikut:

“...yang nawari modal banyak, tapi saya sudah pinjam di BRI banyak anak-anak bank ya kenal dari teman terus pinjam...yang punya inisiatif pinjam ya aku, karena aku yag berperan disini, bapak ya ngurusi usaha yang di rumah..karena kalau pinjam tetangga ya ngak

mungkin dikasih, tidak mungkin dikasih kalau tetangga..aku yang barusan 50 juta yang barusan jangka waktu 3 tahun, bunganya sedikit..BRI itu sedikit bunganya..tapi aku insyaAllah bisa bayar...dulunya aku di Danamon, pokoknya bunganya sedikit, sedikit kalau di BRI. Jaminannya ya sertifikat tanah yang 50 juta ..kalau dulu tidak ada dari BRI kalau dulu kepercayaan, syaratnya nggak apa-apa gampang cuma KTP suami istri, RT RW lengkap sudah.” (wawancara 11 Nopember 2014)

Ungkapan ibu St senada dengan yang disampaikan oleh ibu Tt, kebutuhan modal menjadi syarat kelangsungan usahanya, bahkan akses ke lembaga keuangan digunakan untuk memodali putranya yang diajak untuk berdagang di Pasar Tanjung. Ibu Tt mengungkapkan:

“...ada pinjaman dari BRI, ibu mengajukan, yang disurvei usahanya, sampai 20 juta selama 3 tahun, syaratnya ndak rumit, pake jaminan SIM, jadi SIM dipegang bank, kalau pake SIM dapatnya 20 juta, saya ngambil anak saya, biar punya tanggungjawab sendiri, ibu dulu ngasih modal tapi jualan sendiri anaknya ibu dia sudah bisa beli rumah.”(wawancara, 27 Nopember 2014)

Pengakuan yang lain datang dari ibu Km, sebagai pedagang sektor informal kebutuhan modal yang relatif sedikit dipenuhi dari pinjaman dari bank. Berikut penuturannya:

“...kalau pinjaman ada, banyak, kalau misalnya mau pinjam KUR jaminannya cuma ini saja jadi kalau KUR ada jaminan yang disurvei tempat usaha jadi bunganya kecil, ya pake syarat jaminan BPKB, sertifikat, sama saja. Saya ambil di mandiri, sudah empat kali...kalau dulu gak ada jaminan cuma pake surat jaminan, akhirnya banyak yang gak bayar, orang-orang meremehkan akhirnya, ya pake jaminan, kalau masih baru paling 2 juta, 4 juta kalau pake jaminan ya besar bisa sampai 20 juta atau 25 juta. (wawancara, 26 Nopember 2014)

Sebagai pedagang perabot rumah tangga, ibu Rd juga mengalami hal sama, kebutuhan modal telah dipenuhi dengan mengajukan pinjaman ke BRI, sejak 15 tahun yang lalu sudah membuka usaha di pasar Tanjung untuk meneruskan usaha orang tuannya. Bapaknya seorang pegawai sementara ibunya seorang pedagang jadi jiwa dagang itu menurun ke ibu Rd. Berikut yang diutarakan bu Rd:

“...kalau saya memang sudah punya pinjaman, kemarin kan BI kan sempet turun karena kondisi perbankan kan lagi turun, saya pake jaminan rumah, ya sebagian untuk mengembangkan usaha sebagian untuk di rumah, prosesnya nggak sulit lah karena mulai berdiri saya sudah nggak bisa lepas dari bank.” (wawancara, 24 Nopember 2014).

Seperti penjelasan tersebut, rata-rata pedagang memang mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan. Kereka kebanyakan mengakses modal pinjaman untuk mengembangkan usahannya dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Ketika ditanya mengapa mengajukan ke BRI, bu Rd mengatakan bahwa ia memilih bank yang menawarkan bunga pinjaman yang rendah, meskipun banyak tawaran pinjaman dari bank lain. Pengajuan pinjaman harus disertai dengan jaminan yang dapat mengcover jumlah pinjaman. Pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga tersebut ada dua macam, yang pertama berupa Kredit Usaha rakyat (KUR) dan yang kedua adalah pinjaman umum. Untuk pinjaman KUR, pemohon harus melampirkan SIM dengan disertai jaminan.

Informasi lain terkait perilaku dan sifat pedagang sektor informal di pasar Tanjung berasal dari pegawai bank yang berada di pasar Tanjung, perilaku para nasabah atau debitur tidak hanya mencerminkan individu hubungannya dengan lembaga keuangan akan tetapi juga antara individu dengan kelompoknya. Jumlah pedagang yang sangat banyak menjadi peluang tersendiri bagi bank untuk menawarkan paket pinjaman kepada para pedagang. Seperti yang dilakukan oleh BRI melalui kantor layanan berupa teras BRI. Konsep pelayanan yang diberikan kepada nasabah adalah dengan mengambil buku tabungan nasabah yang ingin menabung pada pagi hari kemudian mengembalikan lagi pada sore hari. Kebijakan ini dilakukan agar nasabah tidak perlu antri di kantor bank. Seperti yang disampaikan Dn pegawai BRI pasar Tanjung berikut:

“...kalau untuk pedagang KUR pinjaman 1 juta sampai 20 juta, yang dilihat usahanya, kalau di BRI mau ngajukan minimal usahanya berjalan enam bulan, kalau di bank Danamon, nggak ada usahanya memodalin usahanya, tapi bunganya besar, malah ada yang nawarin tanpa jaminan, ini ngantarkan tabungan, tadi pagi sudah nabung duduh

dicetak terus diprint out, dikembalikan, sebenarnya ndak dikembalikan ndak apa-apa, tapi kan nggak enak, jadi biar tahu pemasukannya.” (wawancara, 27 Nopember 2014)

Lika-liku pedagang sektor informal terkait akses lembaga keuangan juga dibebankan oleh Sn, pegawai Bank Mandiri yang membuka kantor di Pasar Tanjung, berikut:

“...ada pinjaman pegawai ada pinjaman pedagang, untuk pinjaman pedagang syaratnya KTP, KK, surat nikah foto copy jaminan...ya itu waktu pengajuan, nanti waktu pencairan bawa yang asli, kadang banyak debitur ada yang nggak mau orang lain tahu di pasar, meskipun bersebelahan, ketika survey mereka bilang jangan sampai yang sebelahnyanya tahu gitu...kalau nasabah ngajukan biasanya kebanyakan telpon, cuma kadang ke kantor yang di pasar untuk konsultasi, kadang ya bayar angsuran, kadang angsurannya ada yang minta diambil ke rumah. Yang disurvei itu usahanya, tempat tinggal atau domisilinya, skala usahanya, stok barangnya kan stok barang dilihat juga mas, misalnya pinjaman 50 juta kalau stok barangnya nggak sampai segitu kan kita juga nggak berani..ya lihat di toko aja mas, kan ya *feeling* aja..juga dari transaksinya tiap hari, jadi pengeluaran barang keluar masuk tiap hari juga di lihat..ya kita lihat platform yang sekiranya jaminannya mengcover...ya intinya kita lihat pengajuan dan jaminannya.” (wawancara, 7 Nopember 2014)

Konstruksi kelembagaan perempuan pedagang sektor informal di pasar Tanjung terkait akses lembaga keuangan mikro dan juga aspek penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember. Keberadaan sektor informal informal mengalami evolusi atau perubahan dalam hal pola komunikasi dan kegiatan dagang yang dilakukan. Pada awalnya mereka sebagai komunitas yang membentuk dan menjalankan aturan-aturan sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kehadiran pemerintah memberikan konsekuensi bagi mereka untuk mentaati aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember. Interaksi para pedagang sebagai manifestasi keberadaan kelembagaan komunitas dengan pemerintah sebagai komunitas politik akhirnya harus tunduk pada permainan pasar agar terwujud sistem kelembagaan yang memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dan telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian peneliti menghadapi keterbatasan yang dapat memengaruhi kondisi penelitian yang dilakukan, adapun keterbatasan tersebut antara lain yaitu:

1. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini relatif pendek padahal informasi yang harus digali dari informan sangat banyak guna memberikan pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang keberadaan ibu rumah tangga pedagang sektor informal di pasar Tanjung.
2. Fokus penelitian hanya cenderung pada perubahan kelembagaan ibu rumah tangga pedagang sektor informal berdasarkan akses pinjaman ke lembaga keuangan mikro, masih terdapat cakupan materi penelitian yang berhubungan dengan pedagang sektor informal yang belum diteliti seperti: perilaku konsumsi, resistensi, strategi bertahan hidup, dan modal sosial dan lain-lain. Oleh karena itu untuk mengotimalkan hasil penelitian, cakupan penelitian tersebut juga dapat diteliti.
3. Subyek utama penelitian yang dieksplorasi jumlahnya terbatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah yang besar.
4. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Tipologi dan karakteristik pedagang yang berbeda antara pedagang di Pasar Tanjung dengan di tempat lain mungkin menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Untuk itu penelitian dengan kerangka yang sama perlu dicoba di tempat lain.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi pola perubahan kelembagaan dan ekonomi rumah tangga perempuan di pasar Tanjung yang kontinyus dan permanen. Hal ini dapat ditenggarai sebagaimana berikut: *pertama*, keberadaan pedagang di Pasar Tanjung umumnya karena warisan-turun temurun usaha dagang. Keberadaan para ibu rumah tangga pedagang sektor informal ini karena melanjutkan usaha dagang keluarga. Hal ini tidak terlepas dari peran orang tuanya dalam menamkan jiwa wirausaha atau *entrepreneur* sejak usia dini. Tradisi mewariskan usaha dagangnya kepada anak-anaknya atau keluarganya telah berjalan dalam waktu relatif lama. Para ibu rumah tangga pedagang sektor informal yang berada di Pasar Tanjung adalah pedagang yang menekuni usaha dagang sejak bertahun-tahun dan usaha tersebut berasal dari keluarga mereka sebelumnya. Rata-rata mereka telah menekuni usaha dagang tersebut lebih dari 5 tahun bahkan terdapat ibu rumah tangga pedagang yang menekuni usahanya sejak Pasar Tanjung berdiri. *Kedua*, keberadaannya memiliki kontribusi positif bagi *survival strategy* untuk peningkatan pendapatan rumah tangga. Pedagang sektor informal merupakan bagian dari entitas ekonomi sektor informal tidak bisa dipandang remeh, karena keberadaannya memiliki kontribusi positif bagi kelangsungan hidup (*survival strategy*) mereka. Kontribusi ekonomi sektor Informal khususnya perempuan pedagang sektor informal di Pasar Tanjung cukup signifikan dalam menopang pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pedagang baik untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak mereka dan juga untuk menabung. Kontribusi ekonomi pedagang sektor informal tidak hanya secara mikro bagi kebutuhan keluarga, akan tetapi keberadaan para pedagang sektor informal juga menyumbang pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pedagang sektor informal. Meskipun kontribusi yang diberikan kalah

signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) bila dibandingkan besarnya kontribusi sektor ekonomi formal, namun keberadaan sektor ekonomi informal, utamanya pedagang sektor informal menjadi tempat menampung pengangguran dari para urban non terampil (*unskill*) dan kurang berpendidikan (*unliterated*). Eksistensi perempuan pedagang sektor informal di pasar Tanjung juga tidak membebani anggaran pemerintah kota, sebab dengan jiwa kewirausahaan dan sikap pantang menyerahnya, mereka dapat berusaha secara mandiri sehingga tidak tergantung pada belas kasihan dari pihak lain, sehingga mampu menopang kehidupannya. *Ketiga*, penataan belum menyelesaikan masalah. Terkait kebijakan pemerintah Daerah dalam hal penataan dan penertiban (ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008), telah dilakukan penertiban dan penataan para pedagang khususnya yang berada di Jl. Wahidin Soedirohoesodo dan di Jl. Untung Soeropati pada tanggal 8 September 2014. Konsep penataan atau penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum dirasakan dampak positifnya bagi para pedagang yang berada di lantai atas pasar. Kebijakan ini berimplikasi terhadap kelangsungan usaha para pedagang. Implikasi kebijakan penertiban ini dalam konteks kelembagaan setidaknya dapat dikemukakan menurut kajian ekonomi dan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi penataan pedagang akan mengakibatkan perubahan pendapatan pedagang. Sementara secara sosial penataan tersebut akan merubah pola kelembagaan dalam bentuk ikatan emosional yang terakumulasi dalam wadah paguyuban pedagang. Pasar tradisional menunjukkan dinamika kelembagaan tersendiri sebagaimana yang terlihat di pasar Tanjung. *Keempat*, tersedia lembaga keuangan dalam kelangsungan usaha sektor informal. Hadirnya lembaga penyedia modal menambah pola kelembagaan terkait sektor informal menjadi semakin kompleks. Banyak aturan main yang harus disepakati para pedagang dengan lembaga keuangan. Bentuk pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan yang ada di Pasar Tanjung ada dua macam yaitu pinjaman kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman komersial atau umum. Untuk pinjaman dalam bentuk kredit

usaha rakyat para pedagang menyertakan Surat Ijin Menempati sebagai bukti kepemilikan atau kah penggunaan kios atau los. Dengan bentuk norma individualitas dan sifat sistem kerja sosialnya yang kompetitif, para pedagang sektor informal dipasar Tanjung menjadi harus dituntut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ketergantungan kepada pemasok barang dagang muncul, ketergantungan kepada pinjaman juga mewarnai aktivitas dagangnya. Didamping tersedia akses permodalan yang berasal dari lembaga keuangan mikro perbankan, sebagian pedagang juga mengakses permodalan yang berasal dari sesama pedagang di pasar Tanjung dengan aturan main yang disepakati oleh pemodal dengan ibu rumah tangga pedagang baik masalah angsuran, jangka waktu maupun bunganya. *Kelima*, para ibu rumah tangga pedagang memiliki hubungan dengan lembaga keuangan mikro. Pola kelembagaan sektor informal di Pasar Tanjung terbentuk atas kelembagaan komunitas, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan pasar. Kelembagaan komunitas memainkan peran para pedagang sebagai komunitas sosial. Kelembagaan pemerintah memainkan peran kepala daerah sebagai komunitas politik. Sementara itu kelembagaan pasar merupakan representasi dari kekuatan ekonomi. Konfigurasi kekuatan antara ketiganya merupakan dasar pembentuk suatu pola kelembagaan yang dijalankan para pedagang sektor informal khususnya ibu-ibu yang ada di pasar Tanjung. Hubungan yang terjalin antara ibu rumah tangga pedagang sektor informal dengan lembaga keuangan mikro di Pasar Tanjung terjalin atas dasar aturan main yang telah disepakati kedua belah pihak. Hubungan baik ini ditunjukkan oleh pihak lembaga keuangan dengan memberikan pelayanan yang semakin baik pada para nasabah. Sementara para pedagang berusaha untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan main.

2. Pola perubahan kelembagaan ibu rumah tangga pekerja sektor informal di Pasar Tanjung bergerak secara kontinyu dan permanen. Perubahan kontinyu ditunjukkan dengan dinamika perubahan aktivitas dagang yang mereka lakukan, dimana aktivitas dagang yang mereka lakukan tetap berjalan sampai sekarang

sebagai bentuk kontribusi pendapatan yang utama bagi keluarga. Mereka juga tetap menempati lokasi usaha yang tetap dengan barang dagang dan akses permodalan yang tidak berubah. Dampak perubahan kelembagaan terhadap ekonomi rumah tangga terkait akses lembaga keuangan mikro oleh ibu rumah tangga pedagang memiliki kecenderungan bersifat laten dan dinamis. Hal ini terlihat bahwa para pedagang sektor informal lebih cenderung mengakses lembaga keuangan mikro. Akses yang dilakukan oleh kebanyakan ibu rumah tangga pedagang di pasar Tanjung menjadi bukti bahwa mereka memiliki hubungan baik terkait kebutuhan modal. Bersifat laten karena akses mereka kepada lembaga keuangan mikro dilakukan hanya terbatas oleh pihak-pihak tertentu akan tetapi aktivitas yang dilakukan oleh para pedagang ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk berkembang. Disamping itu, pola kelembagaan ibu rumah tangga pekerja sektor informal terkait akses lembaga keuangan mikro ini bersifat dinamis artinya terdapat perubahan-perubahan aturan, nilai dan norma yang disepakati oleh pedagang dengan pihak LKM sesuai dengan perkembangan kondisi baik ekonomi maupun sosial.

5.2 Saran

Pola kelembagaan dan dinamika ekonomi rumah tangga perempuan pekerja sektor informal khususnya pedagang di Pasar Tanjung memberikan kesimpulan seperti yang diuraikan pada sub bab 5.1.

1. Perlu adanya perbaikan pola kelembagaan sektor informal khususnya di Pasar Tanjung. Perbaikan tersebut harus melibatkan kelembagaan komunitas, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan pasar. Kelembagaan komunitas memainkan peran para pedagang sebagai komunitas sosial. Kelembagaan pemerintah memainkan peran kepala daerah sebagai komunitas politik. Sementara itu kelembagaan pasar merupakan representasi dari kekuatan ekonomi. Konfigurasi kekuatan antara ketiganya merupakan dasar pembentuk

suatu pola kelembagaan yang dijalankan para pedagang sektor informal khususnya ibu-ibu yang ada di pasar Tanjung.

2. Pihak lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan bantuan modal kepada para pedagang demi kelancara kegiatan usaha para pedagang. Pelayanan dengan cara langsung datang kepada nasabah (debitur) dalam hal menarik simpanan juga perlu ditingkatkan. Para pedagang juga diharapkan dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan dengan cara membayar angsuran tepat waktu sesuai perjanjian kredit. Sementara itu bagi pedagang yang menjadi objek penataan atau penertiban hendaknya mematuhi aturan atau norma-norma dalam kelembagaan pasar ekonomi pasar.
3. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pola kelembagaan para perempuan pedagang sektor informal di Pasar Tanjung tidak hanya melibatkan para pedagang, akan tetapi juga dipengaruhi oleh instrumen kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan dan penataan pedagang sektor informal. Untuk itu, pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2008 perlu ditinjau lagi, terutama pasal-pasal dan ayat-ayatnya bersifat *government oriented*, dalam arti kepentingan pemerintah lebih diutamakan daripada kepentingan dan kebutuhan pedagang. Perlu adanya keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban pedagang. Terutama yang bersifat memberdayakan.
4. Dengan telah dilakukannya penelitian perubahan kelembagaan perempuan pekerja sektor informal di pasar Tanjung terkait akses lembaga keuangan mikro dan aspek penataan (penertiban), dapat dijadikan perbandingan dan referensi bagi para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sebaiknya peneliti melakukan penelitian mengenai tahapan perkembangan usaha dagang para PKL di pasar Tanjung. Selain itu dapat pula dilakukan penelitian mengenai resistensi dan dampak pengrusakan terhadap pola kelembagaan para pedagang sektor informal atau PKL. Perlu juga diteliti mengenai konsep

penataan pasar Tanjung dalam bentuk pasar modern sehingga pasar Tanjung menjadi pasar yang tertata dengan baik.

5. Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan : a. pembinaan manajemen usaha; b. penguatan modal usaha; c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL; d. peningkatan kualitas alat peraga PKL; e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008.
6. Bagi para pedagang sektor informal yang berada di Pasar Tanjung agar dapat menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan mikro yang ada di Pasar Tanjung. Selain itu juga senantiasa memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dan disepakati pedagang demi kelangsungan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Pidekso. 2003. Profil Upaya Perempuan dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomis-Produktif Sektor Informal pada Konteks Nilai Pemberdayaan Diri. *Jurnal Pendidikan Nilai. Kajian Teori, Praktik, dan Pengajarannya*. Tahun 9, Nomor 1, November 2003, Universitas Negeri Malang (UM) dalam <http://www.malang.ac.id/jurnal/lain/nilai/2003a.htm>.fo[26-03-2014]
- Adhelia, 2011. *Pengaruh Jam kerja, Tingkat Pendidikan, Usia, Jumlah Tanggungan Usia Balita, serta besarnya Modal Kerja terhadap pendapatan tenaga kerja wanita disektor informal di Kota Makassar*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Alisjahbana. 2005. *Marjinalisasi Informal Perkotaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- _____. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Amin, ATM Nurul. 2005. "The Informal Sectors Role in Urban Environmental Management". in *International Review for Environmental Strategies Vol. 5, No. 2, pp. 511-530*.
- Anderson, L., Locker, L., Nugent, R. Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources Original Research Article *World Development*, Volume 30, Issue 1, January 2002, Pages 95-105C.
- Arjani, Luh. 2002. *Gender dan Permasalahannya*. Pusat Studi Perempuan Universitas Udayana.
- _____. 2003. Ketimpangan Gender di Beberapa Bidang Pembangunan di Bali. *Jurnal Studi Jender Vol. III No. 2*Tahun 2003
- Arsyad, Lincolyn. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Artini, Ni Wayan Putu dan Handayani. 2009. *Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga*. Piramida, 5. 1:9-15
- Babbitt, L.G., Brown D., Mazaheri, N. Gender, Entrepreneurship, and the Formal–Informal Dilemma: Evidence from Indonesia. *World Development*, Volume 72, August 2015, Pages 163-174.

- Bardhan, Pranab. 1989. Alternative Approaches to the Theory of Institutions in Economic Development. Dalam Pranab Bardhan. (ed.). *The Economic Theory of Agrarian Institutions*. Clarendon Press. Oxford
- Baskara, I Gde. 2013. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 18, No. 2, Agustus 182
- Bromley, R. (1979). *Introduction-The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing? The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. Oxford, Pergamon Press
- Budiman, Arief, 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dadang. 2011. *Asymetric Information dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Situbondo*. Universitas Jember.
- De Soto, Hernando. 1989. *The Other Path: Invisible Revolution in the Third World*. Basic Book, A Member Of The Perseus Books Group. New York.
- _____, Hernando. 2006. *The Mystery of Capital Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*. terjemahan Pandu Aditya K. Yogyakarta: Qalam.
- Dewi, Martini Putu. 2012. Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan pendapatan Keluarga. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 5 No. 2 Tahun 2012.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy Tenth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Effendi. 1997. *Sektor Informal dan Wawasan Pengembangan Masyarakat. Makalah Diskusi Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPR Hasil Pemilu 1997*. Jakarta.
- Elvina, Mira. 2013. *Perempuan Perlu Kemandirian Ekonomi Guna Hindari Kekerasan*. <http://antarariau.com/berita/29913/perempuan-perlu-kemandirian-ekonomi-guna-hindari-kekerasan>. [26_03_2014]
- Faisal. 2004. *Perempuan di Sektor Informal terhadap Ekonomi Rumah Tangga (Kasus Perempuan Pedagang Kaki Lima di Universitas Hasanuddin)*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. 2004.

- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif*, YA3, Malang.
- Faizah, Ilmiyaul. 2012. *Jual Beli Kios (Milik Umum) Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya
- Field, John. 2008. *Social Capital Second Edition*. New York : Routledge.
- Firdausy, C. M. 1995. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima. Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta, Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.: 139-156.
- _____. 1995. *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta: DRN dan Bappenas.
- Firdaus dan Titik Hartini. 2001. Aspek Pemberdayaan Perempuan Dibalik Lembaga Kredit Mikro. *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*. Volume 6. No. 3
- Fitlayeni, Rinel. 2010. *Strategi bertahan hidup perempuan di sektor informal Pasca gempa 2009 (Studi Kasus Perempuan Penjual Sayur di Pasar Raya Padang)*. Padang.
- Greer, Alan and Paul Hoggett. 1999. "Public Policies, Private Strategies and Local Public Spending Bodies". in *Public Administration* Vol. 77 No. 2 1999 pp. 235-256.
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima: Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi Pkl Di Semarang*. Tisara Grafika. Salatiga
- Hani, Rachmania, Setyaningsih, Putri. Patterns of Indonesian Women Entrepreneurship *Procedia Economics and Finance*, Volume 4, 2012, Pages 274-285
- Hariyanto, Sugeng. 2008. Peran Aktif Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah tangga Miskin: Studi Kasus Pada Perempuan Pemecah Batu Dipucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 2, Desember 2008, hal. 216 - 227
- Hart, Keith dkk. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Di Kota*. Jakarta: Gramedia.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta : MR-United Press.

- Hasibuan, Nurimansjah. 2003. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Hidayat. 1986. *Peran Sektor Informal dalam Perekonomian Kota*. LPM Unpad, Bandung.
- Hidayat, Aceng, 2007. *Pengantar Ekonomi Kelembagaan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.
- Hulme, David & Arun, Thankom (2009). *Microfinance A Reader*. New York, Routledge.
- Ibrahim, Bedriati dan Murni Baheram. 2009. "Strategi Bertahan Hidup Keluarga Pemulung di Desa Salo Kabupaten Kampar". dalam *Jurnal Ichsan Gorontalo, Volume 4, No. 2, Edisi Mei-Juni 2009, hal. 2439-2448*.
- Ihromi. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Ikaputra, Rochmad. 2004. Tipologi Kakilima: Kajian Sistem Desain Kakilima dalam Konteks Sektor Informal. *NALARs Volume 3 Nomor 2 Juli 2004: 1-18*. UGM. Jogjakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat* . Jakarta . Bappenas
- Kasryno, Faisal. 1984. Kerangka Analisa Ekonomi Pembangunan Pedesaan. Dalam Faisal Kasryno. (ed). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Kayuni, Happy M. and Richard I.C. Tambulasi. 2009. "Political Transitions and Vulnerability of Street Vending in Malawi". in *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management Number 3 (12) /August 2009. Pp.79-96*.
- Ken Suratiyah et al. 1996. *Dilema Perempuan, antara Industri Rumah Tangga dan Aktivitas Domestik*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kherallah, Mylene dan Johann Kirsten. 2002. *The New Institutional Economics: Application for Agricultural Policy Research in Developing Countries*. MSSD Discussion Paper. No. 41, June. IFPRI. Washington DC
- Kompip, Solo. and Lab. UCYD. FISIP UNS Solo. 2004. *Kajian Implikasi Otonomi Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal di Kota Surakarta*. Solo, Kompip Solo dan the Ford Foundation

- Kurniawati. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Perempuan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin Di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar*. FE Udayana.
- Landreth, Harry and David C. Colander. 1994. *History of Economic Thought. USA*: Hughton Miffin Company.
- Lawang, Robert M.Z. 2005. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta : FISIP UI PRESS.
- Ledgerwood, Joanna. 1999. *Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC.: The World Bank.
- _____, (1999). *Economic Thought. USA: Hughton Miffin Company.. Sustainable Banking With The Poor; Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspecive*. Washington DC. The World Bank.
- Manig, Winfried. 1991. Rural Social and Economic Structures and Social Development. Dalam Winfried Manig. (ed.). *Stability and Change in Rural Institutions in North Pakistan. Socio-Economic Studies on Rural Development. Vol. 85. Alano. Aachen*
- Manning, Chris, Effendi & Tadjuddin Noer. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mandayati, Sri, 2012. *Lansia Di Sektor Informal (Studi Aktivitas Ekonomi Perempuan di Pasar Terong Kec. Bontoala Kota Makassar)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mazumdar, D. (1991). *Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris Terhadap Data dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Morrell, Elizabeth, dkk. 2008. *Tata Kelola Ekonomi Informal Policy Brief 11. Australia* : Crawford School of Economics and Government the Australian National University.
- Mosse, J. C 2007 *Gender dan Pembangunan*. Diterbitkan atas kerja sama Rifka Amnisa Women's Crisi Center dengan Pustaa Pelajar Yogyakarta.
- Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Manning, Effendi dan Noer. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Moleong, Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas*. Malang : in-TRANS Publishing dan INSPIRE Indonesia.
- Muzakir, 2010. *Kajian Persepsi Harapan Sektor Informal Terhadap Kebijakan Pemberdayaan Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna*. Media Litbang Sulteng.
- Nasdian, Tonny Fredian. 2003 dan Lala M Kolopaking. *Sosiologi Untuk Pengembangan Masyarakat*. Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, Program Pascasarjana IPB, Bogor.
- Nawawi, Hadari dan Martina, 1994, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nawawi, H. Hadari. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- North, Douglass C. 1990. Institutions and Transaction-cost Theory of Exchange. Dalam James E. Alt and Kenneth A. Shepsle. *Perspectives on Positive Political Economy*. Cambridge University Press. Cambridge
- Novita, Dian, *Outline Sekolah Feminis Perempuan Mahardika 2010*
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Oktavianti, Ika. 2012. Peranan Perempuan Penjual Jamu Gendong Dalam Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga. *Journal of Economic Education* 1 (2) (2012)
- Okten, C & Osili, U. O. Social Networks and Credit Access in Indonesia Original Research Article *World Development*, Volume 32, Issue 7, July 2004, Pages 1225-1246.
- Pakpahan, Agus. 1989. *Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi*. Prosiding Patanas: Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

- Pejovich, Svetozar. 1995. *Economic Analysis of Institutions and Systems*. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. The Netherlands.
- Prasad, Biman C. (2003). Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environment. *International Journal of Social Economics*. Vol. 30, No. 6: 741-762
- Primahendra. 2001. *Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan dan Perkuatan LKM*. Jakarta 17 Juli 2001.
- Priyono, Edy. 2002. Mengapa Angka Pengangguran Rendah di Masa Krisis ? : Menguak Peranan Sektor Informal Sebagai Buffer Perekonomian, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol.1 No.2 Juli 2002.
- Pudjiyanto, dan Mukhlis. 2006. Studi Kasus Wanita-wanita Penambang Pasir di desa Lumbung Rejo, Kecamatan Tempel-Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial*. 11.1:15-24
- Pudjiawati, Sajogyo. *Peran Wanita dalam Perkembangan masyarakat Desa*. Jakarta. Rajawali. 1985
- Rachbini, Didik J, 2010. *Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara*. Jakarta: <http://www.unisosdem.org.downlod>.(23 Nopember 2014)
- Rachbini, D. J. and A. Hamid. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta, LP3ES
- _____. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta, LP3ES.
- Rutherford, Malcolm. 1994. *Institutions in Economic: The Old and the New Institutionalism*. Cambridge University Press. Cambridge
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1994. *Ekonomi Edisi Keduabelas*. Terjemahan A. Jaka Wasana M. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Santosa, Purbayu B. 2010. *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2010. "Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi". Pidato

Pengukuhan Guru Besar disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 11 Maret 2011.

Saparinah Sadli. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Saptana, Pranadji, Syahyuti, dan Roosgandha. 2003. *Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan Di Pedesaan: Studi Kasus di Propinsi Bali dan Bengkulu*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, DEPTAN, Bogor.

Sari Novita, Fardianah Mukhyar. 2011. Kajian Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Agribisnis*. Volume 01. Nomor. 04. Desember.2012.

Sari. 2010. *Analisis Pengaruh Umur, Status Perkawinan dan pendidikan Terhadap Pendapatan Pekerja Perempuan Sektor Informal di Desa Tegal Jadi kecamatan Marga Kabupaten Tabanan*. Udayana.

Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.

Sethuraman, S.V. 1985. *Sektor Informal di Negara Berkembang*. Jakarta: PT.Gramedia.

Sihotang, Maria. 2011. *Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga Dan Motivasi Bekerja (Studi Kasus : Pegawai Administrasi Universitas HKBP Nommensen*. Medan.

Simanjuntak P. J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, LPFE, UI Jakarta
_____. P. J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.

Soewartoyo, 2010. *Pekerja Sektor Informal : Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan*. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Sookram, Sandra and Patrick Ken Watson. 2008. "Small-Business Participation in the Informal Sector of an Emerging Economy". in *Journal of Development Studies Vol. 44 No. 10* November 2008. pp. 1531-1553.

- Subarsono. 1996. *Toward Managing the In-formal Sector for Urban Economic Development: Government Policy and the Informal Sector*. Thesis, the Flinder University of South Australia, Adelaide.
- Subejo. 2004. Peranan Social Capital Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar untuk Studi Social Capital di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi Vol. No 1* Juni 2004 (Hal 77-86)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukarno dan Damayanti. 2012. Bank Gakin: Telaah Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Di Jember. *Prosiding Seminar & Konferensi Nasional Manajemen Bisnis*, 26 Mei 2012. Jember.
- Sulaksono, Gery. 2012. *Kemandirian Ekonomi Perempuan*. <http://gagasan.hukum.wordpress.com/2012/03/01/kemandirian-ekonomi-perempuan>. [26-03-2014]
- Surya, Octora. *Kajian karakteristik berlokasi pedagang kaki lima Di kawasan sekitar fasilitas kesehatan (Studi Kasus: Rumah Sakit dr. Kariadi Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro Semarang. tidak dipublikasikan.
- Syaifullah, Yunan. 2013. *Microfinance, Analisis dan Teori*. Bayu Media. Malang.
- Tambunan, T. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Tobing, Erwin. 2002. *Reorientasi Pembinaan Sektor Informal*. Tidak diterbitkan.
- Todaro, Michael, P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid I. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta. (terjemahan).
- Todaro, Michael P. dan Stephen Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tonny Fredian dan Utomo, Bambang S. 2003. *Tajuk Modul : Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial (SEP-51 C)*, Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Vant, Arild. 2006. *Institutions. Departement of Economics and Resource Management Norwegian University of life Sciences*. http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions_Arild_Vant.pdf [23 Maret 2014].
- Wardoyo & Prabowo, Hendro. 2006. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Jabodetabek*. Paper. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

- Wauran, Patrick C. 2012. Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD)* .Volume 7 No.3 Edisi Oktober 2012.
- Widodo, Tri. 2005. *Sektor Informal Yogyakarta*. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP). Yogyakarta.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Edisi Khusus Desember, pp: 735-751.
- Williamson, O.E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*. Vol. 38, pp. 595-613.
- _____.2009. *Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Winarno, Agung. 1996. Profil Usaha Sektor Informal di Jombang. *Trisula Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Agama* No. 1 Pebruari Universitas Darul Ulum Jombang.
- Yeager, Timothy J. 1999. *Institutions, Transition Economies, and Economic Development*. The Political Economy of Global Interdependency. Westview Press. Oxford. USA
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2006. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, & Strategi*. Bayu Media. Malang
- _____. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia Publishing: Jakarta
- Yusuf N. 2006. *Analisis Ekonomi Sektor Informal di kota Tangerang. Strategi Bertahan Hidup dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pendapatan Migran*. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 98 hal.
- Zamroni, 2004. *Kelembagaan dan Kebocoran Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Ekonomi Makro*. [http://www.katalog.pdiilipi.go.id/index.php/searchkatalog/download.DatabyId/6080/6081.pdf](http://www.katalog.pdiilipi.go.id/index.php/searchkatalog/download/DatabyId/6080/6081.pdf). [23 Maret 2014].

Lampiran I: Dokumen Cuplikan Hasil wawancara Dengan Informan

1. Wawancara dengan informan bersinisial Tt berusia 60 tahun penjual palawija (di lantai atas)

Peneliti : biasanya yang narik karcis pedagang jam berapa ya bu?

Informan : nanti biasanya jam dua mas

Peneliti : berapa bu besarnya retribusinya?

Informan : kalau kios bulanan kayak ini, yang pakek tembok-tembok itu yang bulanan, tapi kayaknya banyak yang macet, banyak yang nggak bayar soale di bawah itu ndak bisa bersih, itu orang-orang yang jualan itu, jadi banyak yang macet di sini. Kalau ibu harian jadi mesti rutin, ada yang nggak bayar berapa tahun...? Ada yang dua tahun, ada yang duapuluh tahun. Pokoknya mulai ada pasar bawah itu.

Peneliti : berapa biasanya bayarnya bu?

Informan : kalau yang sedikit daganganya ya Rp 1.000,-

Peneliti : ibu mulai kapan jualan di pasar Tanjung

Informan : ibu mulai bayi sudah dibawa mbah ke pasar, mulai dari mbah mulai jualan di pasar Tanjung sampai ke anak-anaknya, dulu itu (kios depan bu Tt) punya ibu terus tukar tambah sama yang punya ini. Kalau kios sekarang kayaknya naik tapi kayaknya banyak yang ndak bayar, soale bawah itu masih jualan, yang dituntut sama orang atas itu kan yang di bawah itu, kalau bawah itu sudah bersih banyak yang bayar, yang bawah Cuma beber tikar ditarik Rp 1.000,- jualannya laris, ini gak laku bawng putih ibu, nggak nutut sama kulakannya, pendapatannya itu , kalau dulu sebelum pasar bawah orang naik ke atas semua.

Peneliti : mulai kapan bu pasar bawah itu bu?

Informan : pasar bawah itu sudah mulai jamannya pak Samsul, sebelum pak Samsul, sebelumnya pak samsul pak Hadi, kalau jamannya pak Hadi itu rame, jamannya pak Samsul itu di bawah jualan seenaknya, ini kan baru saja dibersihkan.yang di bawah enak itu beber koso, anak ibu aja turun. Saya kasih ini nggak mau, enak di bawah katannya.

Peneliti : pedagang-pedagang di sini apa ada perkumpulannya.?

Informan : ya ada, saya dulu bagian itu dulu, paguyuban sekarang itu diganti di bawah di orang bawah, apa itu namanya paguyuban GERPAS, kapan hari sudah ke pendopo ke lobi pemda, gerpas itu gerakan pemuda pedagang pasar Tanjung, kalau dulu adik saya terus diganti ndak jualan, berangkat haji terus ndak mau lagi, ndak mau kisruh-kisruh.

- Peneliti : katanya pedagang yang bawah itu mau di pindah ke los-los bawah?
- Informan : pedagang di bawah itu bukannya dipindah ke bawah, maunya dipindah ke atas, itu banyak kios-kios yang kosong banyak yang ditinggal penghuninya. Kalau dulu di sini banyak orang jualan sayur-sayur, waluh siyem, orang atas itu rame jadi punya ibu rame. Kapan hari sudah mau di tata lagi, ndak tahu lagi mau di apa gitu, sudah menemui pak Hasi, pak Jalal ya barusan sampek ke sini, sampak atas tapi ya nggak ada keputusan. Perjanjiannya ya jam 19.00 malam baru buka, tapi jam 2 sore sudah buka. Jualan perjanjianannya jam tujuh habis maghrib, jadi di sini sudah tutup.
- Peneliti : berapa pendapatan rata-rata ibu sehari ?
- Informan : dulu rame, jaman dulu Rp 500.000,-,Rp 600.000,- sudah banyak. Sekarang kadang Rp 100.000,- itu kecil, baru kalau ada rezeki, kalau ada orang punya gawe baru rame.
- Peneliti : kalau usaha gini ada pinjaman modal bu?
- Informan : ya pinjaman modal ada dari BRI, ibu mengajukan sampai 20 juta, yang disurvey usahanya
- Peneliti : syaratnya gimana bu?
- Informan : syaratnya nggak ruwet, sampai 20 juta selama 3 tahun, pake jaminan Surat Ijin Menempati (SIM), jadi SIM nya dipegang sama bank. Kalau pake SIM dapat 20 juta
- Peneliti : sampai jam berapa jualan u?
- Informan : buka jam enam pagi sampai sore, bentar lagi nutup bapaknya datang. Cuma ibu ini jualanannya yang sepi, yang rame bapak yang jaga, sudah banyak langganan tetap, mlijo-mlijo bapaknya yang melayani. Nanti jam 2 pagi bapak ke sini melayani mlijo-mlijo.
- Peneliti : berapa putranya bu?
- Informal : putranya ibu tiga, sudah mulai pasar lawas itu ibu sudah berkecimpung di pasar Tanjung, anak-anak ibu di pasar semua.
- (petugas BRI datang menyerahkan buku tabungan nasabah)
- Peneliti : mbak dari BRI, kalau untuk pedagang berapa plaformnya?
- Informan : kalau untuk pedagang namanya kredit usaha rakyat (KUR), pinjamanya 1 sampai 20 juta, yang dilihat usahanya, kalau di BRI mau ngajukan minimal usahannya sudah berjalan 6 bulan, kalau di bank Danamon nggak ada usaha memodalin usahannya, tapi bunganya besar.
- Informan : ada yang nawarin tanpa jaminan, tapi bunganya besar.
(bu Tt)
- Peneliti : ibu sudah berapa kali ngambil di BRI

Informan : saya nggak, hanya ngambilkan anak saya, biar punya tanggung jawab jualan sendiri, ini dulu nagasih modal, tapi jualan sendiri anaknya ibu, alhamdulillah sudah bisa beli rumah. Ibu ini nabung buat cicilan, nati pas akhir bulan diambil gitu yang pas setoran. Dulu ibu ngambil tak kasih anake ibu, jadi anak laki-laki biar cuma kerja. Dari hasil jualan saya bisa ngasih 25 juta. Yang tanda tangan anake ibu tapi ibunya yang bayar.

Peneliti : tiap hari keliling mbak?

Informan : ini ngantarkan tabungan, jadi pagi tadi mengambil bukunya, sekarang kembalikan, misalkan tidak dikembalikan nda apa-apatapi kan nggak enak, biar tahu pemasukannya.

Peneliti : jaminannya apa mbak?

Informan : kalau KUR jaminannya bisa BPKB, bisa sertifikat. Banyak nasabahnya, jadi mereka yang nggak sempat antri di bank dijemput langsung diambil tiap harinya, jadi angsurannya potong tabungan,

Peneliti : syaratnya apa saja mbak?

Informan : syarat lain KTP suami istri, KK, surat Nikah, kalau BPKB foto copy, STNK, kalausertifikat tanah, rumah pake SPPT paak, terus surat desa usahannya harus ditempat tinggal (domisili) surveinya ke rumah dulu baru ke tempat usaha.

2. Wawancara dengan informan berinisial Hmd pedagang bumbu di lantai atas

Peneliti : mulai kapan bu jualan di sini?

Informan : saya mulau jualan tahun 2004

Peneliti : kenapa memilih pasar tanjung?

Informan : apalagi pasar sekarang agak sepi gara-gara pasar bawah, misalkan bawah itu dasar buka mulai habis maghrib, ya di pasar Tanjung ini Alhamdulillah bisa ramai,

Peneliti : kan sudah ada penertiban?

Informan : ada penertiban tapi ndak bisa pasar Tanjung, anu Kepala Pasar Tanjung ndak bisa, tetap mulai jam 3.00 sampai seterusnya jam 6 pagi

Peneliti : alasan jualan bumbu, kok ngak jualan yang lain?

Informan : soalnya jual lain ndak bisa, bapak sudah jualan ayam, apalagi sehari-hari orang jualan kan ndak sama, ada sepi ada ramai gitu.

Peneliti : yang menawarkan lokasi jualan disini?

Informan : kalau dulu ya, kalau sulu ya langsung apa, nyari sendiri-sendiri, dijaga di sini, umpama saya mendapat di sini, ya gak usah pulang wis satu hari satu malam, ya nanti kalau ada saya punya di sini, di urus sama bapak-bapak

- Peneliti : ada biaya sewa tempat, gini ini?
Informan : kalau punya saya sewa, ya, sewa 1 tahun Rp1.000.000,-, per bulan harian karcis kalau karcis ya, 1 hari, 1 hari berapa Rp 2.000, 1 bulan Rp 60.000,- malam umpama belum pulang ditarik lagi sama yang tukang karcis, semua itu ditarik tapi saya gak mau gak mau ditarik saya, kalau saya ndak mau, ini kan jual kue ya, kan ndak pulang sampai jam 09.00 ditarik lagi, kan sudah bayar biasanya kan gak usah.
- Peneliti : berapa pendapatan rata-rata?
Informan : kalau punya saya nggak tahu per harinya berapa yang penting dapat 1 hari kadang itu ya Rp 100.000, bukan penghasilan itu semua, kotornya, Alhamdulillah mencukupi.
- Peneliti : putranya berapa?
Informan : putranya saya enam, sekolah semua, ada yang kuliah, ada yang sudah nikah, yang kuliah 3 sudah selesai yang satu, kalau nggak cukup ya cari utangan buat bayar kuliah, di sini ada kelompok arisan.
- Peneliti : apa kendala pedagang di sini?
Informan : kendalanya ya sepi itu, ya karena pedagang di bawah itu pasar dua, kalau orang belanja kan gak belanja sekarang tapi nanti malam saja, ada orang jualan lagi kalau dulu kan ndak ada, sudah diusulkan tapi ndak tahu hasilnya, ya kadang bocor, masih belum di betulin, ya menggangu kalau hujan, yang bawah ya ditarik lebih mahal tiap harinya karcisnya
- Peneliti : ada pinjm modal
Informan : kalau modal disini, yang penting jujur, meskipun ngambil apa gitu di warung-warung kayak gitu nanti kalau habis dikasihkan uangnya.
- Peneliti : pernah pinjam ke perbankan?
Informan : nggak, nggak pernah, ya pernah pinjam disini, itu harian, itu harian umpama ambil Rp 5.000, bukan Rp 5.000.000,-, setoran Rp 5.000 dapat dapat uang RP 400.000,- namanya apa ya, bukan koperasi bukan apa itu, itu punya orang kayak saya gini bukan punya koperasi, punya temen, itu inisiatif saya sendiri, ya itu Rp 5.000 dapat Rp 400.000,-, saya ambil yang Rp 10.000 dapat Rp 800.000 selama 3 bulan 10 hari.
- Peneliti : kenapa tidak ke bank?
Informan : takut ndak bisa bayar, kalau disini tiap hari kan enak, ndak pake jaminan jadi sama-sama percaya, tahu-sama tahu, soalnya bukan di koperasi.
- Peneliti : kalau telat?
Informan : ya ndak apa-apa, nambah hari, biasanya 100 hari jadi 150 hari
Peneliti : meberatkan

- Informan : ya berat gimana lagi, gimana lagi kalau sudah nggak ada buat beli beli ini, belanja bumbu kalau nggak punya memang terpaksa, apalagi buat anak sekolah, kalau ndak ada ya cari utangan, ngak ada bantuan dari Dinas Pasar...ya cuma 1 temen itu wis harian, jadi cukup ngajukan langsung dikasih, yang nagih ya yang bersangkutan yang punya uang.
- Peneliti : berapa kali pinjam?
- Informan : ya berkali, kali, tapi kan membantu untuk beli bumbu, misal ndak ada pinjaman ya bingung apalagi bayar anak sekolah, biaya sekolah kan mahal.
- Peneliti : harapan ibu dengan keberadaan pasar Tanjung
- Informan : semoga dibetulin semua yang bocor, yang bocor sampai kena bumbu-bumbu kan bisa busuk
- Peneliti : kalau penertinan kemari gamana?
- Informan : oo, penertban itu apa? yang kemarin itu cuma di bawah saja, kalau orang yang jualan di bawah itu tetap saja itu sekarang ditertibkan, nanti sore jualan jadi nggak tegas,
- Peneliti : katanya ada yang jual beli lapak?
- Informan : ada yang dijual Rp 3.000.000, nggak tahu belinya ndek siapa katanya orang itu ndek itu siapa? ri..ri itu Ansori, yang jadi ketua di bawah itu kan Ansori, katanya orang-orang ada yang Rp 2.000.000,-. Itu di luar dari Dinas Pasar, kalau yang ngarcis orang pasar, kalau saya ndak beli, ndak beli jalan, ndak mau kan, ya soalnya itu kan umum disuruh keluar-keluar.
3. Wawancara dengan informan berinisial W1 (60 tahun) penjual makanan ringan di lantai bawah (los pinggir Timur)
- Peneliti : sudah bersih ya bu yang di sini?
- Informan : ya sudah dipindah ke pasar Sabtuan, pasar Tegal Besar sama pasar Sukorejo.
- Peneliti : ibu sudah lama jualan di pasar Tanjung?
- Informan : Saya sudah jualan di sini sudah 18 tahun...mulai menempati sudah lama dulu ini yang nempati mertua, saya mulai kawin ya menempati sini, yang disini nggak di pindah ini kan di pinggir yang di depan ya dibongkar semua.
- Peneliti : berapa bayarnya gini bu?
- Informan : ini bayarnya setahun, tapi tiap hari kan ditagih sehari tiga kali, pagi karcis sampah, karcis biasa, terus nanti sore, kalau setiap tahun kan memperbarui ijin tempat usaha ini, kalau sudah mati di perbaharui, setahun Rp 300.000,-, tapi pas waktu kantor pasar tidak ada ketuanya (maksudnya Kepala Pasar) dua tahun apa tiga tahun Rp 300.000, karena nggak ada kepalanya kalau ada kepala pasar ya tiap tahun ditarik iuran, biasanya ditarik Rp 1.500.000,- tapi

banyak orang-orang nggak mau, tiap kios itu lain-lain iurannya ada yang ditarik satu juta, dua juta, tapi orang-orang tidak mau, ya kalau besar, kan punya saya kecil jadi ya tiga ratus ribu. Bayarnya ke kantor. Kalau nggak bayar ya nggak boleh jualan. Nggak apa-apa bayar yang penting dapat jualan.

- Peneliti : jadi sudah lama ya bu jualan?
 Informan : Dulu ibu yang menempati sini jadi eman-eman kalau tidak ada yang menempati.
- Peneliti : ada pinjaman modal ya bu?
 Informan : Modalnya modal sendiri..saya kan jualannya sedikit jadi cukup modal sendiri, tapi banyak yang nawari, dulu juga ada yang nawari dari Al Ikhwan untuk orang-orang yang jualan khusus bagi jamaahnya jadi nggak ada bunganya ...kalau nggak salah itu punya lambaga masjid..banyak orang yang nawarkan tapi saya ndak mau.
- Peneliti : Kenapa bu?
 Informan : takut waktu bayar ndak ada uangnya.
 Peneliti : berapa pendapatan rata-rata sehari bu?
 Informan : Kalau pendapatan sehari ya nggak ngitung mas wong kadang-kadang dapat ya langsung saya pake kulakan, kadang saya pake belanja, jadi nggak ketemu dapat berapa, ya kalau untuk kebutuhan makan ya Alhamdulillah cukup.
- Peneliti : tidak pernah coba usaha lain bu?
 Informan : Dulu pernah pulang ke desa untuk tani, di sana 7 bulan tapi bapak tidak kerasan, di sini ya kerjanya di sini saja jualan. Mulai buka jam 3 pagi nanti sampai maghrib kadang sampai isya'. Kalau dulu kan nggak nutup-nutup yang di pinggir, terusan, untung ada yang melaporkan terus di bongkar. Itu yang pagar biru, Jendral itu, terus gar-gara itu yang melaporkan ke Surabaya, mobilnya kan nggak bisa lewat, terus kan banyak toko-toko,warung-warung besar, terus kan ada jualan telur disuruh minggir mobilnya mau lewat pas nantang orangnya, langsung dilaporkan ke Surabaya. Tapi alhamdulillah sekarang bersih.
- Peneliti : nggak nutup kalau minggu bu?
 Informan : nggak ada mingguan, pokoknya sepi nggak sepi tetep jualan.
- Peneliti : karcinta brp bu?
 Informan : karcisnya 3 kali pagi Rp 300 siang Rp 2000 malam Rp 1.000 kalau sampai malam sampah yang Rp 300. ada sampahnya, buangnya pk montor.
- Peneliti : ada pengaruhnya setelah dibongkar?
 Informan : Biasa sama saja, soalnya tambah banyak yang jualannya biasanya gak jualan, sekarang berjualan, itu banyak yang dibetulkan warung

nasi. Nanti bagus kalau sudah jualan semua, pake payung semua, orang yang jualan pake payung. Per orang pake payung sebelah timur pake payung semua. Dulu kan pake terpal kanan kiri, sekarang yang sebelah sana jualannya ndak boleh di bawah, harus di atas. Tetep bayar karcis, kalau ndak bayar siapa yang bayar sampah apalagi yang jualan ikan laut. Tapi karcisnya ndak sama, kayak ini sama jual buah-buahan nggak sama, kalau ini kan cuma kecil.

Peneliti : Kasihan pedagang yang atas ya bu?

Informan : Tapi yang bawah siang kan gak ada, cuma sore saja yang di bawah, sudah ada kesepakatan dengan petugas, biasanya kesepakatan mereka bukanya jam 5 sore, tapi jam 3 sore mereka sudah mulai menata barang dagannya, mereka ndak nunggu pedagang yang yang di atas tutup, kalau nunggu yang atas tutup, kadang yang atas sampai jam 09.00 malam, kalau nunggu yang atas tutup nggak makan yang bawah, mereka sekarang jualan ndak boleh di jalan, tapi di atas.

Peneliti : sebelumnya pernah diajak rundingan bu?

Informan : yang bawah itu pernah diajak rapat, mungkin rapatnya di kantor pasar. Kalau saya kan di atas, yang di bawah-bawah itu. Sebelum di bongkar kan lapak-lapak kan di pindah, rapat yang akan dipindah sebab pasare sepi terus pasarnya sebentar jam 9 sudah sepi yang baju-baju nggak bisa. Ke Sabtuan, Gebang Bungur, Tegal Besar pindahnya. Toko-toko itu sebelum bongkaran nggak ada yang bayar pajak, kan nggak kelihatan semua tokonya nggak laku. Sekarang kan dibongkar.

4. Wawancara dengan informan berinisial Rd pedagang (penjual) perabot rumah tangga

Peneliti : Berapa saringan ini?

Informan : Rp 12000,- , apalagi,

Peneliti : gantungan baju yang kawat, sudah lama buka usaha?

Informan : sudah 15 tahun, saya menempati sini mulai 1994, ini surat ijin pemakaiannya kan hak pakai, setiap lima tahun sekali kan harus perpanjang, tapi sekarang sudah banyak yang dijual,..sekarang sepi mas, makanya banyak yang dijual, maksudnya dipindahtanggankan hak pakainya

Peneliti : dulu yang mengelola siapa?

Informan : saya mengelola usaha ini sejak 1994, suami saya yang asli sini, saya Banyuwangi, suami saya buka toko di pasar Gebang, jarang kesini mas paling lama ya setengah jam, habis itu sudah balik lagi, gak pernah lama, paling ya sebentar

Peneliti : Kayak gini statusnya bagaimana?

Informan : sudah punya sendiri kan hak pake bukan hak milik, tiap tahun perpanjng, g mesti mas setiap 5 th sekali

Peneliti : ada yang nawari modal dari bank?

Informan : kalau saya memang sudah punya pinjaman, kemarin kan BI kan sempet turun karena kondisi perbankan kan lagi turun utamanya pasar kan yang dituju, saya pake jaminan rumah, ya sebagian untuk mengembangkan usaha sebagian untuk di rumah, prosesnya nggak sulit lah karena mulai berdiri saya sudah nggak bisa lepas dari bank memang saya kan sudah pinjaman, memang BI kan sempat turun soalnya perbankan sempat turun , aku jaminan rumah, lumayan besar pinjaman, sebagian untuk

Peneliti : memang sudah diajari dagang sejak kecil?

Informan : Memang yang penting ada jiwa dagang, bapakku pegawai ibu pedagang gak meski dilatih dagang kalau gak ada hobi ya gak bisa,

Peneliti : bagaimana awalnya bisa pinjam ke Bank?

Informan : mulai berdiri aku gak bisa lepas dari bank, mungkin terakhir ini mas saya pinjam bank, karena keadaannya sudah sepi, kayaknya kalau tidak ada pertolongan yang kuasa mungkin tidak mampu, sepi. kondisi yang parah itu sudah sekitar 3 tahun ini.

Peneliti : kenapa pilih BRI

Informan : kan kalaupun pinjam kan lihat bunganya yang paling murah, kalau mahal ya wssalam, yang nawarkan banyak, BTPN, Mandiri, kalau sya ke BRI Syariah.

Peneliti : gak pingin pindah

Informan : Pingi tapi kan butuh tempat, dana, kan babat lagi, kalau ini bisa dijual dipindahtagankan.

Peneliti : bayar berapa retribusinya?

Informan : bayarnya tiap bula per kios Rp 42.000 jdi saya 3 kios tinggal kalikan saja, bayar tiap Rp 42.000 kali 3, jadi tiap tahun ya gak bayar

Peneliti : suami gak pernah gantian?

Informan : suami saya gak pernah kesini, jarang sekali paling Cuma setengah jam, kadang 15 menit.

5. Wawancara dengan informan berinisial Kh (52) Penjual Jamu

Peneliti : mulai kapan buka usaha di pasar Tanjung?

Infoman : saya memulai usaha ini sekitar tahun 1995 suami sama kerja di sini juga...anak saya dua yang satu masih sekolah di SMK Trunojoyo, yang pertama sudah menikah sekarang ikut mertua....saya tinggal di Timur Pasar.

Peneliti : bagaimana awalnya memulai usaha?

- Informan : awalnya abah sama umi yang jualan disini , terus abah umi meninggal saya penerusnya...ya karena usaha ini warisan jadi tidak ada usaha lain, ya ini lah yang ditekuni, mulai dulu mulai pembangunan pasar.
- Peneliti : berapa penghasilan rata-rat tiap hari?
- Informan : alhamdulillah per hari penghasilan kurang lebih kalau sekarang 150.000,-an kurang lebih, kalau perbulan yaitu perhari dikalikan aja.
- Peneliti : ada yang nawari pinjaman?
- Informan : yang sempat nawari pinjaman ya BRI, yang punya insiatif ya saya dengan suami, pilih BRI ya apa ya...?
- Peneliti : bagaimana menurut ibu pinjaman tersebut?
- Informan : enaklah bayar setiap bulan, bunganya ringan, saya pinjam 10 juta bayar angsurannya lima ratus ya lima ratus dua puluh lah...selama 2 tahun...ya ada jaminan SIM pasar...mulai dulu sampai sekarang ya itulah...ditawari apa-apayang lain ndak maulah karena saya punya tanggungan di BRI, biar nggak dobel-dobel...dulu sempat ditawari KUR ndak pake apa ya nggak pake SIM lah pokoknya nggak pake jaminan, dapat 5 juta terus ditawari lagi pake jaminan dapat pinjaman 10 juta...sebenarnya banyak yang nawari.
- Peneliti : digunakan apa saja pinjaman tersebut?
- Informan : pinjaman itu saya pake separo-separo, yang separo untuk dagang yang separo untuk apa-apa di rumah. Dengan adanya pinjaman tadi ya enaklah.
6. Wawancara dengan informan berinisial St (42) Penjual Warung Kopi
- Peneliti : kapan ibu memulai usaha?
- Informan : mulai berdagang sejak tahun 84, suami buka toko bangunan kacaping 4 gebang sekaligus tempat tinggal. Mulai berdagang sejak kecil. jadi diajarin sama ibu juala apa dulu ya jualan kacang mungkin. memang ditempatkan disini memang dari dulu tempatnya di sini
- Peneliti : dibuat apa hasil dagangnya bu?
- Informan : ya untuk kebutuhan makan bayar utang dan menghidupi keluarg.
- Peneliti : sehari sampai dapat berapa bu?
- Informan : kalau penghasilan rata-rata ndak ketemu dalam seharinya ya mas ndak mesti ya yang penting bisa balik modal, bisa bayar utang, bayar bank lebih dari cukup lah. Di sini nggak ada kegiatan arisan atau apa...orang sini ini pada nabung semua karena banyak utang di bank...di sini yang jual rata-rata menjaga dagangannya sendiri jadi nggak ada kendala apa-apa.
- Peneliti : ada yang nawari modal?

Informan : yang nawari modal banyak, tapi saya sudah pinjam di BRI banyak anak-anak bank ya kenal dari teman terus pinjam...yang punya inisiatif pinjam ya aku, karena aku yag berperan disini, bapak ya ngurusi usaha yang di rumah..

Peneliti : kenapa tertarik BRI

Informan : Karena kalau pinjam tetangga ya ngak mungkin dikasih, tidak mungkin dikasih kalau tetangga..aku yang barusan 50 juta yang barusan jangka waktu 3 tahun, bunganya sedikit..BRI itu sedikit bunganya..tapi aku insyaAllah bisa bayar...dulunya aku di Danamon, pokoknya bunganya sedikit, sedikit kalau di BRI.

Peneliti : apa saja yang dipakai jaminan ?

Informan : jaminannya ya sertifikat tanah yang 50 juta ..kalau dulu tidak ada dari BRI kalau dulu kepercayaan, syaratnya nggak apaa-apa gampang cuma KTP suami istri, RT RW lengkap sudah..kalau syaratnya nggak dipenuhi ya nggak bisa masa alamatnya nggak ada ya nggak dikasih..untuk para pedagang di sini tiap hari bayar karcis.

Peneliti : kalau bayarnya telat bagaimana bu?

Informan : InsyaAllah di pasar Tanjung tidak ada orang yang tidak tepat waktu karena di sini pekerja keras orang pasar Tanjung, kalau telat tidak ada denda, cuma surat peringatan..

Peneliti : bagaimana tanggapan suami tentang pinjaman ibu?

Informan : suami tidak masalah malah mendukung karena aku tidak pernah komplain, belum ada coret merah, aku pribadi yang punya inisiatif, pinjaman itu untuk beli barang, tambahan modal.

Peneliti : bagaimana prosedurnya pinjam di bank?

Informan : prosesnya tidak terlalu ruwet, ya cuma tinggal tandatangan sudah tunggu di kasir. Kalau bayar angsurannya gampang, tepat waktu, bayarnya ya misal jatuh tempo tanggal 20, tanggal 21 ya nggak masalah, yang penting akhir bulan, sela kita pegang prinsip punya kewajiban...aku dulu pinjam mulai satu juta, aku sudah 4 sampek 5 kali.

7. Wawancara dengan Sona (27 tahun) pegawai bank Mandiri

Peneliti : Apa saja jenis pinjaman yang tersedia?

Informan : Ada pinjaman pegawai ada pinjaman pedagang, untuk pinjaman pedagang syaratnya KTP, KK, surat nikah foto copy jaminan...ya itu waktu pengajuan, nanti waktu pencairan bawa yang asli, kadang banyak debitur ada yang nggak mau orang lain tahu di pasar, meskipun bersebelahan ketika survey mereka bilang jangan sampai yang sebelahnya tahu gitu.

- Peneliti : informasinya dari mana nasabah itu?
 Informan : kalau nasabah nagujukan biasanya kebanyakan telpon, cuma kadang ke kantor yang di pasar untuk konsultasi, kadang ya bayar angsuran, akadang angsurannya ada yang minta diambil ke rumah.
- Peneliti : sampai berapa pinjaman tersebut?
 Informan : Plaformnya macam-macam sampai 150 juta kalau nasabah lama, pinjaman awal itu 100 juta kalau nasabah bagus bisa...untuk kelas pedagang kue atau warung-warung dan sekelasnya bisa 5 juta..prosesnya sampai 2 minggu.
- Peneliti : kenapa mereka nggak datang langsung ke kantor?
 Informan : di pasar itu kadang-kadang satu saudara jangan sampai tahu..
- Peneliti : bagaimana cara menagi nasabah yang di relokasi?
 Informan : Untuk pedagang yang sore saya datangnya malam...ada yang ditagih tiap hari, soalnya perputaran uang dipasar itu kan cepet mas, ada yang minta tiap bulan, yang tiap hari punya pertimbangan bahwa uang satu bulan itu kan besar jadi mending diputar....kesepakatan dengan nasabah itu bisa tiap hari bisa tiap bulan jadi saya bisa mengukur kemampuan debitur.
- Peneliti : apa saja yang disurvei bank?
 Informan : Yang disurvei itu usahannya, tempat tinggal atau domisilinya, skala usahanya, stok barangnya kan stok barang dilihat juga mas, misalnya pinjaman 50 juta kalau stok barangnya nggak sampai segitu kan kita juga nggak berani..ya lihat di toko aja mas, kan ya feeling aja..juga daritransaksinya tiap hari, jadi pengeluaran barang keluar masuk tiap hari juga di lihat..ya kita lihat plaform yang sekiranya jaminannya mengcover...ya intinya kita lihat pengajuan dan jaminannya.

8. Wawancara dengan informan berinisial Fr (35 tahun) pedagang Konveksi

- Peneliti : mulai kapan jualan baju?
 Informan : saya mulai berdagang sudah lama...ya mulai sekolah..mulai kuliah sudah bantu orang tua mulai tahu 1997, tahun 1997 itu cuma bantu-bantu orang tua, kalau mulai usaha ini secara mandiri ya tahun 2004, suami ikut mengelola usaha...
- Peneliti : bagaimana memulai usaha?
 Informan : awalnya seneng ya gitu-gitu awalnya, maksudnya usaha sendiri itu seneng dari pada ikut orang lain...ada usaha disitu dari orang tua.
- Peneliti : berapa pendapatan per bulan?
 Informan : kalau penghasilan rata, kalau omzet kalau dirata-rata ya Rp700.000 kalau bulan-bulan biasa kalau bulan bulan romadhon ya lain..
- Peneliti : masalah permodalan bagaimana?

- Informan : kadang-kadang modal masih kurang, terus sekarang itu kayaknya sudah banyak sales jadi pelanggan-pelanggan yang dulunya kulakan atau belanja ke sini berkurang, karena banyak yang sudah jempot bola kan...kita kan cuma nunggu.
- Peneliti : bagaimana dengan penertiban?
- Informan : pedagang pedagang yang di luar yang dipindah itu kan tidak punya ijin usaha, SIM kalau kita kan punya surat-surat ijin itu. Kalau yang PKL iurannya harian, kalau sudah menempati kios-kios ya bayar bulanan.
- Peneliti : pernah ada tawaran modal?
- Informan : selama ini banyak yang menawarkan pinjaman, sering sekali, yang punya inisiatif ya sama-sama dengan suami jadi kita putuskan sama-sama...ya kalau kita perlu ya kita pinjam...pinjaman mikro itu lebih mudah..bunganya 1 persen dengan waktu 3 tahun, kalau tidak dapat mengangsur tepat waktu ada denda mas tapi dihitung harian...kalau pinjam ke yang lain ya nggak mungkin dikasih...kalau uang pinjaman itu saya pake untuk usaha, bukan untuk yang lain sebagai jaminan ya SIM kalau dulu syaratnya sama dengan sekarang...syaratnya ya KTP, KK itu syarat administrasi. Ya kita ngajukan sesuai dengan administrasi lengkap, terus kita di survei kalau layak kita diikat, mereka pihak lembaga bank datang bank ini bank ini itu tiap hari datang, mereka kan jualan juga.
- Peneliti : ada kendala waktu ngajukan pinjaman?
- Informan : kalau saya kesulitan kalau sama bank BUMN, karena saya tidak punya jaminan, sedangkan bank BUMN itu tidak menerima SIM itu tadi, SIM itu pun bank bisa menerima tapi nilainya kecil sekali maksimal 20 juta, kalau bank swasta mereka kan berani, kita tembus ke BUMN memang nggak bisa, saya sudah menjadi nasabah selama 4 tahun sudah dua kali mengajukan...misalkan tidak ada pinjaman ya tetep karena memang itu usahannya.

Lampiran II : Pedoman Wawancara Dengan Informan

**PEDOMAN WAWANCARA
BAGI IBU RUMAH TANGGA PEKERJA SEKTOR INFORMAL**

I. IDENTITAS INFORMAN

1. N a m a :
2. U m u r :
3. Jenis Pekerjaan :
4. Mulai berdagang :
5. Status Perkawinan :
6. Pekerjaan Suami :
7. Jumlah anak (tanggungan):
8. Alamat Asal :
- Alamat Tempat Tinggal :

III. LATAR BELAKANG MENEKUNI PEKERJAAN

1. Kapan memulai usaha dagang?
2. Bagaimana ibu memulai usaha berdagang?
3. Apa yang mendorong anda untuk menekuni kegiatan usaha ini?
4. Alasan berdagang, memilih lokasi di Pasar Tanjung?
5. Siapa yang menawarkan untuk menempati lokasi ini?
6. Bagaimana ibu bisa menempati lokasi di sini?
7. Berapa penghasilan rata-rata per hari/bulan?
8. Putranya berapa, sekolah dimana?
9. Latar belakang pekerjaan suami?
10. Adakah kegiatan yang melibatkan kelompok pedagang lain semacam arisan?
11. Apa saja kendala yang ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini?
12. Di rumah juga bergabung dengan kelompok arisan ?
13. Apa bedanya pedagang yang di lantai 2 dengan yang di ruas jalan/di bawah?

II. LATAR BELAKANG AKSES *MICROFINANCE*

1. Pernah ada yang menawarkan pinjaman modal?
2. Bagaimana ibu bisa mengenal lembaga keuangan mikro?
3. Siapa yang punya inisiatif untuk meminjam (bapak/ibu)?
4. Kenapa tertarik dengan pinjaman dari, berapa besar nilai pinjaman...jangka waktu, bunga..?
5. Mengapa tidak mengajukan pinjaman ke pihak lain(bank/saudara/tetangga)?
6. Apa yang digunakan sebagai jaminan?
7. Apa yang membedakan sistem pinjaman dulu dengan sekarang..?
8. Bagaimana menurut ibu syarat yang diminta jika mengajukan pinjaman?
9. Bagaimana jika syarat yang diminta tidak dapat dipenuhi?
10. Bagi pedagang yang direlokasi bagaimana membayar angsurannya?
11. Bagaimana jika tidak bisa mengangsur tepat waktu?
12. Bagaimana menurut bapak (suami) mengenai pinjaman tersebut?
13. Dari mana saja sumber pinjaman ?
14. Apa ada pedagang yang berperan dalam mendapatkan pinjaman?
15. Pinjaman yang diperoleh biasanya digunakan untuk apa?
16. Bagaimana prosedur syarat pinjaman, pencairan pinjaman, membayar angsuran?
17. Apa kendala-kendala dalam mendapatkan pinjaman?
18. Berapa tahun (berapa kali) menjadi nasabah?
19. Bagaimana pendapat ibu tentang keberadaan lembaga keuangan mikro?
20. Bagaimana jika tidak mendapatkan pinjaman dari LKM?